SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3):
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Kebumen adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Rencana Stategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari:
   a. Visi, Misi dan Program Bupati terpilih Tahun 2016; dan
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen dan RPJMN serta memperhatikan:
   a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
   b. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
   c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:
a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	:	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	:	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	:	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	:	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	:	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI	:	PENUTUP

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
    b. pelaksanaan RPJMD.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan perencanaan RPJMD;
    b. pelaksanaan RPJMD; dan
    c. hasil RPJMD.
(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa penilaian hasil pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan target pencapaian kinerja akhir pembangunan jangka menengah.
(6) Penilain hasil pelaksanaan RPJMD sebagaiman dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati-Wakil Bupati berakhir.
(7) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
    d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kebumen serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (6/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KEBUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KEBUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, yang disusun dalam periodisasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana-rencana kegiatan yang bersifat indikatif serta penetapan indikator kinerja daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 126

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada tanggal 9 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Berdasarkan hasil Pemilukada tersebut, telah terpilih pasangan Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, S.E dan KH. Yazid Mahfudz sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Pasangan tersebut dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen pada tanggal 17 Februari 2016 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-418 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-419 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa: “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara dalam Pasal 264 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya juga telah dinyatakan bahwa: “Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. RPJMD disusun berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen, khususnya pada tahap ketiga dan keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen, yaitu tahun 2015-2019 dan tahun 2020-2025.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen dan RPJMN Tahun 2015-2019. Dokumen ini memuat beberapa hal, yaitu: (i) arah kebijakan keuangan daerah; (ii) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penyusunan RPJMD ditempuh dengan memperhatikan 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan, yaitu: (i) teknokratik, (ii) *top-down,* (iii) *bottom-up,* (iv) partisipatif, dan (v) politis. Secara singkat 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut: (i) *Pendekatan Teknokratik* dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, serta mengacu pada data dan informasi pembangunan sebagai kerangka logis pengambilan keputusan; (ii) *Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up*) dilaksanakan melalui inventarisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus diimplementasikan oleh daerah dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur serta inventarisasi masukan dari Renstra Perangkat Daerah yang harus diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (iii) *Pendekatan politik* dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan oleh Bupati terpilih dengan proses pembahasan dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (iv) *Pendekatan partisipatif* karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme konsultasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD didasarkan pada peraturan-perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); dan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96).

C. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mengacu pada berbagai dokumen baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Daerah, antara lain:

1. RPJMN Tahun 2015-2019

RPJMN Tahun 2015-2019 dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, visi pembangunan Indonesia jangka panjang adalah “Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur”.

Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam tahapan pembangunan di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, maka RPJMN disusun dengan memperhatikan pencapaian pembangunan

tahap sebelumnya. Pelaksanaan RPJMN dijabarkan melalui visi, misi dan program presiden.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-1, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-2, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

RPJMN Tahun 2015-2019 memiliki visi "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Dari visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi yang tercantum pada RPJMN Tahun 2015-2019, di mana ke-7 misi tersebut adalah:

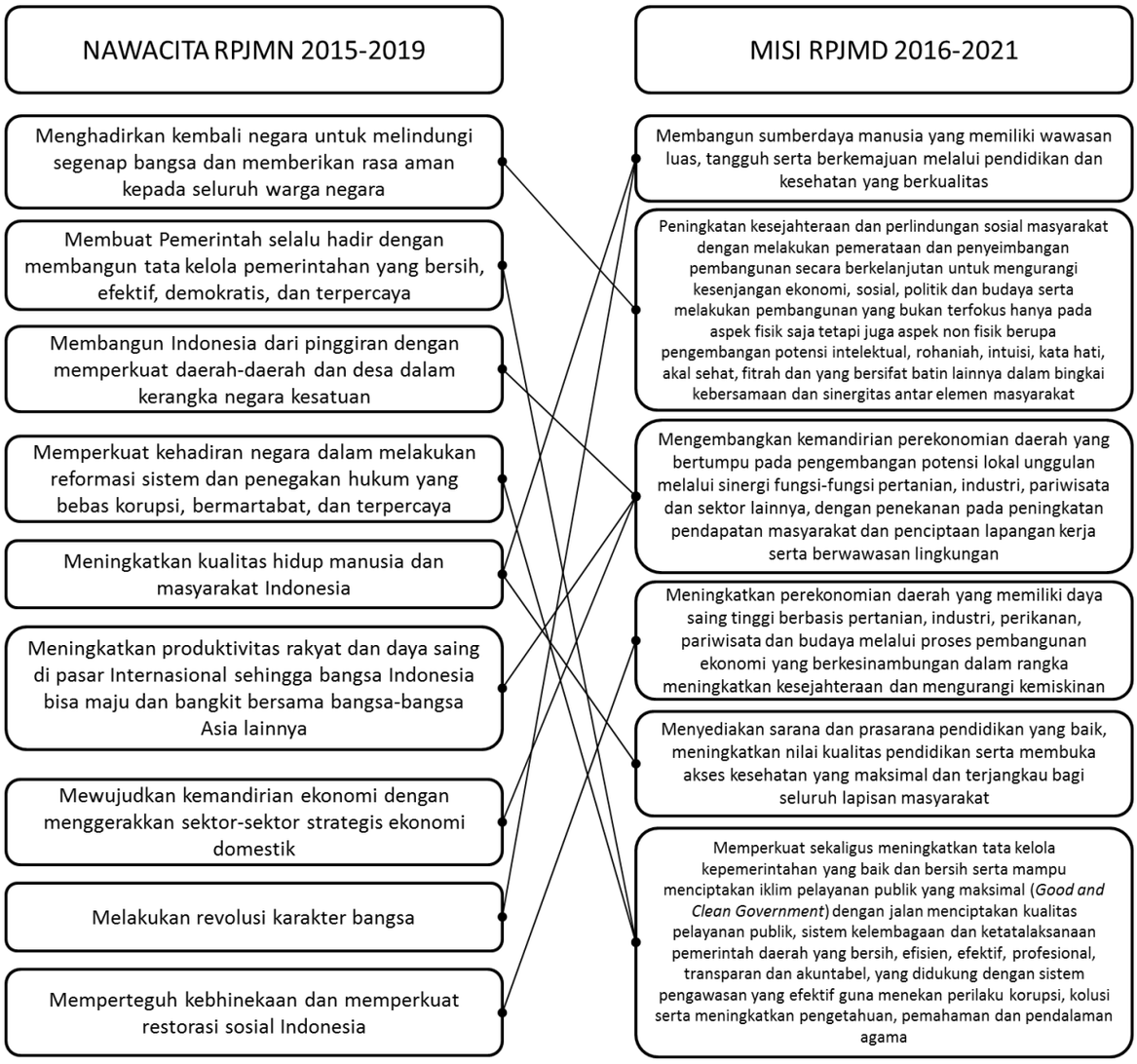
a. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
b. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
c. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
d. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
e. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
f. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
g. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2015-2019, ditetapkan 9 (sembilan) prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:

a. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
b. membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
c. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

d. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
e. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
f. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
g. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
h. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
i. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara substantif, keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMD, terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1
Keterkaitan Nawa Cita RPJMN
Tahun 2015-2019 dan Misi RPJMD

Sumber : Data primer diolah

RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Pada setiap prioritas RPJMN Tahun 2015-2019 terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Kebumen, sebagai bentuk kontribusi Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan Visi Indonesia 2019.

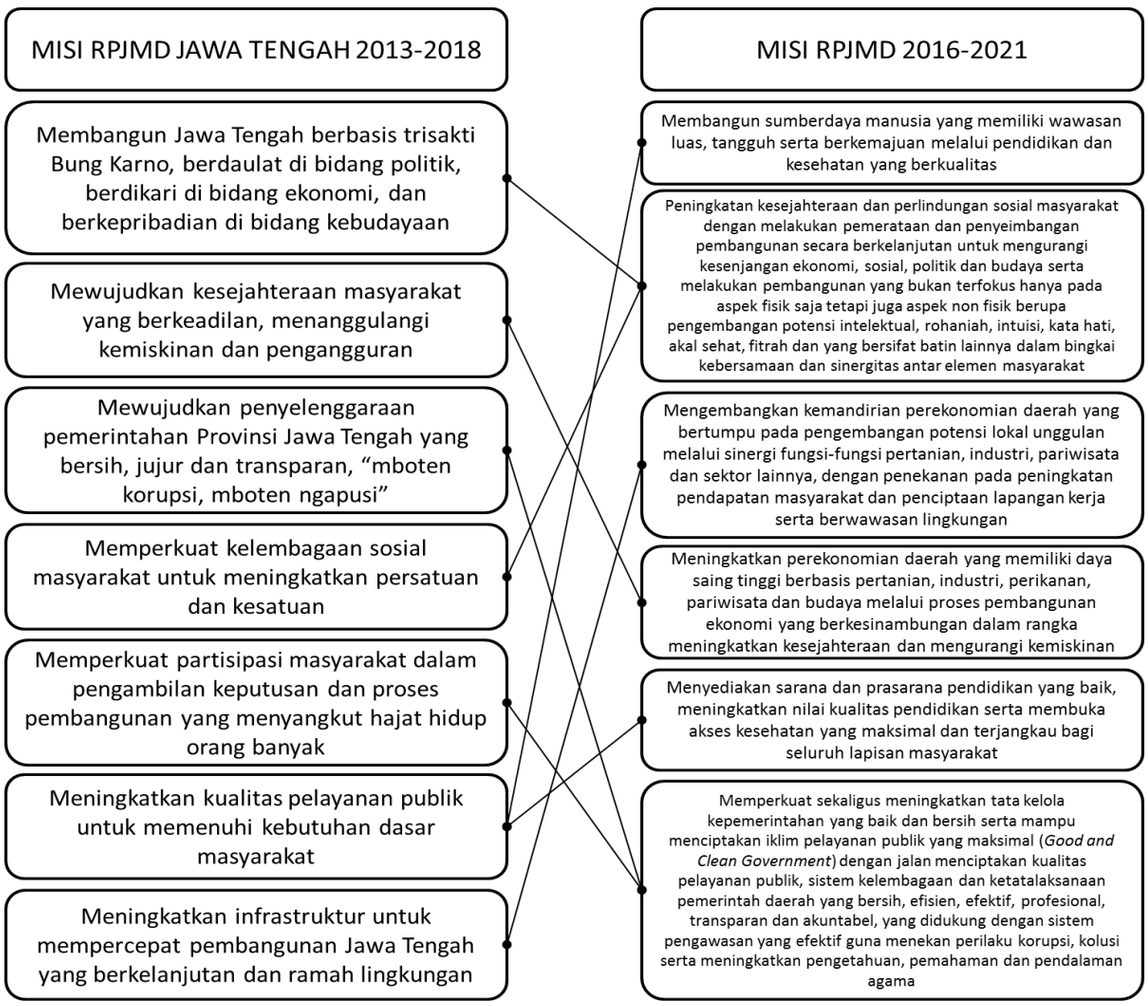
2. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 merupakan salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Visi Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 adalah: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam visi ini terkandung sikap dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Sedang misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. membangun Jawa Tengah berbasis trisakti bung karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan kedaulatan pangan;
b. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
d. memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
e. memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
f. meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
g. meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pada setiap prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdapat substansi inti yang berisi program-program yang dilengkapi dengan indikator dan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Kebumen, sebagai bentuk kontribusi Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan Visi Jawa Tengah 2018.



Gambar 1.2
Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 dan Misi RPJMD

Sumber : Data primer diolah

3. RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

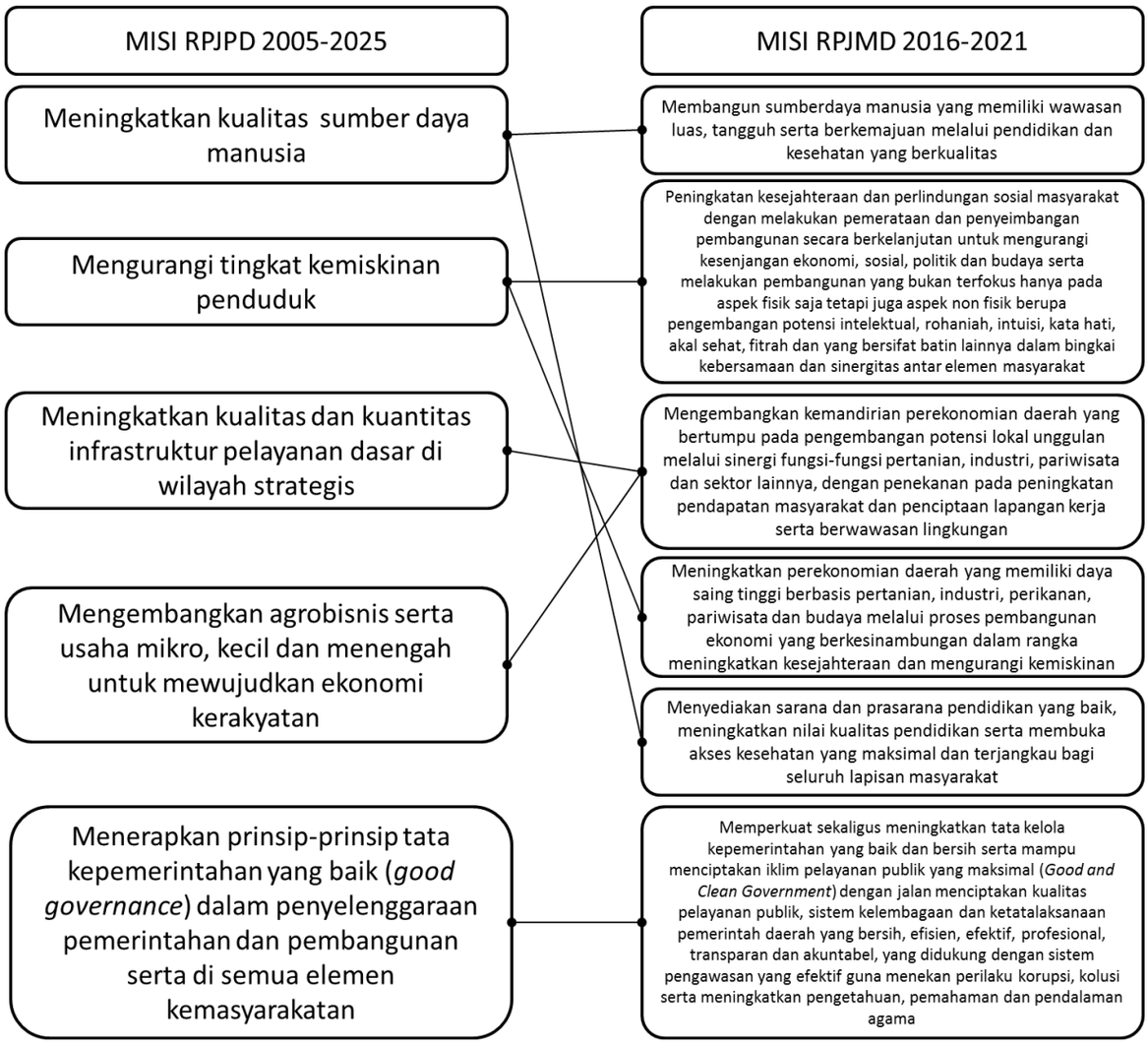
RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025. Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 adalah: "Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis" Makna dari visi tersebut, yaitu:

a. Kebumen, adalah suatu daerah otonom (selanjutnya disebut Daerah), yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
b. Mandiri, artinya suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang mampu mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Kemandirian di sini bukan situasi atau kondisi dalam keterisolasian, tetapi konsep dinamis yang mengenal saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlebih dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang kini tengah berlangsung. Kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian tersebut. Kemandirian suatu daerah, antara lain dapat diukur dari; ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur dalam menjalankan tugasnya; dan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemandirian dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Selain itu, kemandirian secara prinsip adalah suatu sikap untuk mengenali potensinya dan kemampuannya untuk mengelola sumber daya yang tersedia dan tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dan masyarakatnya harus mandiri dalam menentukan kebijakan serta memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pemenuhan kebutuhan bahan pokok untuk pengembangan agrobisnis dan pemenuhan kebutuhan akan kebutuhan pangan sebagai produk pertanian. Kedua kebutuhan ini dengan sendirinya akan tercukupi dengan mengelola sumber daya lokal yang menjadi basis kehidupan masyarakatnya yakni pertanian.
c. Sejahtera artinya suatu kondisi dimana masyarakat telah mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan dan pendidikan serta sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini setidaknya diperlukan dua syarat. Pertama, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri maka masyarakat memerlukan pendapatan perkapita yang cukup. Dalam hal ini maka seberapa jauh pengembangan agrobisnis mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi

disertai dengan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, seandainya syarat pertama tidak terwujud, maka Pemerintah Daerah berkewajiban membantu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akan mendapatkan bantuan sosial baik dalam bentuk subsidi atau bantuan sosial lainnya. Untuk bisa mewujudkannya, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pendapatan regional yang cukup guna membiayai kebutuhan perlindungan sosial tersebut. Dalam hal ini, sumbangan agrobisnis pada pendapatan regional merupakan salah satu tantangan yang cukup besar untuk dipikirkan dalam pengembangan program agrobisnis.

d. Agrobisnis, artinya daerah yang mampu menghasilkan produk produk pertanian dan produk olahan pertanian yang memiliki nilai kompetitif yang tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, maupun internasional. Kabupaten Kebumen yang memiliki basis ekonomi di sektor pertanian ini diharapkan mampu menjadi daerah agrobisnis terdepan di Jawa Tengah pada Tahun 2025. Produk pertanian merupakan produk yang dihasilkan secara langsung dari kegiatan bertani. Sementara itu produk olahan pertanian merupakan produk yang dihasilkan setelah produk pertanian tersebut diolah dalam suatu industri agrobisnis baik industri rumah tangga maupun industri besar. Upaya menghasilkan produk pertanian dan produk olahan pertanian secara bersamaan ini sangat penting. Pada satu sisi, Kabupaten Kebumen memiliki potensi alam dan infrastruktur yang baik guna mengembangkan pertanian. Selain itu sebagian besar masyarakat Kabupaten Kebumen mengembangkan kegiatan ekonominya di sektor pertanian. Pada sisi yang lain, di Kabupaten Kebumen juga berkembang industri-industri kecil yang mengolah produk pertanian menjadi produk olahan pertanian. Produk pertanian bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik di tingkat lokal maupun nasional namun pada saat yang sama juga menjadi bahan dasar yang diperlukan industri-industri produk olahan pertanian. Oleh karena itu, keduanya merupakan suatu kesatuan holistik yang tidak dipisahkan. Secara riil keberhasilan menjadi daerah agrobisnis bisa dilihat dari sumbangan subsektor agrobisnis pada 3 (tiga) hal, yaitu: (i) kontribusinya yang signifikan pada pendapatan regional, (ii) penyerapan tenaga kerja, dan (iii) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021. RPJMD merupakan penjabaran dan menjadi tahapan pembangunan 5 (lima) tahun ketiga dan keempat dalam RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Keterkaitan misi RPJMD dengan misi RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.3
Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Kebumen
Tahun 2005-2025 dan Misi RPJMD

Sumber : Data primer diolah

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

   Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

   Dengan memperhatikan pendekatan sistem pengembangan wilayah di Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) sistem perwilayahan (*regionalisasi*) dengan mempertimbangkan perpaduan dari aspek homogenitas, modalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukowonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Kabupaten Kebumen termasuk satu di antara bagian dari perwilayahan Barlingmascakeb.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

   Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana RPJMD.

   Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, pola pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen terbagi dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada.

   a. Telaah Rencana Struktur Ruang

      Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan yang dilakukan terhadap rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Kebumen, meliputi:

      1) Rencana Sistem Prasarana Utama, terdiri atas:
         a) Rencana jaringan transportasi darat;
         b) Rencana jaringan perkeretaapian;
      2) Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya, meliputi:
         a) Rencana jaringan energi;
         b) Rencana jaringan telekomunikasi;
         c) Rencana jaringan sumber daya air; dan
         d) Rencana jaringan prasarana lingkungan.

   b. Telaah Rencana Pola Ruang

      Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Berikut ini disajikan rencana

pola ruang Kabupaten Kebumen yang memuat pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan budidaya.

c. Telaah Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

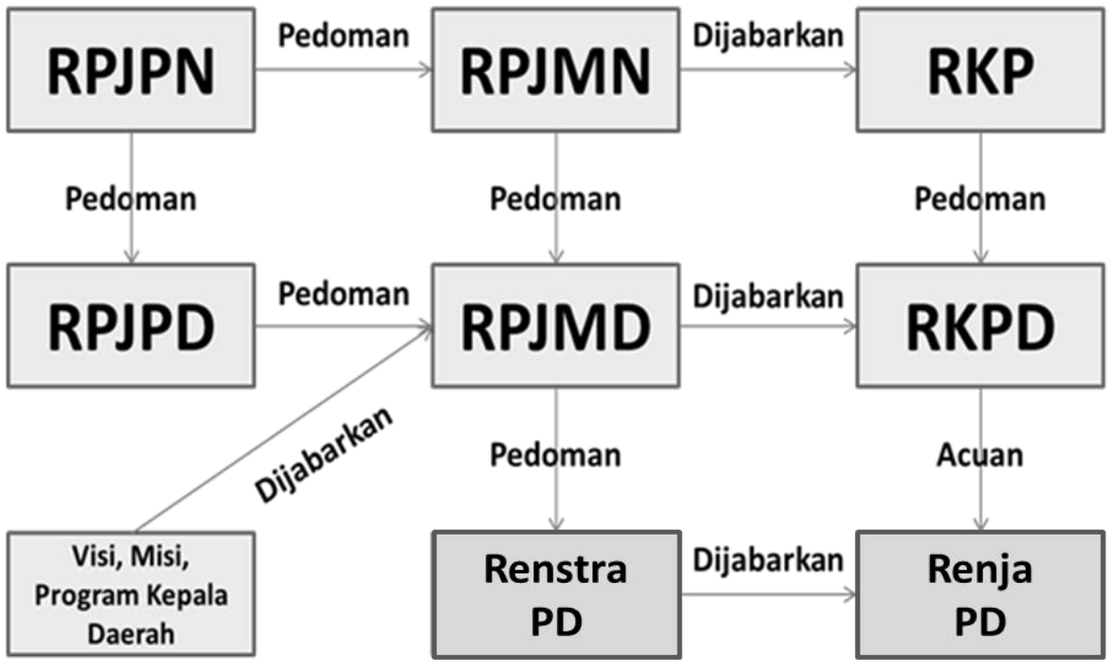
Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Indikasi program pemanfaatan ruang Kabupaten Kebumen diarahkan untuk menterjemahkan rencana struktur dan pola ruang tahun 2011 sampai dengan 2031.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

a. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis dan potensi lokal lainnya di Kabupaten;
b. pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggerak sektor agrobisnis dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa;
c. pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan agrobisnis dan potensi lainnya di Kabupaten;
d. pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan kegiatan pendukung lainnya;
e. pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
f. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dalam jangka panjang;
g. pengembangan kawasan strategis untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang; dan
h. mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana.

Jika digambarkan dalam bentuk grafis, maka hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
Sumber : Anonim

Gambar 1.4 menjelaskan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berpedoman pada RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN Tahun 2014-2019 dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. RPJMD kemudian dijabarkan ke dalam RKPD untuk menjadi dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Kebumen, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Di samping itu, untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, diharapkan juga akan memperhatikan beberapa dokumen terkait lainnya, di antaranya:

1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020;
2. Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
4. Strategi Sanitasi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020;
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2016-2020 dan/atau Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
6. Rencana Aksi Kota Pusaka Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020;

7. Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020;
8. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020;
9. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender; dan
10. Dokumen Grand Desain Pengendalian Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2035.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut.

1. Maksud

   Maksud dari penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen yang berkesinambungan.

2. Tujuan

   Tujuan dari penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

   a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan daerah jangka menengah;
   b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanan penganggaran; dan
   c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi, kabupaten, antar kabupaten dan desa.

E. Sistematika Dokumen

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini berisi uraian mengenai kinerja keuangan di masa lalu seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh pada masa datang terhadap daerah tersebut.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini cukup memberi gambaran singkat tentang perlunya visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016–2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih, sekaligus kelak harus mengakomodasi tentang tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memberi gambaran singkat tentang perlunya strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memberi gambaran singkat tentang perlunya uraian terkait dengan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini memberi gambaran singkat tentang perlunya menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait serta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini memberi gambaran singkat tentang perlunya gambaran tentang indikator kinerja daerah (ukuran keberhasilan) pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dengan menggambarkan akumulasi pencapaian Indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini memberi gambaran singkat tentang perlunya gambaran bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode berikutnya, dan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XI : PENUTUP

Bab ini memberi gambaran singkat tentang perlunya penjelasan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sedang disusun.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sejarah Kabupaten Kebumen berawal dari kedatangan bangsawan ulama dari Kerajaan Mataram bernama Kyai Pangeran Bumidirjo di Panjer pada tahun 1670. Berdasarkan bukti-bukti sejarah Kebumen berasal dari kata Bumi, nama sebutan bagi Kyai Pangeran Bumidirjo, mendapat awalan ke- dan akhiran -an yang menyatakan tempat. Sampai akhirnya ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Jendral De Jonge Nomor 3 tertanggal 31 Desember 1935 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1936 dan sampai saat ini tidak berubah.

Secara umum, Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terus berkembang dan sangat dinamis, dengan dinamika pembangunan yang terjadi di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya, yang mendorong perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakatnya. Gambaran umum kondisi Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

A. Aspek Geografi

1. Letak, Batas dan Luas Wilayah

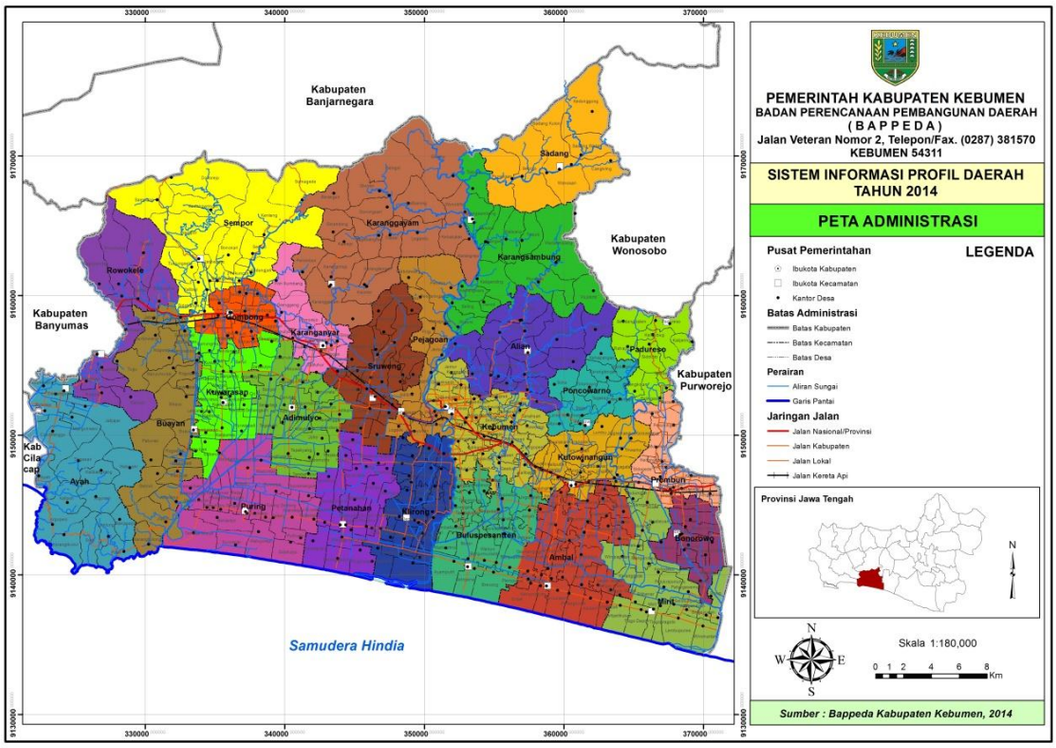
Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah antara lain:

a. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
b. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas;
c. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo; dan
d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Kebumen dalam konteks regional memiliki posisi yang strategis karena merupakan simpul penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dan memanjang di pulau Jawa bagian selatan, sehingga Kabupaten Kebumen menjadi penghubung kota-kota besar yang menjadi kawasan pusat pertumbuhan baik tingkat regional maupun nasional.

Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27'-7°50’ (tujuh koma dua puluh tujuh derajat sampai dengan tujuh koma lima puluh derajat) Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' (seratus sembilan koma dua puluh dua derajat sampai dengan seratus sembilan koma lima puluh derajat) Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedang pada bagian utara berupa pegunungan, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu.

Di selatan daerah Gombong terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. Di daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan stalagmit.

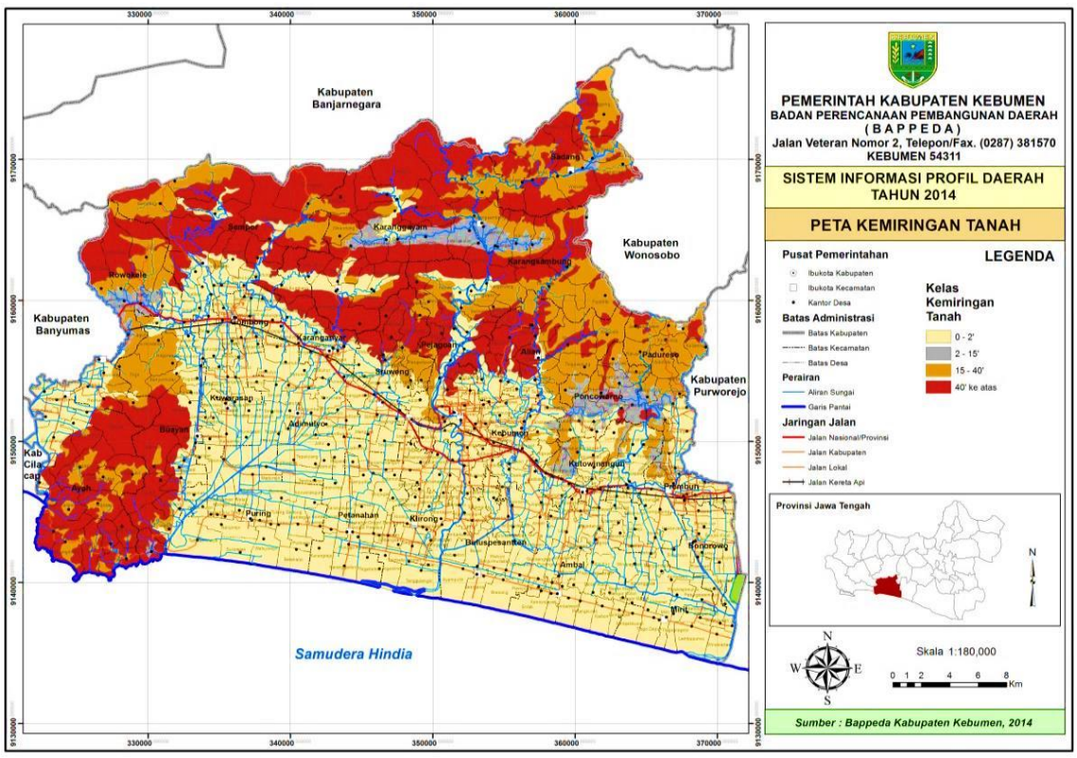


Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Kebumen
Sumber : Profil Daerah, 2015

Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan, yang mencakup sejumlah 449 (empat ratus empat puluh sembilan) desa, dan 11 (sebelas) kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 (seratus dua puluh delapan ribu seratus sebelas koma lima puluh) hektar atau 1.281,115 (seribu dua ratus delapan puluh satu koma seratus lima belas) kilometer persegi (lihat gambar 2.1). Kondisi wilayah Kabupaten Kebumen sebagian besar adalah dataran rendah dan sebagian lainnya berupa perbukitan dan wilayah pantai.

2. Topografi

Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0 sampai dengan 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) meter di atas permukaan laut. Kemiringan tanahnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.2
Topografi Kabupaten Kebumen
Sumber: Profil Daerah, 2015

3. Hidrogeologi

   Kabupaten Kebumen di bagian selatan sebagian besar tersusun oleh dataran rendah dan karst, mempunyai potensi sumber daya air tanah dengan produktivitas tinggi-sedang. Namun pada sebagian wilayah di bagian utara yang berupa rangkaian pegunungan-perbukitan dengan litologi batuan bersifat tufaan yang potensi sumber daya air tanahnya secara umum rendah. Ketersediaan air pada daerah karst, baik air tanah maupun air permukaan pada umumnya cukup baik (sedang), namun jumlah total kandungannya, posisi reservoir serta kualitas air belum teridentifikasi dengan jelas. Di samping itu pada musim kemarau jumlah airnya sangat terbatas. Sedang untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan seperti daerah sekitar bumi perkemahan Desa Widoro Kecamatan Karangsambung serta daerah Kecamatan Padureso, pada musim penghujan keberadaan airnya cukup baik, namun pada musim kemarau sangat kekurangan air.

4. Klimatologi

   Kabupaten Kebumen memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim hujan terjadi bulan Desember-Maret, sedangkan musim kemarau pada bulan April-Juli. Curah hujan rata-rata sepanjang tahun 2014 sebesar 2.867,02 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma nol dua) milimeter

pertahun, temperatur udara berada pada kisaran 21,7-33,9°C (dua puluh satu koma tujuh sampai dengan tiga puluh tiga koma sembilan derajat celcius). Kelembaban udara rata-rata 82,0% (delapan puluh dua persen) dan kecepatan angin rata-rata 2,09 (dua koma nol sembilan) knot.

5. Penggunaan Lahan

   Kabupaten Kebumen bercorak agraris dengan penggunaan lahan yang dominan sebagai lahan persawahan, baik sebagai sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, pada tahun 2013 tercatat 39.748 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektar atau sekitar 31,03% (tiga puluh satu koma nol tiga persen) adalah lahan sawah dan 88.363,50 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga koma lima puluh) hektar atau 68,97% (enam puluh delapan koma sembilan puluh tujuh persen) adalah lahan kering. Menurut sistem irigasinya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis (50,34%) dan hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, beririgasi setengah teknis (9,23%), beririgasi sederhana (5,77%), beririgasi desa (2,65%) dan sebagian berupa sawah tadah hujan dan pasang surut (32,02%).

   Penggunaan lahan kering di Kabupaten Kebumen mencapai 88.363,50 hektar, sebagian untuk pertanian seluas 42.799,50 hektar dan bukan lahan pertanian mencapai 45.564,00 hektar. Lahan untuk pertanian kering tersebut sebagian besar untuk tegalan/kebun mencapai 27.629,00 hektar. Sedangkan lahan kering bukan untuk pertanian sebagian besar untuk rumah/bangunan dan lahan sekitarnya seluas 26.021,00 hektar dan berupa hutan negara seluas 16.861,00 hektar.

6. Potensi Pengembangan Wilayah

   Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, pengembangan Kabupaten Kebumen telah direncanakan untuk menjadi beberapa struktur ruang wilayah. Rencana struktur ruang tersebut meliputi sistem pusat kegiatan, jaringan prasarana wilayah kabupaten. Sistem pusat kegiatan meliputi sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

   Sistem perkotaan dibagi menjadi beberapa pusat, yaitu: (i) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Perkotaan Kebumen, (ii) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Perkotaan Gombong, Karanganyar, dan Prembun, dan (iii) Pusat Pengembangan Kawasan (PPK), yang meliputi Perkotaan Ayah, Puring, Petanahan, Sruweng, Ambal, Kutowinangun, Karangsambung, Padureso, Rowokele, Buayan, Klirong, Buluspesantren, Mirit,

Bonorowo, Pejagoan, Alian, Poncowarno, Adimulyo, Kuwarasan, Sempor, Karanggayam, dan Sadang.

Sistem perdesaan dibagi menjadi Pusat Pelayanan Antar Desa, Pusat Pelayanan Setiap Desa, dan Pusat Pelayanan pada Setiap Dusun atau Kelompok Permukiman. Sistem perdesaan dikembangkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PPL yang direncanakan dikembangkan meliputi Desa Giyanti, Purbowangi, Tanggulangin, Rantewringin, Buluspesantren, Tlogopragoto, Bonorowo, Peniron, Jatimulyo, Poncowarno, Adimulyo, Kalipurwo, Jatinegara, Pagebangan, dan Desa Sadangkulon.

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya. Sistem Jaringan Prasarana wilayah Kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem prasarana utama berupa sistem jaringan transportasi yang meliputi jaringan transportasi darat dan jaringan perkeretaapian. Jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, dan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

Jaringan jalan dibagi menjadi jarigan jalan bebas hambatan, jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan jaringan jalan kabupaten. Jaringan jalan bebas hambatan meliputi jalan Ciamis-Cilacap-Yogyakarta. Jaringan jalan nasional meliputi ruas Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah yang berupa jalan arteri primer sebagai jalan strategis nasional; ruas jalan perbatasan Jawa Barat-Cilacap-Kebumen-Perbatasan Yogyakarta; ruas jalan batas Banyumas Tengah-Kebumen dengan panjang ruas kurang lebih 23,895 km; ruas jalan lingkar selatan Kebumen dengan panjang ruas kurang lebih 9,108 km; ruas jalan batas Kota Kebumen-Prembun dengan panjang ruas kurang lebih 12,682 km; ruas jalan menuju Purworejo dengan panjang ruas kurang lebih 4,224 km; dan ruas jalan Prembun-Kutoarjo dengan panjang ruas kurang lebih 12,696 km.

Jaringan jalan provinsi meliputi: Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara; Prembun-Wadaslintang-Wonosobo; Gombong-Sempor-Banjarnegara. Sedangkan jaringan jalan kabupaten merupakan jalan penghubung antar ibu kota kecamatan, meliputi: ruas jalan Kebumen-Petanahan; ruas jalan Prembun-Kebumen-Gombong; ruas jalan Kebumen-Wonosobo melalui Prembun-Padureso; ruas jalan Kebumen-Banjarnegara melalui Gombong-Sempor; ruas jalan Kebumen-

Karangsambung-Sadang dan Karangsambung-Girikerto sebagai akses ke Banjarnegara dan Wonosobo; ruas jalan Karanganyar-Karanggayam-Pagebangan; ruas jalan Gunungsari-Selogiri-Banjarnegara; dan ruas jalan Prembun-Bonorowo-Mirit.

Rencana jaringan perkeretaapian meliputi: jalur Solo-Bandung/Jakarta; dan jalur Solo-Yogyakarta-Kutoarjo-Kroya melalui Kecamatan Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Karanganyar, Gombong, dan Rowokele. Pengembangan jaringan perkeretaapian ini akan memperlancar mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Kebumen.

Selain sistem prasarana utama juga akan dikembangkan sistem prasarana lainnya. Sistem prasarana lainnya meliputi:

a. rencana sistem jaringan prasarana energi, pembangunan ini mencakup prasarana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas; pembangkit listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
b. rencana sistem jaringan telekomunikasi, pembangunan ini mencakup jaringan telekomunikasi tetap berupa jaringan kabel telepon dan nirkabel dan jaringan telekomunikasi bergerak berupa satelit;
c. rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air, pembangunan ini mencakup wilayah sungai lintas kabupaten; wilayah sungai kabupaten; jaringan irigasi; cekungan air tanah; jaringan air baku untuk air bersih; dan sistem pengendali banjir;
d. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan, pembangunan ini mencakup sistem drainase serta jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
e. rencana sistem pengelolaan lingkungan, pembangunan ini mencakup pembangunan sistem jaringan persampahan; sistem jaringan prasarana sanitasi; sistem pengelolaan limbah; dan sistem penanganan limbah di perkotaan dan di wilayah pengembangan industri.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan suaka alam dan cagar budaya; kawasan lindung geologi; kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan hutan lindung meliputi wilayah Kecamatan Karangsambung, Karanggayam, Sempor, Rowokele, Pejagoan, Sruweng, Buayan, dan Ayah. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan

resapan air dan kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung, kecamatan yang termasuk dalam kategori ini adalah Sadang, Rowokele, Sempor, Karangsambung, Padureso, Rowokele, Buayan, Ayah, dan Poncowarno, sedangkan wilayah di luar kawasan hutan lindung antara lain Kecamatan Alian, Ayah, Buayan, Gombong, Karanganyar, Karangsambung, Karanggayam, Kebumen, Padureso, Pejagoan, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, dan Sruweng.

Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan Sekitar Mata Air yaitu di Kecamatan Ayah, Rowokele, dan Buayan. Kawasan Sempadan Sungai meliputi sempadan dengan luas 2.506 hektar beserta anak sungainya meliputi Sungai Luk Ulo, Sungai Ijo, Sungai Telomoyo, dan Sungai Mawar. Kawasan Sempadan Pantai meliputi sempadan dengan jarak 100 meter dari titik tertinggi yaitu membentang dari Pantai Ayah di Kecamatan Ayah ke arah timur Kecamatan Mirit berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Kawasan sempadan Pantai. Kawasan sempadan danau atau waduk berupa kawasan sabuk hijau sepanjang perairan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi seluas kurang lebih 245 hektar yang berada di Waduk Wadaslintang Kecamatan Padureso dan Waduk Sempor Kecamatan Sempor. Ruang Terbuka Hijau perkotaan meliputi ibukota kecamatan dan kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 4.478 hektar atau sekitar 46,53 % dari luas permukiman yang meliputi: Ruang Terbuka Hijau publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau privat yaitu kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi 10 %.

Kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan cagar budaya. Kawasan pantai berhutan bakau berada di sebagian kawasan pesisir Kecamatan Ayah dan direncanakan pengembangannya di muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong. Kawasan cagar budaya meliputi:

a. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong;
b. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
c. Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor;
d. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen;
e. Goa Menganti di Desa Karangduwur Kecamatan Ayah;
f. Situs Makam Mbah Lancing di Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit;

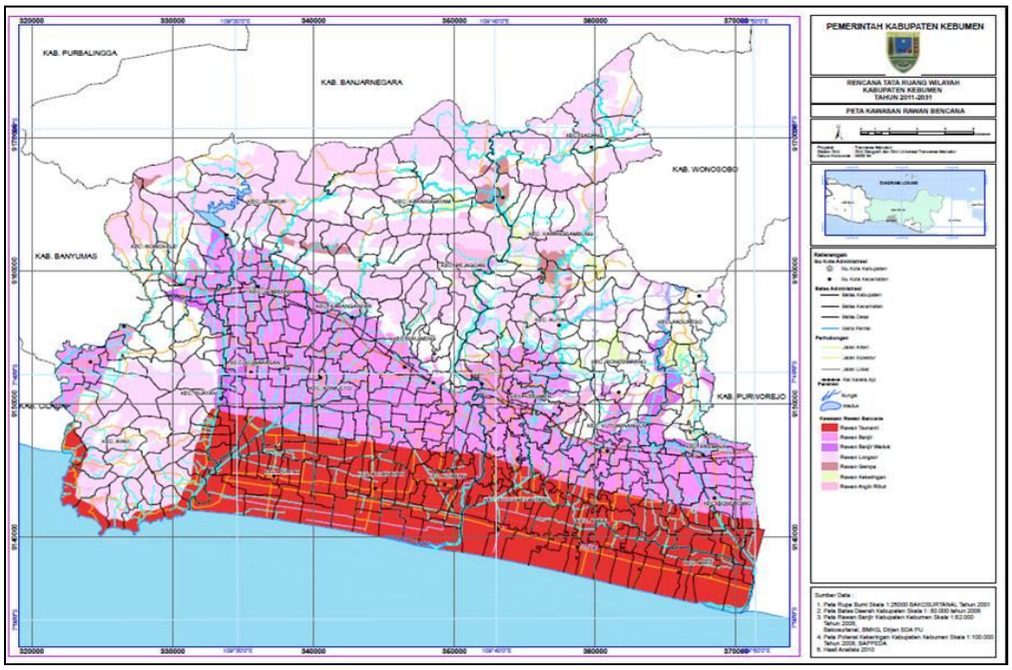
g. Situs Makam Mbah Somalangu di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen;
h. Situs Makam Mbah Untung Suropati di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam;
i. Situs Makam Mbah Agung di Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam;
j. Situs Makam Mbah Pako di Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam;
k. Situs Makam Mbah Pagerjawa di Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam;
l. Pesanggrahan Bulupitu di Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun;
m. Pesanggrahan Pandan Kuning di Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan; dan
n. Pesanggrahan Karangbolong di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan.

Kawasan lindung geologi Kabupaten Kebumen meliputi: kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung; Kawasan Bentang Alam Karst; dan Kawasan Imbuhan Air Tanah. Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung seluas kurang lebih 18.340 ha (delapan belas ribu tiga ratus empat puluh hektar), meliputi: (i) Kecamatan Karangsambung; (ii) Kecamatan Karanggayam; (iii) Kecamatan Sadang; (iv) Kecamatan Pejagoan; dan (v) Kecamatan Alian.

Kawasan Bentang Alam Karst meliputi wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele dan Buayan seluas kurang lebih 4.894 ha (empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat hektar). Sedangkan Kawasan Imbuhan Air Tanah meliputi Cekungan Air Tanah Kebumen-Purworejo dengan luas kurang lebih 1.127 km² (seribu seratus dua puluh tujuh kilometer persegi), Cekungan Air Tanah Banyumudal dan Cekungan Air Tanah Kroya.

7. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah, yaitu rawan longsor, rawan banjir, rawan kekeringan atau rawan air bersih dan rawan tsunami. Ada satu kecamatan yaitu Kecamatan Ayah yang merupakan daerah rawan 4 jenis bencana tersebut. Daerah rawan bencana tanah longsor terdiri dari 116 desa di 16 kecamatan, rawan bencana banjir 108 desa di 15 kecamatan, serta daerah rawan kekeringan atau rawan air bersih 83 desa di 16 kecamatan. Sedangkan daerah yang berpotensi tsunami ada 52 desa di 12 kecamatan.



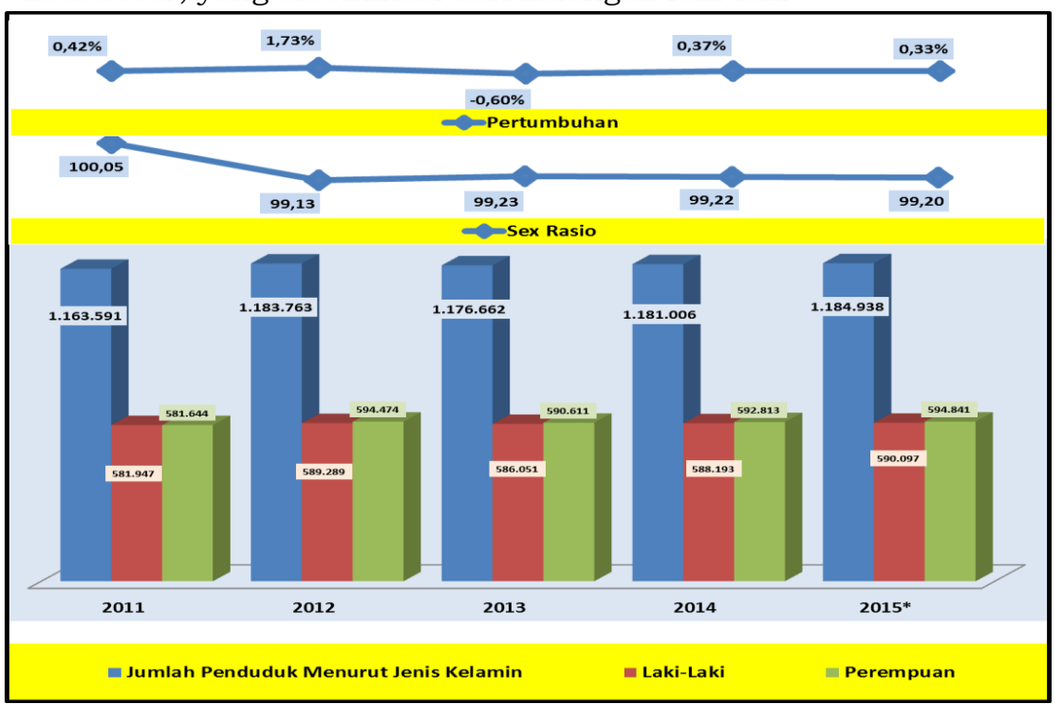
Gambar 2.3
Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen
Sumber: RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

B. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari 1.163.591 jiwa pada tahun 2011 menjadi 1.184.938 jiwa pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,45%. Apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2015, sebanyak 318.572 rumah tangga, maka rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa. Kemudian apabila dibandingkan dengan luasan wilayah sebesar 1.281,115 km2, maka kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sebesar 922 jiwa/km², dengan Kecamatan Kebumen merupakan daerah terpadat penduduknya dengan kepadatan 2.893 jiwa/km² dan Kecamatan Sadang merupakan daerah terjarang penduduknya dengan kepadatan 335 jiwa/km².

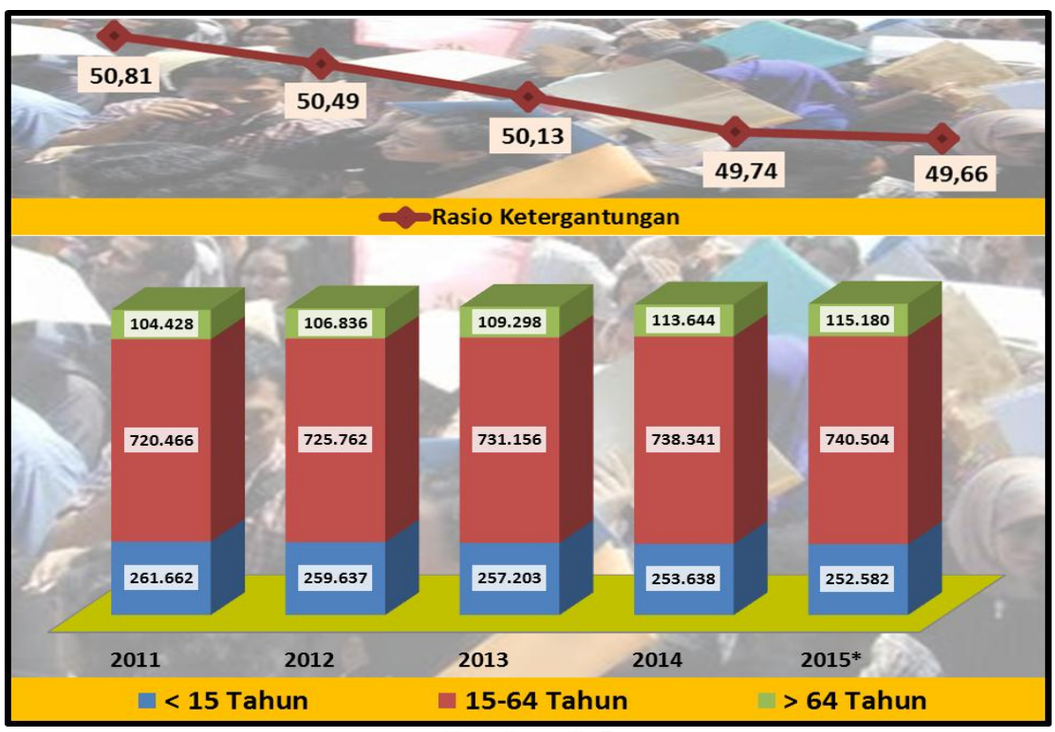
Dilihat dari jenis kelamin, terjadi kecenderungan perubahan jumlah penduduk. Pada tahun 2011, jumlah penduduk laki-laki sebesar 581.947 jiwa dan perempuan 581.644 jiwa, sehingga angka *sex rasio*nya sebesar 100,5 yang berarti pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,5 penduduk laki-laki. Pada tahun 2015, angkanya berubah menjadi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 588.193 jiwa dan perempuan 592.813 jiwa, dengan angka sex rasio 99,20 yang berarti pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Kecenderungan perubahan angka *sex ratio* di bawah 100 dimungkinkan dengan banyaknya penduduk yang merantau ke luar daerah demi mencari atau mendapatkan lapangan

pekerjaan khususnya sektor industri dan perdagangan/jasa di kota-kota besar, yang didominasi dari kalangan laki-laki.



Gambar 2.4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
dan Sex Rasio Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah
*Keterangan : *) Angka Sementara*



Gambar 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber: BPS, data diolah
*Keterangan : *) Angka Sementara*

Dilihat dari keadaan penduduk 15 tahun ke atas, menunjukkan komposisi demografi penduduk di Kabupaten Kebumen dari tahun 2011-2015 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Komposisi ini nyaris tidak berubah secara signifikan sampai tahun 2015, baik untuk komposisi penduduk muda (<15 tahun), maupun untuk komposisi penduduk tua (>65). Angka beban ketergantungan penduduk juga belum menunjukan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015 tercatat Rasio ketergantungan sebesar 49,66. Artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus menanggung 49-50 orang yang belum produktif (muda), atau dianggap tidak produktif lagi (tua). Angka rasio ketergantungan ini harus bisa ditekan serendah mungkin. Semakin kecil angka rasio ketergantungan akan menunjukkan semakin baik komposisi penduduk suatu daerah, artinya bahwa penduduk di daerah tersebut semakin produktif.

C. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian secara umum di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan kondisi perekonomian tahun 2013. Pada skala Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi (PDRB Tanpa Migas) meningkat dari 5,58 % pada tahun 2013 menjadi 5,71% pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi tertinggi yang terjadi pada tahun 2014 adalah Kategori Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 13,00%. Kemudian Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,20%, dan Kategori Pendidikan sebesar 10,17%. Sedangkan Kategori pertanian pada skala regional mengalami penurunan pertumbuhan dari 2,55% pada tahun 2013 menjadi -2,95% pada tahun 2014. Kategori pertanian merupakan kategori dengan pertumbuhan paling kecil yang terjadi pada tahun 2014.

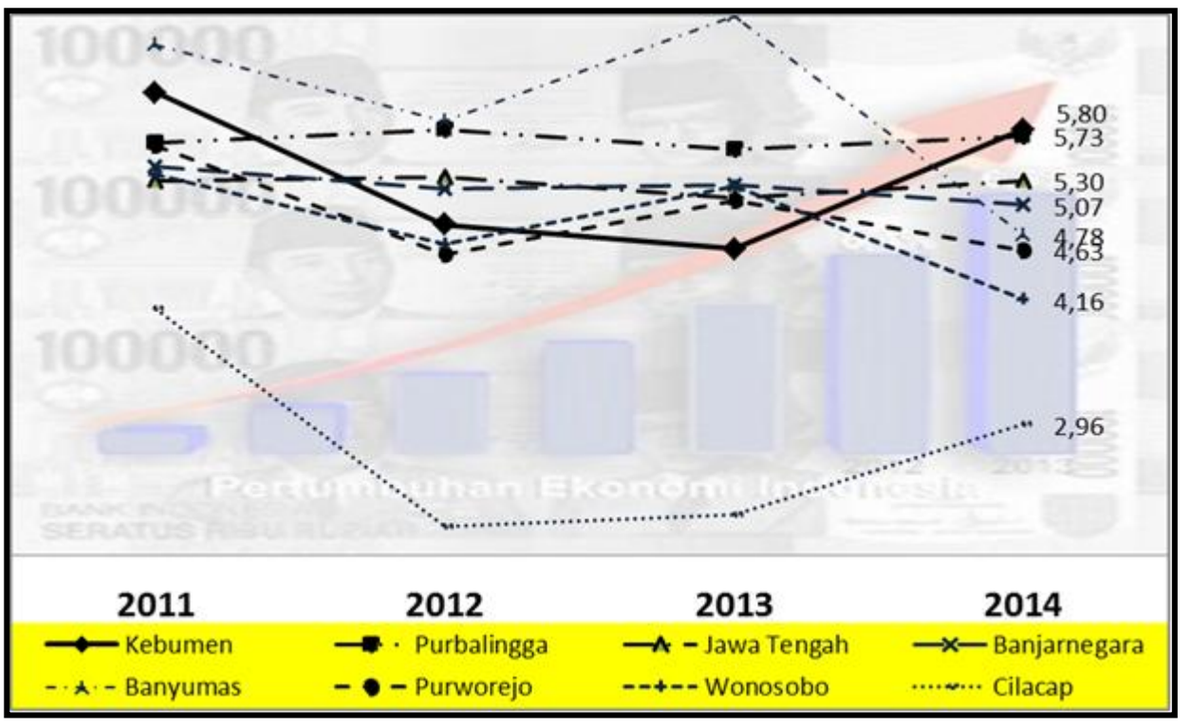
Perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2014 mencapai 5,80%, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,65%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2014 dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 17,70%. Seluruh kategori ekonomi PDRB pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015*
- PDRB ADHB (Rp. Juta)	13.766.061,0	15.123.969,0	16.536.357,8	18.672.657,8	19.929.924,1
- PDRB ADHK 2010 (Rp. Juta)	13.068.985,5	13.707.057,2	14.344.827,4	15.176.441,6	15.823.511,1
- LPE ADHK 2010 (%)	6,15	4,88	4,65	5,80	5,83
- LPE ADHK 2010 Provinsi Jawa Tengah (%)	5,30	5,34	5,14	5,42	5,70

Sumber : BPS dan PDRB Kabupaten Kebumen, 2016
*Keterangan : *) angka sementara*

Perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, pada tingkat regional kawasan, berada pada garda terdepan. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen lebih tinggi dengan perbandingan angka 5,80% berbanding 5,30%. Sedangkan bila dibandingkan dengan 6 kabupaten tetangga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen berada pada posisi teratas, dengan Kabupaten Cilacap menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 2,96%.



Gambar 2.6
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan 6 Kabupaten Tetangga
Tahun 2011-2014 (persen)

Sumber : BPS, data diolah

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Kebumen
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (persen)

	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.00	5.79	7.60	-4.78	3.36
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	6.89	5.47	5.95	5.65
C	Industri Pengolahan	0.00	4.47	-2.06	11.89	9.37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.00	5.91	10.40	12.46	2.09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	-2.30	-6.17	-4.55	3.54
F	Konstruksi	0.00	1.91	8.72	6.06	4.91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.00	6.61	1.35	6.10	3.23
H	Transportasi dan Pergudangan	0.00	4.95	2.81	11.75	10.09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.00	1.75	3.18	5.80	4.40
J	Informasi dan Komunikasi	0.00	7.32	11.65	8.89	17.70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.00	6.41	2.28	4.50	0.15
L	Real Estat	0.00	4.67	2.11	6.81	5.54
M,N	Jasa Perusahaan	0.00	9.49	7.90	18.66	7.39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.00	2.55	0.06	3.01	0.21
P	Jasa Pendidikan	0.00	24.72	24.29	11.98	10.37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.00	10.56	10.69	15.01	9.49
R,S,T, U	Jasa lainnya	0.00	2.13	-0.86	10.80	9.29
Produk Domestik Regional Bruto		**0.00**	**6.15**	**4.88**	**4.65**	**5.80**

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2014
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2010-2014 sebagian besar sektor memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total Produk Domestik Regional Bruto. Perlu menjadi catatan, bahwa sektor pertanian yang memberikan sumbangan terbesar dalam PDRB Kabupaten Kebumen memiliki pertumbuhan yang paling rendah dan bahkan negatif pada tahun 2013 yaitu sebesar -4,76%.

Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 masih ditopang dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan sumbangan pada tahun 2014 sebesar 27,24%. Kemudian kategori Industri Pengolahan sebesar 19,04%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 14,33%, kategori Jasa Pendidikan sebesar 9,26%, kategori Konstruksi sebesar 6,56%, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,04%. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5%.

Tabel 2.3
Peranan PDRB Kabupaten Kebumen
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (persen)

	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.44	28.68	29.12	27.21	27.24
B	Pertambangan dan Penggalian	4.74	4.87	4.69	4.68	5.04
C	Industri Pengolahan	18.51	18.53	17.42	18.30	19.04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05
F	Konstruksi	7.04	6.71	6.81	6.84	6.56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.24	16.07	15.19	15.27	14.33
H	Transportasi dan Pergudangan	3.78	3.55	3.33	3.46	3.62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.18	2.00	1.92	1.97	1.95
J	Informasi dan Komunikasi	1.77	1.72	1.70	1.65	1.64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.98	3.03	3.06	3.05	2.85
L	Real Estat	1.47	1.41	1.31	1.29	1.25
M,N	Jasa Perusahaan	0.25	0.25	0.26	0.29	0.29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.98	3.69	3.78	3.67	3.44
P	Jasa Pendidikan	5.10	6.07	8.12	8.90	9.26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.87	0.92	1.01	1.08	1.11
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.50	2.36	2.14	2.21	2.28
Produk Domestik Regional Bruto		**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2014
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

Jika melihat konfigurasi distribusi sektoral di Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014, tidak/belum terlihat adanya pergeseran struktur ekonomi, di mana sektor riil masih menjadi tumpuan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perubahan struktural tidak terjadi. Meskipun demikian, meningkatnya persentase distribusi pada sektor industri membuktikan bahwa telah terjadi dasar peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern. Diharapkan dari perubahan sikap sosial dan motivasi yang ada dapat membawa perbaikan dalam kesempatan kerja, produktivitas, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi.

Sektor basis yang menjadi kekuatan Kabupaten Kebumen diperoleh dengan menghitung *Location Quotient (LQ)* yaitu dengan membandingkan distribusi lapangan usaha di Kabupaten Kebumen dengan Provinsi Jawa Tengah di mana Kabupaten Kebumen berada secara geografis. Beberapa sektor di Kabupaten Kebumen secara konsisten memiliki nilai persentase distribusi yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.4
Hasil Analisis DLQ dan SLQ Kabupaten Kebumen
Tahun 2009-2013

	SLQ < 1	SLQ > 1
DLQ < 1	**Tertinggal:** a. Sub Sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya; b. Sub Sektor Penggalian; c. Sub Sektor Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet; d. Sub Sektor Alat Angkutan, Mesin, dan Peralatannya; e. Sub Sektor Barang Lainnya; f. Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; g. Sub Sektor Hotel; h. Sub Sektor Jasa Penunjang Angkutan; i. Sub Sektor Perseorangan dan Rumah Tangga.	**Prospektif:** a. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan; b. Sub Sektor Kehutanan; c. Sub Sektor Semen & Bahan Galian Bukan Logam; d. Sub Sektor Sewa Bangunan; e. Sub Sektor Angkutan Jalan Raya; f. Sub Sektor Sosial Kemasyarakatan ;
DLQ > 1	**Andalan:** a. Sub Sektor Perikanan; b. Sub Sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau; c. Sub Sektor Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki; d. Sub Sektor Kertas dan Barang Cetakan; e. Sub Sektor Bank; f. Sub Sektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank; g. Sub Sektor Jasa Perusahaan; h. Sub Sektor Hiburan dan Rekreasi.	**Unggulan:** a. Sub Sektor Tanaman Perkebunan; b. Sub Sektor Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya; c. Sub Sektor Restoran; d. Sub Sektor Angkutan Rel.

Sumber : BPS dan Bagian Perekonomian Setda (data diolah)

Analisis LQ menggunakan metode DLQ dan SLQ membagi sektor-sektor perekonomian menjadi 4 (empat) antara lain:

a. Unggulan: merupakan industri basis dan masih berpotensi menjadi industri basis di masa mendatang;
b. Prospektif: merupakan industri basis, akan tetapi ada kecenderungan untuk tidak berpotensi lagi menjadi industri basis di masa yang akan datang;
c. Andalan: belum menjadi industri basis, akan tetapi berpotensi menjadi industri basis di masa yang akan datang;
d. Tertinggal: bukan merupakan industri basis atau belum menjadi industri basis dan belum berpotensi menjadi industri basis di masa yang akan datang.

Dari hasil analisis LQ, didapatkan sektor-sektor perekonomian yang menjadi sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Kebumen di antaranya Sub Sektor Tanaman Perkebunan; Sub Sektor Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya; Sub Sektor Restoran; dan Sub Sektor Angkutan Rel. Sedangkan sektor-sektor andalan di antaranya Sub Sektor Perikanan; Sub Sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau; Sub Sektor Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki; Sub Sektor Kertas dan Barang Cetakan; Sub Sektor Bank; Sub Sektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank; Sub Sektor Jasa Perusahaan; dan Sub Sektor Hiburan dan Rekreasi. Sektor-sektor inilah yang akan menjadi tumpuan perekonomian dan harus mendapat fokus penanganan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen ke depan.

2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi untuk makanan termasuk makanan jadi dan konsumsi bukan makanan. Kecenderungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan bukan makanan disebut sebagai pola konsumsi. Konsumsi rumah tangga per kapita kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi dengan tren secara umum yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pengeluaran rumah tangga dan jumlah rumah tangganya semakin meningkat, sehingga dapat dikatakan kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan. Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita untuk non makanan selama 3 tahun terakhir meningkat dari 36,30% pada tahun 2013, menjadi 39,70% tahun 2014 dan diperkirakan menjadi 43,1% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara relatif.

Tabel 2.5
Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2015

No.	Uraian Kinerja	2013	2014	2015*
1.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita (Rp)	426.518	486.232	545.946
2.	Persentase makanan	63,70	60,30	56,9
3.	Persentase non makanan	36,30	39,70	43,1

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2013-2014 (data diolah)
*Keterangan: *) Angka Proyeksi*

3. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Bila Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Produk Domestik Regional Bruto Per kapita. Produk Domestik Regional Bruto Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kebumen mencapai 15.810.807 rupiah dengan pertumbuhan sebesar 12,92%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 9,34%.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Kebumen tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2014 (Ribu Rp)

	Lapangan Usaha/Industry	2010	2011	2012	2013*	2014**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,965.19	3,343.55	3,728.73	3,810.01	4,307.39
B	Pertambangan dan Penggalian	494.14	567.35	601.06	655.76	796.61
C	Industri Pengolahan	1,929.46	2,159.39	2,231.01	2,562.04	3,009.83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.92	7.38	8.01	8.60	8.79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.71	8.59	8.01	7.65	8.12
F	Konstruksi	733.49	781.56	872.37	957.22	1,036.56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,693.12	1,873.21	1,945.17	2,137.58	2,265.13
H	Transportasi dan Pergudangan	394.33	414.05	426.88	485.01	572.29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	184.88	200.52	217.74	231.15	258.86
J	Informasi dan Komunikasi	310.18	352.74	392.29	427.22	450.77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	153.43	163.98	167.93	180.92	198.09
L	Real Estat	25.67	29.65	33.92	40.92	45.49
M,N	Jasa Perusahaan	415.33	430.68	483.46	514.21	543.43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	531.15	707.77	1,040.24	1,246.82	1,464.65
P	Jasa Pendidikan	90.36	107.39	128.78	151.37	175.31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	261.03	275.05	274.37	309.71	360.49
R,S,T, U	Jasa lainnya	25.67	29.65	33.92	40.92	45.49
Produk Domestik Regional Bruto		**10,424.52**	**11,656.22**	**12,806.01**	**14,001.93**	**15,810.81**

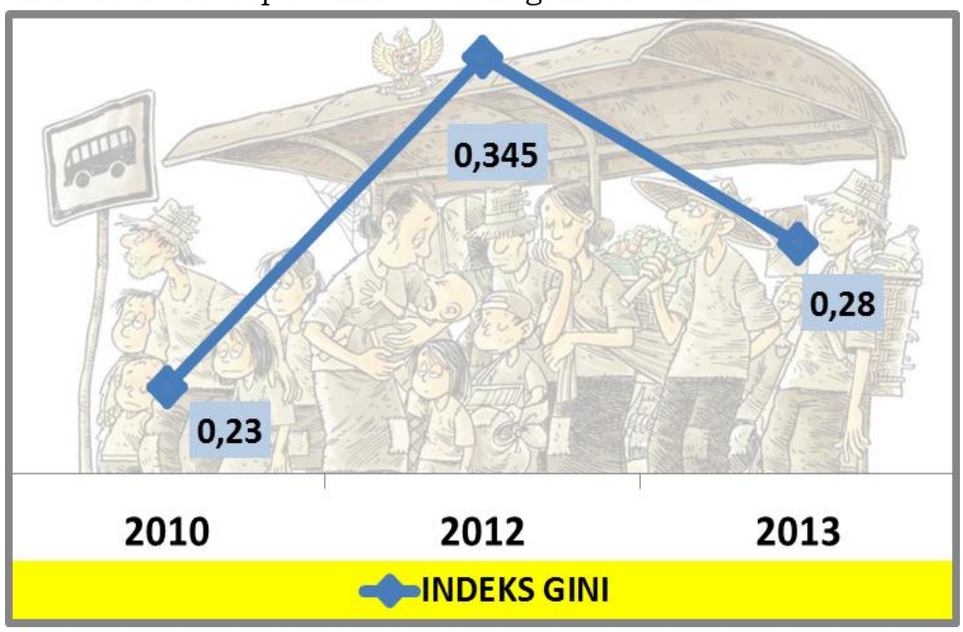
Sumber : BPS, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

4. Indeks Gini

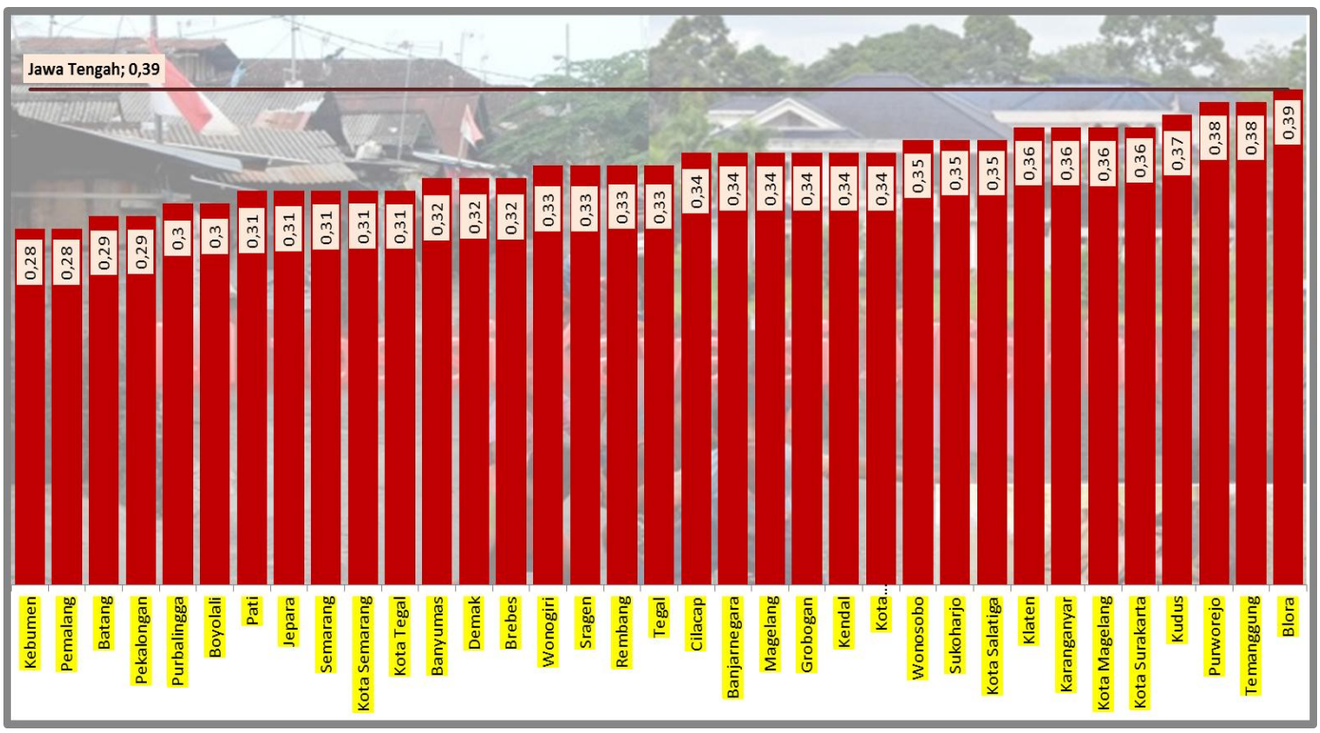
Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Selama periode 2010-2013 perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Kebumen menunjukkan angka yang cenderung meningkat, yang menunjukkan kondisi ketimpangan pendapatan antar masyarakat semakin melebar. Indeks Gini pada tahun 2010 sebesar 0,23 meningkat menjadi 0,345 pada tahun 2012 dan kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi

0,28. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Kebumen selama tahun 2010-2013 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.7
Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013
Sumber : BPS, 2016



Gambar 2.8
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan 34 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Sumber : Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Meskipun cenderung meningkat, Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 lebih rendah dibanding Provinsi

Jawa Tengah dengan perbandingan angka 0,28 dan 0,39. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Indeks Gini Kabupaten Kebumen juga berada pada posisi paling rendah (terbaik) yang menunjukkan pemerataan pendapatan paling merata. Berdasarkan trend data dari tahun 2010-2013, diperkirakan pada tahun 2015, Indeks Gini Kabupaten Kebumen akan menurun pada angka 0,24.

5. Inflasi

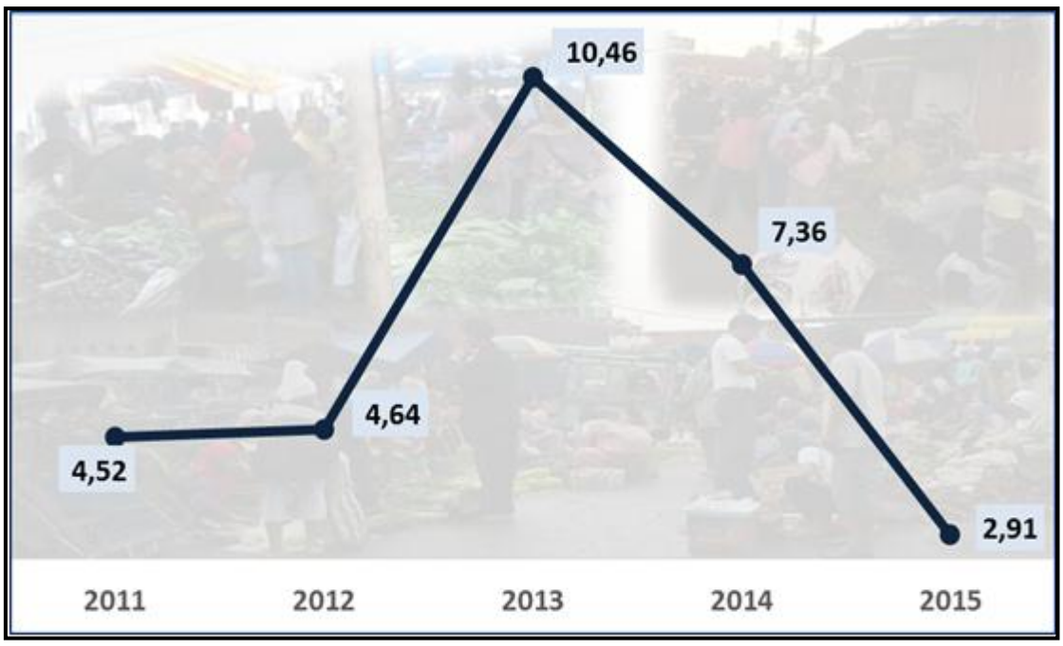
Laju inflasi Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan angka yang berfluktuasi, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Menurut Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Bahan Makanan	2,77	3,95	7,23	10,07	5,83
2.	Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,09	4,57	10,63	6,42	4,42
3.	Perumahan, Air, gas, Listrik dan Bahan Bakar	5,77	7,35	3,92	8,36	1,93
4.	Sandang	5,93	4,9	22,62	4,41	4,3
5.	Kesehatan	9,24	2,19	3,58	4,59	1,9
6.	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	7,84	0,08	22,93	0,96	2,7
7.	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	5,72	3,89	21,17	10,57	-2,4
	Umum	4,52	4,64	10,46	7,36	2,91

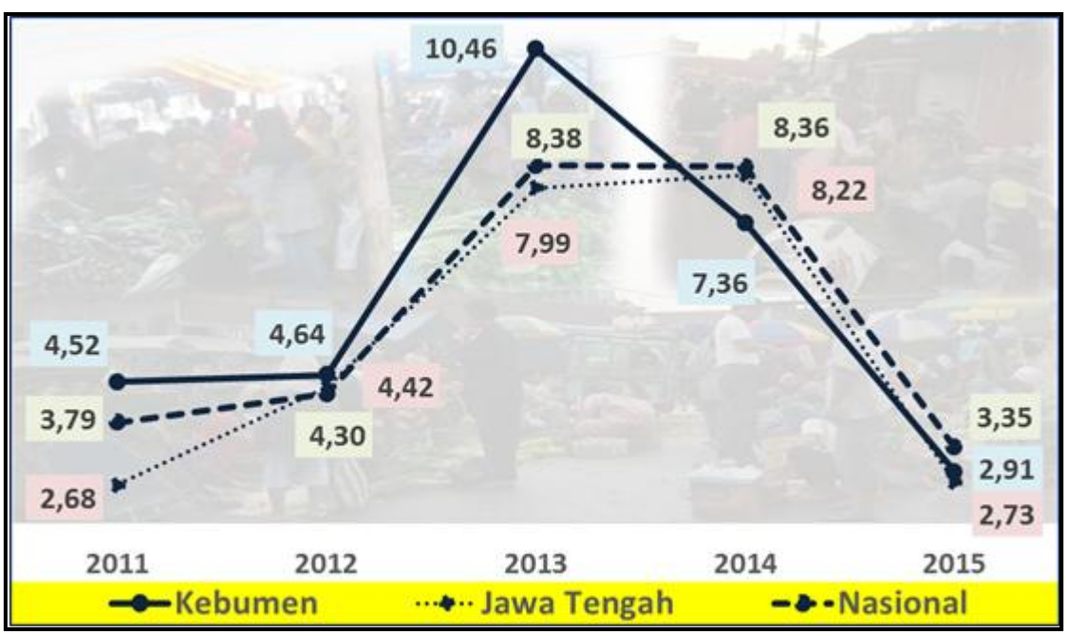
Sumber : Buku IHK dan Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Selama tahun 2011-2015, laju inflasi di Kabupaten Kebumen menurun dari 4,52% pada tahun 2011 menjadi 2,91% pada tahun 2015. Namun demikian pada tengah-tengah periode terjadi fluktuasi, dimana pada tahun 2013 laju inflasi naik menjadi sebesar 10,46%. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Juni 2013 yang berdampak pada kenaikan harga-harga barang dan jasa akibat kenaikan harga BBM tersebut, memicu inflasi tahun 2013 mencapai 2 (dua) digit. Inflasi tersebut merupakan inflasi tertinggi selama kurun waktu 2011-2015. Kenaikan harga BBM yang terjadi menjelang Ramadhan, Lebaran, dan pergantian tahun ajaran sekolah tersebut menyebabkan kenaikan harga yang tinggi pada beberapa komoditi. Semua kelompok pengeluaran selama tahun 2013 mengalami kenaikan harga, terutama kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang mengalami inflasi sebesar 22,93%. Adapun inflasi terendah dialami oleh kelompok kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 3,58%.



Gambar 2.9
Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Sumber : Buku IHK dan Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Selama tahun 2011-2015, perkembangan inflasi Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan pola yang hampir sama. Inflasi yang relatif tinggi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional terjadi pada tahun 2013 dimana Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan nasional tingkat inflasinya mencapai masing-masing 10,46%, 7,99% dan 8,38%.



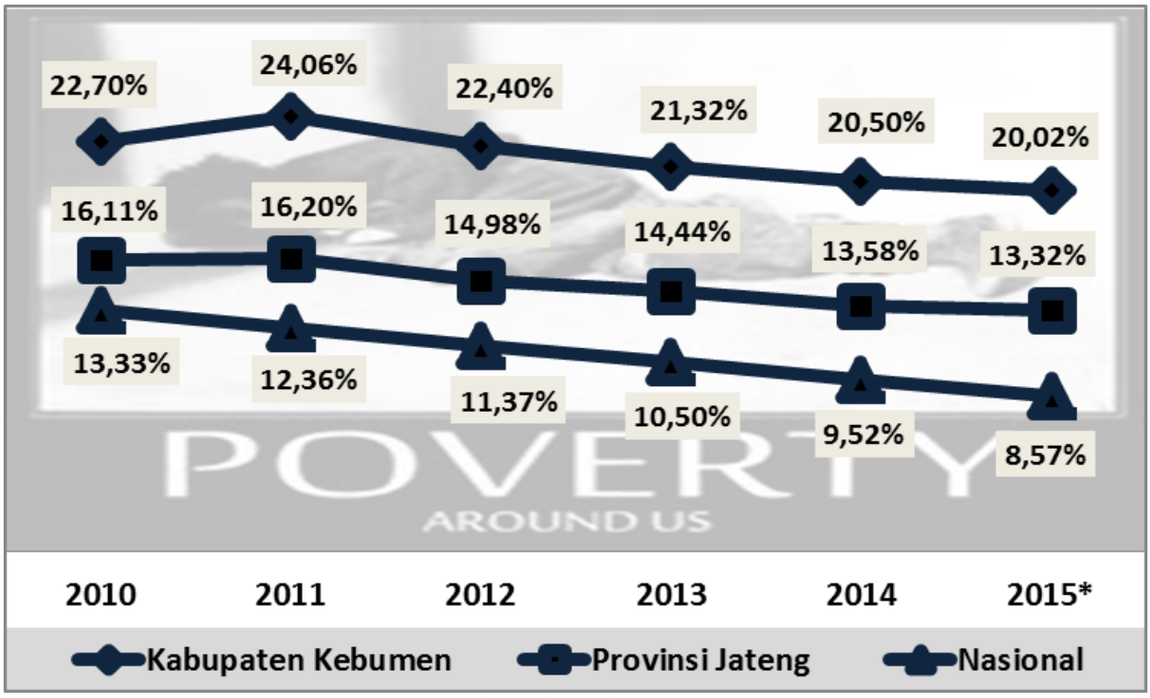
Gambar 2.10
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015
Sumber : Buku IHK dan Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Pada tahun 2015, inflasi yang relatif tinggi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional terjadi pada bulan Juli 2015 dan bulan Desember 2015. Inflasi yang tinggi pada bulan Juli ini berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat pada bulan Juli yang bertepatan dengan bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri yang cenderung mengalami kenaikan dalam mengkonsumsi barang dan jasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, sehingga menyebabkan harga-harga pada bulan Juli 2015 menjadi naik, terutama untuk kelompok bahan makanan dan kelompok sandang. Pada bulan Juli 2015 Kabupaten Kebumen mengalami inflasi sebesar 0,92%, Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,92% dan Nasional mengalami inflasi sebesar 0,93%. Adapun inflasi yang relatif tinggi berikutnya, terjadi bulan Desember 2015, dimana Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,76%, 0,99% dan 0,96%. Inflasi tertinggi berikutnya terjadi bulan Juni 2015, dimana Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,52%, 0,61% dan 0,54%. Inflasi tertinggi berikutnya lagi terjadi bulan Mei 2015, dimana Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,41%, 0,51% dan 0,50%.

Penurunan indeks harga atau deflasi pada bulan Januari dan Februari 2015 juga terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional. Pada bulan Januari 2015 Kabupaten Kebumen mengalami deflasi sebesar 0,20%, Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,35% dan Nasional mengalami deflasi sebesar 0,24%. Sementara itu, pada bulan Februari 2015 Kabupaten Kebumen mengalami deflasi sebesar 0,10%, Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,62% dan Nasional mengalami deflasi sebesar 0,36%.

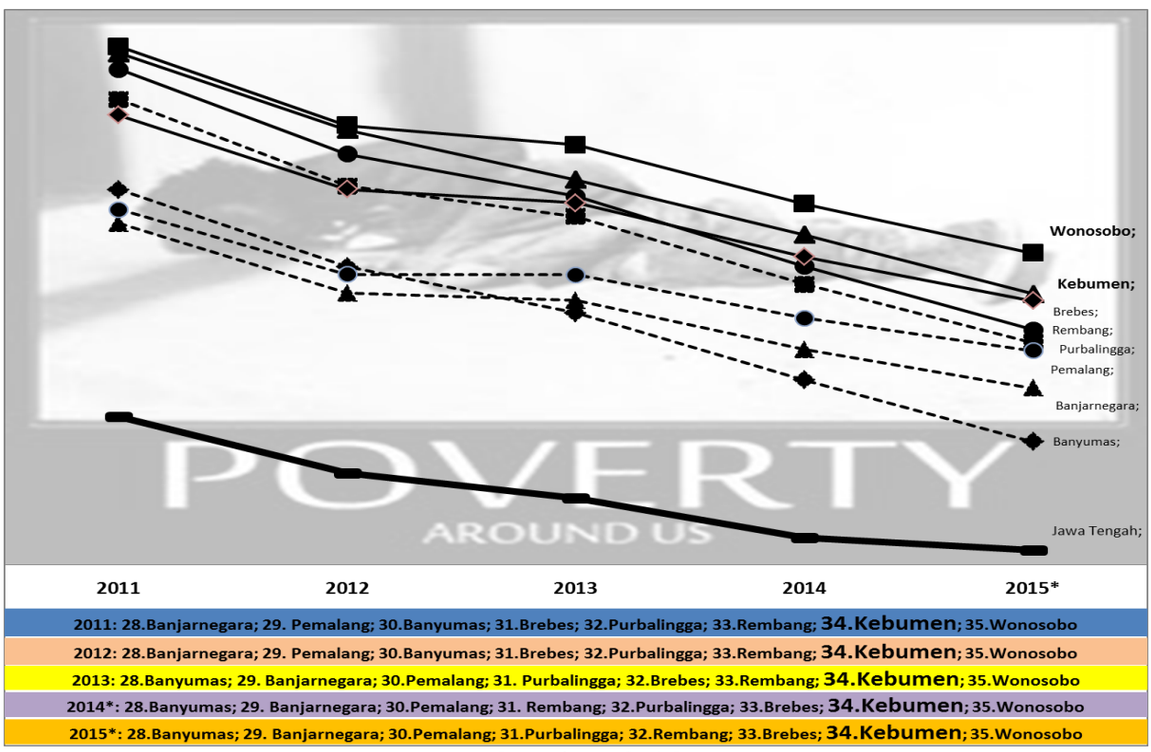
6. Penduduk Miskin

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen selama tahun 2011-2015 masih cukup memprihatinkan, meskipun angkanya dari tahun 2011 semakin menurun. Setelah sempat naik dari 22,70% tahun 2010 menjadi 24,06% tahun 2011, angka kemiskinan terus menurun hingga tahun 2015 penduduk miskin Kabupaten Kebumen mencapai 20,02%. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, selama periode 2011-2015, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen selalu lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 2.11
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

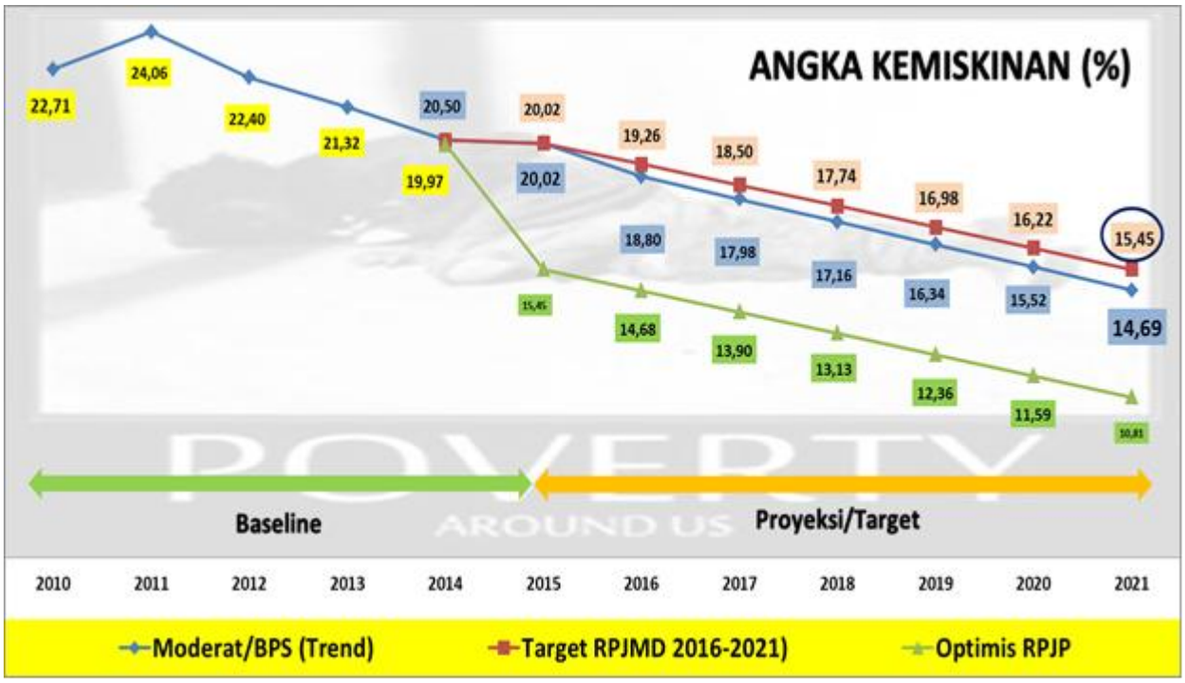
Sumber : BPS, data diolah
*Keterangan : *) Angka Sementara*



Gambar 2.12
Perbandingan Peringkat Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen
dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Lain di Kawasan Regional
Tahun 2011-2015

Sumber : BPS dan Bappeda, 2015

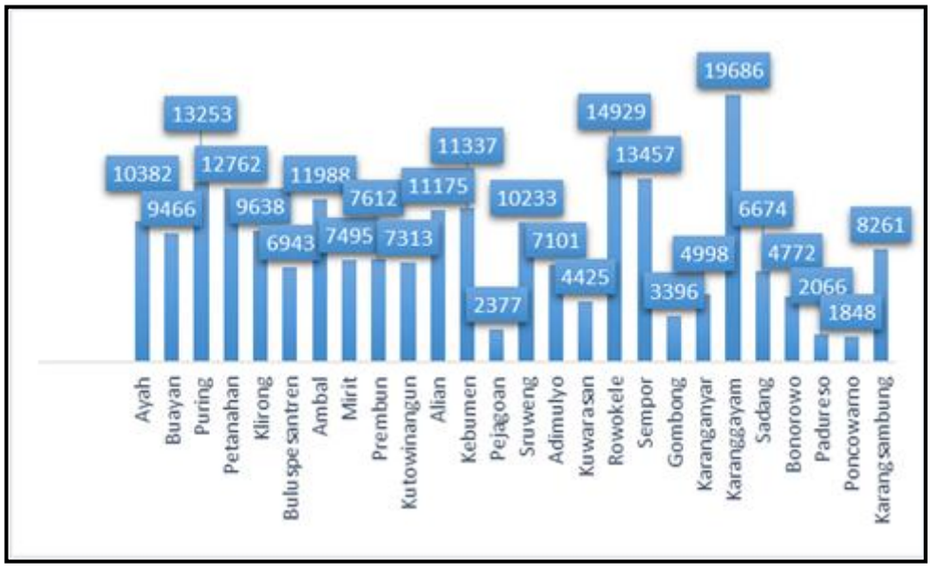
Dibandingkan angka penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 berada cukup jauh di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan angka 20,13% berbanding 13,58%. Untuk skala provinsi, penduduk miskin Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 34 dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Secara regional/kawasan, penduduk miskin Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 hanya lebih rendah dari Kabupaten Wonosobo dengan perbandingan angka 20,13% berbanding 20,80%. Diperkirakan pada tahun 2015, angka dan peringkat penduduk miskin ini tidak mengalami banyak pergeseran.



Gambar 2.13
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen
Tahun 2010-2015 dan Target Tahun 2016-2021

Sumber : BPS dan Bappeda, 2015
*Keterangan : *) Angka Sementara*

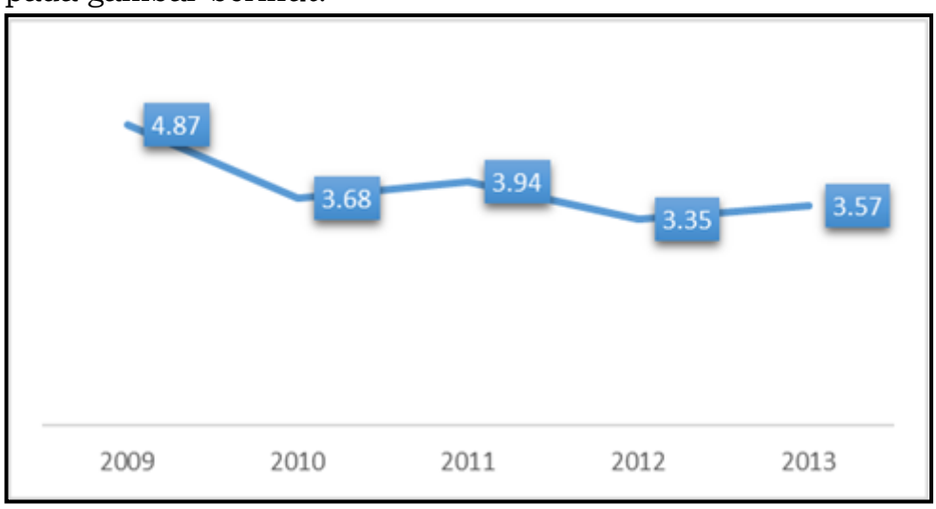
Berdasarkan pendataan penduduk miskin yang dilakukan oleh TKP2KDes dan Bappeda Kabupaten Kebumen, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 mencapai 223.587 jiwa atau 19,08% dari jumlah penduduk Kabupaten Kebumen. Penduduk miskin di Kabupaten Kebumen tersebar di 26 kecamatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kecamatan Karanggayam sebanyak 19.686 jiwa dan terendah berada di Kecamatan Poncowarno sebanyak 1.848. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.14
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen
Menurut Kecamatan Tahun 2015 (Jiwa)
Sumber : Bappeda, 2015, diolah

a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

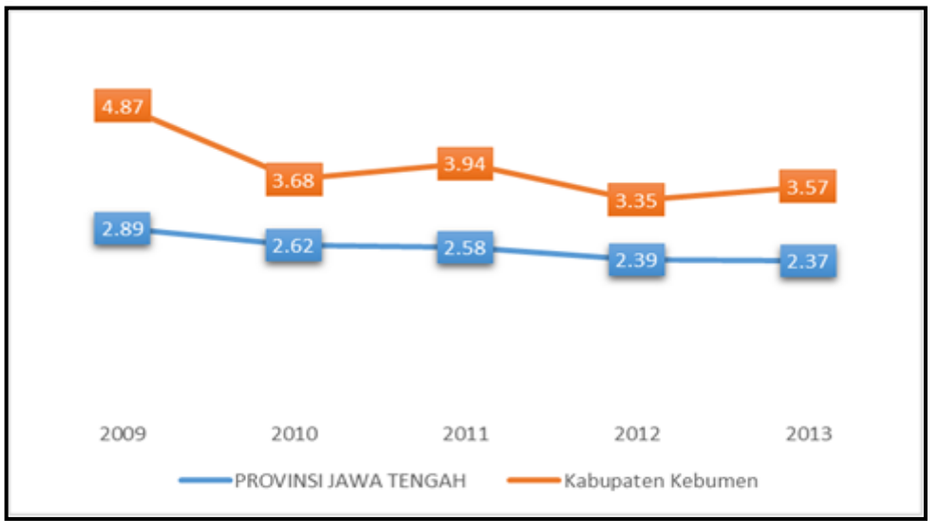
Dilihat dari perkembangan antar waktu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kebumen pada tahun 2009-2013 berangsur membaik walaupun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 sebesar 4,87% dan pada tahun 2013 menjadi 3,57%, namun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 3,94%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.15
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2009-2013, diolah

Perkembangan relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kebumen selama lima tahun (2009-2013) sejalan terhadap perkembangan capaian

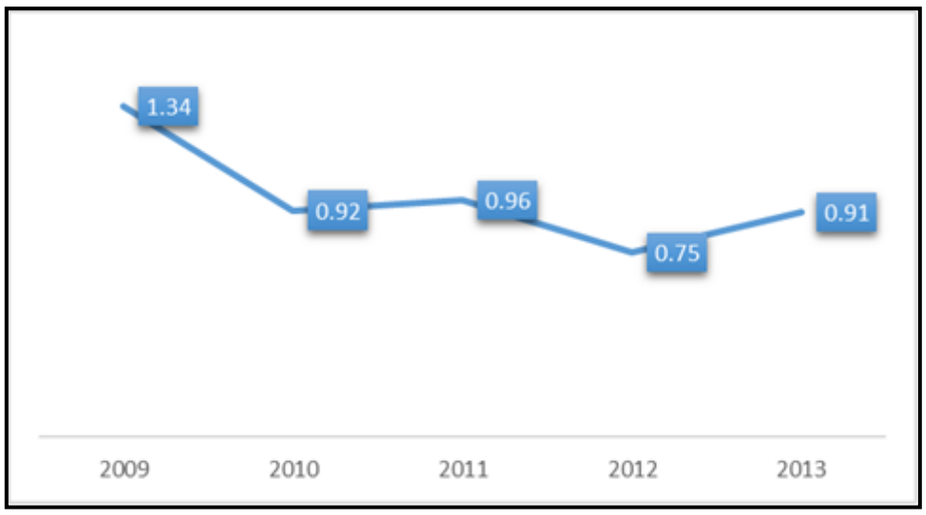
Provinsi Jawa Tengah, meskipun capaian Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kebumen masih cukup tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.16
Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Kebumen terhadap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2013 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2009-2013, diolah

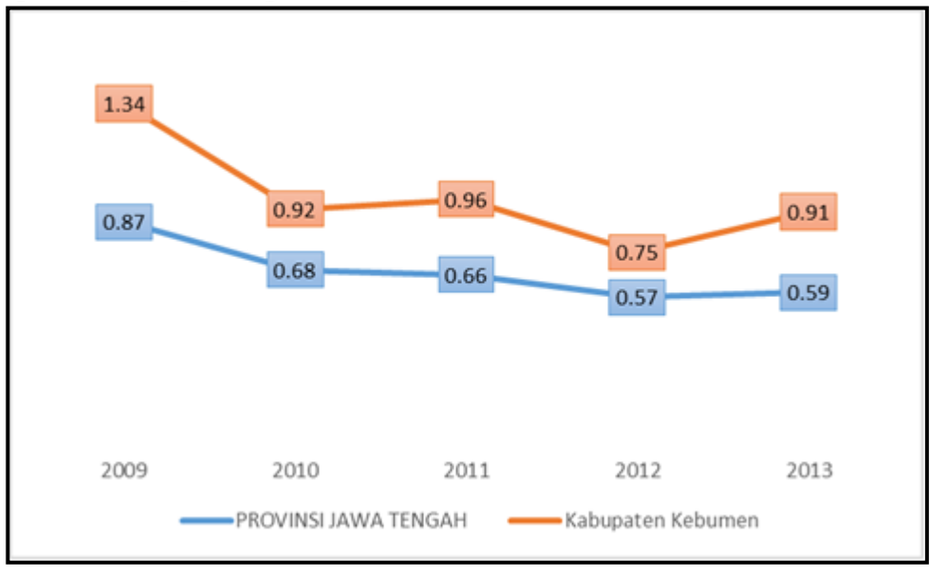
b. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi, yaitu kenaikan pada tahun 2011 sebesar 0,96% dan tahun 2013 sebesar 0,91%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.17
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2009-2013, diolah

Perkembangan relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen selama periode lima tahun (2009-2013) sejalan terhadap capaian Provinsi Jawa Tengah, meskipun capaian Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.18
Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)
Kabupaten Kebumen terhadap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2013

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2009-2013, diolah

7. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang tertangani menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dari sisi kenyamanan masyarakat, semakin sedikit/rendah kriminalitas yang terjadi, semakin nyaman masyarakat dalam melakukan setiap aktivitasnya, sehingga upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin optimal.

Kasus kriminalitas yang ditangani di Kabupaten Kebumen selama 2011-2015 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan berkurangnya kasus pelanggaran hukum yang terjadi, yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Tabel 2.8
Jumlah Penanganan Tindak Kriminalitas
di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Kasus Narkoba	3	8	10	6	6
2.	Kasus Pembunuhan	0	0	1	2	2
3.	Kasus Seksual	25	17	21	1	1
4.	Kasus Penganiayaan	27	31	8	2	2
5.	Kasus Pencurian	81	85	96	39	39
6.	Kasus Penipuan	36	16	12	9	5
7.	Kasus Pemalsuan	2	4	4	0	0

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
	Uang					
Total Kasus		174	161	152	59	59
Jumlah penduduk		1.179.826	1.183.763	1.176.662	1.181.006	1.181.006
Rasio angka kriminalitas yang tertangani		1,47	1,36	1,29	0,50	0,50

Sumber : Polres Kebumen, 2015
Keterangan :) Angka sementara*

8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan kualitas hidup penduduk. Pada bulan September 2015 di-launching metode baru perhitungan IPM yang mencakup Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); pendidikan yang semula diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH); serta dimensi pengeluaran diukur dengan pengeluaran per kapita.

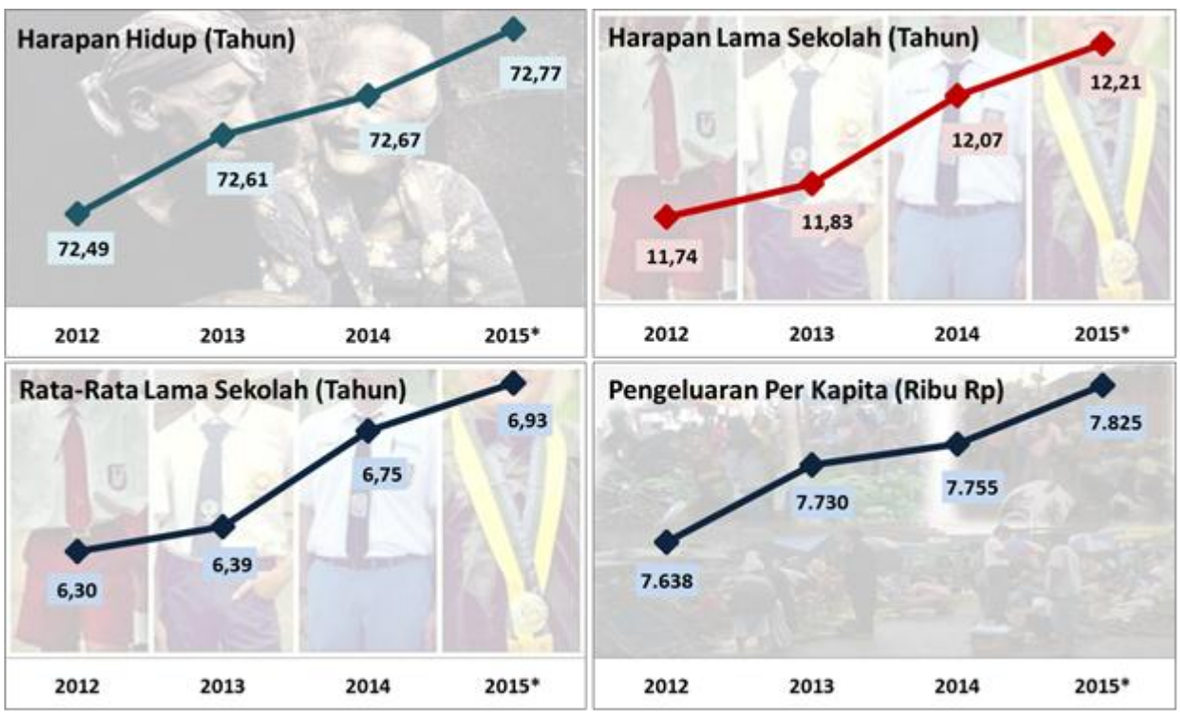
Perubahan pengukuran IPM dari metode lama ke metode baru pada dasarnya terletak pada dimensi pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH) berubah menjadi angka Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, kemudian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 15 tahun ke atas berubah menjadi 25 tahun ke atas. Kemudian pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli yang diukur dengan menggunakan 96 komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan).

Dengan metode perhitungan baru, IPM Kabupaten Kebumen periode tahun 2012-2014 mengalami peningkatan dari 64,47 tahun 2012 menjadi 65,67 pada tahun 2014 dan diperkirakan meningkat menjadi 66,48 pada tahun 2015. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen tahun 2012-2015, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.19
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2015

Sumber : BPS, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*



Gambar 2.20
Perkembangan Variabel Pembentuk IPM
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2015

Sumber : BPS, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan

masyarakat Kabupaten Kebumen secara umum semakin membaik berdasarkan rata harapan hidup yang semakin panjang. AHH naik dari 72,49 pada tahun 2012 menjadi 72,67 pada tahun 2014, dan diperkirakan meningkat menjadi 72,77 tahun pada 2015. Angka ini menunjukkan secara rata-rata penduduk yang dilahirkan di Kabupaten Kebumen dapat bertahan hidup hingga usia 72-73 tahun.

Kenaikan AHH ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan, serta genetika/ keturunan. Upaya-upaya yang diperlukan dan terus dilakukan untuk meningkatkan AHH di antaranya pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan sanitasi (pemenuhan kebutuhan air bersih dan jamban sehat bagi keluarga), perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, dan pendampingan kesehatan ibu dan anak.

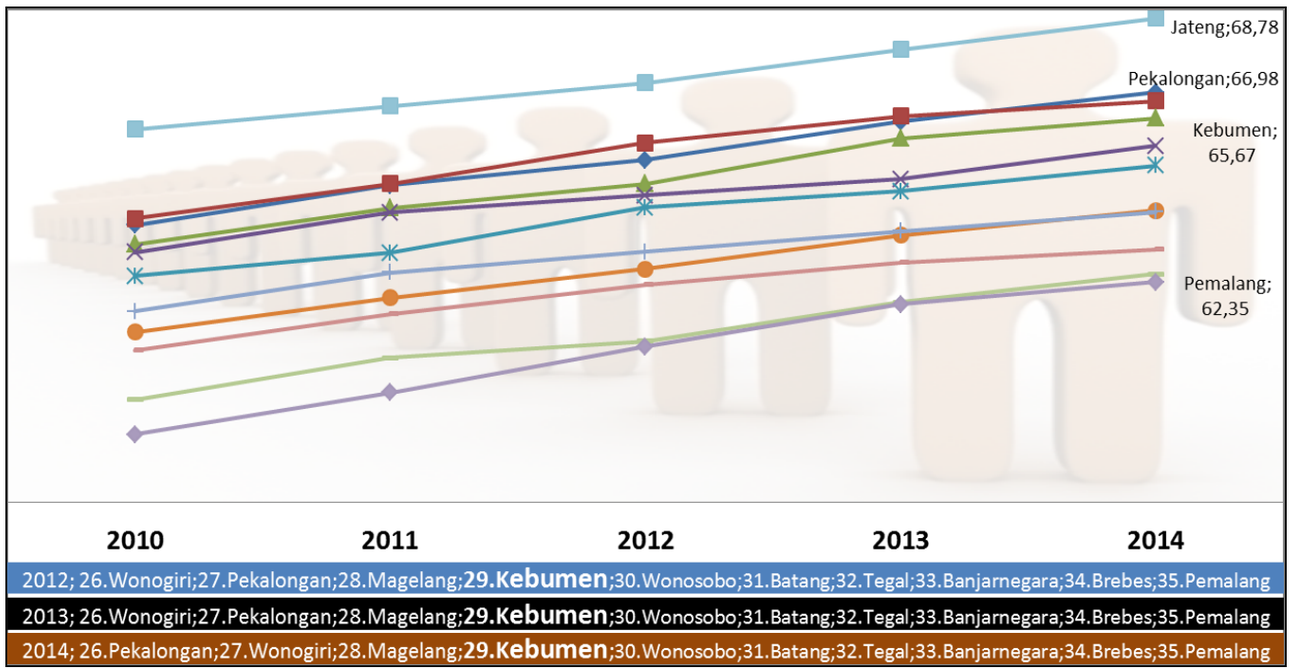
Sedangkan HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari sebesar 11,74 pada tahun 2012 menjadi 12,07 pada tahun 2014, dan diperkirakan mencapai 12,21 pada tahun 2015.

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Kebumen selama periode 2012-2014 meningkat dari 6,30 tahun menjadi 6,75 tahun dan diperkirakan tahun 2015 meningkat menjadi 6,93 tahun. Selaras dengan kebijakan nasional pembangunan pendidikan dalam rangka mendukung wajib belajar 12 tahun, maka peningkatan angka HLS dan RLS perlu diupayakan melalui peningkatan aksesibilitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan meliputi pembangunan/rehabilitasi gedung dan ruang kelas baru, dukungan pendampingan BOSDA pendidikan menengah dan khusus, pemberian beasiswa miskin, bantuan operasional

penyelenggaraan Paket A, B dan C serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Sementara itu, pengeluaran per kapita di Kabupaten Kebumen meningkat dari Rp7.638.000,00 pada tahun 2012 menjadi Rp7.755.000,00 pada tahun 2014. Meskipun pengeluaran per kapita (disesuaikan) di Kabupaten Kebumen meningkat, namun perlu adanya upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan memperketat belanja barang dan jasa, penghematan penggunaan BBM dan listrik, diversifikasi pangan, serta adanya pelayanan dan kemudahan dalam berinvestasi.

Angka IPM Kabupaten Kebumen masih berada di bawah angka IPM Provinsi Jawa Tengah, dengan perbandingan angka 65,67 dan 68,78. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, dibandingkan Kabupaten lain, peringkat IPM Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 berada pada peringkat 29 dari 35 Kabupaten/Kota. Secara regional/kawasan, peringkat IPM Kabupaten Kebumen lebih tinggi dari Wonosobo dan Banjarnegara, namun lebih rendah dari Cilacap, Purworejo dan Banyumas.



Gambar 2.21
Perbandingan IPM Kabupaten Kebumen dan 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Sumber : BPS, 2015

9. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun

usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Selama tahun 2011-2015, kecenderungan penurunan nilai APK ditunjukkan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini mengisyaratkan adanya penurunan pada jumlah murid yang tinggal kelas atau berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya, yang mana berarti terjadi peningkatan pada kualitas murid dan sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Namun demikian, terjadi peningkatan nilai APK pada jenjang SMA/MA/SMK. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah penduduk non usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA/MA/SMK, yang dapat terjadi karena beberapa hal seperti tidak lulusnya murid kelas 3 atau meningkatnya jumlah murid yang tidak naik kelas.

Tabel 2.9
Perkembangan APK Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Tingkat Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	SD/Sederajat	106,2	102,93	101,18	103,72	103,72
2.	SMP/Sederajat	104,69	102,33	95,33	100,39	100,39
3.	SLTA/Sederajat	59,43	62,03	81,23	82,7	84,17

Sumber : Dinas Dikpora, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

10. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Selama tahun 2011-2015 APM jenjang SMA di Kabupaten Kebumen menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan. yang berarti bahwa penduduk usia sekolah 16-18 tahun di Kabupaten Kebumen yang bersekolah pada jenjang SMA semakin banyak. Sedangkan APM jenjang SD dan SMP menunjukkan kecenderungan penurunan, yang berarti bahwa penduduk usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun di Kabupaten Kebumen yang bersekolah pada jenjang SD dan SMP semakin menurun.

Tabel 2.10
Perkembangan APM Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Tingkat Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	SD /Sederajat	91,56	88,01	86,66	88,74	90,82
2.	SMP/Sederajat	77,3	74,18	71,67	75,62	75,62
3.	SLTA/Sederajat	45,19	46,25	60,66	58,5	66,24

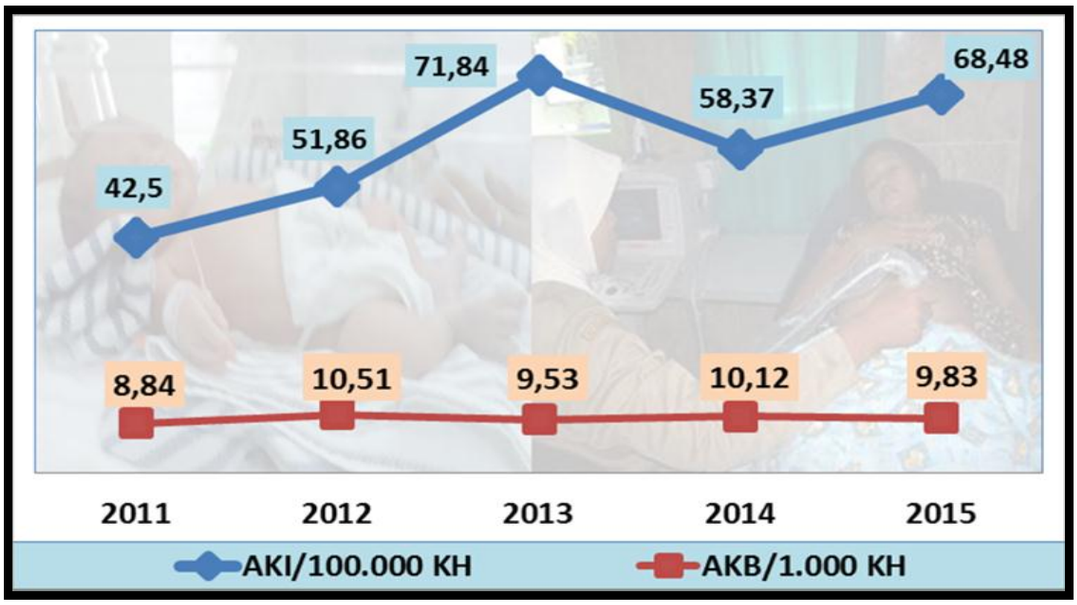
Sumber : Dinas Dikpora, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

11. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat vital. Maka dari itu pemerintah juga mentargetkan pembangunan kesehatan untuk masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemajuan dan kemampuan hidup sehat, agar derajat kesehatan optimal, dan tidak mudah terkena penyakit sehingga usia harapan hidup dapat panjang. Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf h ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kontribusi bidang kesehatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terwakili oleh indikator Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Pada tahun 2015 AKB mencapai 9,83 kematian per 1.000 kelahiran hidup mengalami kenaikan dari angka tahun 2011 yang mencapai angka 8,84 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Sementara AKI juga mengalami kenaikan dari 42,5 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 68,48 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

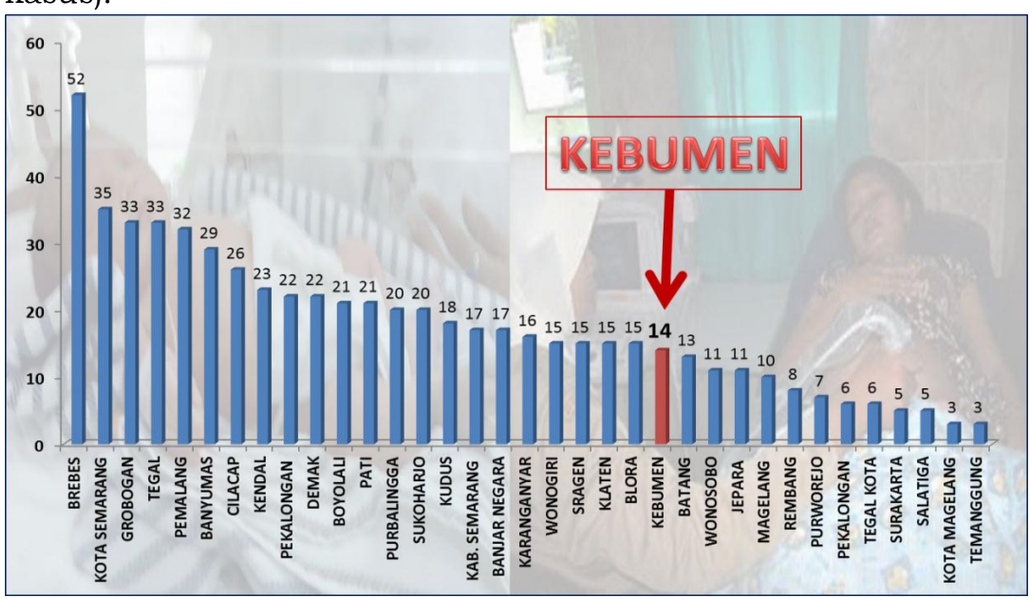
Selengkapnya mengenai AKI dan AKB Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.22
Perkembangan Angka Kematian Ibu
dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

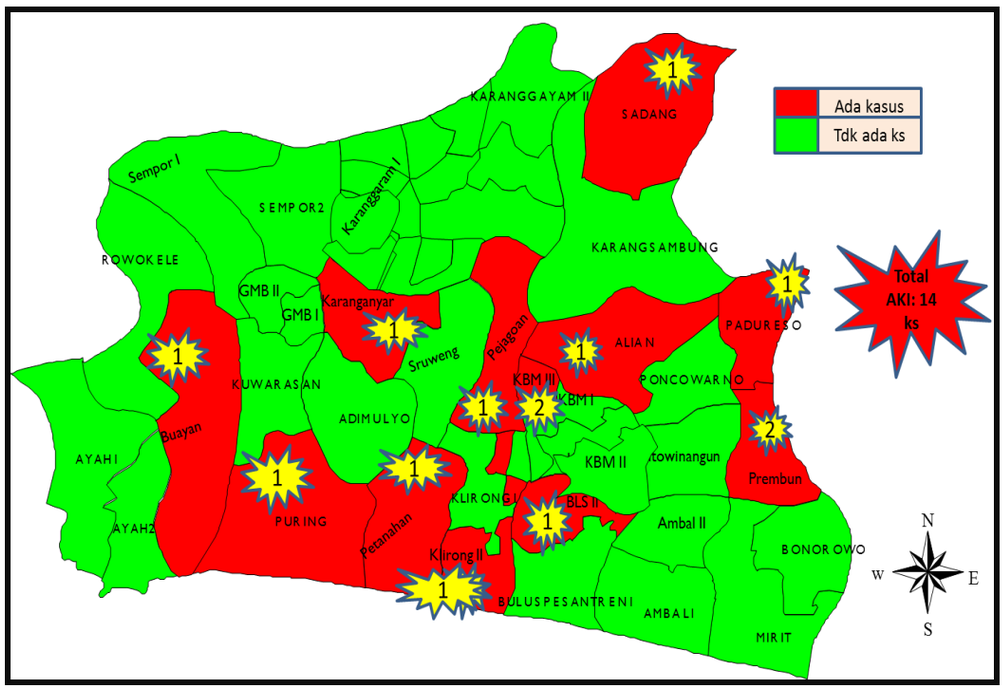
Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung naik pada 2 tahun terakhir dari 58,37/100.000 KH pada 2014 menjadi 68,48/100.000 KH pada tahun 2015. Di tingkat provinsi, AKI Kabupaten Kebumen tahun 2015 berada pada urutan 23 dengan AKI tertinggi. Penyebab kematian ibu tertinggi selama tahun 2015 (14 kasus) antara lain pendarahan (5 kasus), hipertensi (4 kasus), penyakit penyerta (4 kasus) dan emboli air ketuban (1 kasus).



Gambar 2.23
Peringkat Angka Kematian Ibu 35 Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

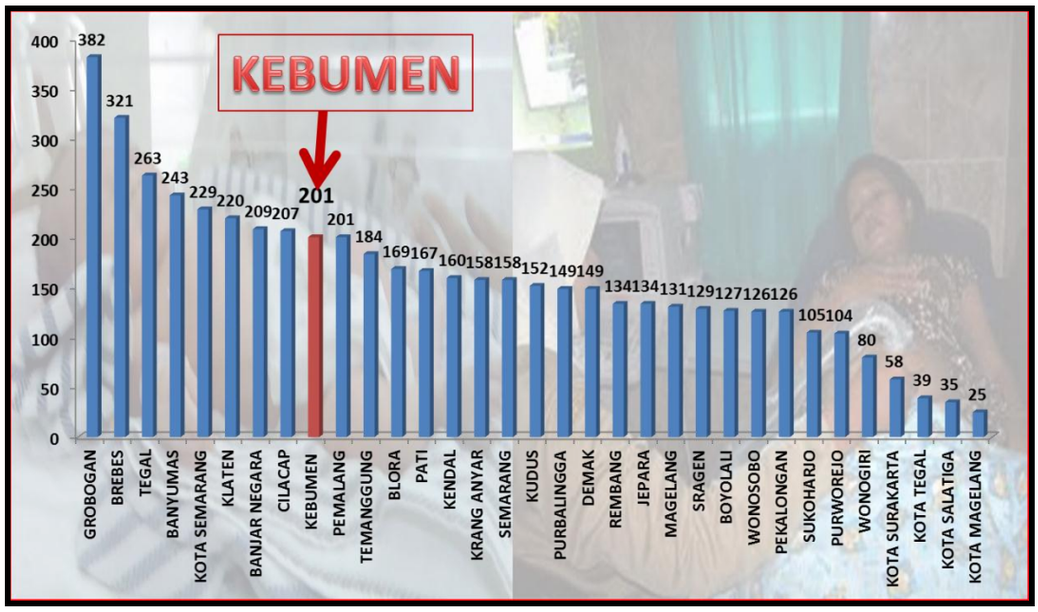
Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Dilihat dari persebarannya, kasus AKI pada tahun 2015 terjadi di 11 Kecamatan, dengan kecamatan Kebumen dan Prembun menjadi wilayah dengan kasus AKI tertinggi yaitu 2 kasus.



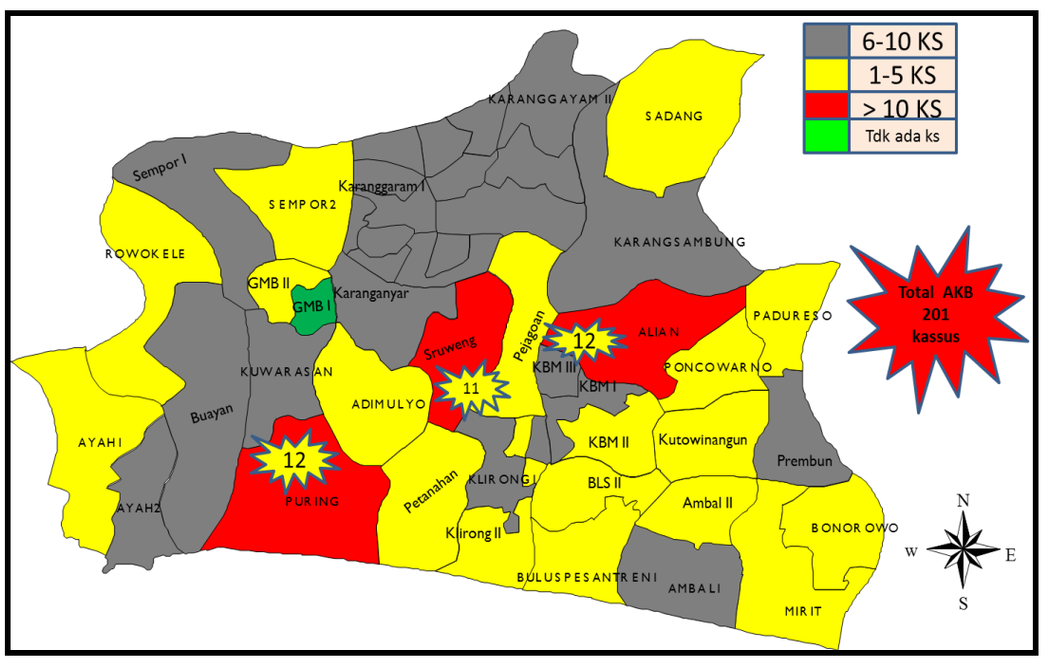
Gambar 2.24
Persebaran Kasus Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Kebumen Tahun 2015
Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung mengalami kenaikan pada 3 tahun terakhir, dari 9,53/10.000 KH pada tahun 2013 menjadi 9,83/10.000 KH pada tahun 2015. Di tingkat provinsi, AKB Kabupaten Kebumen tahun 2015 (201 kasus) berada pada urutan 9 dengan AKB tertinggi. Urutan 5 besar penyebab kematian bayi pada tahun 2015 di antaranya penyebab lain-lain (67 kasus), BBLR (56 kasus), asfiksia (31 kasus), kelainan bawaan (26 kasus) dan diare (6 kasus). Apabila dilihat dari persebarannya, kasus AKB di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015, 3 (tiga) kecamatan yaitu Puring, Sruweng dan Alian menjadi wilayah dengan kasus AKB tertinggi yaitu lebih dari 10 kasus, sedangkan Puskesmas Gombong II menjadi wilayah dengan AKB terendah yaitu 0 kasus.



Gambar 2.25
Peringkat Angka Kematian Bayi (AKB) 35 Kabupaten/Kota
se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016



Gambar 2.26
Persebaran Kasus Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

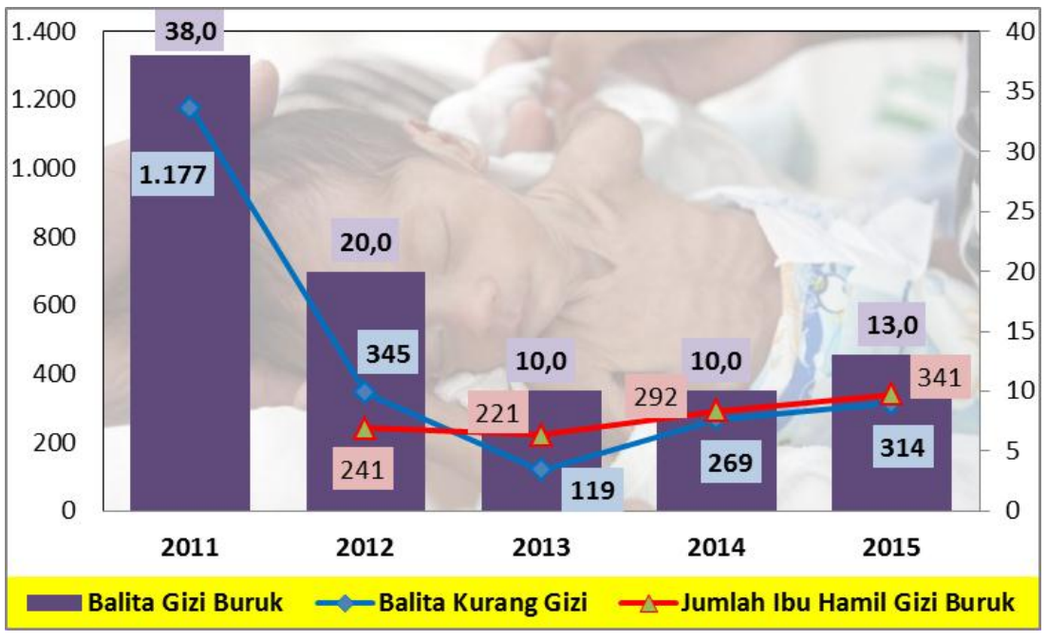
Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

12. Balita Gizi Buruk, Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Gizi Buruk

Kecenderungan harapan penduduk berumur panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Oleh karena itu, angka harapan hidup waktu lahir (eo) memiliki korelasi yang sangat erat dengan angka kematian bayi atau *infan mortality rate* (AKB/IMR). Kemudian angka kematian bayi

dipengaruhi pula oleh pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan neonates dan status gizi bayi (0-11 bulan).

Kondisi derajat kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah kasus balita gizi buruk (BGB), balita kurang gizi (BKG) dan ibu hamil gizi buruk (IHGB). Pada periode 2011-2015, BGB dan BKG cenderung mengalami penurunan, dimana BGB turun dari 38 kasus pada 2011 menjadi 13 kasus pada tahun 2015 dan BKG turun dari 1.177 kasus tahun 2011 menjadi 314 kasus pada 2015. Sementara IHGB cenderung naik dari 241 kasus pada 2012 menjadi 341 kasus pada tahun 2015.



Gambar 2.27
Perkembangan Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk,
Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil Gizi Buruk
di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

13. Kebudayaan

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap benda cagar budaya serta kegiatan olahraga yang diselenggarakan merupakan indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.11
Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Kegiatan Olahraga
di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan	25	30	35	46	51
2.	Kegiatan Olahraga	1	1	1	1	1

Sumber : Profil Daerah Tahun 2014
*Keterangan : **) angka perkiraan*

D. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 4 (empat) fokus layanan, yaitu Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Fokus Layanan Urusan Pilihan, dan Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
   a. Pendidikan

      Pendidikan merupakan salah satu pondasi atau pilar terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing *output* pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berusaha secara optimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal.

      1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

         Pada tahun 2011-2015, angka partisipasi sekolah di Kabupaten Kebumen untuk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) dan 16-18 tahun (SMA/SMK/MA) meningkat. Untuk APS SMP/MTs meningkat dari 89,79% menjadi 101,59%, sedangkan APS SMA/SMK/MA meningkat dari 50,78% menjadi 63,14%. Sedangkan APS untuk usia 7-12 tahun (SD/MI) menurun dari 100,49% menjadi 99,20%. Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Kebumen pada tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.28
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Dikpora, 2015

2) Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Untuk itu, pemerintah wajib mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh masyarakat. Ketersediaan sekolah yang berkualitas dan mampu menampung penduduk usia sekolah juga menjadi faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rasio ketersediaan ruang kelas sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Kebumen selama tahun 2011-2015 relatif meningkat untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Hal ini menunjukkan kecukupan jumlah ruang kelas SD dan SMP untuk menampung penduduk usia sekolah SD dan SMP. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA, rasio ketersediaan ruang kelas sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA cenderung menurun. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian pemerintah daerah dalam peningkatan penyediaan sarana ruang kelas tingkat pendidikan SMA.

Tabel 2.12
Perkembangan Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Jumlah Sekolah					
	Sekolah Dasar	804	804	802	806	806
	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama	119	119	118	111	111
	Sekolah Lanjut Tingkat Atas	92	88	90	92	92
2.	Jumlah Kelas					
	Sekolah Dasar	5.675	5.675	5.834	5.809	5.809
	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama	2.145	2.145	2.105	2.156	2.156
	Sekolah Lanjut Tingkat Atas	1.516	1.516	1.277	1.410	1.410
3.	Penduduk Usia Sekolah					
	7 - 12 Tahun	132.276	130.700	129.520	128.029	126.651
	13 - 15 Tahun	67.228	67.045	66.341	65.118	64.675
	16 - 18 Tahun	60.874	61.187	61.617	61.904	62.276
4.	Rasio Penduduk Usia Sekolah/Kelas					
	Sekolah Dasar	23	23	22	22	22
	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama	31	31	32	30	30
	Sekolah Lanjut Tingkat Atas	40	40	48	44	44

Sumber : Dinas Dikpora, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

3) Angka Putus Sekolah (APtS)

APtS di Kabupaten Kebumen selama periode 2011-2015 cenderung mengalami penurunan untuk semua jenjang pendidikan. Penurunan Angka Putus Sekolah ini disebabkan karena optimalnya upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-program Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten berupa BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BBPD Kabupaten, beasiswa *retievel* untuk anak putus sekolah, beasiswa miskin/beasiswa transisi bagi siswa rawan putus sekolah, dan beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu mempunyai korelasi positif terhadap penurunan Angka Putus Sekolah.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Putus Sekolah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

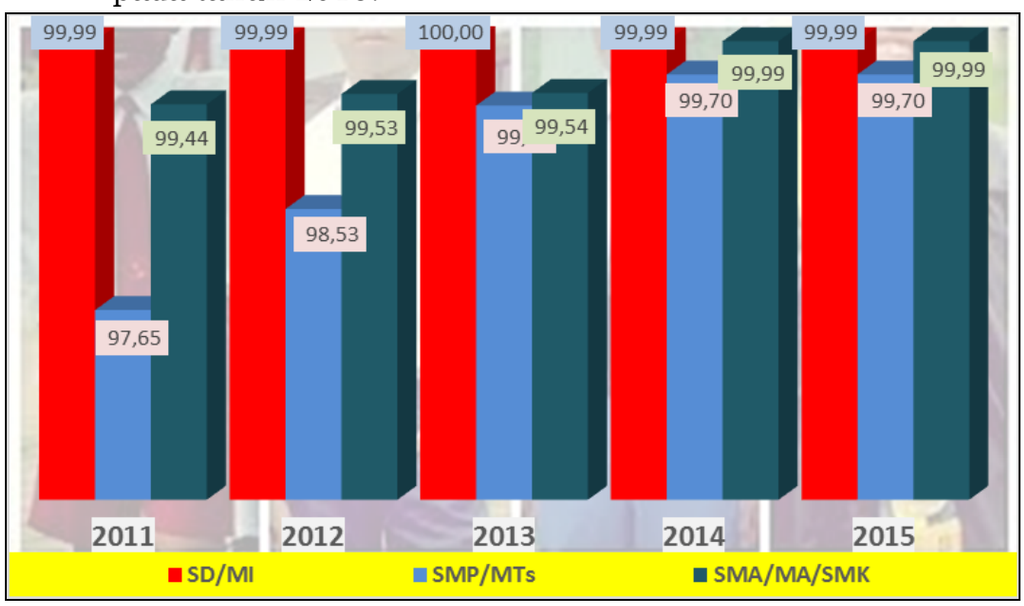
No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	SD/Sederajat	0,12	0,07	0,07	0,09	0,07
2.	SMP/Sederajat	0,45	0,31	0,17	0,29	0,15
3.	SLTA/Sederajat	0,78	0,11	0,24	0,43	0,16

Sumber : Dinas Dikpora, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

4) Angka Kelulusan

Angka kelulusan dan angka melanjutkan merupakan indikator untuk menilai dan mengukur

kualitas SDM pada suatu daerah. Pada periode 2011-2015 angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/SMK/MA cenderung stabil pada angka 99%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs meningkat dari 97,65% pada tahun 2011 menjadi 99,70% pada tahun 2015.

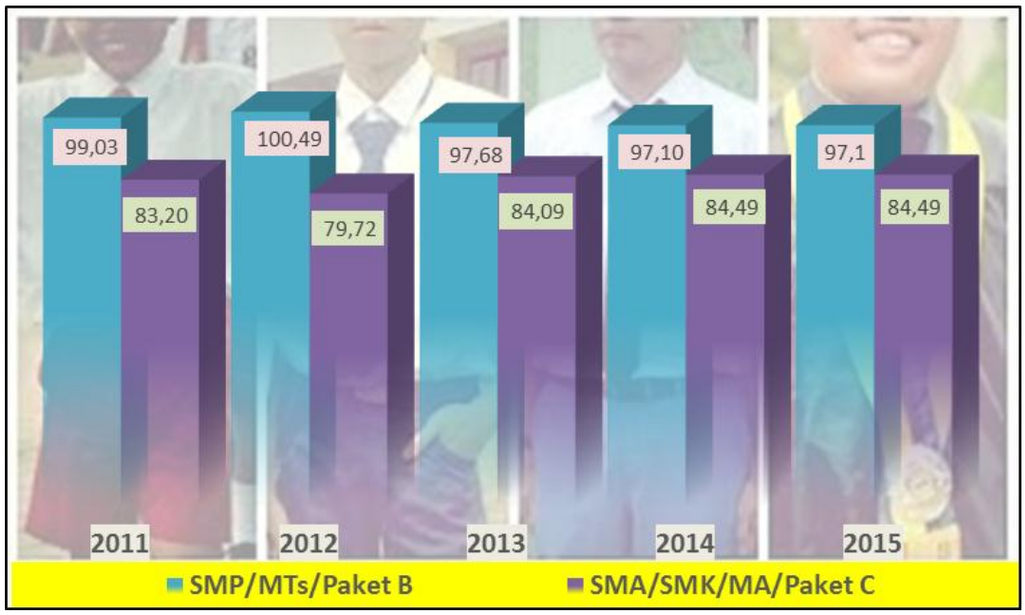


Gambar 2.29
Perkembangan Angka Kelulusan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Dikpora, 2015

5) Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015 untuk jenjang SMP/MTs/Paket B cenderung menurun dari 99,03% menjadi 97,1%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C meningkat dari 83,20% menjadi 84,49%.



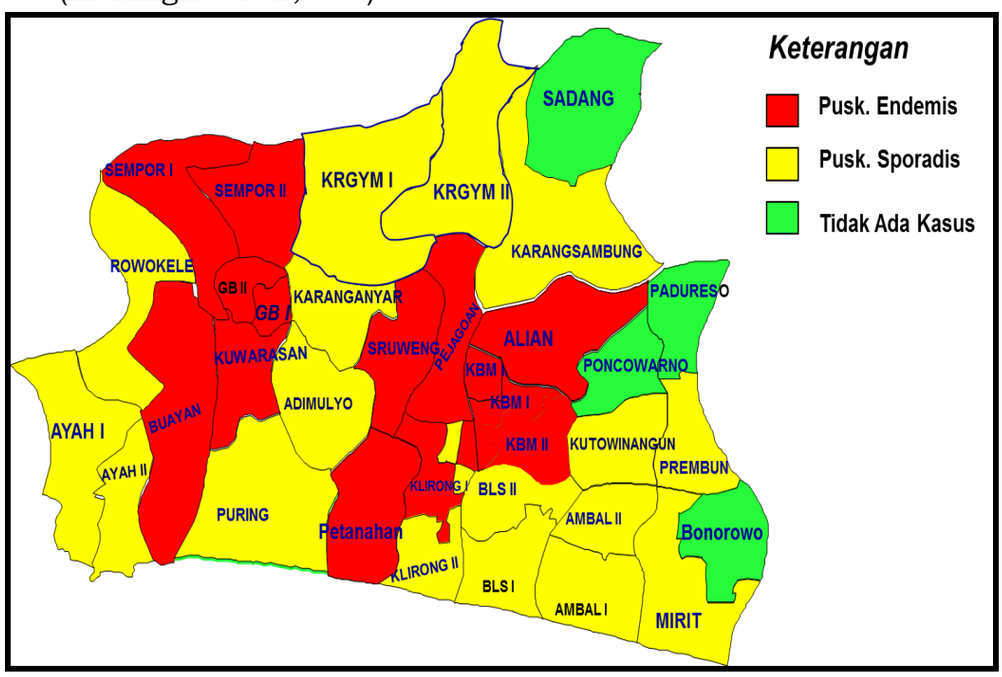
Gambar 2.30
Perkembangan Angka Melanjutkan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Dikpora, 2015

b. Kesehatan

1) Angka Kesakitan DBD

Angka kesakitan penyakit DBD selama tiga tahun terakhir (2013-2015) terus meningkat, dari 8,98/100.000 tahun 2013 menjadi 18,22/100.000 pada tahun 2015 (meningkat 102,89%).



Gambar 2.31
Persebaran Kasus DBD
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

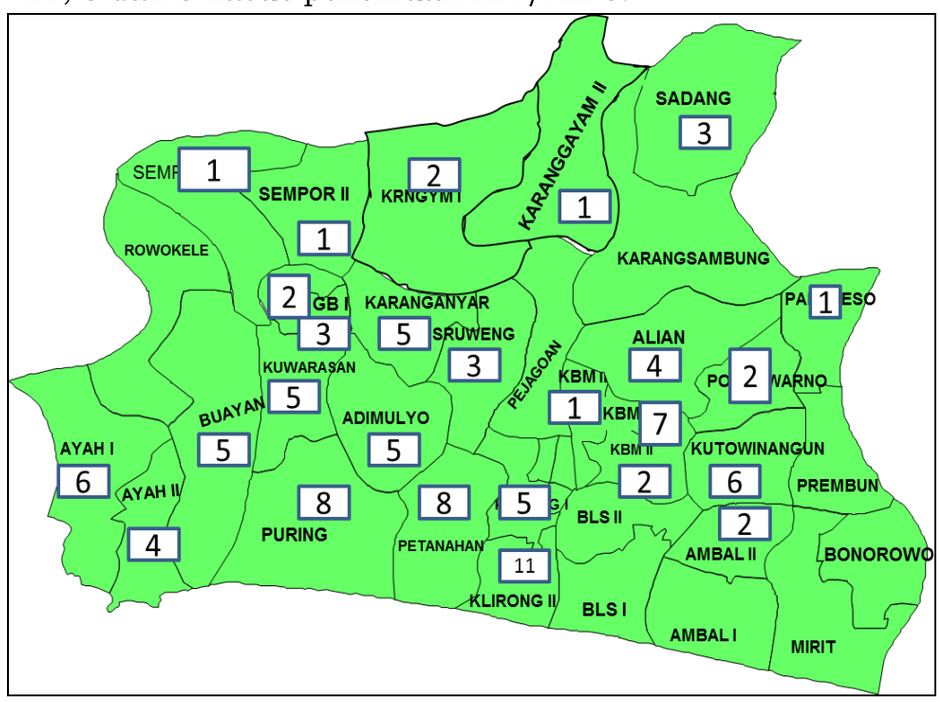
Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Dilihat dari penyebaran dan endemisitas wilayah per puskesmas, kasus DBD di Kabupaten Kebumen selama tahun 2013-2015 terbagi menjadi 3 kawasan yaitu:

a) Kawasan endemis DBD terdiri dari 14 wilayah (Sempor 1, Sempor 2, Buayan, Kuwarasan, Gombong 1, Gombong 2, Sruweng, Petanahan, Klirong 1, Pejagoan, Kebumen 1, Kebumen 2, Kebumen, dan Alian);
b) Kawasan sporadis DBD terdiri dari 17 wilayah (Ayah 1, Ayah 2, Rowokele, Puring, Adimulyo, Karanganyar, Karanggayam 1, Karanggayam 2, Karangsambung, Klirong 2, Buluspesantren 1, Buluspesantren 2, Ambal 1, Ambal 2, Mirit, Kutowinangun, dan Prembun); dan
c) Kawasan tidak ada kasus DBD terdiri 4 wilayah (Sadang, Padureso, Poncowarno dan Bonorowo).

2) Angka Penemuan HIV/AIDS

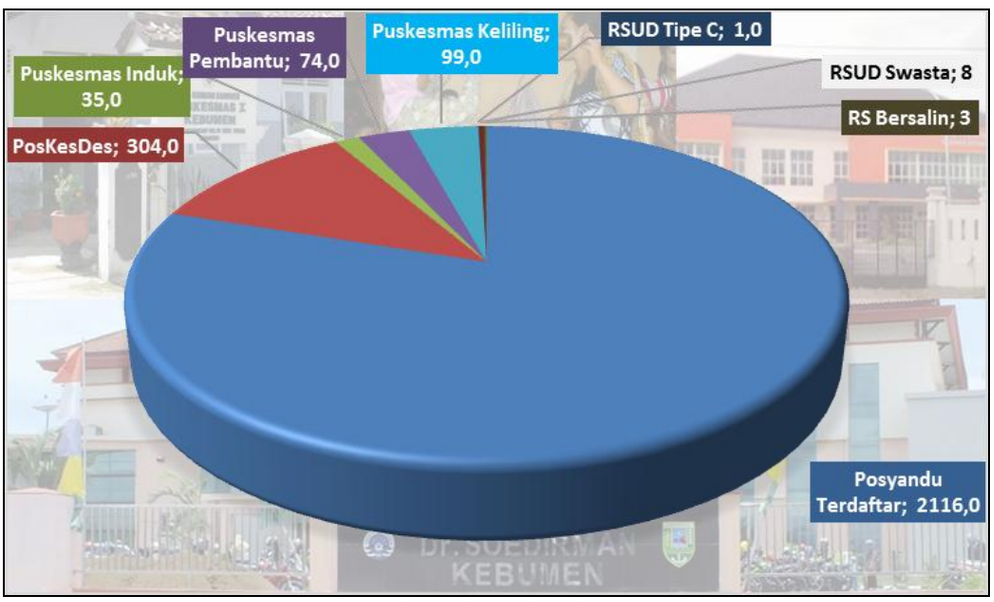
Angka penemuan penderita HIV/AIDS selama tahun 2013-2015 mengalami peningkatan dari 92 kasus menjadi 104 kasus. Wilayah dengan penemuan penderita HIV/AIDS tertinggi pada tahun 2015 adalah Puskesmas Klirong II, Puring dan Petanahan, masing-masing dengan 11, 8 dan 8 kasus penemuan HIV/AIDS.



Gambar 2.32
Persebaran Penemuan Kasus HIV/AIDS
Kabupaten Kebumen Tahun 2015
Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

3) Ketersediaan Sarana dan Tenaga Kesehatan

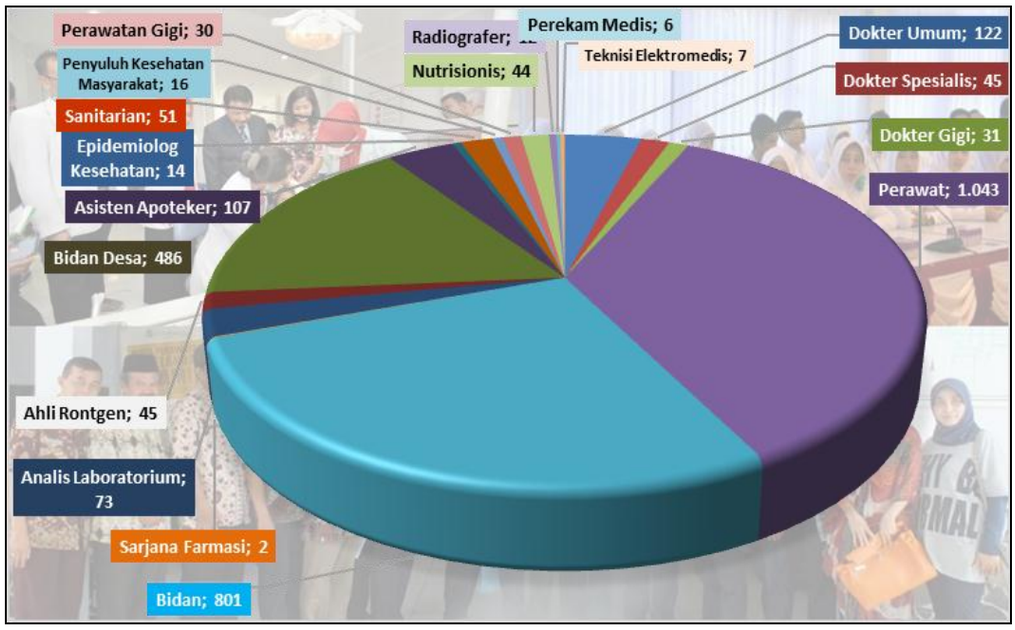
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi kondisi dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Sarana kesehatan sangat mutlak diperlukan agar pelayanan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik. Agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat berfungsi secara maksimal, pemerintah menyediakan sarana kesehatan dasar sampai dengan lanjutan melalui fasilitas posyandu, puskesmas, dan juga rumah sakit. Hal ini untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2015 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.33
Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan
di Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Di samping sarana dan prasarana penunjang, derajat kesehatan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang melayani masyarakat. Semakin cukup dan berkualitas tenaga kesehatan yang tersedia di sebuah daerah, semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan, maka semakin tinggi pula harapan akan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.34
Ketersediaan Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Sumber : diolah dari berbagai sumber

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Ketersediaan Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan faktor utama pendukung kelancaran lalu lintas di darat. Pembangunan transportasi jalan merupakan bagian penting dalam kegiatan pembangunan yang memiliki nilai ekonomi, sosial budaya, dan strategis serta diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jaringan jalan merupakan bagian dari sarana terpenting dalam sistem transportasi. Jangkauan pelayanan jalan di Kabupaten Kebumen saat ini terbatas pada wilayah-wilayah yang secara alami berkembang dengan pesat. Kondisi jalan setiap tahunnya harus terus ditingkatkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya untuk mengimbangi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2015 terdiri dari jalan nasional sepanjang 54,19 km, jalan provinsi sepanjang 39 km, jalan kabupaten sepanjang 975,15 km dan panjang jalan desa 1.236,94 km.

Tabel 2.14
Ketersediaan Jalan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015 (dalam km)

No.	Status Jalan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jalan Nasional	60,58	60,58	54,19	54,19	54,19

No.	Status Jalan	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Jalan Provinsi	30,09	30,09	30,09	30,09	30,09
3.	Jalan Kabupaten	615,200	615,200	958,08	958,08	975,15
4.	Jalan Desa	Na	1.592,08	1.254,01	1.254,01	1.236,94

Sumber : DPU, 2016

2) Ketersediaan Infrastruktur Irigasi

Ketersediaan jaringan irigasi di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2015 cukup memadai. Jaringan irigasi teknis primer sepanjang 91.234 meter, sekunder 283.767 meter dan tersier sepanjang 15.650 meter. Jumlah tersebut mampu melayani areal irigasi seluas 40.338 hektar, terbagi menjadi tiga kewenangan pengelolaan yaitu Pusat, Kabupaten dan Desa.

Daerah irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat meliputi areal 27.880 hektar, dengan panjang saluran Induk dan sekunder 375,42 kilometer, terdiri dari 8 (delapan) daerah irigasi yang meliputi Daerah Irigasi Sempor dan Wadaslintang (Kedungsamak, Kaligending, Pesucen, Kuwarasan, Wadaslintang Barat, dan Bedegolan). Sedangkan kewenangan Kabupaten Kebumen meliputi areal 12.458 hektar. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.15
Ketersediaan Jaringan Irigasi
di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 (dalam ha)

No.	Jenis Irigasi	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Kewenangan Kabupaten	8.621	8.621	8.621	8.621	12.458
2	Kewenangan Pusat	27.880	27.880	27.880	27.880	27.880
	Jumlah	36.501	36.501	36.501	36.501	40.338

Sumber : Dinas SDA-ESDM, Tahun 2016
*Keterangan : *) Data sementara*

3) Penyediaan Air Baku

Ketersediaan air baku mutlak diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga kelangsungan hidup dengan baik. Kekurangan air pada suatu daerah dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan juga gangguan pada kesehatan lingkungan.

Selama ini kebutuhan air bersih untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Kebumen diambil dari air baku yang diolah olah PDAM, dengan kemampuan penyediaan air baku sebesar 300 liter/detik. Sampai dengan tahun 2015, sumber air baku yang dipakai oleh PDAM tersebar di beberapa lokasi antara lain:

a) Waduk Sempor dengan volume 120 l/det;
b) Sungai Luk Ulo dengan volume 50 l/det;
c) Mata Air Mandayana dengan volume 20 l/det;
d) Sungai Bedegolan dengan volume 40 l/det;
e) Mata Air Kaliwinong dengan volume 20 l/det;
f) Mata air Banyumudal (Buayan) dengan volume 30 l/det; dan
g) Sungai Kedung Bener dengan volume 20 l/det.

Kebutuhan untuk memenuhi pelanggan sebesar 380 liter/detik sehingga masih ada sisa 20 liter/detik. Angka ini mampu menyediakan air sebanyak 1.728.000 liter per hari atau 10.368.000 liter per minggu.

4) Pelayanan Air Minum

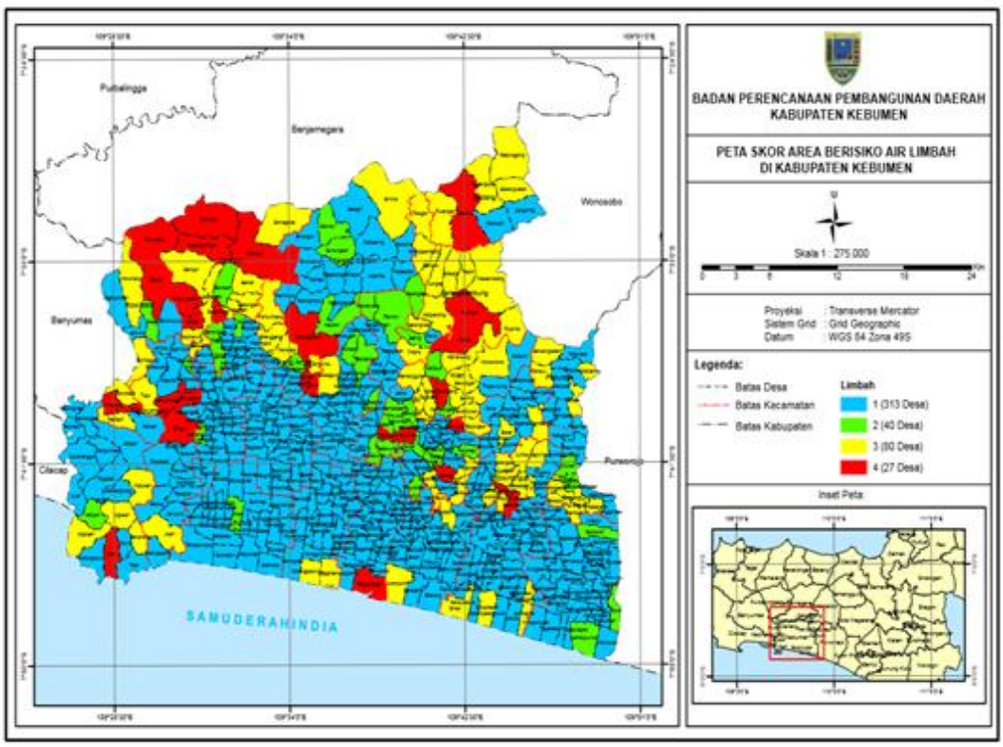
Berdasarkan pemutakhiran data SSK Tahun 2015, sampai dengan tahun 2015, total pelayanan air minum di Kabupaten Kebumen sebesar 63,51%, dengan perincian sebagai berikut:

a) pelayanan perpipaan PDAM, dengan SR sebanyak 22.539 pada akhir 2015. Jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 1.181.006 jiwa, sehingga pelayanan air minum perpipaan PDAM sebesar 11,45%;
b) pelayanan perpipaan non PDAM, dengan jumlah KK terkoneksi perpipaan non PDAM sebanyak 90.423 KK, sedangkan jumlah KK tahun 2015 sebesar 316.159, sehingga pelayanan air minum perpipaan non PDAM sebesar 28,60%; dan
c) pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan dimana jumlah KK dengan akses air minum non perpipaan terlindungi sebanyak 74.178 KK, atau sebesar 23,46%.

5) Sanitasi

a) Air Limbah Domestik

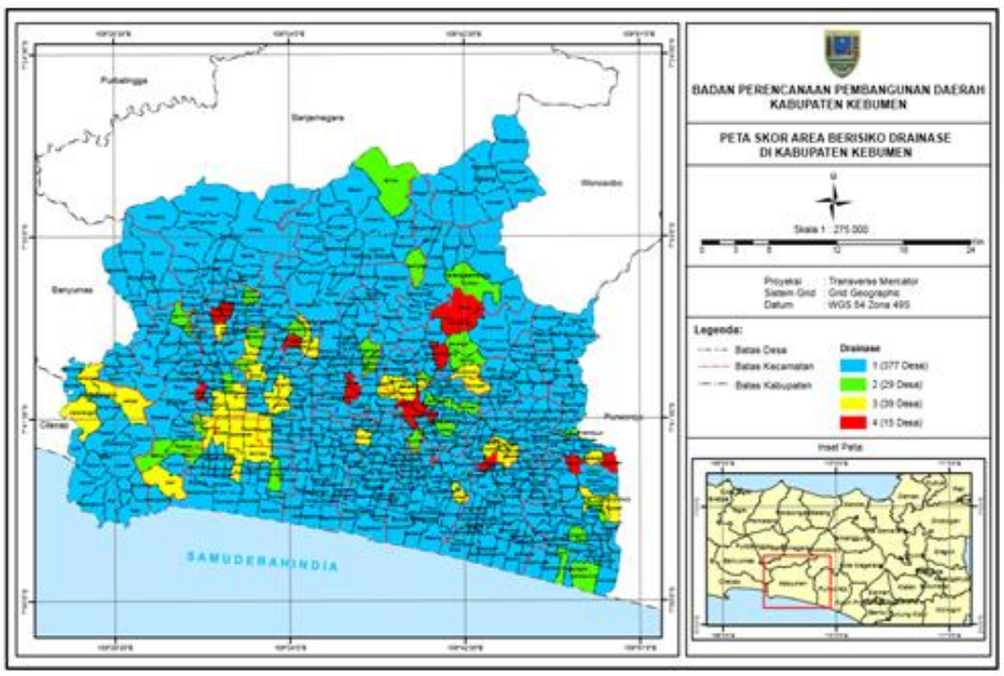
Pada tahun 2015, berdasarkan pemutakhiran data SSK, area beresiko air limbah di Kabupaten Kebumen sebanyak 27 desa/kelurahan. Permasalahan utama pada sektor air limbah domestik adalah masih cukup tingginya perilaku buang air besar sembarangan dengan persentase mencapai 13,4% (39.885 KK) dan akses terhadap jamban yang tidak layak masih mencapai 21,5% (64.263 KK). Prasarana instalasi pembuangan limbah terpadu (IPLT) sudah ada 1 (satu) unit di Kaligending, namun belum berfungsi maksimal.



Gambar 2.35
Peta Area Beresiko Air Limbah
Sumber : Buku SSK, 2015

b) Drainase Lingkungan

Pada tahun 2015, berdasarkan pemutakhiran data SSK, area beresiko drainase di Kabupaten Kebumen sebanyak 15 desa/kelurahan.



Gambar 2.36
Peta Area Beresiko Drainase
Sumber : Buku SSK, 2015

Permasalahan utama pada sektor drainase lingkungan adalah belum ada selokan sehingga grey water dan air hujan masih masuk ke comberan yang mengakibatkan genangan serta kesadaran masyarakat masih rendah/pembuangan dari kamar mandi, wastafel, air hujan dan industri rumah tangga tercampur jadi satu sehingga mengakibatkan polusi.

6) Penataan Ruang

Kinerja penataan ruang dapat dilihat dari jumlah pengajuan IMB selama tahun 2011-2015 yang terus mengalami peningkatan dari 493 izin pada tahun 2011 menjadi 750 izin pada tahun 2015.

Tabel 2.16
Perkembangan Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
Pengajuan IMB per tahun	493	524	635	750	750

Sumber : DPU, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kriteria rumah layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan konstruksi, serta aspek legalitas kepemilikan rumah, yaitu antara lain lantai tidak lembab, pencahayaan cukup (sinar matahari dapat masuk rumah), tidak bocor, tahan gempa (skala tertentu) dan mempunyai bukti pertanahan. Selama tahun 2011-2015, 14.248 RTLH telah mendapat penanganan, sehingga pada tahun 2015 jumlah rumah layak huni sebanyak 293.020 unit atau sebesar 100% dari jumlah rumah yang ada, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Kondisi Rumah*	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Rumah Tidak Layak Huni					
1.	Jumlah RTLH	14.248	8.012	4.774	2.505	0
2.	Rasio RLH (100–rasio RTLH) (%)	95,14	97,28	98,38	99,15	100,00
B.	Permukiman Kumuh					
1.	Luas Permukiman Kumuh (Ha)	Na	Na	Na	213,62	213,62

Sumber : Bapermasdes, 2016
*Keterangan : *) Data base jumlah rumah sasaran RPJMD Tahun 2010-2015*
Data base jumlah rumah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi sebanyak 306.885 unit dengan RTLH sejumlah 26.860 unit

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi keamanan dan ketertiban berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat.

Tahun 2015, dilihat dari aspek ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Kebumen merupakan tahun yang cukup strategis dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. Secara umum kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 tetap kondusif. Konflik ataupun pertikaian antar pendukung calon Kepala Daerah yang dikhawatirkan rentan terjadi, tidak terjadi.

Sedangkan kondisi ketertiban dan kemanan Kabupaten Kebumen secara umum pada tahun 2015 dapat dilihat dari jumlah kasus kriminalitas yang terjadi mencapai sejumlah 132 atau menurun dari tahun 2014 sejumlah 157 kasus. Sedangkan jumlah sarana prasarana keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2015 terdiri dari 8 unit pos polisi, 6 unit mobil pemadam kebakaran, 4 unit pos pemadam kebakaran, dan 4.044 pos siskamling, dengan jumlah tenaga keamanan 894 polisi, 132 aparat pamong praja, 9.583 aparat linmas dan 25 orang polisi hutan.

Kerjasama dalam rangka Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini meliputi:

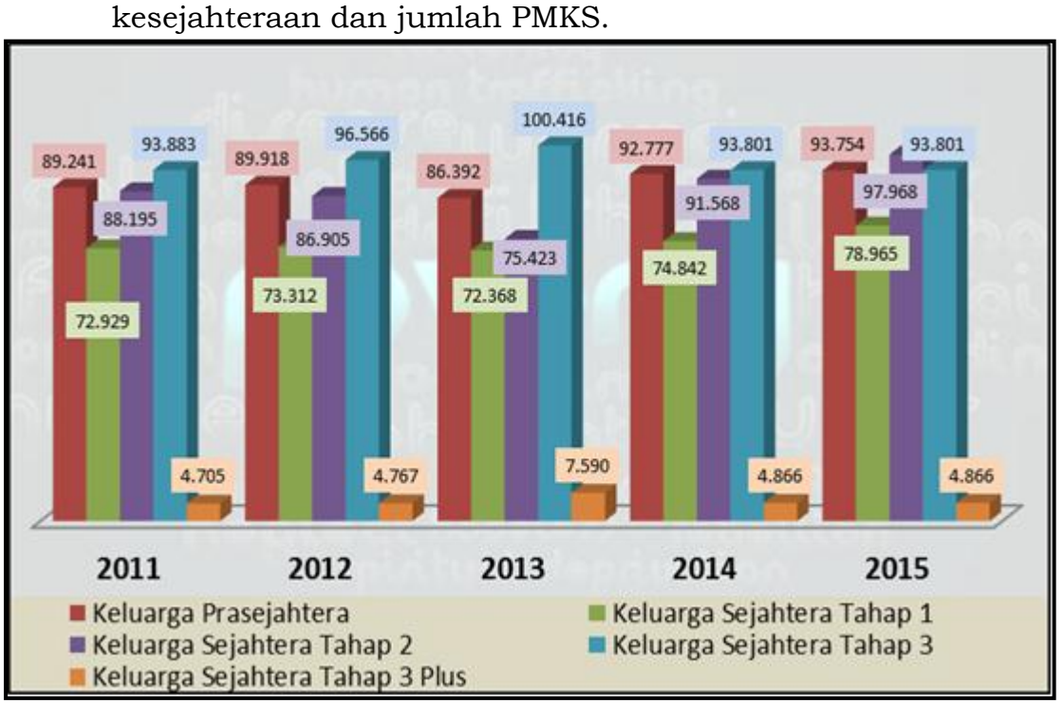
1) penyelenggaraan/pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat;

2) penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
4) pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
5) penilaian eskalasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan.

Sementara itu upaya yang dilakukan di bidang keamanan yang berkaitan dengan tindak pidana umum melalui upaya represif dan preventif oleh pihak Kepolisian untuk membantu menciptakan rasa tenteram dan tertib di masyarakat, antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pengamanan swakarsa dengan menggiatkan siskamling.

f. Sosial

Kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2015 dapat dilihat dari jumlah KK menurut tingkat kesejahteraan dan jumlah PMKS.

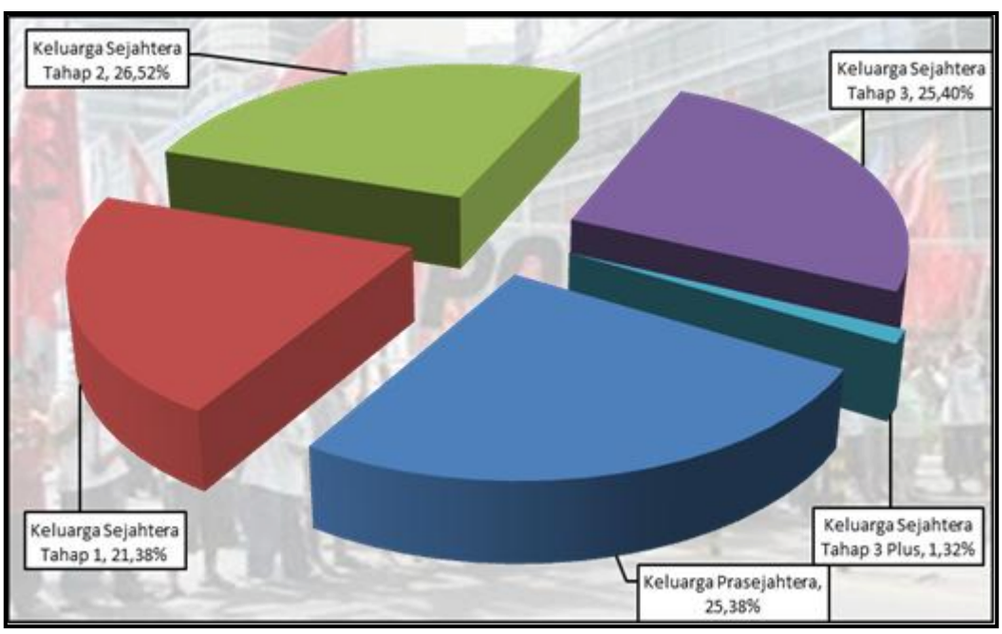


Gambar 2.37
Tingkat Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Sumber : Badan PP dan KB, 2015

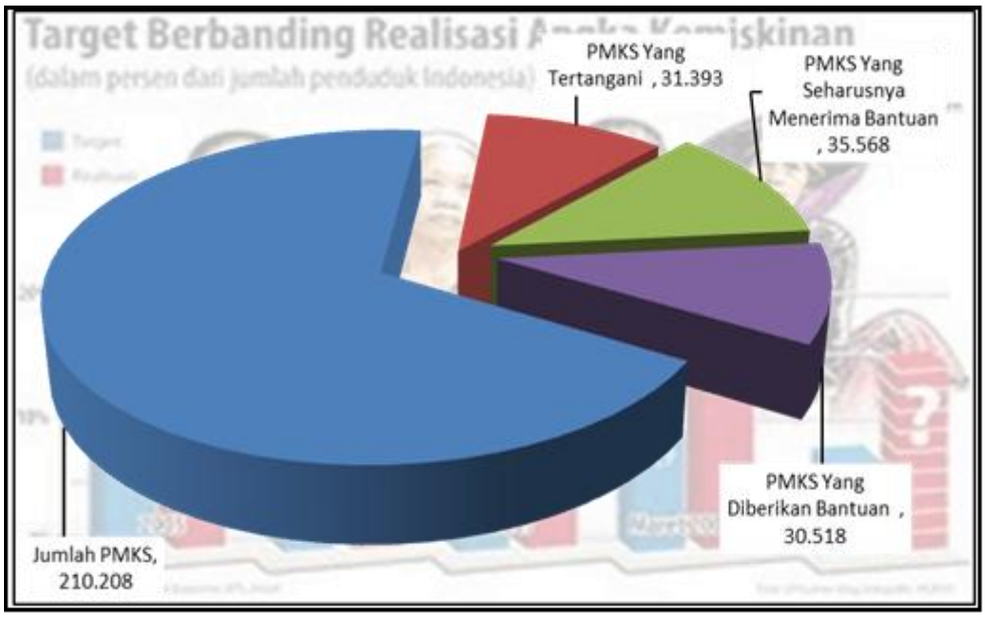
Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial budaya, bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu. Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tenteram, bahagia dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan sosial diusahakan untuk mencegah, memberikan solusi dan memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai kumpulan individu.

Jumlah keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera 1) selama periode 2011-2015 cenderung meningkat dari 162.170 KK (46,47%) tahun 2011 menjadi 172.719 KK (46,76%) pada tahun 2015. Sedangkan jumlah keluarga yang berada di atas garis kemiskinan (keluarga sejahtera 2, 3 dan 3 plus) meskipun secara jumlah meningkat dari 186.783 KK pada 2011 menjadi 196.635 KK tahun 2015, namun secara persentase menurun dari 53,53% tahun 2011 menjadi 53,24% pada tahun 2015.



Gambar 2.38
Persentase Tingkat Kesejahteraan Menurut Kepala Keluarga
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Sumber : Badan PP dan KB, 2015



Gambar 2.39
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Sumber : Dinas Nakertransos, 2015

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada dan ditangani. Semakin banyak jumlah PMKS semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pada tahun 2015, jumlah PMKS di Kabupaten sebanyak 210.208 orang dengan jumlah yang tertangani sebanyak 31.393 orang, yang diberikan bantuan sebanyak 30.518 orang dari 35.568 orang yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.18
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah sarana sosial					
	a. Panti Asuhan	16	18	18	17	17
	b. Panti Bina Netra	0	1	1	1	1
	c. Panti Bina Grahita	0	1	1	1	1
	d. Panti Bina Karya	0	1	1	1	1
	e. Panti Bina Rungu Wicara	0	0	1	2	2
	f. Panti Rehabilitasi	1	0	0	0	0
2.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial	2.269	Na	246	1.410	1.410
3.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2.499	Na	2.566	1.539	1.539

Sumber : Dinas Nakertransos, 2016

2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Untuk bidang ketenagakerjaan, capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Secara umum jumlah pencari kerja terus mengalami peningkatan, namun hal ini dapat diimbangi dengan jumlah lowongan yang juga terus meningkat. Untuk jumlah tenaga kerja yang terserap kategori AKAL, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, ini menunjukkan keberhasilan daerah untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tenaga kerja yang terserap dalam kategori AKAD juga sangat signifikan peningkatannya, hal ini menunjukkan secara umum terjadi peningkatan peluang kerja dan minat untuk bekerja di dalam negeri. Untuk pencari kerja yang terserap dalam kategori AKAN, sejak tahun 2014 menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini cukup melegakan, mengingat tingginya risiko yang harus ditanggung pekerja yang bekerja di luar negeri.

Tabel 2.19
Perkembangan Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja
di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Pencari Kerja	Lowongan	Terserap		
				AKAL	AKAD	AKAN
1.	2011	14.203	2.882	362	1.415	1.131
2.	2012	15.591	4.186	464	791	3.931
3.	2013	16.371	1.214	431	2.501	3.411
4.	2014	14.428	9.471	2.785	3.691	2.156
5.	2015*	15.512	10.242	3.548	5.228	1.391

Sumber : Dinas Nakertransos, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Potensi kualitas sumber daya perempuan dan kemampuan untuk berperan dalam masyarakat sama dengan laki-laki. Namun kenyataannya, masih banyak dijumpai status dan peran perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Hal itu bisa dilihat dari masih sedikitnya jumlah perempuan yang menempati posisi penting di pemerintahan, dalam bidang legislatif maupun yudikatif, dalam perannya secara umum di dunia usaha/swasta dan masyarakat. Perempuan yang menduduki posisi penting dan bekerja di sektor publik di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut. Meskipun untuk tabel tersebut bukan semua merupakan penduduk Kebumen, namun paling tidak masih terlihat minoritas peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.20
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	1,59	0,65	3,41	4,07	4,98
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	4,02	6,40	4,20	4,31	4,4
3.	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	94	86	132	118	120
4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	94	86	132	122	120

Sumber : Badan PP dan KB, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

c. Pangan

Capaian kinerja urusan pangan di bidang ketersediaan regulasi ketahanan pangan menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Daerah telah melakukan cukup upaya untuk memastikan bahwa bidang ketahanan pangan memperoleh perhatian dengan disediakannya regulasi daerah. Hal ini ternyata tidak terlalu berkorelasi terhadap capaian kinerja ketersediaan pangan utama per penduduk yang menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Peningkatan cukup signifikan terjadi di tahun 2012, namun tahun berikutnya kembali mengalami penurunan yang relatif drastis. Nampaknya, berbagai variabel di luar variabel regulasi lebih dominan mempengaruhi capaian ketersediaan pangan utama per penduduk. Penurunan drastis di tahun 2013 baru dapat dipulihkan ke kondisi semula pada tahun 2015.

Tabel 2.21
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan pangan utama per penduduk (%)	217,38	258,11	197,29	209,01	220,73

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

d. Pertanahan

Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari data persentase luas lahan bersertifikat, dimana pada tahun 2011-2015 jumlahnya terus meningkat dari 22% pada tahun 2011 menjadi 22,91% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak milik tanah mereka.

Tabel 2.22
Perkembangan Luas Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
Persentase luas lahan bersertifikat	22	22,02	22,15	22,83	22,91

Sumber : Bagian Tapem Setda, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

e. Lingkungan Hidup

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Kabupaten Kebumen terus berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tabel 2.23
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten KebumenTahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase penanganan sampah	45,48	41,18	43,04	43,54	42,40
2.	Persentase penduduk berakses air minum	69,96	73,29	76,63	79,96	83,30

Sumber : DPU, 2016

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menitikberatkan pada kegiatan Implementasi SIAK (*updating* dan pemeliharaan) pengembangan data base kependudukan, monitoring dan pelaporan kependudukan, penyusunan profil kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil.

Tabel 2.24
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten KebumenTahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Cakupan Akte Kelahiran	Na	Na	Na	Na	90,33
2.	Persentase Cakupan Akte Kematian	Na	Na	Na	Na	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diupayakan melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain lomba desa, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), stimulan Bantuan Semen, stimulan Lantainisasi, stimulan Dana Gotong Royong Masyarakat, stimulan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/P2MKM dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Berbagai bantuan stimulan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat sejauh ini telah mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menumbuhkan swadaya masyarakat yang cukup besar.

Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa juga dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan. Melalui penguatan kelembagaan ini diharapkan terwujudnya sinergi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya kualitas pengurus lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan. Upaya pembinaan terhadap lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya.

Tabel 2.25
Perkembangan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Orkesmas Berdasarkan Profesi	144	144	144	110	80
2.	Orkesmas Berdasarkan Agama	50	50	50	50	50
3.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	49	49	49	49	44

Sumber : SIPPD, 2016

Salah satu permasalahan atau isu strategis dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah isu mengenai penanggulangan kemiskinan, yang sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat terutama di perdesaan. Pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan menggunakan dasar pijakan kebijakan nasional yaitu pemenuhan kebutuhan dasar individu ataupun masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, baik secara individu (jiwa penduduk miskin), maupun kelompok (rumah tangga sasaran).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun dengan dasar hukum yang pasti dan sudah ada saat ini. Secara operasional arah penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam empat kebijakan dan program, yaitu perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perlindungan sosial.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kebumen, telah dilakukan beberapa langkah dan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Desa agar makin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang makin luas, efektif dan efisien sesuai dengan otonomi desa dalam rangka memperkuat dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya memperkuat pelaksanaan otonomi desa meliputi pembuatan regulasi, arahan dan pedoman, pemberian fasilitasi, pemberian bimbingan serta monitoring dan evaluasi.

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain melalui:

1) peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dan peningkatan kesejahteraan perangkat desa melalui pemberian bantuan keuangan kepada desa yang meliputi pemberian Dana Desa (APBN), Alokasi Desa Dana, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten;
2) fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dihadapi oleh desa;
3) pemberian fasilitasi dalam rangka penyusunan regulasi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Keputusan

Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, serta Pemberian fasilitasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa;

4) pemberian Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), pemberian Penghasilan bagi Aparat Desa Karang Kopek dan Pemberian Uang Kehormatan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
5) pemberian sewa-sewa Tanah Kas Desa dan eks Bengkok Kelurahan yang dipakai oleh Pemerintah Daerah dan sebagainya.

Peningkatan pendapatan desa diperlukan adanya optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, aset desa, seperti sewa tanah kas desa, gedung pertemuan desa, pasar desa dan lain-lain. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah antara lain pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan optimalisasi pendayagunaan aset desa.

Sementara itu, beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah antara lain fasilitasi rekruitmen aparatur Pemerintah Desa, baik dalam pemilihan maupun pengisian aparatur Pemerintah Desa. Sedangkan dalam pendampingan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti penyusunan produk hukum desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan administrasi desa, yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan SDM aparatur Pemerintah Desa. Fasilitasi penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan adanya peran aktif Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pemerintahan Desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Program ini secara nyata telah mampu menumbuhkan kesadaran bagi keluarga-keluarga di Kabupaten Kebumen untuk menerapkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). NKKBS bahkan telah menjadi bagian dari tata kehidupan di dalam masyarakat.

Tabel 2.26
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,6	3,6	3,6	2,7	2,7

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
2.	Jumlah akseptor KB	164.431	166.719	168.824	155.892	155.134
	a. Laki-Laki	4.247	4.070	4.267	4.100	5.115
	b. Perempuan	160.184	162.649	164.557	151.792	150.019
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	213.911	213.523	212.291	209.517	214.553
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	164.431	166.719	168.824	155.892	155.134
5.	Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	72.929	73.312	73.317	72.368	72.055

Sumber : Badan PP dan KB, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

Penyelenggaraan program KB selain untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Progam kegiatan yang selama ini dilaksanakan utamanya dalam pelayanan KB dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan kontrasepsi, kemudahan dalam pelayanan informasi, advokasi serta pendampingan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi.

Keberhasilan program KB sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program KB. Dengan kata lain, peran aktif masyarakat sangat menentukan kesuksesan program KB di lapangan. Wujud dari peran aktif masyarakat ini adalah terlibatnya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam berbagai kegiatan KB melalui 6 (enam) peran bhakti institusi.

i. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Kebumen terutama transportasi darat dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Sebagai salah satu bidang pelayanan dasar, Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.27
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pengajuan perpanjangan Izin trayek	105	135	124	124	124

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum (buah)	1.542	1.844	2.156	2.156	2.156
3.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	38.000 - 48.500	38.000 - 48.500	38.000 - 48.500	38.000 - 48.500	38.000 - 48.500
4.	Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi	114	179 AKAP 13 AJAP	179 AKAP 13 AJAP	179 AKAP 19 AJAP	179 AKAP 19 AJAP
5.	Terminal					
	a. Tipe A	1	1	1	1	1
	b. Tipe B	1	1	1	1	1
	c. Tipe C	3	3	3	3	3
	d. Pendukung	2	2	2	2	2
6.	Trayek	59	59	59	59	59

Sumber : Dishubkominfo, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat dan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, ketertiban lalu lintas dan angkutan serta untuk memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi.

Pemasangan rambu-rambu untuk sistem keamanan jalan sudah berjalan dengan baik. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta rambu pengaman dilakukan di berbagai jalur jalan utama. Pemasangan rambu-rambu perlu dilakukan untuk memberikan informasi dini kepada pengguna jalan pada titik-titik rawan kecelakaan.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas bertujuan mewujudkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan penyediaan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman, APILL dan *warning lamp.* Upaya meningkatkan jumlah fasilitas kelengkapan jalan dilakukan juga dalam rangka untuk mendukung manajemen dan rekayasa lalu lintas guna menjamin kelancaran arus lalu lintas orang dan barang secara efektif dan efisien. Namun demikian karena kondisi wilayah Kebumen yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan bahkan pegunungan dan memiliki banyak persimpangan jalan, maka kebutuhan akan kelengkapan jalan terutama rambu jalan dan pagar pengaman (*guardraill*) masih banyak lokasi/tempat yang belum terpenuhi.

j. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini sangat penting dan strategis dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/ M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dengan pengembangan jaringan informasi dan pengendalian terhadap prasarana komunikasi. Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: pemberian fasilitasi perizinan berdasarkan verifikasi titik koordinat bakal calon lokasi menara telekomunikasi oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di lapangan, dan pemungutan retribusi menara telekomunikasi. Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data menara dan memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 2.28
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Jumlah jaringan komunikasi	9	9	10	10	10
2.	Jumlah zona layanan komunikasi	54	55	55	55	97
3.	Jumlah surat kabar nasional dan lokal	7	8	8	8	8
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	9	9	9	9	9
5.	Website milik Pemda	1	1	1	1	1
6.	Pameran/expo	1	1	1	1	1

Sumber : Dishubkominfo, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

k. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kinerja daerah di bidang Koperasi menunjukkan progres yang relatif positif. Indikator berupa Persentase jumlah koperasi aktif terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat dari posisi 62,89% di tahun 2011, persentase koperasi aktif mampu meningkat mejadi 84% di

tahun 2015. Peningkatan yang terjadi adalah lebih dari 20% selama kurun waktu 5 tahun.

Kinerja daerah di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum sepesat di bidang perkoperasian. Pada tahun 2012 tercatat jumlah UMKM sebanyak 42.784 orang, dan di tahun 2015 menjadi sebanyak 43.132 orang. Artinya, selama kurun waktu 4 tahun jumlah UMKM hanya meningkat sebanyak sebanyak 348 orang atau 0,8 %. Variabel yang mempengaruhi kondisi ini memang bermacam-macam, terutama adalah fluktuasi kondisi perekonomian yang mempengaruhi kondisi sektor real secara umum, seperti fluktuasi mata uang, harga bahan baku dan bahan penunjang, permintaan dan daya beli masyarakat.

Tabel 2.29
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Koperasi,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Koperasi	462	488	504	516	528
2	Persentase Koperasi Aktif	62,89	68,64	76,23	77,26	84,00
3	Jumlah UMKM	472	42.784	42.990	43.134	43.132

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2016

l. Penanaman Modal

Kinerja di urusan penanaman modal secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Sektor yang paling menonjol adalah bidang perdagangan, hotel dan restoran, yang didampingi oleh sektor konstruksi dan penyediaan listrik, gas dan air bersih. Sektor pertanian, walaupun ditengarai memiliki nilai tambah yang relatif rendah, namun ternyata masih cukup diminati penanam modal dalam negeri. Selanjutnya berturut turut adalah sektor jasa-jasa, industri pengolahan dan angkutan. Penanaman modal di sektor pertambangan dan energi tidak lagi nampak realisasinya sejak tahun 2012.

Tabel 2.30
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

No.	Tingkat investasi PMDN	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertanian	7.106,00	2.186.932	3.811.000	10.000.000	11.901.947
2.	Pertambangan& energi	13.584,00	-	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	3.401,00	1.755,00	3.835.000	4.268.230	6.184.030
4.	Listrik, gas dan air bersih	18.886,00	7.627.217	-	18.045.000	18.975.189
5.	Bangunan	-	-	-	-	-
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	-	31.571.233	63.732.01	47.443.062	79.309.067

No.	Tingkat investasi PMDN	2011	2012	2013	2014	2015*
7.	Pengangkutan dan komunikasi	3.377,00	2.402.000	350.000	2.525.000	2.698.312
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-
9.	Konstruksi	-	4.972.000	7.446.607	16.646.537	20.369.841
10.	Jasa-jasa	-	1.380.000	5.921.873	3.302.484	6.263.421
	Jumlah	46.354,00	51.894.383	85.096.490	102.220.313	145.701.805

Sumber : BPMPT, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

m. Kepemudaan dan Olahraga

Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Organisasi pemuda di Kabupaten Kebumen antara lain KNPI, Organisasi Mahasiswa, Pramuka, organisasi kesenian dan organisasi olah raga.

Di Kabupatren Kebumen juga terdapat berbagai organisasi olahraga dari berbagai cabang olah raga yang telah ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Organisasi olah raga ini berpartisifasi aktif dalam event-event yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, bahkan juga mampu mewakili kabupaten pada tingkat provinsi. Adapun beberapa cabang olahraga tersebut terdapat di 26 kecamatan yang berperan melaksanakan pembinaan pada masing-masing cabang olahraha untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi.

Tabel 2.31
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
	Kepemudaan					
1.	Jumlah Organisasi Kepemudaan	71	68	72	86	86
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	3	5	5
	Olahraga					
1.	Jumlah Klub Olahraga	71	68	72	86	86
2.	Lapangan Olah Raga	830	1.030	1.030	1.030	1.030
	Sepakbola	121	140	115	115	115
	Bola Voli	189	289	166	166	166
	Bola Basket	39	60	35	35	35
	Bulu Tangkis	439	471	428	428	428
	Tenis	42	70	24	24	24
	Meja Tenis Meja			262	262	262
3.	Gedung Olah Raga	18	26	31	31	31
	Futsal	9	10	15	15	15
	Gedung Serba Guna	3	5	6	6	6
	Kolam Renang	6	11	9	9	9
	Sasana Tinju	0	0	1	1	1
4.	Jumlah Organisasi Olahraga	24	26	26	32	32
5.	Kegiatan Olahraga	1	1	1	2	2

Sumber : Dikpora, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

n. Statistik

Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor/urusan sehingga memudahkan dalam analisis perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Capaian kinerja urusan statistik selama periode tahun 2011-2015 antara lain tersusunnya Buku Daerah Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto, Buku Profil Daerah, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan dan Buku Studi Nilai Tukar Petani. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik, melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah, seperti SIM Pengentasan Kemiskinan, Sistem Informasi Profil Daerah, SIM Keuangan Daerah, SIM Perencanaan, SIM Pengendalian, SIMBADA, dan lain-lain.

o. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya serta pelestarian benda, situs dan kawasan Cagar Budaya merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengajak masyarakat mengenal dan melestarikan kesenian dan kebudayaan khususnya kebudayaan asli Kebumen yang beragam.

Salah satu bentuk budaya yang lain adalah benda peninggalan sejarah. Di wilayah Kabupaten Kebumen banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi, yang sebagian sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah yang ada hingga tahun 2015 sebanyak 46 buah. Capaian kinerja urusan kebudayaan juga dapat dilihat dari jumlah grup kesenian daerah yang semakin meningkat dari 207 grup pada tahun 2011 menjadi 400 grup kesenian pada tahun 2015.

Tabel 2.32
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	22	12	9	6
2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	25	45	45	46	46
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	1	1	1
4.	Jumlah grup kesenian	207	207	209	316	400
	Kuda Lumping	131	131	131	78	125

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
	Ketoprak	34	34	35	38	38
	Wayang Kulit	42	42	43	129	129
	Campursari				4	8
	Angguk				1	2
	Rebana				27	40
	Karawitan				4	4
	Jamjaneng				16	21
	Calung				4	6
	Lengger				5	5
	Seni Peran				1	4
	Sanggar Seni				6	8
	Cepetan				1	4
	Angklung				1	3
	Teater				1	3

Sumber : Disparbud, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

p. Perpustakaan

Capaian kinerja urusan perpustakaan tahun 2011-2015, dapat dilihat dari jumlah perpustakaan di Kabupaten Kebumen yang selalu meningkat, dari 391 unit pada tahun 2011 menjadi 788 unit pada tahun 2015, yang terdiri dari 1 perpustakaan daerah dan 787 perpustakaan desa. Hal ini diikuti dengan meningkatnya minat baca masyarakat dan pengunjung di perpustakaan. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan harus diimbangi dengan koleksi buku dan peningkatan sarpras yang tersedia. Untuk itu perlu adanya terobosan guna meningkatkan minat masyarakat mengunjungi perpustakaan. Pada tahun 2014, perpustakaan daerah dibangun di kawasan terpadu yang terdiri dari arena permainan anak, ruang terbuka hijau, area kuliner dan perpustakaan *on line*, karena di masa depan kemungkinan jumlah pengunjung sangat dipengaruhi oleh meningkatnya teknologi di bidang informasi yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.

Tabel 2.33
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Jumlah Perpustakaan	391	466	480	788	788
2.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	31.750	37.433	40.148	20.291	88.048
3.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	971.202	965.081	972.302	971.087	971.786
4.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	14.049	14.828	15.775	14.671	18.661
5.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan	34.223	34.310	36.080	24.869	29.404

Sumber : Kantor Perpusarsipda, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

q. Kearsipan

Arsip merupakan salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen bagi lembaga pemerintahan. Untuk mewujudkan penerapan tata pemerintahan yang baik, pengelolaan arsip yang baik dan benar merupakan salah satu upaya untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip merupakan sumber informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai alat bukti otentik kinerja Pemerintah Daerah.

Selama periode tahun 2011-2015, telah dilakukan pelatihan aplikasi pengelolaan arsip secara otomasi kepada 55 SKPD dan juga telah dilakukan sosialisasi penyuluhan kearsipan kepada sekretaris desa dengan materi kearsipan dimulai dari pemilihan sampai dengan penyusutan serta materi perundangan tentang kearsipan. Dalam rangka mendukung implementasi kearsipan di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana berupa *filling* kabinet, rak arsip, boks arsip, kartu kendali, map gantung, dan sekap kartu kendali. Bantuan kearsipan ini diberikan secara bertahap kepada seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen sejak tahun 2009-2015. Hal ini telah ditindak lanjuti dengan kunjungan ke setiap desa, selain untuk implementasi ilmu yang diterima, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kebumen juga akan melakukan pembenahan kearsipan di setiap desa yang mendapatkan bantuan. Hal ini bertujuan agar arsip di desa tertata dengan baik, sehingga memudahkan perangkat desa untuk mencarinya dan membantu dalam pengambilan kebijakan nantinya.

3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Kinerja daerah di sektor kelautan dan perikanan relatif fluktuatif. Untuk produksi perikanan terjadi tren meningkat, namun pada tahun 2013 terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan. Hal ini utamanya disebabkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kebumen yang menurun. Sejak tahun 2011 hingga 2013 penurunan mencapai 33% lebih diduga akibat perubahan iklim. Tahun 2014 dan selanjutnya, terjadi peningkatan produksi perikanan yang cukup menggembirakan. Perkembangan konsumsi ikan menunjukkan kondisi yang menggembirakan, nampaknya telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Kebumen.

Cakupan bina kelompok nelayan mengalami kondisi yang fluktuatif. Baru pada tahun 2015 jumlah cakupan bina kelompok nelayan mampu kembali ke posisi awal di tahun 2011. Tahun 2012 sampai 2014 kondisinya masih di bawah kondisi awal tahun 2011. Kegiatan pembinaan dilakukan berupa penyuluhan, sosialisasi, pembinaan secara intensif, inovasi teknologi, demonstrasi, magang dan bimbingan. Selain itu juga dilakukan penguatan kelembagaan kelompok serta pemberian bantuan peralatan dan sarana produksi perikanan lainnya. Kontribusi pendapatan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sejak tahun 2012 dan baru mampu naik lagi di tahun 2015.

Tabel 2.34
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Produksi perikanan (ton)	5.402,33	5.796,25	3.861,52	6.887,53	7.618,06
2.	Konsumsi ikan	8,61	9,01	10,05	12,28	13,65
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	30	24	20	25	30
4.	Kontribusi pendapatan perikanan terhadap PAD (%)	0,58	0,57	0,52	0,50	0,55

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

b. Pariwisata

Secara umum jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2015 angkanya sudah melampaui jutaan kunjungan wisata. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berkorelasi dengan presentase kontribusi pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terus mengalami penurunan. Di tahun 2015 persentasenya adalah sebesar 2,62%, jauh menurun dari kondisi di tahun 2011 yang sebesar 4,22%.

Tabel 2.35
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Kunjungan Wisata	701.391	807.500	804.500	957.007	1.117.136
2.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	12,74	15,13	(0,37)	18,96	16,73
3.	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	0,02	0,03	0,05	0,08	0,1
4.	Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD (%)	4,22	4,59	3,7	3,58	2,62

Sumber : Disparbud, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

c. Pertanian

Perkembangan capaian urusan pertanian, untuk komoditas padi, secara luasan areal tidak terdapat perkembangan yang signifikan, produksi fluktuatif cenderung meningkat, konsumsi fluktuatif sedangkan untuk surplusnya juga fluktuatif. Selanjutnya, komoditas jagung, secara luasan memang fluktuatif namun terjadi tren yang meningkat. Produksi jagung mengalami peningkatan cukup signifikan dengan konsumsi meningkat tapi relatif stabil. Surplus untuk komoditas jagung terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pengecualian di tahun 2014. Untuk komoditas kedelai, secara luasan areal terjadi penurunan di tahun 2013. Hal ini tentunya diikuti kondisi yang sama pada produksi jagung yang juga mengalami penurunan signifikan di tahun 2013. Konsumsi jagung di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat, sehingga dari tahun ke tahun Kabupaten Kebumen senantiasa mengalami kondisi surplus negatif untuk komoditas jagung.

Tabel 2.36
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Padi (gabah kering giling)					
	- Luas areal (Ha)	79.190	77.826	79.740	80.248	79.040
	- Produksi (ton)	440.012	480.338	422.835	448.270	516.356
	- Konsumsi (ton)	241.917	201.200	256.148	256.317	236.375
	- Surplus (ton)	194.135	274.815	162.881	187.919	275.332
2.	Jagung (wose)					
	- Luas areal (Ha)	4.306	3.887	4.068	4.221	5.873
	- Produksi (ton)	21.913	29.281	29.189	23.415	42.479
	- Konsumsi (ton)	467	474	473	539	534
	- Surplus (ton)	20.056	26.950	26.865	21.391	39.251
3.	Kedelai (wose)					
	- Luas areal (Ha)	8.403	6.530	3.217	6.817	6.405
	- Produksi (ton)	11.562	9.028	4.539	8.465	7.529
	- Konsumsi (ton)	21.490	21.812	21.771	24.808	24.590
	- Surplus (ton)	-10.662	-13.076	-17.379	-16.617	-17.305

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

d. Kehutanan

Capaian kinerja daerah pada urusan kehutanan perlu mendapat perhatian khusus. Untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis terjadi penurunan drastis mulai tahun 2014, dilanjutkan tahun 2015. Hal ini nampaknya relatif berkorelasi dengan kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB yang kondisinya fluktuatif dengan tren yag menurun.

Tabel 2.37
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015**
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	3.400	4.237	5.100	2.525	2.525
2.	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,89	0,92	0,88	0,87*	0,87*

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

e. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pengawasan terhadap pertambangan tanpa izin masih kurang optimal, hal tersebut diketahui dengan masih adanya luasan pertambangan yang tanpa izin. Meskipun demikian, luasan pertambangan tanpa izin pada tahun 2011-2015 mengalami penurunan dari 32 hektar pada tahun 2011 menjadi 24,20 hektar pada tahun 2015.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada akhir tahun 2015, sektor ini berkontribusi sebesar 8,04%. Namun demikian, tetap harus diingat bahwa nilai ekonomis dari sektor pertambangan ini seringkali berbanding terbalik dengan dampak lingkungan yang diakibatkan. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk tidak menggunakan pasir Sungai Luk Ulo pada setiap kegiatan pembangunan di sektor pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban eksploitasi terhadap penambangan galian C di Sungai Luk Ulo.

Tabel 2.38
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertambangan tanpa izin (Ha)	32,00	32,00	32,00	24,20	24,20
2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	7,83	7,68	7,89	8,04	8,04

Sumber : Dinas SDA ESDM, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

f. Perdagangan

Kinerja sektor perdagangan relatif stabil dengan tren yang meningkat tipis. Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal menunjukkan peningkatan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB juga terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dikaitkan dengan upaya revitalisasi pasar-pasar daerah yang mulai dilakukan secara cukup masif sejak tahun 2012 lalu.

Tabel 2.39
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Ekspor bersih perdagangan	Na	Na	Na	Na	Na
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	15	17	17	19	19
3.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	11,27	11,22	11,35	11,39	11,39

Sumber : Dinas Perindagsar, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

g. Perindustrian

Hal yang sedikit berbeda terjadi di sektor perindustrian. Kontribusi IRT terhadap PDRB sektor industri terus mengalami tren yang menurun. Hal ini selaras dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang juga mengalami tren yang menurun. Kondisi ini secara jelas digambarkan dalam perkembangan pertumbuhan sektor industri yang mengalami penurunan drastis di tahun 2014 dan setelah itu belum mampu pulih lagi sampai saat ini. Hal ini barangkali dapat dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional dan regional yang belum kondusif akibat berbagai kondisi eksternal.

Tabel 2.40
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Kontribusi IRT terhadap PDRB sektor industri (%)	92,65	92,06	91,58	91,66	91,66
2.	Pertumbuhan industri (%)	38,4	0,49	2,38	0,95	0,95
3.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	10,54	10,44	10,46	10,41	10,41

Sumber : Dinas Perindagsar, 2016
*Keterangan : *) Angka Sementara*

h. Transmigrasi

Kinerja daerah pada urusan transmigrasi mengalami penurunan. Jika pada tahun 2011 daerah sudah berhasil mengirim transmigrasi umum sebanyak 26 kk, maka tahun-tahun selanjutnya kondisinya justru semakin menurun. Pada tahun 2014 dan 2015 daerah hanya mampu mengirim transmigran sebanyak 5 KK. Hal ini barangkali disebabkan semakin berkurangnya jumlah peminat transmigrasi yang memenuhi syarat serta program transmigrasi daerah yang kuotanya relatif menurun.

Tabel 2.41
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Uraian Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
Transmigrasi Umum	26 kk	25 kk	10 kk	5 kk	10 kk

Sumber : Dinas Nakertransos, 2016

4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tahun 2015 dari sisi perencanaan pembangunan daerah, merupakan tahun yang cukup strategis, dimana RPJMD Tahun 2010-2015 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2015 habis masa berlakunya ditandai dengan berakhirnya masa kerja Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, pada tahun 2015 dilakukan penyusunan dokumen teknokratis RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

b. Keuangan

Dari sisi keuangan daerah, total APBD selama periode tahun 2011-2015 terus meningkat, yang menunjukkan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 dan 2013 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Kebumen terus meningkat. Namun demikian, pada tahun 2014 kinerja keuangan daerah menurun menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini menjadi perhatian seluruh elemen Pemerintah Daerah untuk kembali meningkatkan kinerja keuangan daerah. Salah satu indikator utama yang menyebabkan penurunan kinerja keuangan daerah adalah penilaian terhadap pengelolaan aset daerah. Untuk itu, dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah, secara periodik dilakukan evaluasi manajemen pengelolaan aset sehingga keberadaan aset Kabupaten Kebumen dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja keuangan daerah dan secara khusus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai sumber daya manusia dalam pemerintahan menjadi pilar pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan PNS yang berkualitas agar pembangunan dapat berjalan baik.

Jumlah PNS pada Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2011-2015 cenderung menurun. Pada tahun 2015 jumlah PNS sebanyak 13.834, atau menurun 12,24% dari tahun 2011 sejumlah 15.527 orang. Dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio jumlah PNS di Kabupaten Kebumen tahun 2015 sebesar 1:85,65 atau 1 PNS melayani sejumlah 86 penduduk. Perkembangan jumlah PNS Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.42
Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2011	8.464	7.063	15.527
2012	8.010	6.996	15.006
2013	7.653	6.840	14.493
2014	7.438	6.800	14.238
2015	7.206	6.628	13.834

Sumber : BKD, 2016

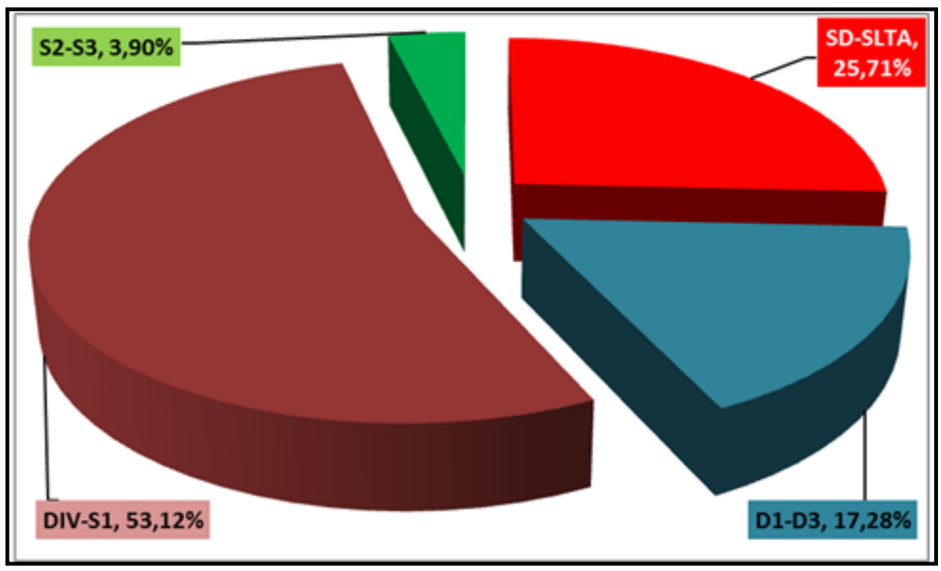
Dilihat dari kapasitas SDM, kualitas PNS Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan PNS, dimana PNS yang berpendidikan DIV/S1 dan S2 semakin meningkat. Pada tahun 2011 PNS yang berpendidikan DIV/S1 sejumlah 4.871 orang dan meningkat 50,85% menjadi 7.348 orang pada tahun 2015. Demikian juga dengan jumlah PNS berpendidikan S2-S3 yang meningkat dari 191 orang pada tahun 2011 menjadi 539 orang tahun 2015 (meningkat 182,20%).

Tabel 2.43
Perkembangan Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	SD-SLTA	D1-D3	DIV-S1	S2-S3	Jumlah
2011	6.421	4.044	4.871	191	15.527
2012	5.776	3.512	5.472	246	15.006
2013	5.278	3.429	5.529	257	14.493
2014	3.886	3.129	6.961	262	14.238

Tahun	SD-SLTA	D1-D3	DIV-S1	S2-S3	Jumlah
2015	3.557	2.390	7.348	539	13.834

Sumber : BKD, 2016



Gambar 2.40
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Sumber : BKD, 2016

Sementara itu, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari peningkatan kapasitas SDM PNS. Upaya peningkatan kapasitas SDM PNS dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2011-2015 1.152 PNS mendapatkan peningkatan kapasitas melalui diklat teknis fungsional.

Tabel 2.44
Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2011	106	44	150
2012	168	57	225
2013	143	137	280
2014	131	129	260
2015	167	70	237

Sumber : BKD, 2016

d. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan dalam era persaingan global dewasa ini menjadi hal yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian dan pengembangan menjadi fondasi untuk menemukan dan mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pembangunan daerah di semua sektor kehidupan masyarakat. Sampai dengan tahun 2015, telah dilaksanakan berbagai kegiatan

yang ditujukan dalam upaya peningkatan peran aparatur dan masyarakat dalam penelitian dan pengembangan, seperti Riset Unggulan Daerah, Krenova, dan SIDA. Selain itu, pada awal tahun 2016 ini, atas inisiatif unsur perguruan tinggi dan masyarakat di Kabupaten Kebumen, akan dibentuk sebuah wadah bagi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kebumen yaitu Dewan Riset Daerah.

e. Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum)

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kebumen mempunyai perangkat daerah antara lain Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada Tahun 2015, jumlah perangkat daerah di Kabupaten Kebumen sejumlah 31 unit. Kemudian secara administratif Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan yang terbagi ke dalam 449 desa dan 11 kelurahan, 1.934 rukun warga, 1.680 dusun, dan 7.078 rukun tetangga, dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Kebumen.

E. Aspek Daya Saing Daerah

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi NTP, maka relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan dan daya beli petani.

Pada tahun 2011-2015, terjadi tren penurunan NTP dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Penurunan ini mengindikasikan semakin lemahnya daya tawar petani terhadap pasar. Kondisi ini patut menjadi prioritas dan perhatian pemerintah daerah, mengingat kontribusi sektor pertanian cukup dominan dalam perekonomian Kabupaten Kebumen. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.45
Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

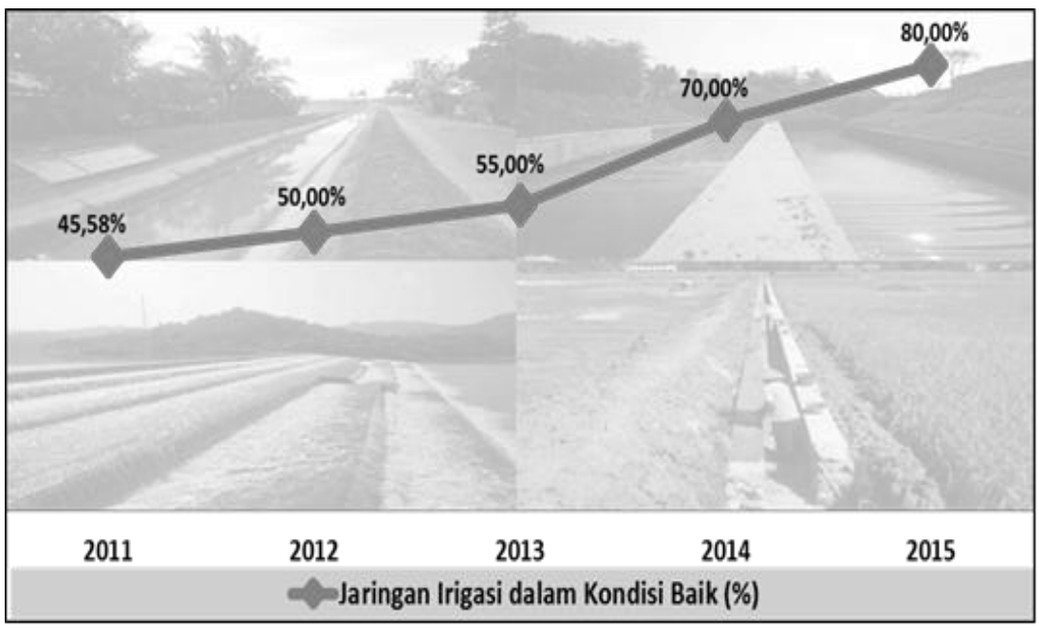
No.	Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indonesia	104,87	104,87	101,96	101,32	102,33
2.	Jawa Tengah	106,62	106,37	101,42	100,65	102,03
3.	Kabupaten Kebumen	105,38	105,59	102,00	98,42	110,39

Sumber : BPS (data diolah)

2. Infrastruktur Wilayah

a. Infrastruktur Irigasi

Kabupaten Kebumen merupakan daerah agraris dimana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Kebumen, maka diperlukan sarana irigasi yang baik untuk menunjang sektor pertanian tersebut. Sampai tahun 2015 di Kabupaten Kebumen kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dengan kondisi baik mencapai 80% dari total daerah irigasi kewenangan kabupaten sejumlah 8.621 Ha.



Gambar 2.41
Perkembangan Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten
Dalam Kondisi Baik Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Sumber : SIPPD Tahun 2015

b. Infrastruktur Jalan

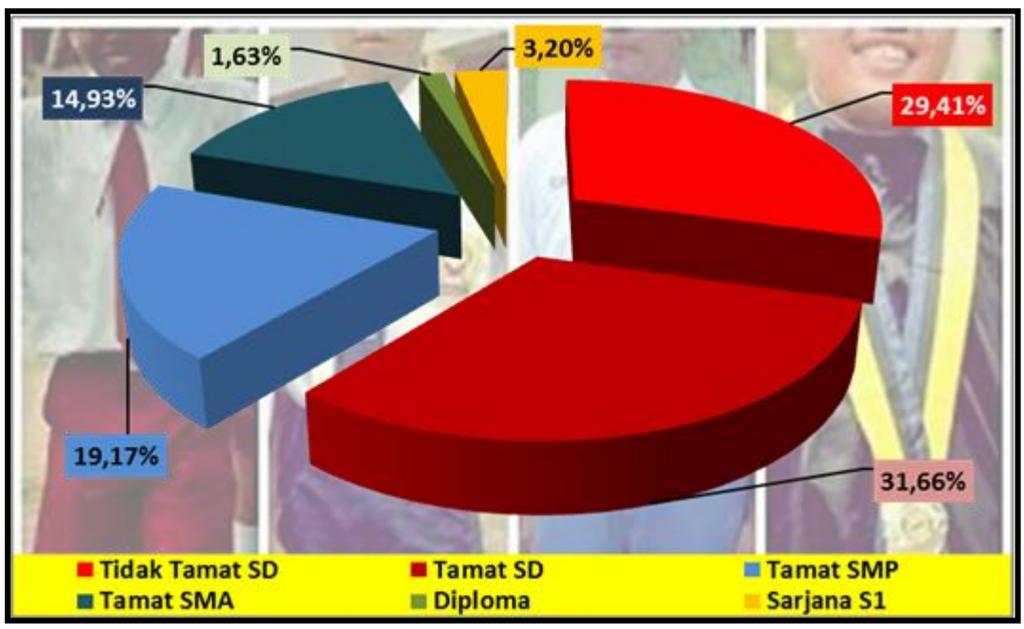
Pada sisi yang lain, infrastruktur jalan merupakan faktor utama pendukung kelancaran lalu lintas di darat. Pembangunan transportasi jalan merupakan bagian penting dalam kegiatan pembangunan yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan strategis dan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jaringan jalan merupakan bagian dari sarana terpenting dalam sistem transportasi. Jangkauan pelayanan jalan di Kabupaten Kebumen saat ini terbatas pada wilayah-wilayah yang secara alami berkembang dengan pesat.

Kondisi jalan setiap tahunnya harus terus ditingkatkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya untuk mengimbangi berkembangnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Kebumen pada Tahun

2015 terdiri dari jalan nasional sepanjang 54,19 km, jalan provinsi sepanjang 30,09 km, jalan kabupaten sepanjang 975,15 km dan panjang jalan desa 1.236,94 km. Dari 975,15 km jalan kewenangan kabupaten, saat ini 447,82 km (45,92%) dalam kondisi baik, sedangkan sisanya sejumlah 199,61 km (20,47%) dalam kondisi sedang, rusak ringan 150,21 km (15,4%) dan rusak berat 176,69 km (18,12%).

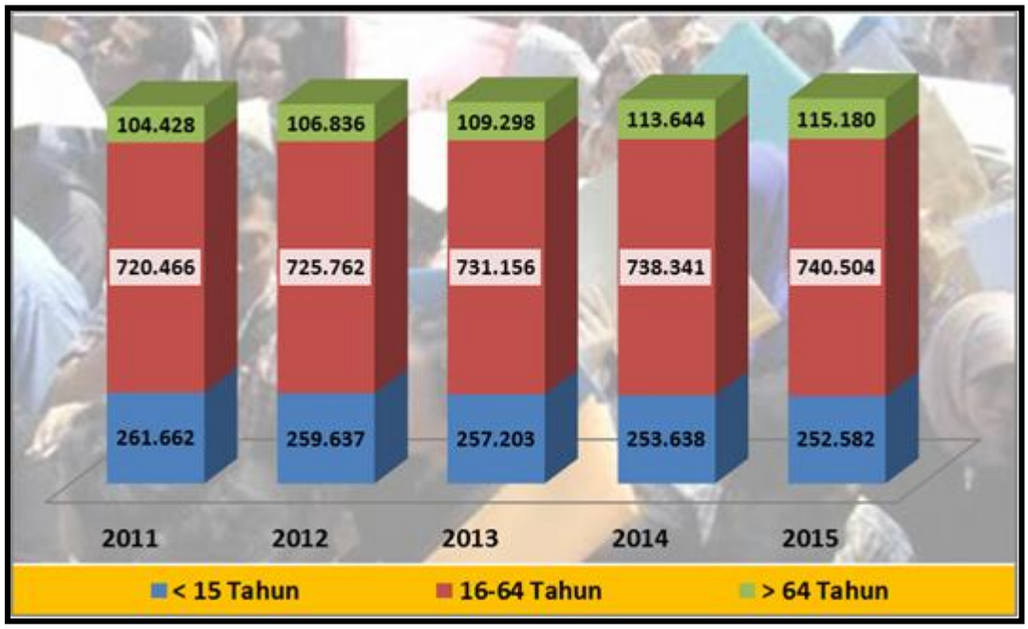
3. Sumber Daya Manusia

Daya saing Kabupaten Kebumen dilihat dari sisi sumber daya manusia, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 masih cukup memprihatinkan. Mayoritas penduduk yaitu 80,24% hanya mengenyam pendidikan dasar 9 tahun (SD-SMP), sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan setingkat SMA berjumlah 14,93%, dan penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi (D3-S1) berjumlah 4,83%.



Gambar 2.42
Tingkat Pendidikan Penduduk
Kabupaten Kebumen Tahun 2015

Sumber : SIPPD Tahun 2015



Gambar 2.43
Perkembangan Penduduk Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Pengelompokkan Umur Tahun 2011-2015
Sumber : BPS, 2015

Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi demografi penduduk di kabupaten Kebumen dari tahun 2011-2015 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Komposisi ini nyaris tidak berubah secara signifikan sampai tahun 2015, baik untuk komposisi penduduk muda (<15 tahun), maupun untuk komposisi penduduk tua (>65).

Angka beban ketergantungan penduduk juga belum menunjukan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015 tercatat Rasio ketergantungan sebesar 49,66. Artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus menanggung 49-50 orang yang belum produktif (muda), atau dianggap tidak produktif lagi (tua). Angka rasio ketergantungan ini harus bisa ditekan serendah mungkin. Semakin kecil angka rasio ketergantungan akan menunjukan semakin baik komposisi penduduk suatu daerah, artinya bahwa penduduk di daerah tersebut semakin produktif.

4. Daya Saing Usaha

Dilihat dari daya saing daerah, pada tahun 2013 Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 9 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Indikator-indikator yang dinilai dalam daya saing daerah antara lain:

a. Aspek dinamika usaha

Indikator yang dinilai dalam aspek ini antara lain persentase usaha yang berusia kurang dari 10 tahun,

persentase usaha dengan turnover lebih dari 500 juta rupiah, kebutuhan pendanaan dari luar, tingkat pengajuan pinjaman (kebutuhan dan pengajuan), dan persentase perusahaan yang inovatif. Dilihat dari indikator-indiator dalam aspek ini, Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 34 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

b. Aspek infrastruktur

Indikator yang dinilai dalam aspek ini antara lain persentase jalan daerah yang beraspal terhadap total jalan yang ada, penilaian pemeliharaan dan pengembangan, pasar per 1.00 penduduk, lembaga pelatihan kejuruan (ketersediaan per 1.000 penduduk dan penilaian kualitas) serta jumlah lembaga keuangan per 1.000 penduduk. Dilihat dari indikator-indikator dalam aspek ini, Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 16 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

c. Aspek kapasitas pemerintah

Indikator yang dinilai dalam aspek ini adalah kapasitas pemerintah dan upaya pemerintah. Aspek kapasitas pemerintah dinilai dengan indikator anggaran per kapita, persentase PAD terhadap total pendapatan, persentase peningkatan PAD, belanja pembangunan per kapita, kenaikan belanja pembangunan per kapita. Aspek upaya pemerintah dinilai dengan indikator ketersediaan studi terbaru (*updated*) peluang investasi, ketersediaan materi promosi investasi terbaru (*updated*), frekuensi/kualitas dari ekspo/fair investasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah per tahun, penilaian terhadap kualitas dari program-program promosi investasi pemerintah, kualitas kinerja PTPSP/OSS, persentase perusahaan yang memiliki TDP, rata-rata jumlah hari yang diperlukan untuk memperoleh TDP dan SIUP, penilaian terhadap kualitas fasilitas pendukung investasi, persentase anggaran promosi investasi tahunan per PDRB, jumlah regulasi baru atau yang direvisi terkait regulasi pajak, perizinan, insentif, tenaga kerja dan lingkungan yang mempermudah investasi. Dilihat dari indikator-indiator dalam aspek ini, Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 4 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

d. Aspek kinerja investasi

Indikator yang dinilai dalam aspek ini antara lain realisasi investasi per anggaran promosi investasi publik, realisasi investasi per kapita, persentase perusahaan yang berinvestasi, rata-rata nilai investasi per perusahaan yang berinvestasi, rata-rata rekruitmen tenaga kerja per perusahaan yang berinvestasi, persentase perusahaan yang

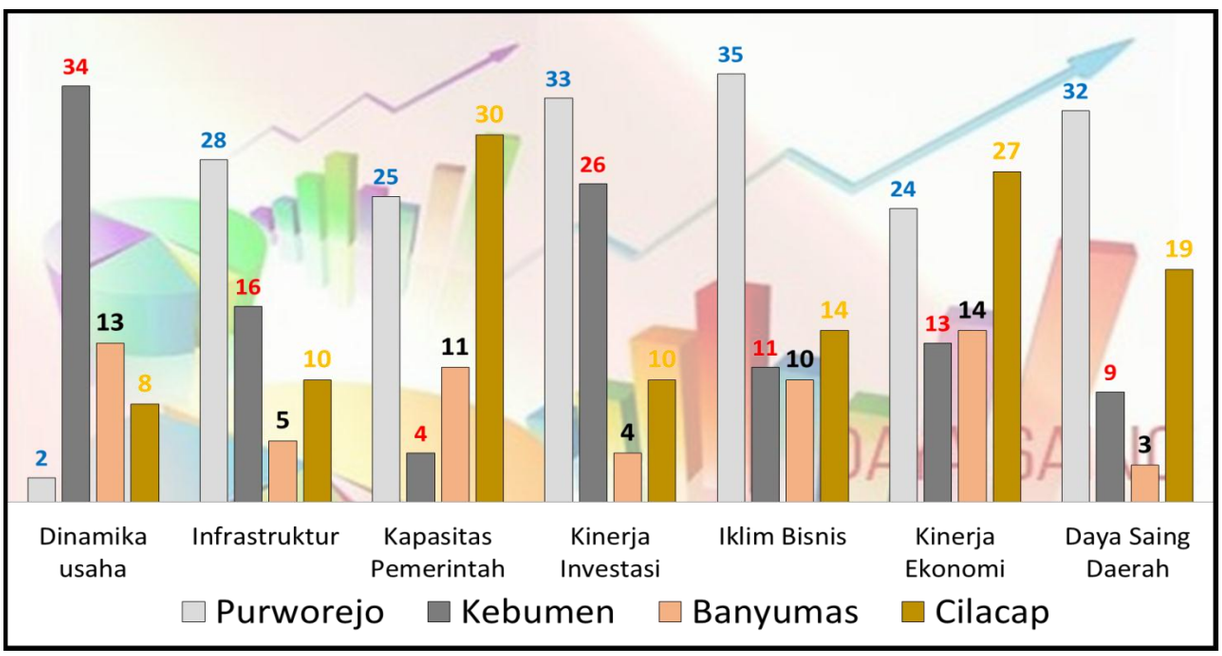
berinvestasi dalam 12 bulan ke depan, rata-rata nilai investasi per perusahaan yang berinvestasi dalam 12 bulan ke depan, rata-rata rekruitmen tenaga kerja per perusahaan yang berinvestasi dalam 12 bulan ke depan serta rata-rata penilaian daya tarik investasi. Dilihat dari indikator-indiator dalam aspek ini, Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 26 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

e. Aspek iklim bisnis

Indikator yang dinilai dalam aspek ini antara lain rata-rata 4 hambatan terpelik utama terhadap bisnis, kondisi usaha dibandingkan 2 tahun sebelumnya, perkiraan kondisi usaha 2 tahun ke depan, persentase keanggotaan dalam asosiasi bisnis, perilaku konsisten dari pejabat pemerintah, jumlah regulasi bermasalah dianggap minimal 10%, kebutuhan "biaya informal", dan penilaian lingkungan bisnis dalam 2 tahun terakhir. Dilihat dari indikator-indiator dalam aspek ini, Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 11 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

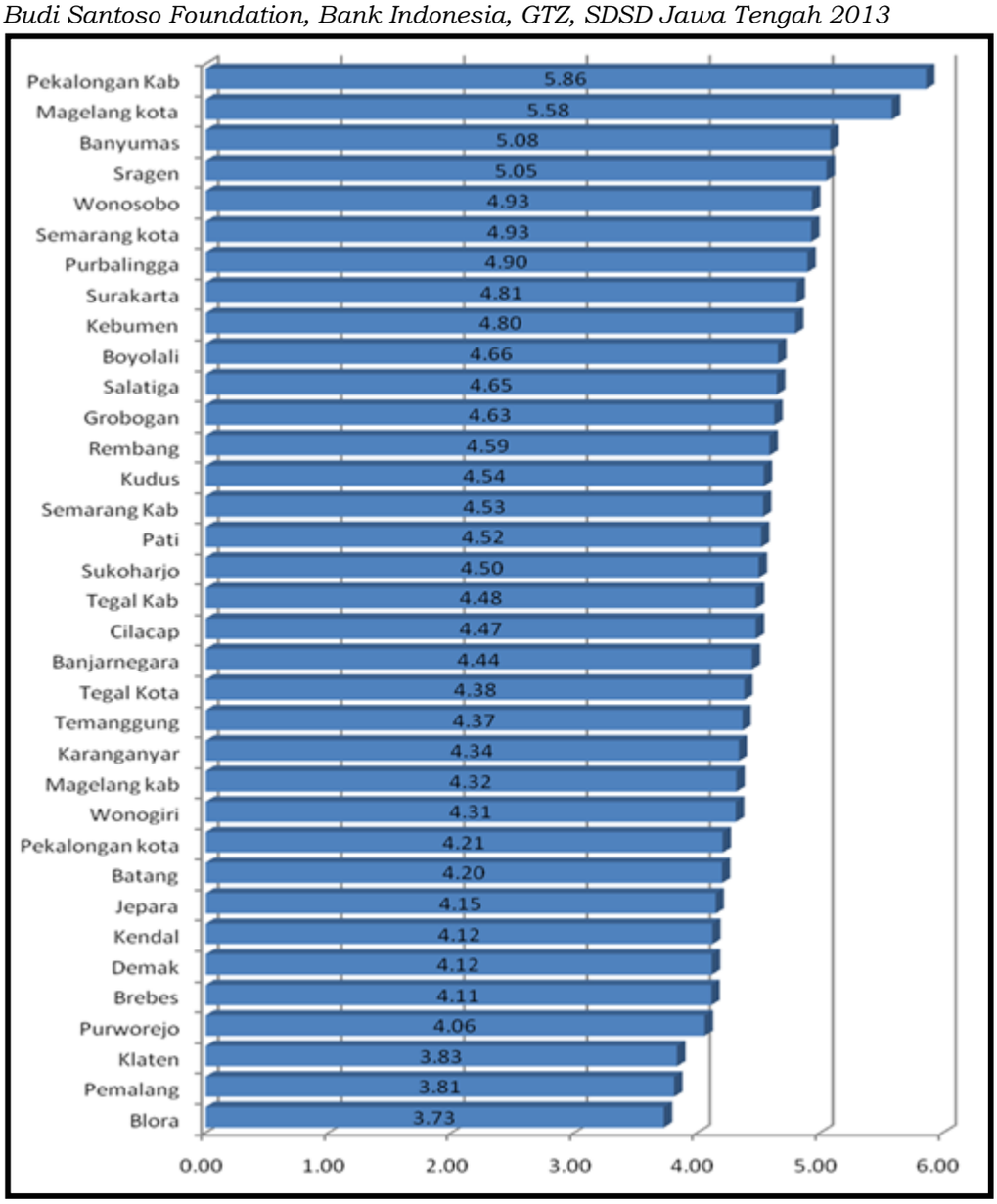
f. Aspek kinerja ekonomi

Indikator yang dinilai dalam aspek ini antara lain pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, pertumbuhan PDRB perkapita, rata-rata tingkat pengangguran rendah, pertumbuhan total penyaluran kredit dan tingkat kredit macet. Dilihat dari indikator-indiator dalam aspek ini, Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 13 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.44
Perbandingan Survey Daya Saing Daerah Kabupaten Kebumen, Purworejo, Banyumas dan Cilacap Tahun 2013

Sumber : Budi Santoso Foundation, Bank Indonesia, GTZ, SDSD Jawa Tengah 2013



Gambar 2.45
Perbandingan Indeks Peringkat Survey Daya Saing Daerah
35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2016

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Salah satu faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah faktor keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Keuangan Daerah yang diuraikan dalam APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik melalui kebijakan belanja daerah, untuk membiayai berbagai prioritas pembangunan daerah sesuai sumber daya pendanaan yang tersedia baik yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun skema transfer dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisah (selalu terintegrasi) dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu: (i) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (iii) Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang–undang tersebut menjadi dasar dari munculnya Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset Pemerintah Daerah, kondisi kewajiban Pemerintah Daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD.

A. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

   Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
      1) Hasil Pajak Daerah
         Hasil pajak daerah pada APBD Kabupaten Kebumen terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
      2) Hasil Retribusi Daerah
         a) Retribusi Jasa Umum, meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
         b) Retribusi Jasa Usaha, meliputi: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,

Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Bagian Laba Usaha Daerah pada APBD Kabupaten Kebumen terdiri atas: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo, Perusahaan Daerah BPR Bank Kebumen dan Perusahaan Daerah BPR-BKK, termasuk Bagian Laba dari Bank Pembangunan Derah/PT. Bank Jateng.

4) Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain PAD yang Sah pada APBD Kabupaten Kebumen terdiri atas: jasa giro Kas Daerah, rekening deposito pada bank, tuntutan ganti rugi daerah, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

b. Dana Perimbangan, terdiri atas:
1) Dana Bagi Hasil Pajak;
Dana bagi hasil pajak terdiri atas: bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi, dan dana alokasi cukai.
2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
Dana bagi hasil bukan pajak terdiri atas: bagi hasil dari pungutan hasil perikanan dan bagi hasil dari sumberdaya hutan.
3) Dana Alokasi Umum; dan
4) Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri atas:
1) Pendapatan hibah dari pemerintah;
2) Dana bagi hasil pajak provinsi terdiri atas: bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, bagi hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, bagi hasil Pajak Rokok, serta bagi hasil retribusi provinsi;
3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dari Pemerintah; dan
4) Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Selama tahun 2011-2015, secara umum kinerja pelaksanaan APBD khususnya Pendapatan Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 1.273.275.623.110,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.2.326.188.256.641,00 pada tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 19,08%. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2011 yang mencapai sebesar 30,18%, dari sebesar Rp.978.097.201.472,00 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp.1.273.275.623.110,00 pada tahun 2011, sebagai dampak meningkatnya dana penyesuaian dari Pemerintah untuk Tunjangan Profesi dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Secara lengkap perincian mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2010-2015 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

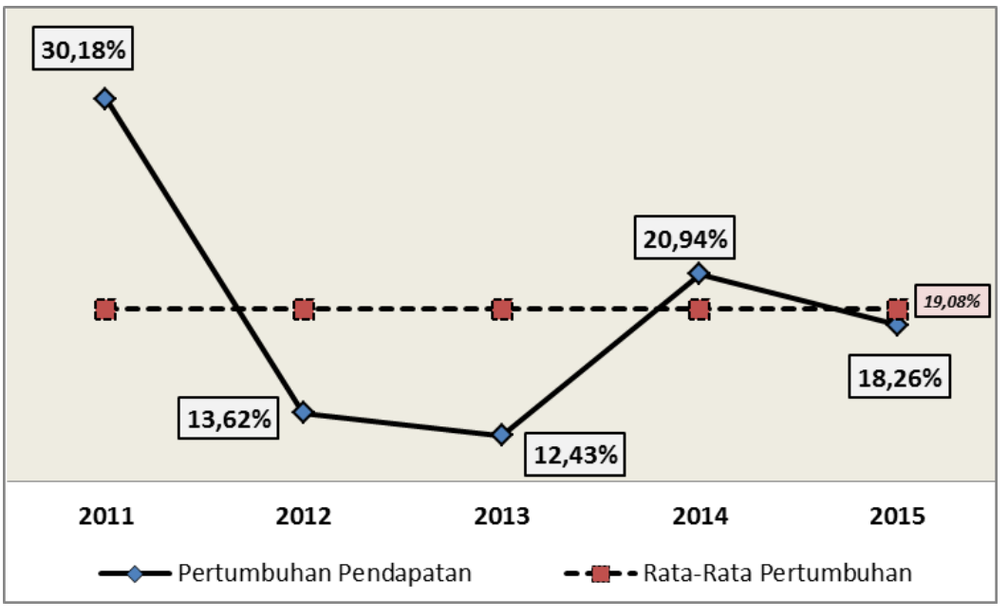
No.	Realisasi	Tahun					Rata-Rata Realisasi
		2011	2012	2013	2014	2015	
A	Pendapatan (a.1+a.2+a.3)	1.273.275.623.110	1.446.685.447.262	1.626.530.654.021	1.967.047.779.137	2.326.188.256.641	1.727.945.552.034
a.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	73.513.164.444	102.374.370.560	131.481.736.502	242.079.502.075	245.159.255.421	158.921.605.800
a.1.1	Pajak Daerah	17.326.903.745	20.375.075.302	42.012.443.873	46.312.651.913	52.015.233.621	35.608.461.691
a.1.2	Retribusi Daerah	16.417.314.297	24.787.134.714	24.542.086.173	43.343.968.696	26.897.280.470	27.197.556.870
a.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.754.419.696	6.822.776.847	5.506.191.030	8.008.929.340	8.561.009.403	6.330.665.263
a.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.014.526.706	50.389.383.697	59.421.015.426	144.413.952.126	157.685.731.927	89.784.921.976
a.2	Dana Perimbangan	856.994.931.591	1.056.314.659.838	1.135.499.305.803	1.233.776.681.950	1.343.315.952.370	1.125.180.306.310
a.2.1	Dana Bagi Hasil	45.863.492.591	49.989.322.838	34.564.265.803	27.498.627.950	30.994.004.370	37.781.942.710
a.2.2	Dana Alokasi Umum	731.980.739.000	906.222.007.000	1.021.871.180.000	1.125.568.884.000	1.146.008.708.000	986.330.303.600
a.2.3	Dana Alokasi Khusus	79.150.700.000	100.103.330.000	79.063.860.000	80.709.170.000	166.313.240.000	101.068.060.000
a.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	342.767.527.075	287.996.416.864	359.549.611.716	491.191.595.112	737.713.048.850	443.843.639.923
a.3.1	Hibah	117.637.460.200	546.900.500	-	1.038.000.000	21.148.531.000	28.074.178.340
a.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
a.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi kepada Kab./Kota	39.736.748.669	56.570.858.558	66.179.825.253	69.778.066.149	114.070.000.131	69.267.099.752
a.3.4	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	95.198.962.400	163.270.232.000	219.576.541.000	291.252.654.000	472.419.886.000	248.343.655.080
a.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	90.070.390.000	67.474.965.000	73.793.245.463	129.122.874.963	130.074.631.719	98.107.221.429
a.3.6	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	123.965.806	133.460.806	-	-	-	51.485.322

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.2
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	1.272.818.544.000	1.273.275.623.110	100,04	30,18
2012	1.417.519.422.000	1.446.685.447.262	102,06	13,62
2013	1.599.628.126.000	1.626.530.654.021	101,68	12,43
2014	1.875.551.127.000	1.967.047.779.137	104,88	20,94
2015	2.264.965.910.000	2.326.188.256.641	102,70	18,26
Rata-rata			102,27	19,08

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.1
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tingkat realisasi pendapatan daerah selama tahun 2011-2015 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 102,27%. Sedangkan dari sisi pertumbuhan, realisasi pendapatan daerah tahun 2011-2015 mengalami peningkatan rata-rata 19,08% per tahun, dengan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 30,18%.

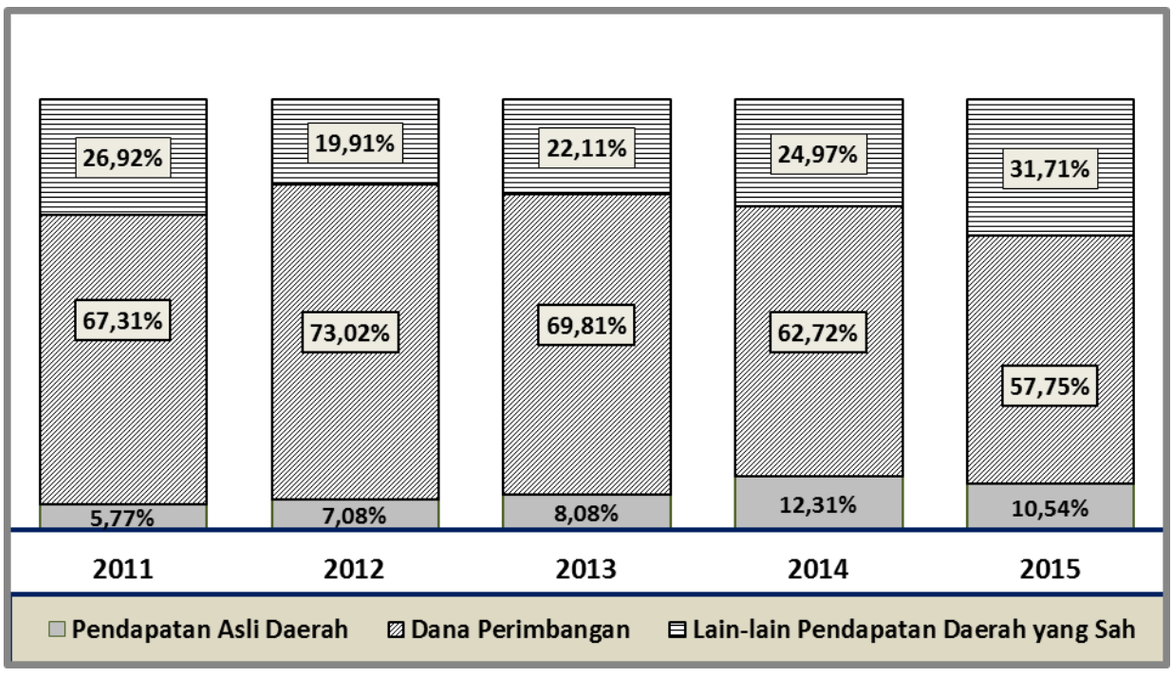
Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2011-2015 didominasi oleh sumber Dana Perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 66,12%, disusul oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan proporsi rata-rata sebesar 25,12%, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara-rata-rata baru mencapai 8,76%. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi.

Tabel 3.3
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian Pendapatan	Kontribusi Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah (%)					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Pendapatan Asli Daerah	5,77	7,08	8,08	12,31	10,54	8,76
2.	Dana Perimbangan	67,31	73,02	69,81	62,72	57,75	66,12
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26,92	19,91	22,11	24,97	31,71	25,12

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.2
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

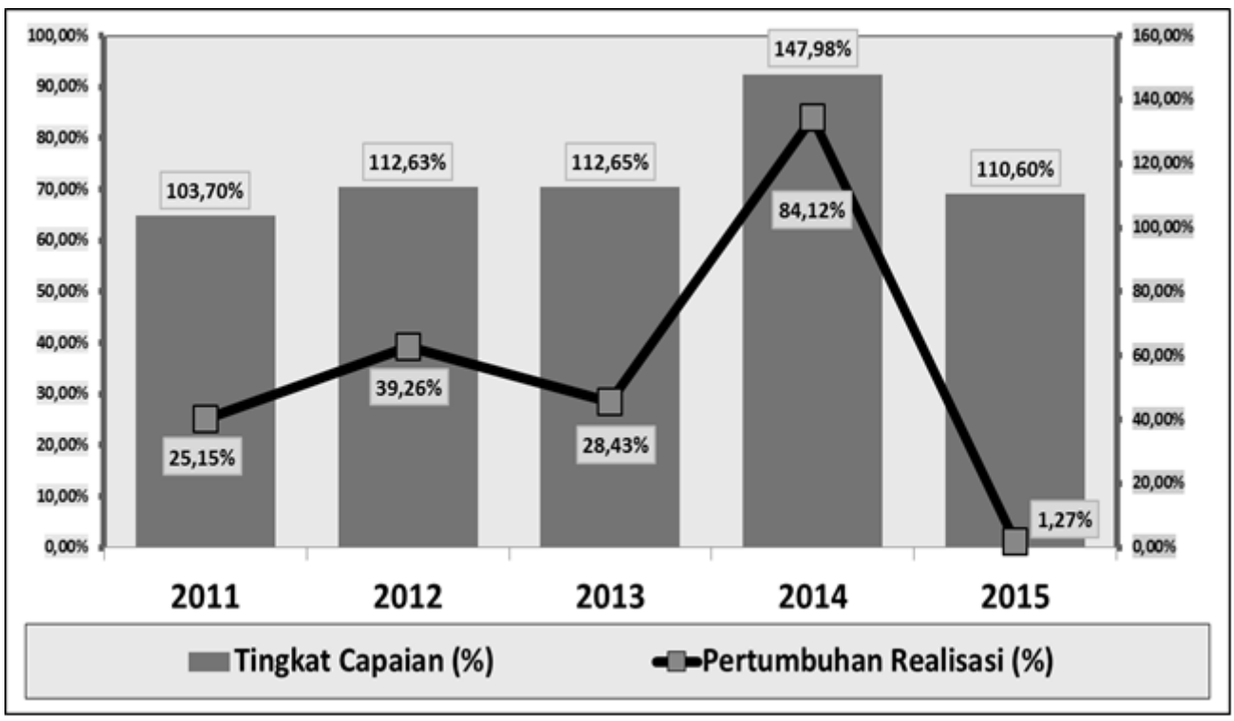
a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.73.513.164.444,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.245.159.255.421,00 pada tahun 2015, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 35,65%. Pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 84,12%. Sedangkan tingkat capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-2015 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 117,51%.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	70.892.281.000	73.513.164.444	103,70	25,15
2012	90.896.840.000	102.374.370.560	112,63	39,26
2013	116.720.489.000	131.481.736.502	112,65	28,43
2014	163.586.346.000	242.079.502.075	147,98	84,12
2015	221.657.039.000	245.159.255.421	110,60	1,27
Rata-rata			117,51	35,65

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.3
Tingkat Capaian dan Pertumbuhan Realisasi
PAD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

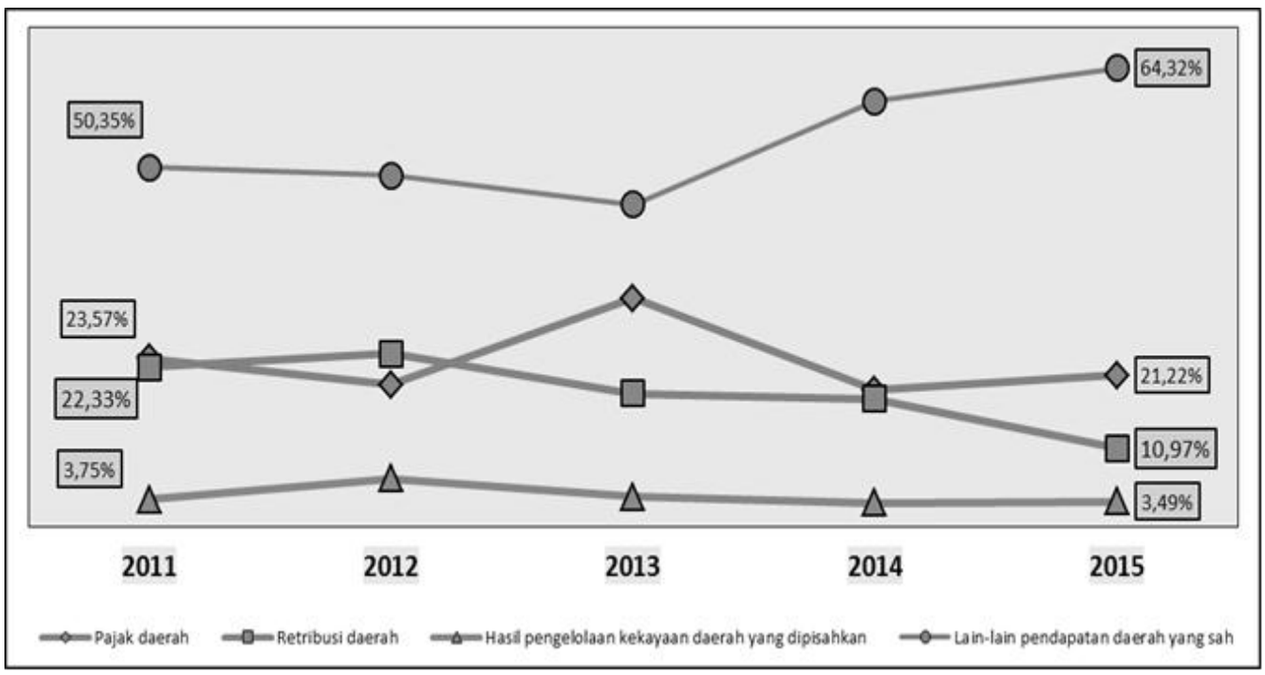
Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Komponen terbesar pembentuk Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2011-2015 adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi rata-rata 46,89% per tahun. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan paling besar dari Rp8.692.144.699,00 pada tahun 2010 menjadi Rp122.474.700.000,00 pada tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan sebesar 1.309%.

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Total PAD
2011	17.326.903.745	16.417.314.297	2.754.419.696	37.014.526.706	73.513.164.444
2012	20.375.075.302	24.787.134.714	6.822.776.847	50.389.383.697	102.374.370.560
2013	42.012.443.873	24.542.086.173	5.506.191.030	59.421.015.426	131.481.736.502
2014	46.312.651.913	43.343.968.696	8.008.929.340	144.413.952.126	242.079.502.075
2015	52.015.233.621	26.897.280.470	8.561.009.403	157.685.731.927	245.159.255.421
Rata-Rata Realisasi	35.608.461.691	27.197.556.870	6.330.665.263	89.784.921.976	158.921.605.800
Rata-Rata Tumbuh	8.672.082.469	2.619.991.543	1.451.647.427	30.167.801.305	42.911.522.744

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.4
Persentase Kontribusi Realisasi Komponen Pembentuk Pendapatan Asli Daerah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	15.019.000.000	17.326.903.745	115,37	35,73
2012	18.435.000.000	20.375.075.302	110,52	17,59
2013	36.485.100.000	42.012.443.873	115,15	106,20
2014	40.347.610.000	46.312.651.913	114,78	10,24
2015	46.346.000.000	52.015.233.621	112,23	12,31
Rata-rata			113,61	36,41

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	18.425.920.000	16.417.314.297	89,10	-53,53
2012	26.039.581.000	24.787.134.714	95,19	50,98
2013	25.848.755.000	24.542.086.173	94,94	-0,99
2014	35.486.648.000	43.343.968.696	122,14	76,61
2015	26.270.679.000	26.897.280.470	102,39	-37,94
Rata-rata			100,75	7,03

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	2.629.740.000	2.754.419.696	104,74	40,71
2012	6.741.341.000	6.822.776.847	101,21	147,70
2013	5.502.072.000	5.506.191.030	100,07	-19,30
2014	7.918.783.000	8.008.929.340	101,14	45,45
2015	8.436.286.000	8.561.009.403	101,48	6,89
Rata-rata			101,73	44,29

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	34.817.621.000	37.014.526.706	106,31	325,84
2012	39.680.918.000	50.389.383.697	126,99	36,13
2013	48.884.562.000	59.421.015.426	121,55	17,92
2014	79.833.305.000	144.413.952.126	180,89	143,04
2015	140.604.074.000	157.685.731.927	112,15	9,19
Rata-rata			129,58	106,42

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

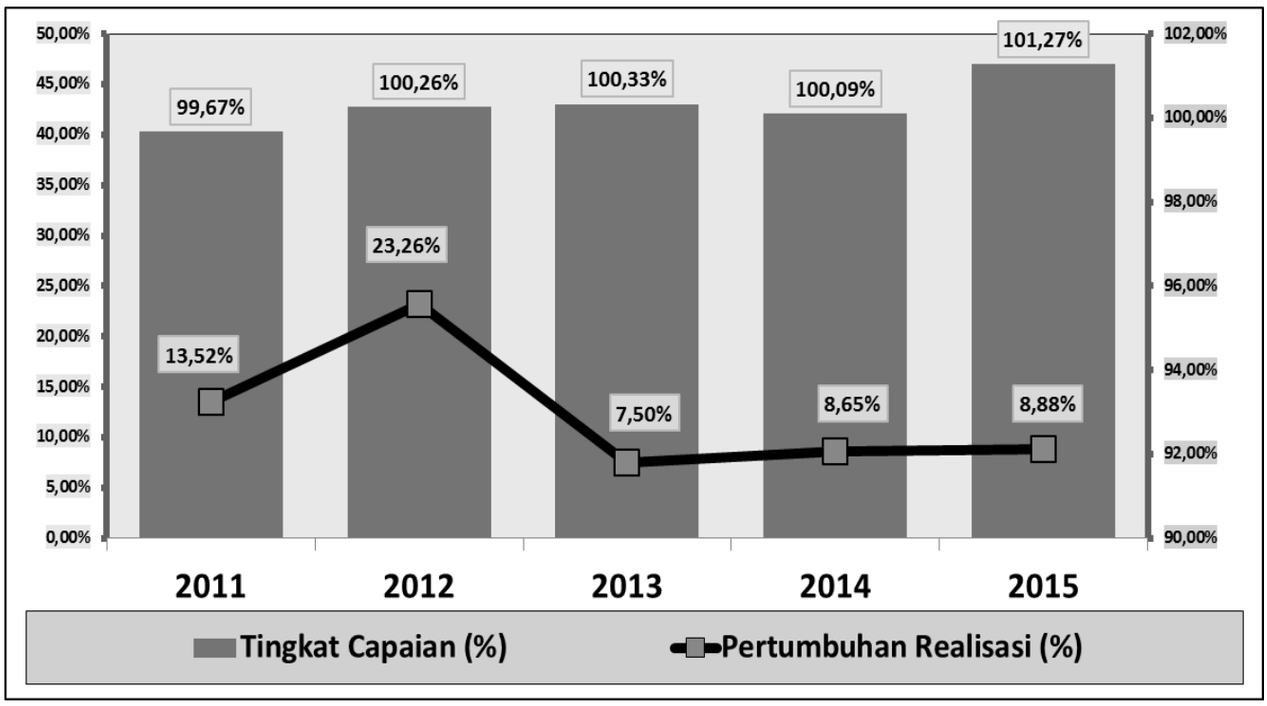
b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.856.994.931.591,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.1.343.315.952.370,00 pada tahun 2015, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,36%. Pertumbuhan realisasi penerimaan Dana Perimbangan terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 23,26%. Sedangkan tingkat capaian realisasi Dana Perimbangan selama tahun 2011-2015 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut secara rata-rata mencapai 100,32%.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Dana Perimbangan
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	859.847.007.000	856.994.931.591	99,67	13,52
2012	1.053.567.332.000	1.056.314.659.838	100,26	23,26
2013	1.131.746.826.000	1.135.499.305.803	100,33	7,50
2014	1.232.640.908.000	1.233.776.681.950	100,09	8,65
2015	1.326.458.336.000	1.343.315.952.370	101,27	8,88
Rata-rata			100,32	12,36

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.5
Tingkat Capaian dan Pertumbuhan Realisasi
Dana Perimbangan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

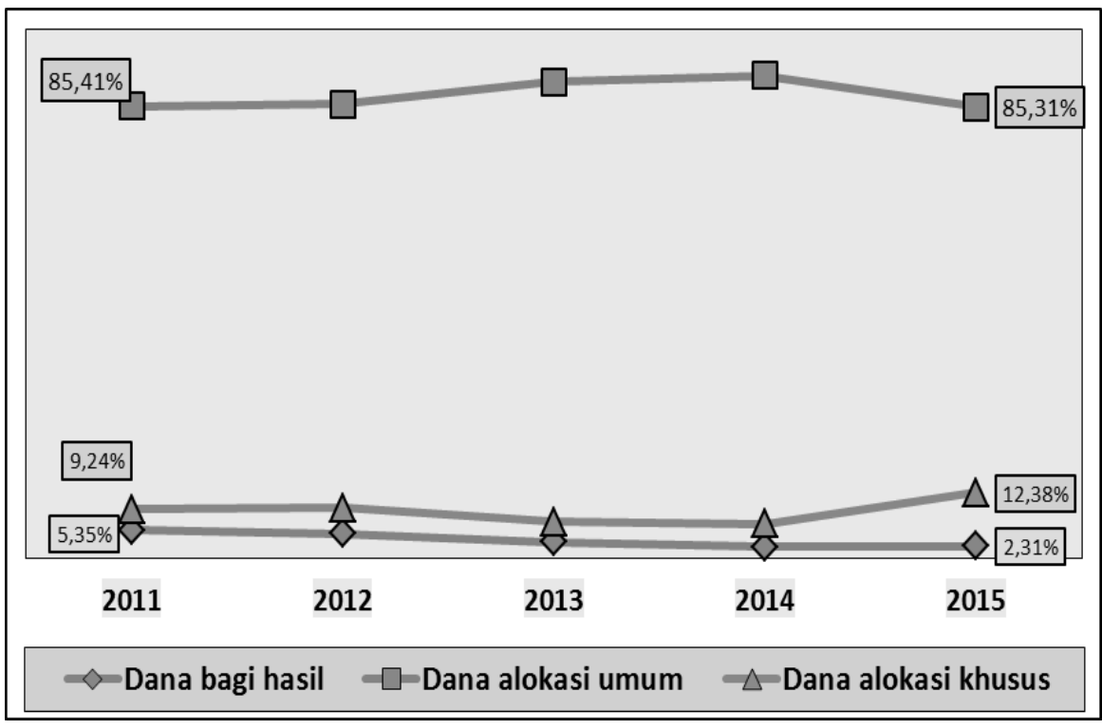
Dana Perimbangan merupakan sumber terbesar realisasi pendapatan daerah selama tahun 2011-2015, dengan kontribusi rata-rata sebesar 66,12%. Kontribusi terbesar dana perimbangan terhadap realisasi pendapatan daerah terjadi pada tahun 2012 sebesar 73,02%, dengan kecenderungan yang terus menurun.

Tabel 3.11
Realisasi Komponen Pembentuk Dana Perimbangan
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Total Dana Perimbangan
2011	45.863.492.591	731.980.739.000	79.150.700.000	856.994.931.591
2012	49.989.322.838	906.222.007.000	100.103.330.000	1.056.314.659.838
2013	34.564.265.803	1.021.871.180.000	79.063.860.000	1.135.499.305.803
2014	27.498.627.950	1.125.568.884.000	80.709.170.000	1.233.776.681.950

Tahun	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Total Dana Perimbangan
2015	30.994.004.370	1.146.008.708.000	166.313.240.000	1.343.315.952.370
Rata-Rata Realisasi	37.781.942.710	986.330.303.600	101.068.060.000	1.125.180.306.310
Rata-Rata Tumbuh	(3.717.372.055)	103.506.992.250	21.790.635.000	121.580.255.195

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.6
Persentase Kontribusi Realisasi
Komponen Pembentuk Dana Perimbangan
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Komponen penyumbang terbesar terhadap Dana Perimbangan selama tahun 2010-2015 diperoleh dari Dana Alokasi Umum dengan rata-rata sebesar 87,15%, disusul penerimaan Dana Alokasi Khusus rata-rata sebesar 8,89%, dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak rata-rata sebesar 3,97%. Selama tahun 2010-2015, Dana Alokasi Umum juga menjadi sumber penerimaan realisasi pendapatan daerah terbesar dengan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 60,26% per tahun. Pada periode tersebut kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap total pendapatan mengalami kecenderungan penurunan dari sebesar 65,72% pada tahun 2010 menjadi sebesar 49,27% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan ketergantungan Kabupaten Kebumen terhadap anggaran dari Pemerintah Pusat semakin menurun.

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	48.715.568.000	45.863.492.591	94,15	-0,94
2012	47.241.995.000	49.989.322.838	105,82	9,00
2013	30.811.786.000	34.564.265.803	112,18	-30,86
2014	26.362.854.000	27.498.627.950	104,31	-20,44
2015	34.576.982.000	30.994.004.370	89,64	12,71
Rata-rata			101,22	-6,11

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	731.980.739.000	731.980.739.000	100,00	13,87
2012	906.222.007.000	906.222.007.000	100,00	23,80
2013	1.021.871.180.000	1.021.871.180.000	100,00	12,76
2014	1.125.568.884.000	1.125.568.884.000	100,00	10,15
2015	1.125.568.884.000	1.146.008.708.000	101,82	1,82
Rata-rata			100,36	12,48

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	79.150.700.000	79.150.700.000	100,00	20,26
2012	100.103.330.000	100.103.330.000	100,00	26,47
2013	79.063.860.000	79.063.860.000	100,00	-21,02
2014	80.709.170.000	80.709.170.000	100,00	2,08
2015	166.312.470.000	166.313.240.000	100,00	106,06
Rata-rata			100,00	26,77

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

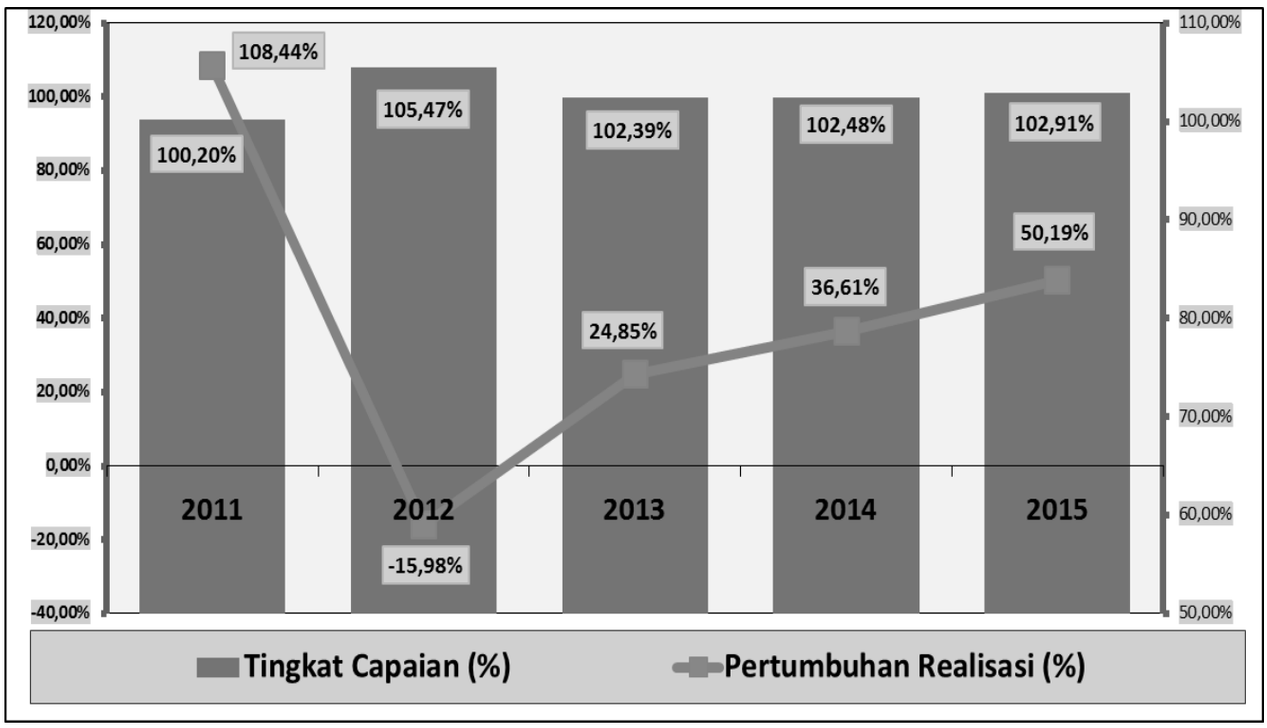
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.342.767.527.075,00 pada tahun 2011 menjadi Rp.737.713.048.850,00 pada tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 40,82%.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	342.079.256.000	342.767.527.075	100,20	108,44
2012	273.055.250.000	287.996.416.864	105,47	-15,98
2013	351.160.811.000	359.549.611.716	102,39	24,85
2014	479.323.873.000	491.191.595.112	102,48	36,61
2015	716.850.535.000	737.713.048.850	102,91	50,19
Rata-rata			102,69	40,82

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.7
Tingkat Capaian dan Pertumbuhan Realisasi
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

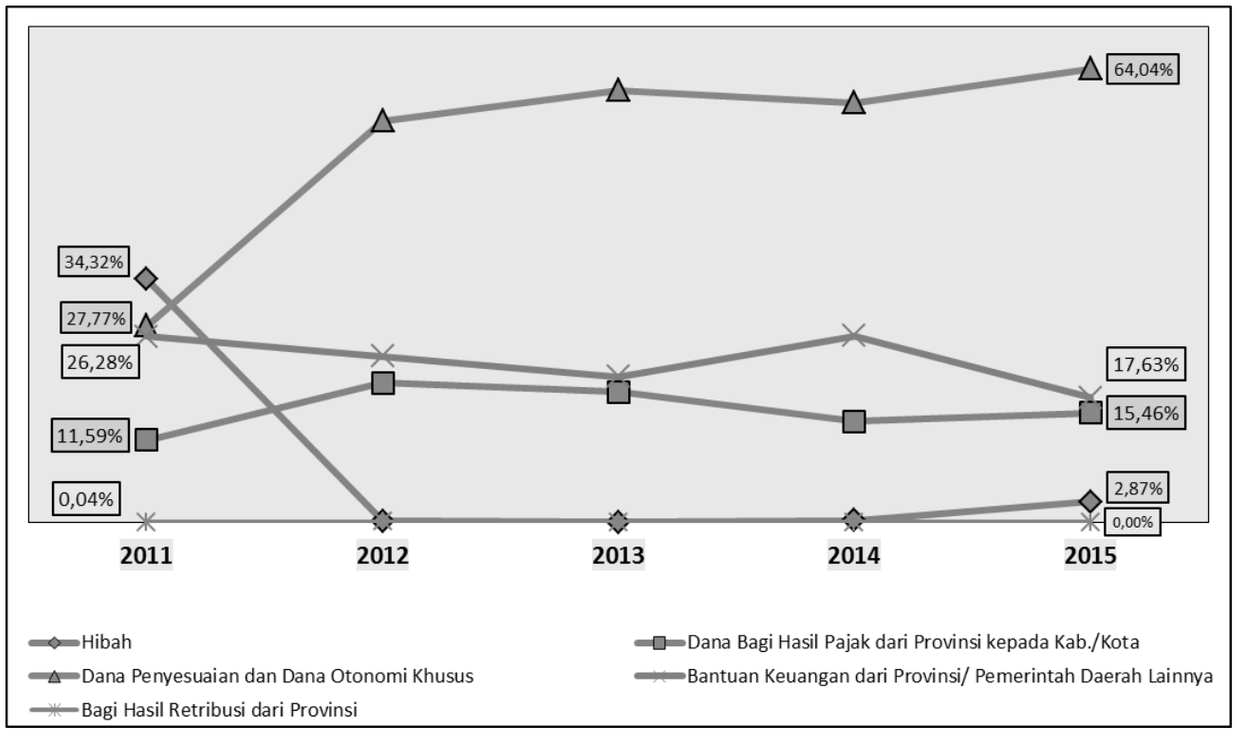
Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Komponen penyumbang terbesar Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2010-2015 diperoleh dari Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dengan rata-rata kontribusi sebesar 53,77%, disusul penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 22,83%, dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,86%.

Tabel 3.16
Realisasi Komponen Pembentuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Hibah	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kab./Kota	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	Total Lain-lain Pendapatan Daerahyang Sah
2011	117.637.460.200	39.736.748.669	95.198.962.400	90.070.390.000	123.965.806	342.767.527.075
2012	546.900.500	56.570.858.558	163.270.232.000	67.474.965.000	133.460.806	287.996.416.864
2013	-	66.179.825.253	219.576.541.000	73.793.245.463	-	359.549.611.716
2014	1.038.000.000	69.778.066.149	291.252.654.000	129.122.874.963	-	491.191.595.112
2015	21.148.531.000	114.070.000.131	472.419.886.000	130.074.631.719	-	737.713.048.850
Rata-Rata Realisasi	28.074.178.340	69.267.099.752	248.343.655.080	98.107.221.429	51.485.322	443.843.639.923
Rata-Rata Tumbuh	(24.122.232.300)	18.583.312.866	94.305.230.900	10.001.060.430	(30.991.452)	98.736.380.444

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.8
Persentase Kontribusi Realisasi Komponen Pembentuk
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	118.717.086.000	117.637.460.200	99,09	180,90
2012	724.165.000	546.900.500	75,52	-99,54
2013	2.000.000.000	0	0,00	-100,00
2014	0	1.038.000.000	100,00	0,00
2015	14.417.531.000	21.148.531.000	146,69	1937,43
Rata-rata			84,26	383,76

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemda Lainnya
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	30.303.811.000	39.736.748.669	131,13	34,13
2012	41.463.289.000	56.570.858.558	136,44	42,36
2013	43.060.019.000	66.179.825.253	153,69	16,99
2014	58.926.366.000	69.778.066.149	118,42	5,44
2015	99.365.806.000	114.070.000.131	114,80	63,48
Rata-rata			130,89	32,48

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	102.908.755.000	95.198.962.400	92,51	34,68
2012	163.270.232.000	163.270.232.000	100,00	71,50
2013	232.109.678.000	219.576.541.000	94,60	34,49
2014	291.252.654.000	291.252.654.000	100,00	32,64
2015	472.419.886.000	472.419.886.000	100,00	62,20
Rata-rata			97,42	47,10

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	90.070.390.000	90.070.390.000	100,00	311,27
2012	67.547.065.000	67.474.965.000	99,89	-25,09
2013	73.940.615.000	73.793.245.463	99,80	9,36
2014	129.144.853.000	129.122.874.963	99,98	74,98
2015	130.647.312.000	130.074.631.719	99,56	0,74
Rata-rata			99,85	74,25

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	79.214.000	123.965.806	156,49	-65,08
2012	50.499.000	133.460.806	264,28	7,66
2013	50.499.000	0	0,00	-100,00
2014	0	0	-	-
2015	0	0	-	-
Rata-rata			84,16	-31,48

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Struktur pendapatan Kabupaten Kebumen seperti yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa sumber pendapatan mayoritas/sebagian besar masih berasal dari sumber dana perimbangan/transfer dari Pemerintah Pusat. Atau dengan kata lain, secara umum APBD Kabupaten Kebumen masih belum mandiri. Salah satu kelemahan dari struktur pendapatan seperti ini adalah relatif tingginya ketidakpastian pendapatan dalam rangka perencanaan anggaran. Selain itu aliran Dana Perimbangan juga tidak sepenuhnya dalam kendali Pemerintah Kabupaten Kebumen, sehingga kemungkinan terjadinya keterlambatan proses pencairan dan lain sebagainya

selalu ada. Sebaliknya bila sumber pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka proyeksi pendapatan akan lebih dapat diprediksi dengan baik, sehingga mempermudah perencanaan program dan kegiatan.

Secara umum realisasi pendapatan daerah selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan, menunjukkan kinerja yang cukup baik dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Namun demikian, beberapa permasalahan yang masih terjadi dan menjadi bahan pertimbangan/evaluasi dalam penetapan target pendapatan pada tahun 2016-2021, antara lain:

a. deregulasi/berubahnya peraturan/ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, yang menetapkan kebijakan menutup peluang dilakukannya penambahan jenis pajak baru *(close list)*;
b. melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada akhirnya berpengaruh pada investasi di daerah;
c. turunnya potensi pajak daerah, karena perubahan lingkungan, seperti pada jenis pajak sarang burung walet; dan
d. turunnya harga minyak dunia.

Sementara itu, potensi dan tantangan perkembangan ke depan ditinjau dari perspektif regional dan nasional yang dapat mempengaruhi tingkat realisasi pendapatan daerah 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

a. stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah;
b. kondisi keamanan dan politik yang terjamin dan kondusif; dan
c. pertumbuhan investasi daerah.

2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung
    1) Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung);
    2) Belanja Bunga;
    3) Belanja Hibah;
    4) Belanja Bantuan Sosial;
    5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
    6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; dan
    7) Belanja Tidak Terduga.
b. Belanja Langsung
    1) Belanja Pegawai (Belanja Langsung);
    2) Belanja Barang dan Jasa; dan
    3) Belanja Modal.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi dari sisi pengeluaran/belanja, dimana kebijakan pengeluaran/belanja daerah dititikberatkan pada prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud dan implementasi dari kebijakan dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran belanja daerah pada APBD. Melalui belanja daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik, diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran belanja daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya Pemerintah Daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen belanja daerah dapat diperlihatkan seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2011-2015 disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selama periode tahun 2011-2015, secara umum kinerja realisasi belanja daerah mengalami peningkatan dari sebesar Rp.1.216.956.106.123,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.2.285.364.998.990,00 pada tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 17,84%. Pertumbuhan realisasi belanja daerah tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2014 yang mencapai sebesar 23,14% dari Rp.1.548.176.706.140,00 pada tahun 2013 menjadi Rp.1.906.501.957.288,00 pada tahun 2014 sebagai dampak pelaksanaan kegiatan tahun 2013 yang diluncurkan dan dilaksanakan pada tahun 2014 terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2011-2015 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 92,56%.

Tabel 3.22
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	1.300.293.217.000	1.216.956.106.123	93,59	20,48
2012	1.492.998.850.000	1.412.496.990.997	94,61	16,07
2013	1.704.544.615.000	1.548.176.706.140	90,83	9,61
2014	2.050.427.145.000	1.906.501.957.288	92,98	23,14
2015	2.516.633.339.000	2.285.364.998.990	90,81	19,87
		Rata-rata	92,56	17,84

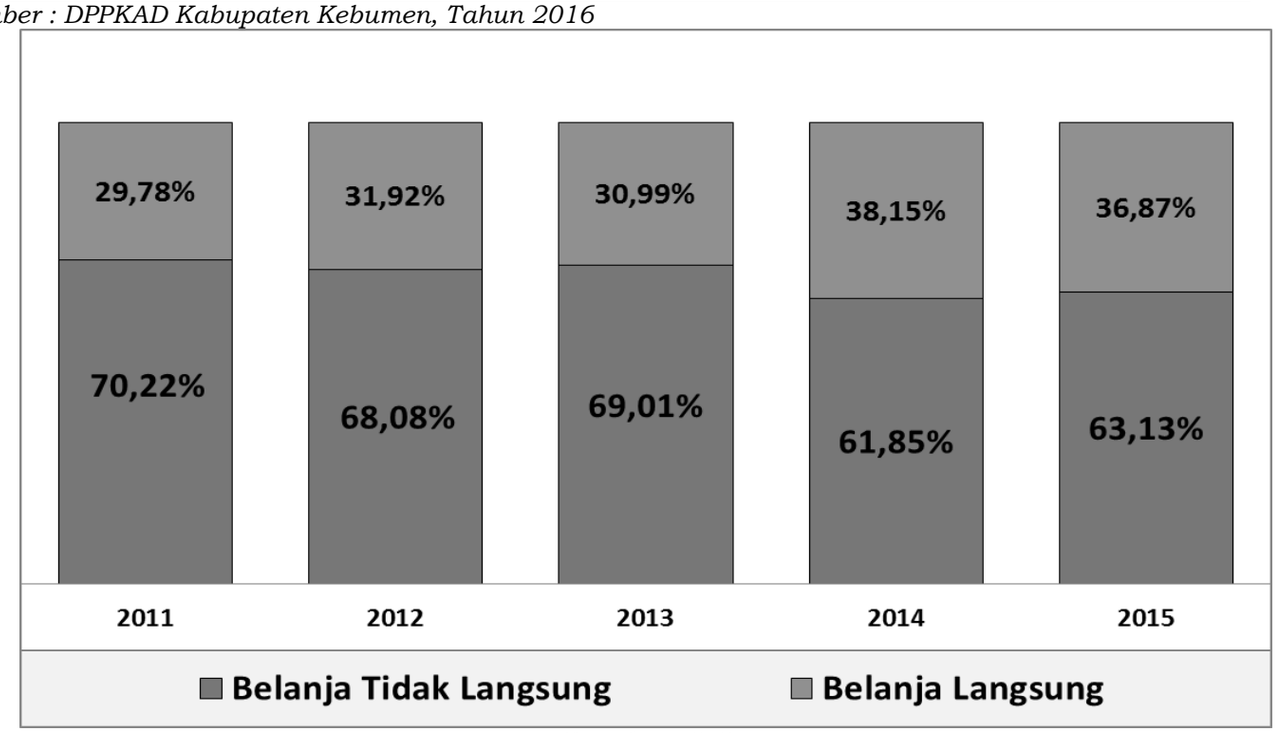
Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Ditinjau dari alokasi penggunaannya, realisasi belanja daerah selama tahun 2011-2015 didominasi untuk pemenuhan belanja tidak langsung dengan proporsi rata-rata sebesar 68,30%, sementara untuk belanja langsung dengan proporsi rata-rata sebesar 31,70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja aparatur khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah, dimana komposisi terbesar Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Kebumen merupakan guru dan tenaga kesehatan. Pemenuhan kebutuhan gaji guru dan tenaga kesehatan tersebut bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 3.23
Alokasi Penggunaan Belanja Daerah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015

No.	Uraian Belanja	Kontribusi (%)					Rata-rata (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Belanja Tidak Langsung	70,22	68,08	69,01	61,85	63,13	66,46
2.	Belanja Langsung	29,78	31,92	30,99	38,15	36,87	33,54
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.9
Alokasi Penggunaan Realisasi Belanja Daerah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Secara lengkap perincian mengenai realisasi pengeluaran belanja daerah selama tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Rekening	Tahun (Rp)					Rata-rata Realisasi (Rp)
		2011	2012	2013	2014	2015	
b	Belanja (b.1+b.2)	1.216.956.106.123	1.412.496.990.997	1.548.176.706.140	1.906.501.957.288	2.285.364.998.990	1.673.899.351.908
b.1	Belanja Tidak Langsung	854.601.898.392	961.565.754.262	1.068.350.146.221	1.179.099.679.995	1.442.716.469.314	1.101.266.789.637
b.1.1	Belanja Pegawai	769.462.896.120	880.803.165.013	956.479.531.443	1.059.118.686.274	1.124.760.537.291	958.124.963.228
b.1.4	Hibah	9.106.497.500	3.600.696.500	3.773.767.430	12.272.363.746	46.004.343.524	14.951.533.740
b.1.5	Bantuan Sosial	33.933.371.467	23.886.913.334	37.697.762.098	26.485.322.598	19.675.317.418	28.335.737.383
b.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.657.643.970	2.188.055.116	2.400.303.758	4.422.146.578	7.496.219.539	3.632.873.792
b.1.7	Bantuan Keuangan	40.441.489.335	51.086.924.299	67.955.879.792	76.771.160.799	244.762.669.246	96.203.624.694
b.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	42.901.700	30.000.000	17.382.296	18.056.799
b.2	Belanja Langsung	362.354.207.731	450.931.236.735	479.826.559.919	727.402.277.293	842.648.529.676	572.632.562.271
b.2.1	Belanja Pegawai	41.850.957.030	39.982.211.843	46.791.859.108	52.757.998.608	37.888.624.685	43.854.330.255
b.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.365.481.162	115.740.020.475	146.075.786.609	208.865.920.877	336.606.454.575	188.130.732.740
b.2.3	Belanja Modal	187.137.769.539	295.209.004.417	286.958.914.202	465.778.357.808	468.153.450.416	340.647.499.276

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

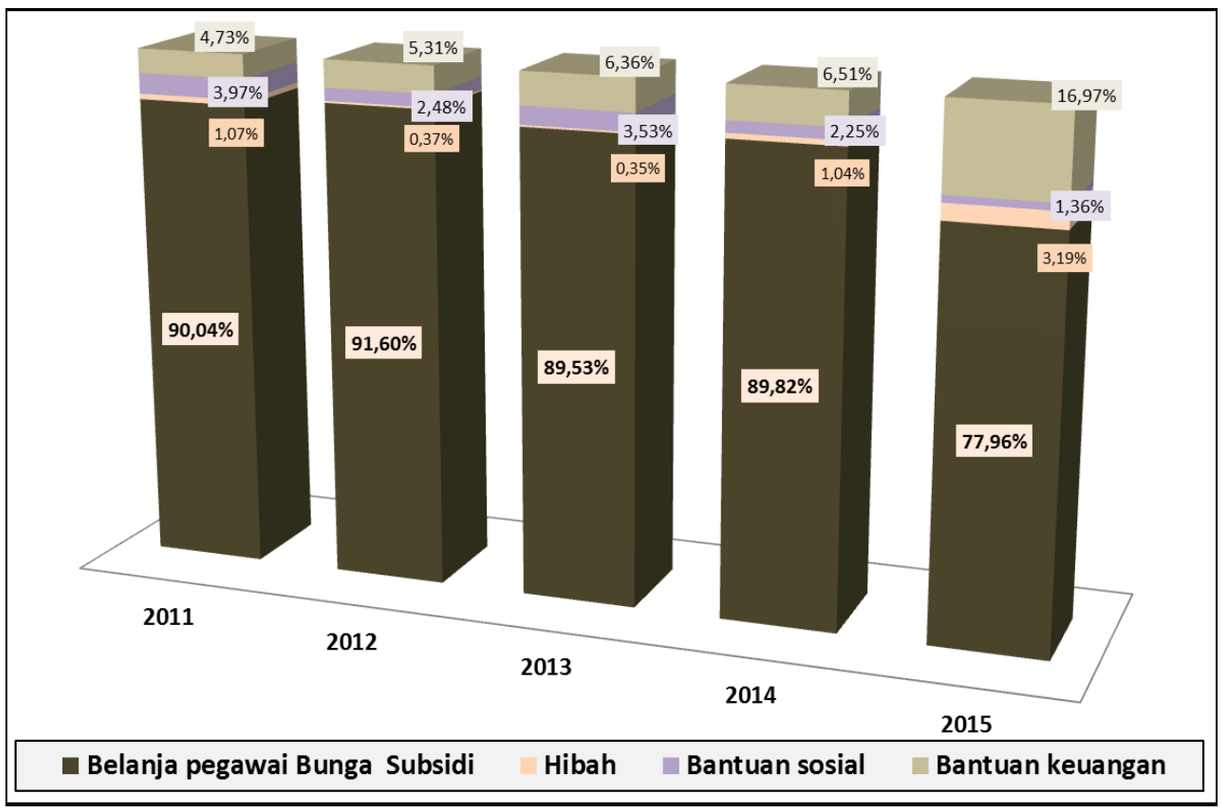
a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari Rp.854.601.898.392,00 pada tahun 2011 menjadi Rp.1.442.716.469.314,00 pada tahun 2015, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,09%. Pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 22,36%. Sedangkan tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung selama tahun 2011-2015 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 94,39%.

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
APBD Kabupaten KebumenTahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi(%)
2011	871.477.755.000	854.601.898.392	98,06	9,11
2012	1.004.087.853.000	961.565.754.262	95,77	12,52
2013	1.165.936.502.000	1.068.350.146.221	91,63	11,11
2014	1.260.278.942.000	1.179.099.679.995	93,56	10,37
2015	1.552.333.693.000	1.442.716.469.314	92,94	22,36
Rata-rata			94,39	13,09

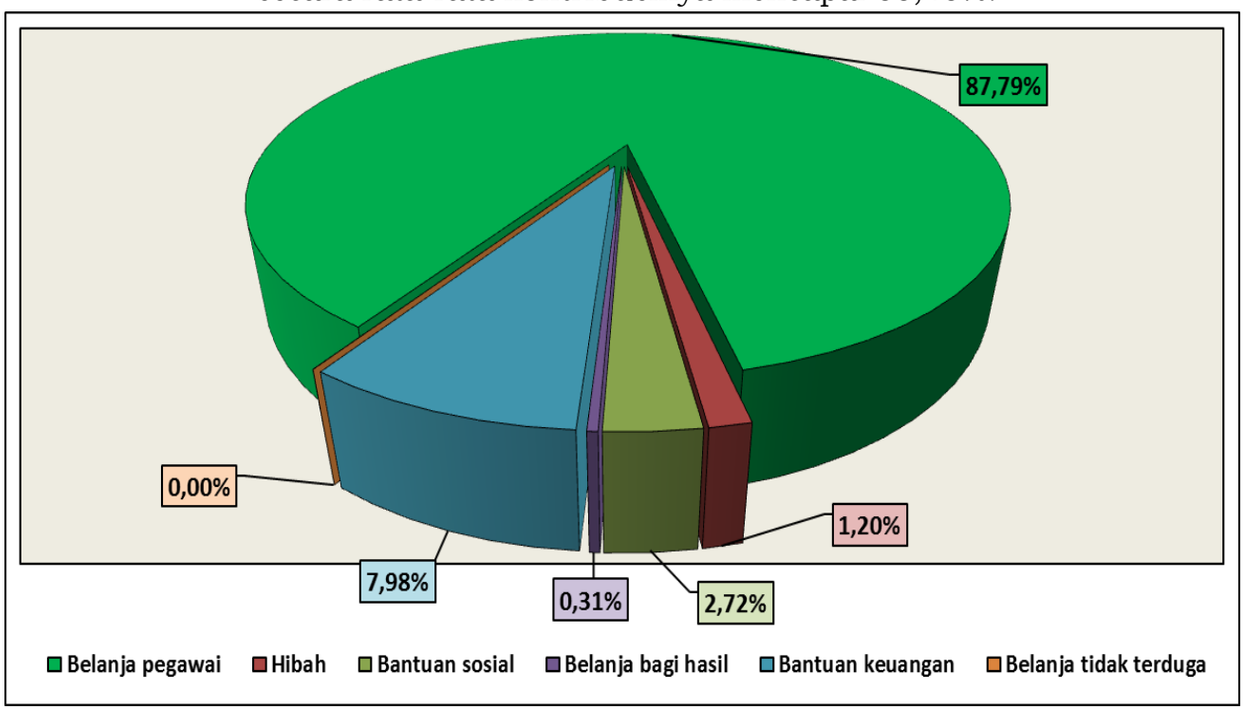
Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.10
Kontribusi Komponen BTL terhadap BTL
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

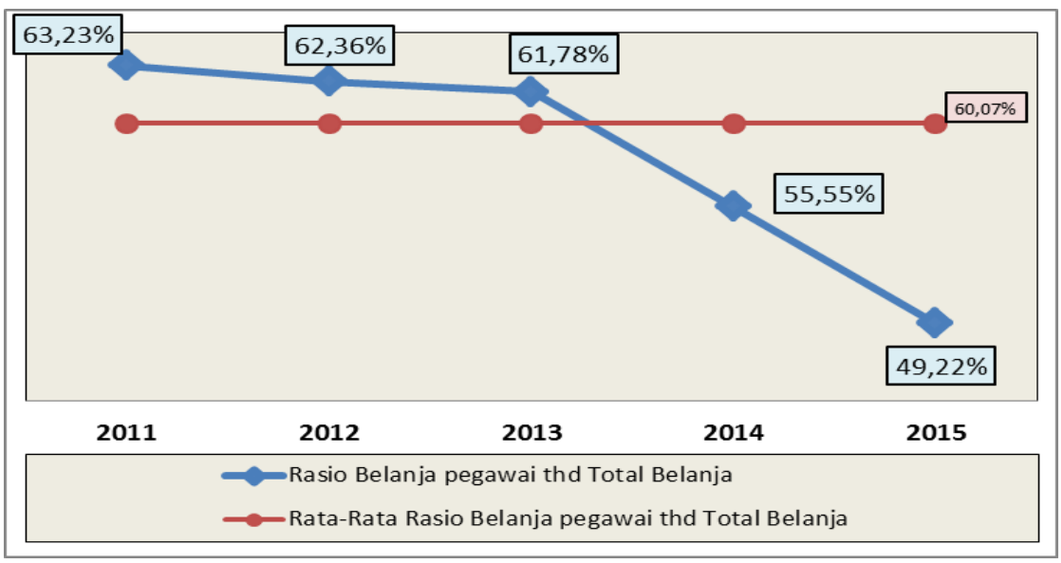
Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) selama tahun 2011-2015 setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Namun apabila ditinjau dari kontribusinya terhadap total belanja daerah, mengalami penurunan dari sebesar 70,22% pada tahun 2011 menjadi 63,13% pada tahun 2015 atau secara rata-rata kontribusinya mencapai 66,46%.



Gambar 3.11
Rata-Rata Kontribusi Komponen BTL terhadap BTL
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016 (data diolah)



Gambar 3.12
Pertumbuhan Kontribusi Belanja Pegawai
terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016 (data diolah)

Rasio realisasi Belanja Pegawai terhadap total belanja daerah selama tahun 2011-2015 terus menurun setiap tahunnya dari 63,23% tahun 2011 menjadi 49,22% pada tahun 2015, atau secara rata-rata pertahun rasionya mencapai 58,43%. Penurunan rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah tersebut menunjukkan upaya rasionalisasi terhadap struktur belanja daerah sudah mulai dijalankan secara efektif.

Tabel 3.26
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Pegawai (BTL)
APBD Kabupaten KebumenTahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	784.477.421.000	769.462.896.120	98,09	11,52
2012	921.088.947.000	880.803.165.013	95,63	14,47
2013	1.051.550.154.000	956.479.531.443	90,96	8,59
2014	1.131.221.395.000	1.059.118.686.274	93,63	10,73
2015	1.226.634.120.000	1.124.760.537.291	91,69	6,20
Rata-rata			94,00	10,30

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.27
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Hibah
APBD Kabupaten KebumenTahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	9.599.813.000	9.106.497.500	94,86	-57,15
2012	4.311.651.000	3.600.696.500	83,51	-60,46
2013	3.863.000.000	3.773.767.430	97,69	4,81
2014	17.440.550.000	12.272.363.746	70,37	225,20
2015	52.506.135.000	46.004.343.524	87,62	274,86
Rata-rata			86,81	77,45

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.28
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
APBD Kabupaten KebumenTahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	34.592.170.000	33.933.371.467	98,10	3,14
2012	24.638.148.000	23.886.913.334	96,95	-29,61
2013	38.191.754.000	37.697.762.098	98,71	57,82
2014	28.992.973.000	26.485.322.598	91,35	-29,74
2015	20.187.155.000	19.675.317.418	97,46	-25,71
Rata-rata			96,51	-4,82

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.29
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	1.677.250.000	1.657.643.970	98,83	76,88
2012	2.219.089.000	2.188.055.116	98,60	32,00
2013	2.400.321.000	2.400.303.758	100,00	9,70
2014	4.511.711.000	4.422.146.578	98,01	84,23
2015	7.546.299.000	7.496.219.539	99,34	69,52
Rata-rata			98,96	54,46

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.30
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
APBD Kabupaten KebumenTahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	40.923.864.000	40.441.489.335	98,82	6,04
2012	51.457.864.000	51.086.924.299	99,28	26,32
2013	68.380.614.000	67.955.879.792	99,38	33,02
2014	77.166.835.000	76.771.160.799	99,49	12,97
2015	245.048.028.000	244.762.669.246	99,88	218,82
Rata-rata			99,37	59,43

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.31
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
APBD Kabupaten KebumenTahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	207.237.000	0	0,00	-
2012	372.154.000	0	0,00	-
2013	1.550.659.000	42.901.700	2,77	-
2014	945.478.000	30.000.000	3,17	-30,07
2015	411.956.000	17.382.296	4,22	-42,06
Rata-rata			2,03	-14,43

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

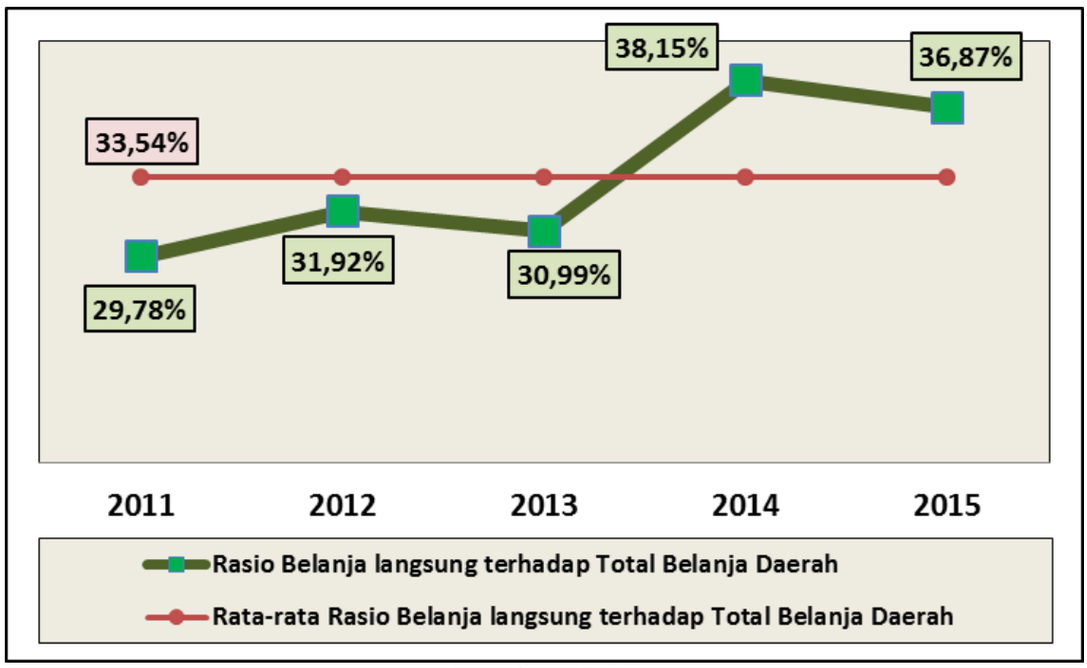
b. Belanja Langsung

Belanja Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.362.354.207.731,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.842.648.529.575,00 pada tahun 2015, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 31,61%. Tingkat capaian realisasi Belanja Langsung selama tahun 2011-2015 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 89,05%.

Tabel 3.32
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Langsung
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

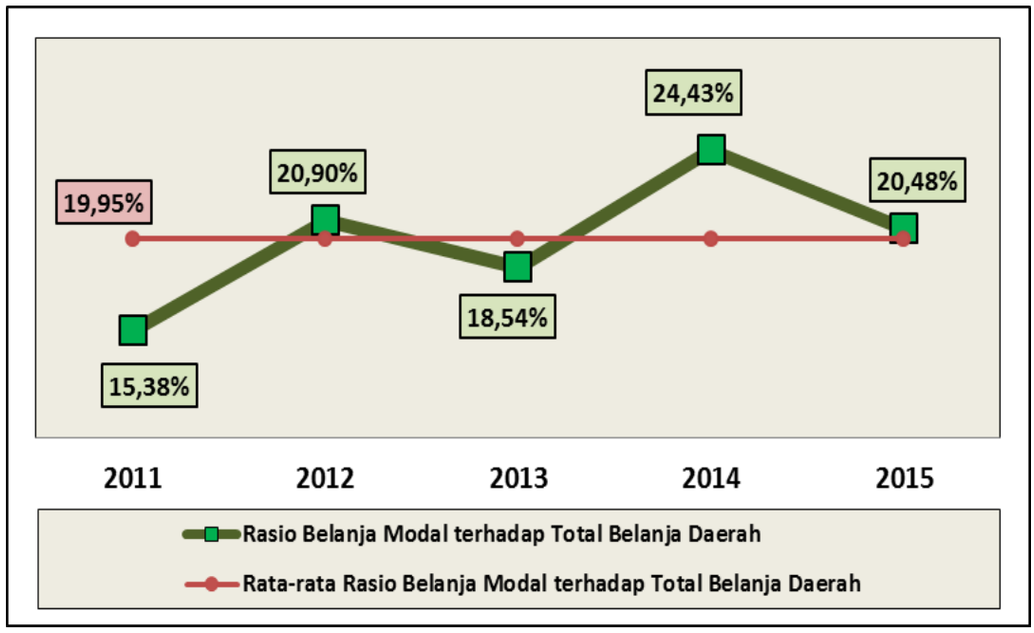
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	428.815.462.000	362.354.207.731	84,50	59,75
2012	488.910.997.000	450.931.236.735	92,23	24,44
2013	538.608.113.000	479.826.559.919	89,09	6,41
2014	790.148.203.000	727.402.277.293	92,06	51,60
2015	964.299.646.000	842.648.529.676	87,38	15,84
Rata-rata			89,05	31,61

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.13
Kontribusi Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015
Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Realisasi Belanja Langsung (BL) selama tahun 2011-2015 setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif dan kecenderungan kontribusinya terhadap total belanja daerah meningkat dari sebesar 29,78% pada tahun 2011 menjadi 36,87% pada tahun 2015 atau secara rata-rata kontribusinya mencapai 33,54%.



Gambar 3.14
Kontribusi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Rasio realisasi Belanja Modal terhadap total belanja daerah selama tahun 2011-2015 setiap tahunnya fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat dari sebesar 15,38% pada tahun 2011 menjadi sebesar 20,48% pada tahun 2015 atau secara rata-rata pertahunnya mencapai 19,95%. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Realisasi Belanja Modal yang semakin tinggi akan meningkatkan *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, dengan semakin tinggi rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, merupakan indikasi positif terhadap upaya perbaikan kualitas struktur belanja daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3.33
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai (BL)
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	44.511.119.000	41.850.957.030	94,02	45,90
2012	45.032.649.000	39.982.211.843	88,78	-4,47
2013	50.699.407.000	46.791.859.108	92,29	17,03
2014	55.082.253.000	52.757.998.608	95,78	12,75
2015	41.861.789.000	37.888.624.685	90,51	-28,18
Rata-rata			92,28	8,61

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.34
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	142.923.270.000	133.365.481.162	93,31	68,04
2012	124.335.192.000	115.740.020.475	93,09	-13,22
2013	157.298.473.000	146.075.786.609	92,87	26,21
2014	234.533.735.000	208.865.920.877	89,06	42,98
2015	395.339.476.000	336.606.454.575	85,14	61,16
Rata-rata			90,69	37,04

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Tabel 3.35
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	241.381.073.000	187.137.769.539	77,53	57,56
2012	319.543.156.000	295.209.004.417	92,38	57,75
2013	330.610.233.000	286.958.914.202	86,80	-2,79
2014	500.532.215.000	465.778.357.808	93,06	62,32
2015	527.098.381.000	468.153.450.416	88,82	0,51
Rata-rata			87,72	35,07

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

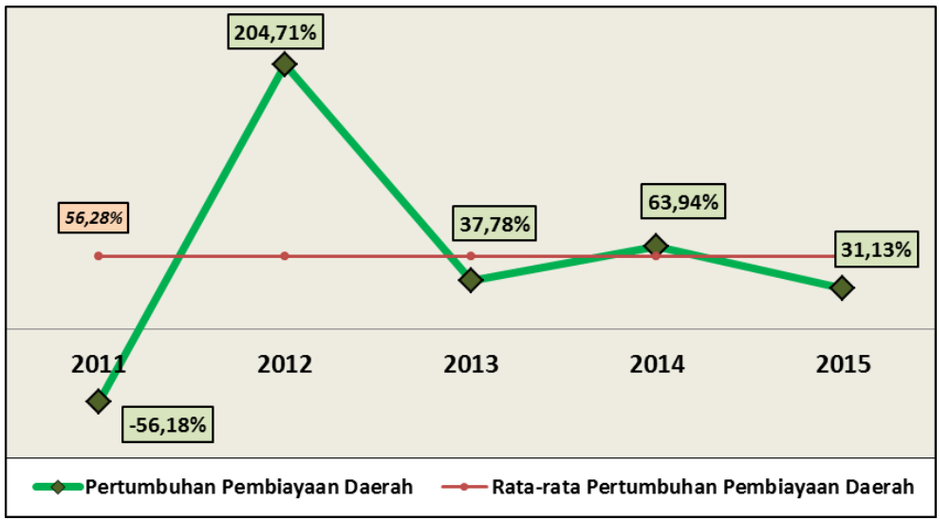
3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Hal ini dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang atau *balance*. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 3.36
Rata-rata Realisasi Pembiayaan Daerah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

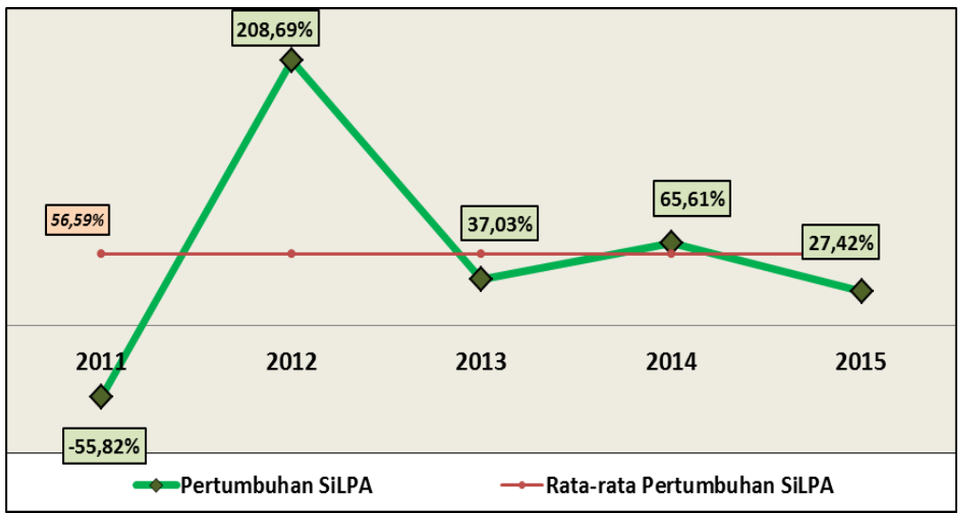
No.	Rekening Pembiayaan	Tahun (Rp)					Rata-rata Realisasi (Rp)
		2011	2012	2013	2014	2015	
c.1	Penerimaan Pembiayaan	26.883.911.726	84.583.469.486	114.972.070.751	187.531.783.632	239.107.170.935	130.615.681.306
c.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	26.548.569.226	81.953.428.713	112.297.925.751	185.976.018.632	236.977.605.481	128.750.709.561
c.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	2.630.040.773	-	-	-	526.008.155
c.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	335.342.500	-	2.674.145.000	1.555.765.000	2.129.565.455	1.338.963.591
c.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.250.000.000	6.474.000.000	7.350.000.000	11.100.000.000	7.750.000.000	6.784.800.000
c.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.250.000.000	6.474.000.000	7.350.000.000	11.100.000.000	7.750.000.000	6.784.800.000
	Pembiayaan Netto (c.1 – c.2)	25.633.911.726	78.109.469.486	107.622.070.751	176.431.783.632	231.357.170.935	123.830.881.306

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.15
Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016



Gambar 3.16
Pertumbuhan Realisasi SiLPA
APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

Selama periode 2011-2015, realisasi pembiayaan daerah fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp.25.633.911.726,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.231.357.170.935,00 pada tahun 2015, atau secara rata-rata meningkat 56,28% per tahun. Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama periode tahun 2011-2015 secara rata-rata tumbuh sebesar 56,59%. Kondisi tersebut disebabkan di antaranya dari adanya pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

4. Neraca Keuangan

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan dan pemerintah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah), pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah terkait aset, kewajiban dan ekuitas dana. Laporan ini sangat penting bagi manajemen Pemerintah Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

a. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Sedangkan investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Jumlah Aset Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2011-2015 meningkat dari sebesar Rp2.708.156.135.743,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp3.910.364.484.326,75 pada tahun 2015, atau secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 9,71%. Aset lancar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 41,90% yang menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Kebumen berada pada kondisi sehat. Sementara itu untuk Investasi Jangka

Panjang secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 12,61%; Aset Tetap sebesar 5,97%; serta Aset Lainnya sebesar 272,06%.

b. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah kewajiban Kabupaten Kebumen periode tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari Rp512.890.635,00 pada tahun 2011 menjadi Rp10.021.828.785,00 pada tahun 2015, atau secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 266,49%. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang yang mengalami penurunan dengan rata-rata 0% serta kewajiban jangka pendek yang mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 266,49%.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Kondisi ekuitas dana Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015 meningkat dari sebesar Rp2.707.643.245.108,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp3.743.016.878.932,00 pada tahun 2015, atau secara rata-rata tumbuh sebesar 8,60%.

Kondisi kewajiban dan ekuitas dana Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari Rp2.708.156.135.743,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp3.900.342.555.541,63,00 pada tahun 2015, atau secara rata-rata meningkat 9,64%. Tingginya pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.

Tabel 3.37
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	76.651.571.573	105.799.735.455	182.631.866.776	204.628.739.012	233.308.457.706	39.164.221.533
	Kas di Bendaharan Pengeluaran	1.694.877.451	283.591	1.121.665	13.745.107	105.534.490	(397.335.740)
	Kas di BLUD RSUD	3.607.663.741	6.498.188.126	3.343.236.934	22.322.692.446	23.819.680.068	5.053.004.082
	Kas di Bendaharan Penerimaan	97.460.125	61.621.325	25.825.400	16.616.625	16.367.600	(20.273.131)
	Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	10.021.681.727	-	-
	Kas Lainnya	-	-	-	-	19.103.235.427	4.775.808.857
	Piutang Pajak dan Retribusi	182.881.562	129.516.117	5.315.095.001	3.689.422.425	12.787.447.606	3.151.141.511
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
	Piutang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	Piutang Lain-Lain	3.792.304.286	9.115.012.673	7.129.347.313	5.016.634.562	16.219.488.565,07	3.106.796.070
	Penyisihan Piutang			-	-	(9.459.232.222,40)	(2.364.808.056)
	Piutang Lain-Lain/Bank Jateng	-	-	-	-	-	-
	Piutang Lain-Lain/Restitusi Pajak	-	-	-	-	-	-
	Persediaan	12.138.561.402	17.690.123.305	16.292.941.722	23.593.787.529	97.667.208.499,57	21.382.161.774
	Jumlah Aset Lancar	98.165.320.140	139.294.480.592	214.739.434.811	269.303.319.432	393.568.187.739,18	73.850.716.900
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						



No.	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Investasi Non Permanen	4.997.157.500	1.695.842.000	364.487.900	264.902.400	184.216.000	(1.203.235.375)
	Investasi Permanen	-	-		-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	43.205.757.996	55.130.927.684	63.189.200.595	75.436.412.378	76.735.773.359	8.382.503.841
	Jumlah Investasi Permanen						
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	48.202.915.496	56.826.769.684	63.553.688.495	75.701.314.778	76.919.989.359	7.179.268.466
1.3	ASET TETAP						
	Tanah	776.640.483.843	789.431.645.450	624.386.065.714	651.237.700.896	737.936.541.657,29	(9.675.985.546)
	Peralatan dan Mesin	263.666.743.022	308.063.355.803	339.722.087.996	388.314.836.390	523.436.123.101	64.942.345.020
	Gedung dan Bangunan	629.759.915.044	695.147.570.249	915.532.629.408	1.200.971.606.068	1.251.947.182.409	155.546.816.841
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	743.373.155.258	815.361.115.373	898.219.256.461	1.030.859.454.225	1.300.829.639.703,57	139.364.121.111
	Aset Tetap Lainnya	51.122.657.635	64.665.441.854	79.417.086.098	76.048.150.506	80.960.105.527	7.459.361.973
	Konstruksi dalam Pengerjaan	44.475.443.329	141.257.975.311	103.761.603.924	39.247.780.112	64.140.007.457	4.916.141.032
	Akumulasi Penyusutan			-	-	(838.900.781.435,58	(209.725.195.359)
	Jumlah Aset Tetap	2.509.038.398.131	2.813.927.104.040	2.961.038.729.601	3.386.679.528.197	3.120.348.818.419,28	152.827.605.072
1.4	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.5	ASET LAINNYA						
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-
	Piutang pada PD BPR	-	-	-	-	-	-



No.	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Penyertaan Modal Terarah	-	-	-	-	-	-
	Piutang Pasien	-	-	-	-	-	-
	Aktiva Tidak Produktif	-	-	-	-	-	-
	Aset Lain-Lain	52.749.501.976	43.134.063.553	22.297.589.981	25.786.768.193	319.527.388.809,29	66.694.471.708
	Jumlah Aset Lainnya	52.749.501.976	43.134.063.553	22.297.589.981	25.786.768.193	319.527.388.809,29	66.694.471.708
	JUMLAH ASET (1.1 + 1.2 + ... + 1.5)	2.708.156.135.743	3.053.182.417.868	3.261.629.442.889	3.757.470.930.600	3.910.364.384.326,75	300.552.062.146
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Perhitungan Kepada Pihak Ketiga (PPK)	684.052	281.421	206.743	9.252.811	27.777.474	6.773.356
	Bagian Lancar Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya:						
	Utang Kepada Pihak Ketiga	512.206.583	5.649.439.661	6.351.212.927	7.372.880.175	-	(128.051.646)
	Utang Kepada Bank Jateng Cabang Kebumen	-	-	-	-	-	-
	Utang Kepada PDAM	-	-	-	-	-	-
	Utang Kepada PT ASKES	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	119.576.864	29.894.216
	Utang Beban	-	-	-	-	2.447.020.803	611.755.201
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	7.427.453.644	1.856.863.411
	Jumlah Kewajiban	512.890.635	5.649.721.082	6.351.419.670	7.382.132.986	10.021.828.785	2.377.234.538

No.	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Jangka Pendek						
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	Utang Dana Talangan Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN (2.1 + 2.2)	512.890.635	5.649.721.082	6.351.419.670	7.382.132.986	10.021.828.785	2.377.234.538
2.3	EKUITAS DANA						
	EKUITAS DANA LANCAR						
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	81.953.428.713	112.297.925.751	185.976.018.632	236.977.605.481	-	(20.488.357.178)
	Pendapatan yang Ditangguhkan	97.460.125	61.621.325	25.825.400	16.616.625	-	(24.365.031)
	Cadangan Piutang	3.975.185.848	9.244.528.790	12.444.442.314	8.706.056.986	-	(993.796.462)
	Cadangan Persediaan	12.138.561.402	17.690.123.305	16.292.941.722	23.593.787.529	-	(3.034.640.350)
	Dana yang Harus Disediakan untuk :						
	Pembayaran Utang Jangka Pendek	(512.206.583)	(5.649.439.661)	(6.351.212.927)	(7.372.880.175)	-	128.051.646
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	97.652.429.505	133.644.759.510	208.388.015.141	261.921.186.446	-	(24.413.107.376)
	EKUITAS DANA INVESTASI						
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	48.202.915.496	56.826.769.684	63.553.688.495	75.701.314.778	-	(12.050.728.874)

No.	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	2.509.038.398.131	2.813.927.104.040	2.961.038.729.601	3.386.679.528.197	-	(627.259.599.533)
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	52.749.501.976	43.134.063.553	22.297.589.981	25.786.768.193	-	(13.187.375.494)
	Dana yang Harus Disediakan untuk :						
	Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2.609.990.815.603	2.913.887.937.276	3.046.890.008.078	3.488.167.611.168	-	(652.497.703.901)
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	2.707.643.245.108	3.047.532.696.786	3.255.278.023.219	3.750.088.797.614	-	258.843.408.456
	EKUITAS						
	EKUITAS	-	-	-	-	3.900.342.555.541,63	
	JUMLAH EKUITAS DANA:						
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.708.156.135.743	3.053.182.417.868	3.261.629.442.889	3.757.470.930.600	3.910.364.384.326,75	300.552.062.146

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016

d. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan *Quick Ratio*. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Sedangkan *Quick Ratio* adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.38
Rasio Likuiditas Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Rasio Likuiditas	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Rasio Lancar	191,40	24,66	33,81	36,48	39,27	-8,61
2	Quick Ratio	167,73	21,52	31,24	33,28	29,53	-11,69

Sumber : Data primer, diolah

Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2011 sebesar 191,40 menurun menjadi 24,66 pada tahun 2012. Dari tahun 2012-2015 rasio lancar meningkat dari 24,66 menjadi 39,27. Namun demikian, secara rata-rata, nilai rasio lancar Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015 menurun dengan angka rata-rata 8,61% per tahun. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2011-2015 dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*Current Ratio*) karena *Quick Ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Nilai rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 (satu). Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai *Quick Ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2011 mencapai 167,73. Nilai ini kemudian turun menjadi 21,52 pada tahun 2012. Namun sebagaimana rasio lancar, pada tahun 2012-2015 nilai *Quick Ratio* juga meningkat dari 21,52 menjadi 29,53 Namun demikian, secara rata-rata nilai *Quick Ratio* Pemerintah Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2011-2015 tumbuh negatif atau mengalami penurunan dengan angka rata-rata 11,69% per tahun. Nilai dari perhitungan tersebut

menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Kebumen setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

e. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Tabel 3.39
Rasio Solvabilitas Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Rasio Solvabilitas	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Rasio Kewajiban terhadap Aset	0,00019	0,00185	0,00195	0,00196	0,00256	228,41
2	Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	0,00019	0,00185	0,00195	0,00197	0,00257	228,84

Sumber : Data primer, diolah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset Kabupaten Kebumen periode tahun 2011-2015 meningkat dari 0,00019, pada tahun 2011 menjadi 0,00256 pada tahun 2015. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin buruk rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2011-2015 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Daerah melakukan pinjaman ke kreditor. Namun tingkat kemampuan membayar tersebut cenderung menurun dengan laju 228,41% per tahun.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2011 sebesar 0,00019 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 0,00257. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

1. Pendapatan Daerah

   Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada:

   a. Pendapatan Asli Daerah
      1) intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
      2) peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
      3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
      4) optimalisasi operasional, monitoring, evaluasi dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
      5) pemberian insentif/bonus dan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target, serta pemberian *dis-insentif* atau menjatuhkan sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
   b. Dana Perimbangan
      1) intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
      2) peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah (pusat dan provinsi) dan pajak daerah.

2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

   Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan kepada:

   a. meningkatkan porsi belanja publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat; dan
   b. meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
   a. pengendalian defisit pembiayaan daerah yang artinya menurunkan defisit anggaran dengan tidak melebihi ketentuan pemerintah yang berlaku;
   b. untuk penerimaan daerah, ditempuh kebijakan melalui upaya pinjaman daerah (pinjaman jangka pendek dan jangka panjang); dan
   c. untuk pengeluaran daerah, ditempuh kebijakan peningkatan efisiensi penyertaan modal kepada perusahaan milik Daerah.

C. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2011-2015.

Tabel 3.40
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Tahun	Total Belanja Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Pengeluaran
2011	811.313.853.150	1.218.206.106.123	66,60%
2012	920.785.376.856	1.418.970.990.997	64,89%
2013	1.003.271.390.551	1.555.526.706.140	64,50%
2014	1.111.876.684.882	1.917.601.957.288	57,98%
2015	1.162.649.161.976	2.293.114.998.990	50,70%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016 (data diolah)

Total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2011-2015 khususnya terkait kebutuhan belanja pegawai (baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung) mengalami peningkatan dari Rp.811.313.853.150,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.1.162.649.161.976,00 pada tahun 2015. Namun demikian, rasio pemenuhan belanja kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah menurun dari 66,60% pada tahun 2011 menjadi 50,70% pada tahun 2015. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur khususnya belanja pegawai pada belanja tidak langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tambahan Penghasilan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta Belanja Pemungutan Pajak Daerah.

D. Kerangka Pendanaan

1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

   Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat tergambar pada realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti pada digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.41
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Tumbuh (%)
a.	Belanja Tidak Langsung	771.120.540.090	882.991.220.129	958.879.835.201	1.063.540.832.852	1.132.256.756.830	10,42
1.	Belanja Pegawai	769.462.896.120	880.803.165.013	956.479.531.443	1.059.118.686.274	1.124.760.537.291	10,30
2.	Bagi Hasil	1.657.643.970	2.188.055.116	2.400.303.758	4.422.146.578	7.496.219.539	54,46
b.	Belanja Langsung	226.510.681.000	230.591.727.900	217.135.407.263	277.324.237.063	378.008.592.919	24,06
1.	Belanja Administrasi Perkantoran (Rutin)	47.000.000.000	50.000.000.000	54.000.000.000	57.000.000.000	60.000.000.000	5,93
2.	Dana Alokasi Khusus	79.150.700.000	100.103.330.000	79.063.860.000	80.709.170.000	166.313.240.000	26,77
3.	Pendamping DAK	7.915.070.000	10.010.333.000	7.906.386.000	8.070.917.000	16.631.324.000	26,77
4.	Penunjang DAK	2.374.521.000	3.003.099.900	2.371.915.800	2.421.275.100	4.989.397.200	26,77
5.	Belanja Bantuan Provinsi	90.070.390.000	67.474.965.000	73.793.245.463	129.122.874.963	130.074.631.719	74,25
c.	Pembiayaan Pengeluaran	1.250.000.000	6.474.000.000	7.350.000.000	11.100.000.000	7.750.000.000	86,21
1.	Penyertaan Modal	1.250.000.000	6.474.000.000	7.350.000.000	11.100.000.000	7.750.000.000	86,21
	TOTAL (A+B+C)	998.881.221.090	1.120.056.948.029	1.183.365.242.464	1.351.965.069.915	1.518.015.349.749	12,82

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016 (data diolah)

2. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016–2021

a. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah, pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yang diproyeksikan dapat meningkat sebesar 7% setiap tahunnya melalui mobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya, meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah:
   a) intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
   b) peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
   c) optimalisasi operasional, monitoring, evaluasi dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
   d) pemberian insentif/bonus dan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target, serta pemberian disinsentif atau menjatuhkan sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran; dan
   e) optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2) Dana Perimbangan:
   a) peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah (pusat dan provinsi) dan pajak daerah; dan
   b) peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus.
3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

   Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

   Proyeksi kerangka pendapatan daerah tahun 2016-2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Rekening	Target Tahun (Rp)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pendapatan (a.1+a.2+a.3)	2.621.839.759.000	2.941.767.730.906	3.217.621.086.027	3.531.728.282.727	3.793.954.299.015	4.048.673.224.696
a.1	Pendapatan Asli Daerah	216.524.649.000	242.850.550.379	264.822.783.416	289.071.367.149	314.292.626.651	337.758.084.374
a.1.1	Pajak Daerah	49.043.000.000	51.150.174.779	55.437.855.170	59.725.535.561	64.013.215.953	69.527.013.229
a.1.2	Retribusi Daerah	26.135.019.000	29.841.495.000	32.419.028.100	34.372.610.910	36.437.752.001	40.465.507.201
a.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.201.619.000	10.714.000.000	12.025.000.000	14.240.000.000	16.790.000.000	19.015.000.000
a.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	135.145.011.000	151.144.880.600	164.940.900.146	180.733.220.677	197.051.658.698	208.750.563.944
a.2	Dana Perimbangan	1.885.347.687.000	2.140.614.851.227	2.325.818.855.826	2.533.160.737.441	2.670.751.660.270	2.777.669.416.656
a.2.1	Dana Bagi Hasil	39.248.253.000	43.301.767.427	47.631.944.170	52.395.138.587	57.634.652.445	63.398.117.690
a.2.2	Dana Alokasi umum	1.256.068.249.000	1.507.281.898.800	1.688.155.726.656	1.890.734.413.855	2.023.085.822.825	2.124.240.113.966
a.2.3	Dana alokasi khusus	590.031.185.000	590.031.185.000	590.031.185.000	590.031.185.000	590.031.185.000	590.031.185.000
a.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	519.967.423.000	558.302.329.300	626.979.446.785	709.496.178.137	808.910.012.094	933.245.723.667
a.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepada Kabupaten/ Kota	99.365.806.000	109.460.557.700	114.933.585.585	120.680.264.864	126.714.278.107	139.385.705.918
a.3.2	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	35.858.316.000	35.858.316.000	36.934.065.480	39.150.109.409	43.065.120.350	47.371.632.385

No.	Rekening	Target Tahun (Rp)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
a.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	102.341.755.000	102.341.755.000	102.341.755.000	102.341.755.000	102.341.755.000	102.341.755.000
a.3.4	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	282.401.546.000	310.641.700.600	372.770.040.720	447.324.048.864	536.788.858.637	644.146.630.364

Sumber : Data primer, diolah

b. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah tahun 2016-2021 antara lain:

1) pemenuhan pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas (Program Janji Bupati dan Wakil Bupati) dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
2) pemenuhan pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3) pemenuhan pelaksanaan program yang bersifat memiliki standar pelayanan minimal dan operasional;
4) mengakomodir seoptimal mungkin program pembangunan yang diperoleh/dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5) mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi (khususnya pertanian), peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya penanggulangan kemiskinan;
6) pelaksanaan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20%), serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
7) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten; dan
8) penyesuaian gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Proyeksi belanja daerah tahun 2016-2021 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.43
Proyeksi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib Mengikat
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a.	Belanja Tidak Langsung	1.679.601.089.000	1.753.061.629.042	1.959.412.397.293	2.192.916.117.491	2.413.152.305.427	2.590.941.830.952
1	Belanja Pegawai	1.255.978.630.000	1.274.015.171.819	1.399.717.199.491	1.537.932.723.383	1.654.945.009.263	1.714.684.987.422
2	Bantuan Keuangan kpd Pem Desa	413.320.025.000	468.744.023.223	549.392.763.803	644.680.960.108	747.904.862.164	865.954.409.530
3	Bagi Hasil	7.802.434.000	7.802.434.000	7.802.434.000	7.802.434.000	7.802.434.000	7.802.434.000
4	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
b.	Belanja Langsung	117.862.494.100	138.487.050.376	149.768.358.170	163.823.831.764	178.351.246.739	181.426.224.277
1	Belanja Administrasi Perkantoran	37.862.494.100	42.487.050.376	44.768.358.170	47.663.831.764	50.571.246.739	53.646.224.277
2	Belanja BLUD RSUD	80.000.000.000	96.000.000.000	105.000.000.000	116.160.000.000	127.780.000.000	127.780.000.000
c.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.400.000.000	8.000.000.000	10.250.000.000	7.970.000.000	8.800.000.000	8.900.000.000
1	Penyertaan Modal	10.400.000.000	8.000.000.000	10.250.000.000	7.970.000.000	8.800.000.000	8.900.000.000
	Total (a + b + c)	1.807.863.583.100	1.899.548.679.418	2.119.430.755.463	2.364.709.949.255	2.600.303.552.166	2.781.268.055.229

Sumber : Bappeda dan DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016 (data diolah)

c. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pengeloaan pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 antara lain:

1) penerimaan pembiayaan daerah, ditempuh kebijakan melalui upaya peningkatan SiLPA melalui efisiensi belanja daerah; dan
2) pengeluaran pembiayaan daerah, ditempuh kebijakan peningkatan efisiensi penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah.

Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2016-2021 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.44
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Proyeksi (Milyar Rp)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	80.566.675.700	136.072.783.639	90.935.034.835	70.735.233.091	55.259.474.563	43.935.124.792
a.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	78.066.675.700	133.572.783.639	88.435.034.835	68.235.233.091	52.759.474.563	41.435.124.792
a.2	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.900.000.000	10.500.000.000	12.750.000.000	10.470.000.000	11.300.000.000	11.400.000.000
b.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.400.000.000	8.000.000.000	10.250.000.000	7.970.000.000	8.800.000.000	8.900.000.000
b.2	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Pembiayaan Netto (A – B)	67.666.675.700	125.572.783.639	78.185.034.835	60.265.233.091	43.959.474.563	32.535.124.792

Sumber : Bappeda dan DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016 (data diolah)

d. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan Daerah	2.621.839.759.000	2.941.767.730.906	3.217.621.086.027	3.531.728.282.727	3.793.954.299.015	4.048.673.224.696
2.	SiLPA	78.066.675.700	136.561.143.639	89.613.185.835	69.241.750.091	53.691.840.563	42.785.852.793
3.	Penerimaan Kembali Penjaman	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Total penerimaan	2.702.406.434.700	3.080.828.874.545	3.309.734.271.862	3.603.470.032.818	3.850.146.139.578	4.093.959.077.489
	Dikurangi:						
	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat (Prioritas I)	1.829.764.429.400	1.899.548.679.418	2.119.430.755.463	2.364.709.949.255	2.600.303.552.166	2.781.268.055.229
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	872.642.005.300	1.181.280.195.127	1.190.303.516.399	1.238.760.083.563	1.249.842.587.412	1.312.691.022.260

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016 (data diolah)

Tabel 3.46
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Uraian	Proyeksi (Rp)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	2.702.406.434.700	3.080.828.874.545	3.309.734.271.862	3.603.470.032.818	3.850.146.139.578	4.093.959.077.489
2	Belanja Prioritas 1 (Wajib dan Mengikat)	1.807.863.583.100	1.899.548.679.418	2.119.430.755.463	2.364.709.949.255	2.600.303.552.166	2.781.268.055.229
a	Belanja Tidak Langsung	1.679.601.089.000	1.753.061.629.042	1.959.412.397.293	2.192.916.117.491	2.413.152.305.427	2.590.941.830.952
b	Belanja Langsung	117.862.494.100	138.487.050.376	149.768.358.170	163.823.831.764	178.351.246.739	181.426.224.277
c	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.400.000.000	8.000.000.000	10.250.000.000	7.970.000.000	8.800.000.000	8.900.000.000
3	Belanja Prioritas 2	801.542.663.600	1.025.776.765.127	1.022.755.617.599	1.060.372.162.843	1.063.143.983.220	1.083.914.469.949
a	Program Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	801.542.663.600	1.025.776.765.127	1.022.755.617.599	1.060.372.162.843	1.063.143.983.220	1.083.914.469.949
4	Belanja Prioritas 3	93.000.188.000	155.503.430.000	167.547.898.800	178.387.920.720	186.698.604.192	228.776.552.311
a	Hibah	7.295.806.000	17.615.200.000	17.615.200.000	17.615.200.000	17.615.200.000	50.551.396.300
b	Tambahan Penghasilan PNSD	30.111.172.000	60.222.344.000	72.266.812.800	83.106.834.720	91.417.518.192	100.559.270.011
c	Belanja Bantuan Sosial	53.093.210.000	75.165.886.000	75.165.886.000	75.165.886.000	75.165.886.000	75.165.886.000
d	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5	Surplus anggaran riil atau Berimbang (1-2-3-4)	0	0	0	0	0	0

Sumber : Bappeda dan DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016 (data diolah)

Dari uraian perhitungan rencana penggunaan Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, dapat diketahui besaran Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Prioritas I, II dan III, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.47
Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Alokasi											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)	2021	(%)
1	Belanja Prioritas 1	1.807.863.583.100	66,90	1.899.548.679.418	61,66	2.119.430.755.463	64,04	2.364.709.949.255	65,62	2.600.303.552.166	67,54	2.781.268.055.229	67,94
2	Belanja Prioritas 2	801.542.663.600	29,66	1.025.776.765.127	33,30	1.022.755.617.599	30,90	1.060.372.162.843	29,43	1.063.143.983.220	27,61	1.083.914.469.949	26,48
3	Belanja Prioritas 3	93.000.188.000	3,44	155.503.430.000	5,05	167.547.898.800	5,06	178.387.920.720	4,95	186.698.604.192	4,85	228.776.552.311	5,59
	Total	2.702.406.434.700	100,00	3.080.828.874.545	100,00	3.309.734.271.862	100,00	3.603.470.032.818	100,00	3.850.146.139.578	100,00	4.093.959.077.489	100,00

Sumber : Bappeda dan DPPKAD Kabupaten Kebumen, Tahun 2016 (data diolah)

Kerangka pendanaan pembangunan daerah selain bersumber dari kapasitas rill kemampuan keuangan daerah yang ada, juga mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat terutama terkait pemenuhan Program Janji Gubernur Jawa Tengah, Prioritas Tematik Sektoral maupun Tematik Wilayah Provinsi Jawa Tengah serta Prioritas Pembangunan Nasional.

Secara lebih lengkap mengenai proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel 3.48.

Tabel 3.48
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Rekening	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pendapatan (a.1+a.2+a.3)	2.621.839.759.000	2.941.767.730.906	3.217.621.086.027	3.531.728.282.727	3.793.954.299.015	4.048.673.224.696
a.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	216.524.649.000	242.850.550.379	264.822.783.416	289.071.367.149	314.292.626.651	337.758.084.374
a.1.1	Pajak daerah	49.043.000.000	51.150.174.779	55.437.855.170	59.725.535.561	64.013.215.953	69.527.013.229
a.1.2	Retribusi daerah	26.135.019.000	29.841.495.000	32.419.028.100	34.372.610.910	36.437.752.001	40.465.507.201
a.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.201.619.000	10.714.000.000	12.025.000.000	14.240.000.000	16.790.000.000	19.015.000.000
a.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	135.145.011.000	151.144.880.600	164.940.900.146	180.733.220.677	197.051.658.698	208.750.563.944
a.2	Dana Perimbangan (Transfer)	1.885.347.687.000	2.140.614.851.227	2.325.818.855.826	2.533.160.737.441	2.670.751.660.270	2.777.669.416.656
a.2.1	Dana Bagi Hasil	39.248.253.000	43.301.767.427	47.631.944.170	52.395.138.587	57.634.652.445	63.398.117.690
a.2.2	Dana Alokasi Umum	1.256.068.249.000	1.507.281.898.800	1.688.155.726.656	1.890.734.413.855	2.023.085.822.825	2.124.240.113.966
a.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	590.031.185.000	590.031.185.000	590.031.185.000	590.031.185.000	590.031.185.000	590.031.185.000
	DAK Fisik	160.931.590.000	160.931.590.000	160.931.590.000	160.931.590.000	160.931.590.000	160.931.590.000
	DAK IPD	35.738.260.000	35.738.260.000	35.738.260.000	35.738.260.000	35.738.260.000	35.738.260.000
	DAK Non Fisik						
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	359.807.880.000	359.807.880.000	359.807.880.000	359.807.880.000	359.807.880.000	359.807.880.000
	- Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.230.700.000	2.230.700.000	2.230.700.000	2.230.700.000	2.230.700.000	2.230.700.000
	- DAK Non Fisik Lainnya	31.322.755.000	31.322.755.000	31.322.755.000	31.322.755.000	31.322.755.000	31.322.755.000
a.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	519.967.423.000	558.302.329.300	626.979.446.785	709.496.178.137	808.910.012.094	933.245.723.667
a.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-
a.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
a.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota	99.365.806.000	109.460.557.700	114.933.585.585	120.680.264.864	126.714.278.107	139.385.705.918
a.3.4	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	-	-	-	-	-	-
	a. Tunjangan Profesi PNSD	-					
	b. Dana Insentif Daerah	35.858.316.000	35.858.316.000	36.934.065.480	39.150.109.409	43.065.120.350	47.371.632.385



No.	Rekening	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
a.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	102.341.755.000	102.341.755.000	102.341.755.000	102.341.755.000	102.341.755.000	102.341.755.000
a.3.6	Bagi hasil retribusi dari provinsi	-	-	-	-	-	-
a.3.7	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	282.401.546.000	310.641.700.600	372.770.040.720	447.324.048.864	536.788.858.637	644.146.630.364
B	Belanja (b.1+b.2)	2.689.506.434.700	3.070.328.874.545	3.296.984.271.862	3.593.000.032.818	3.838.846.139.578	4.082.559.077.489
b.1	Belanja tidak langsung	1.770.101.277.000	1.906.065.059.042	2.124.460.296.093	2.368.804.038.211	2.597.350.909.619	2.817.218.383.263
b.1.1	Belanja pegawai	1.286.089.802.000	1.334.237.515.819	1.471.984.012.291	1.621.039.558.103	1.746.362.527.455	1.815.244.257.433
	a. Gaji dan Tunjangan	886.122.964.000	903.845.423.280	1.029.229.965.608	1.167.152.962.169	1.283.868.258.386	1.343.171.436.473
	b. Tambahan Penghasilan PNS berdasar beban kerja	30.111.172.000	60.222.344.000	72.266.812.800	83.106.834.720	91.417.518.192	100.559.270.011
	c. Tamsil Guru PNSD	2.230.700.000	2.230.700.000	2.230.700.000	2.230.700.000	2.230.700.000	2.230.700.000
	d. Tunjangan Profesi Guru PNSD	359.807.880.000	359.807.880.000	359.807.880.000	359.807.880.000	359.807.880.000	359.807.880.000
	e. Belanja Pimpinan DPRD dan KDH WKDH	4.380.000.000	4.380.000.000	4.380.000.000	4.380.000.000	4.380.000.000	4.380.000.000
	f. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.452.150.000	2.557.508.739	2.771.892.759	2.986.276.778	3.200.660.798	3.476.350.661
	g. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	984.936.000	1.193.659.800	1.296.761.124	1.374.904.436	1.457.510.080	1.618.620.288
b.1.2	Bunga	-	-	-	-	-	-
b.1.3	Subsidi	-	-	-	-	-	-
b.1.4	Hibah	7.295.806.000	17.615.200.000	17.615.200.000	17.615.200.000	17.615.200.000	50.551.396.300
b.1.5	Bantuan sosial	53.093.210.000	75.165.886.000	75.165.886.000	75.165.886.000	75.165.886.000	75.165.886.000
b.1.6	Belanja bagi hasil	7.802.434.000	7.802.434.000	7.802.434.000	7.802.434.000	7.802.434.000	7.802.434.000
b.1.7	Bantuan keuangan	413.320.025.000	468.744.023.223	549.392.763.803	644.680.960.108	747.904.862.164	865.954.409.530
	a. Alokasi Dana Desa = (10% x (Transfer-DAK))	129.064.523.000	155.058.366.623	173.578.767.083	194.312.955.244	208.072.047.527	218.763.823.166
	b. Dana Desa	282.401.546.000	310.641.700.600	372.770.040.720	447.324.048.864	536.788.858.637	644.146.630.364
	c. Bankeu kepada Desa	810.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	d. Bankeu kepada Partai Politik	1.043.956.000	1.043.956.000	1.043.956.000	1.043.956.000	1.043.956.000	1.043.956.000
b.1.8	Belanja tidak terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
b.2	Belanja langsung	919.405.157.700	1.164.263.815.503	1.172.523.975.769	1.224.195.994.607	1.241.495.229.959	1.265.340.694.226

No.	Rekening	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
b.2.1	Belanja pegawai	47.643.166.604	60.331.633.414	60.759.671.247	63.437.292.295	64.333.730.982	65.569.392.341
b.2.2	Belanja barang dan jasa	297.208.095.427	376.361.420.514	379.031.610.560	395.735.173.921	401.327.347.021	409.035.662.512
b.2.3	Belanja modal	574.553.895.670	727.570.761.576	732.732.693.962	765.023.528.391	775.834.151.956	790.735.639.373
C.	Pembiayaan	67.666.675.700	128.561.143.639	79.363.185.835	61.271.750.091	44.891.840.563	33.885.852.793
c.1	Penerimaan pembiayaan	*80.566.675.700*	*139.061.143.639*	*92.113.185.835*	*71.741.750.091*	*56.191.840.563*	*45.285.852.793*
	SiLPA	78.066.675.700	136.561.143.639	89.613.185.835	69.241.750.091	53.691.840.563	42.785.852.793
	Penerimaan Kembali Pinjaman	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
c.2	Pengeluaran pembiayaan	*12.900.000.000*	*10.500.000.000*	*12.750.000.000*	*10.470.000.000*	*11.300.000.000*	*11.400.000.000*
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	10.400.000.000	8.000.000.000	10.250.000.000	7.970.000.000	8.800.000.000	8.900.000.000
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000

Sumber : Data primer diolah

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung selama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian disusun menjadi isu strategis pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Sehingga identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, diharapkan dapat meningkatkan aksesbilitas prioritas pembangunan daerah, dapat dioperasionalkan serta secara moral maupun etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis isu-isu strategis Kabupaten Kebumen untuk RPJMD diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Penjelasan selengkapnya, akan diuraikan pada bagian berikut.

A. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" atau "jurang harapan" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang target sasaran kinerja yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak atau belum bisa diatasi, peluang yang tidak atau belum dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak atau belum bisa diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah yang melibatkan berbagai urusan serta berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan daerah akan menjadi dasar dalam penentuan isu-isu strategis

pembangunan jangka menengah daerah sebagai salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Permasalahan pembangunan memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pembangunan pada periode lalu yang masih belum mencapai target atau standar yang diinginkan atau direncanakan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah
    a. Belum Optimalnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Masih Rendahnya Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia)

        Memperhatikan kecenderungan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan komponen-komponen pembentuknya di Kabupaten Kebumen, meskipun angkanya meningkat setiap tahunnya namun peningkatannya belum terlalu signifikan hanya berkisar antara 0,4-0,8 poin. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen sampai Tahun 2014 juga masih terpaut 3,11 poin dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah dengan angka sebesar 68,78 poin dan terpaut 2,73 poin dari Indeks Pembangunan Manusia Nasional dengan angka sebesar 68,4. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, dibandingkan Kabupaten lain, peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 berada pada peringkat 29 dari 35 Kabupaten/Kota. Secara regional/kawasan, peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen lebih tinggi dari Wonosobo dan Banjarnegara, namun lebih rendah dari Cilacap, Purworejo dan Banyumas. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen secara umum masih berada dibawah rata-rata pencapaian Jawa Tengah dan Nasional pada umumnya.

        Pada capaian Indeks Pendidikan, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kebumen adalah masih rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah yaitu sebesar 6,75 tahun, yang secara makro menunjukkan bahwa rata-rata penduduk dewasa Kabupaten Kebumen baru berpendidikan selevel dengan kelas satu Sekolah Menengah Pertama dan berbanding lurus dengan prosentase terbesar penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir mayoritas menamatkan/berijasah pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibitidaiyah/sederajat. Kondisi ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan menengah yang masih relatif rendah.

Selanjutnya, pada capaian Indeks Kesehatan, permasalahan yang dihadapi yaitu masih relatif tingginya Angka Kematian Bayi sebesar 10,12 kasus per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu sebesar 58,37 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu faktor utama yang menghambat akselerasi dari indeks kesehatan banyak disebabkan karena masih tingginya persentase penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga nonmedis serta pengetahuan ibu yang masih minim tentang kesehatan balita yang juga terefleksi dari RLS wanita di Kabupaten Kebumen yang masih cukup rendah.

Pada capaian Indeks Daya Beli, permasalahan yang dihadapi yaitu tingginya pengaruh kondisi eksternal Kabupaten Kebumen, di antaranya dinamika kebijakan fiskal, moneter dan kenaikan harga BBM yang sangat cepat berubah terhadap dinamika kekuatan daya beli masyarakat yang cenderung tetap, sehingga mempengaruhi yaitu faktor pendapatan masyarakat dan inflasi harga barang dan jasa.

Masih adanya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan merupakan kondisi yang menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan pada bidang kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program-program akselerasi di sektor kesehatan untuk dapat menekan angka kematian bayi serta mewujudkan tingkat ketersediaan dan penyebaran fasilitas serta tenaga medis yang memadai, sangat diperlukan. Hal yang lebih penting lagi adalah perlunya pengembangan/peningkatan kesadaran dan aplikasi perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dinilai masih jauh dari harapan. Kebutuhan dasar ini perlu pula didukung peningkatan Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan tingkat keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan semakin optimal sehingga menunjang percepatan target pembangunan di bidang kesehatan.

Terkait dengan upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah, beberapa hal strategis dapat ditempuh di antaranya melalui optimalisasi penurunan angka peserta didik yang putus sekolah, dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), peningkatan

partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah, peningkatan akses dan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyelenggaraan pendidikan non formal berupa kejar Paket A setingkat SD, Paket B setingkat SMP dan Paket C setingkat SMA. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat, dilakukan peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui pembangunan USB, RKB, peningkatan perbaikan/rehabilitasi sekolah, maupun penyelenggaraan pendidikan SMP Terbuka/Satu Atap terutama di daerah terpencil.

Sementara itu, kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, perlu lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.

b. Menurunnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat

Pengamalan nilai-nilai agama menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu sentra penyebaran agama Islam. Pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menjadi hak asasi setiap individu yang berketuhanan. Pemahaman dan implementasi ajaran agama menjadi pondasi dalam pembangunan berbagai sektor. Kini, perubahan arah kehidupan masyarakat menuju kondisi yang bersifat materialistik, komersial, dan bendawi telah mencerabut jiwa hampir setiap warga Kabupaten Kebumen. Akibatnya, berbagai kerawanan sosial, ras, dan agama sering kali muncul. Kasus penyalahgunaan narkoba, kasus HIV, kriminalitas cenderung semakin meningkat, korupsi secara berjama'ah, dan tindak asusila menjadi semakin marak. Oleh karena itu, pemahaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari harus semakin digalakan.

Berbagai permasalahan dalam menjalani kehidupan beragama yang toleran dan damai yang dihadapi Kabupaten Kebumen antara lain kurang optimalnya pemahaman umat terhadap kitab sucinya terutama pemahaman umat Islam terhadap Al Quran, kurang optimalnya pemanfaatan prasarana ibadah bagi pembentukan karakter masyarakat, kurang optimalnya kinerja lembaga keagamaan dalam

mendorong kesholehan sosial, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan manajemen lembaga keagamaan.

c. Belum Optimalnya Upaya Kepastian, Perlindungan dan Penegakan Hukum Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Tenteram dan Tertib

Pembangunan dan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi berbagai permasalahan, yaitu berkurangnya kewibawaan Pemerintah Daerah, kurangnya dukungan dan respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial, kurangnya langkah antisipatif terhadap kemunculan kriminalitas, berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih, dan keterbatasan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman.

d. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah Belum Optimal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 berada di atas angka Jawa Tengah dan Nasional (Kabupaten Kebumen sebesar 5,83% sedangkan Jawa Tengah sebesar 5,54% dan Nasional sebesar 4,73%). Dilihat dari share/pemerataan pertumbuhan ekonomi, meskipun angkanya cenderung meningkat, Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada tahun 2013 lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan angka 0,28 dan 0,39. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Indeks Gini Kabupaten Kebumen juga berada pada posisi paling rendah (terbaik) yang menunjukkan pemerataan pendapatan paling merata. Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi, meratanya distribusi pendapatan dan cukup tingginya daya saing daerah tersebut ternyata kontradiktif dengan tingkat kemiskinan penduduk yang persentasenya masih tinggi.

Tantangan ke depan terkait kondisi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang sudah cukup tinggi tetapi belum optimal untuk meningkatkan kesejaheraan masyarakat, terkait dengan struktur ekonomi. Struktur perekonomian Kabupaten Kebumen masih sangat mengandalkan sektor pertanian yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang telah berbasis sektor industri pengolahan. Kondisi ini disebabkan karena siklus produksi sektor pertanian jauh lebih lama/lambat dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Selain itu, *multiplier effect* terhadap perekonomian secara makro yang ditimbulkan sektor

industri jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, sehingga efektivitasnya dalam mendongkrak perekonomian relatif lebih tinggi. Hal tersebut karena sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan sektor, baik *backward* maupun *forward*, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian.

Salah satu permasalahan penting pada perekonomian pada sektor pertanian, diantaranya konversi penggunaan lahan pertanian ke non pertanian seperti jaringan irigasi, jalan, perumahan, pertokoan dan penggunaan lainnya terus meningkat yang menyebabkan semakin rendahnya kontribusi produksi pangan domestik terhadap total ketersediaan pangan daerah. Oleh karenanya apabila perekonomian Kabupaten Kebumen hanya mengandalkan kinerja sektor pertanian saja, maka tidak akan mampu bersaing dan akan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Sehingga, dalam perjalanannya menuju wilayah transisi industrialisasi, Kabupaten Kebumen sangat perlu untuk membangun pondasi ekonomi yang tangguh, diantaranya menciptakan komoditi-komoditi industri agrobisnis yang mandiri yang lebih memanfaatkan sumberdaya domestik dibanding impor dari daerah lain.

e. Belum Optimalnya Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah

Tingkat/jumlah investasi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru yang diharapkan dapat mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2015 mencapai Rp.324,43 milyar yang turut didorong oleh investasi pada sub sektor perdagangan, hotel dan restoran, konstruksi listrik, gas dan air bersih, serta sektor pertanian yang membukukan angka realisasi pertumbuhan investasi cukup besar. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perizinan, melalui pelayanan perizinan secara terpadu sehingga proses pengelolaan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Masuknya investor ke daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang

stabil sebagai modal penting dalam menarik minat investasi ke Kabupaten Kebumen.

Pariwisata menjadi salah satu sektor andalan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kebumen. Jumlah dan jenis potensi objek wisata yang beragam menjadi andalan Kabupaten Kebumen dalam mengundang wisatawan untuk berkunjung dan memberikan *share* peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kebumen sebesar 1.117.136 orang. Meskipun sudah cukup besar, jumlah kunjungan wisatawan akan lebih bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, apabila lama tinggal mereka semakin panjang. Dilihat dari aspek rata-rata lama tinggal wisatawan, Kabupaten Kebumen masih berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan angka 0,1 hari dan 2,21 hari. Tantangan yang dihadapi sektor pariwisata adalah meningkatkan daya saing wisata untuk meningkatkan jumlah dan rata-rata lama tinggal wisatawan. Daya saing wisata sangat bergantung pada infrastruktur pendukung seperti aksesibilitas jalan, sarana transportasi, ketersediaan hotel, rumah makan dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, upaya peningkatan daya saing wisata juga harus memperhatikan aspek sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pengelola dan masyarakat di sekitar objek wisata serta meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

f. Belum Optimalnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas

Seiring dengan semakin meningkatya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat, harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Dari sisi makro ekonomi, ketersediaan pelayanan/jasa prasarana jalan mempengaruhi tingkat produktivitas marginal modal swasta. Sedangkan dari aspek mikro ekonomi, prasarana jalan menekan ongkos transportasi yang berpengaruh pada pengurangan biaya produksi. Prasarana jalan juga sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan akses kepada lapangan pekerjaan.

Keterbatasan sarana transportasi, terutama jalan mengakibatkan rendahnya aksesibilitas antar wilayah sehingga berpotensi terhadap dinamika perkembangan

daerah. Sampai tahun 2015, kondisi infrastruktur jalan masih dihadapkan pada permasalahan tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten mencapai 161 km atau 16,80% rusak berat. Permasalahan umum yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur jalan yang memadai di antaranya penanganan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang diakibatkan oleh keterbatasan anggaran yang mengakibatkan masih tingginya kondisi kerusakan jalan kabupaten karena sebagian besar jalan kabupaten sudah habis umur rencananya; belum optimalnya sitem jaringan jalan yang menjadi poros penghubung antar kecamatan dan antar pusat pertumbuhan terutama di wilayah utara; masih rendahnya kondisi jalan kolektor di ruas jalan Jawa Tengah Selatan. Sementara itu, kerusakan jalan sebelum waktunya disebabkan oleh sebagian jalan berada pada daerah rawan bencana dan pemanfaatan yang tidak sesuai (muatan Lebih, pemanfaatan ruas jalan yang tidak sesuai dan saluran drainase jalan yang tersumbat). Di samping itu, sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan/jembatan masih kurang optimal.

Penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang mantap diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air baku, mengurangi luas areal banjir, dan pengendalian banjir. Permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya saluran irigasi (irigasi teknis kabupaten dalam kondisi rusak sebesar 45%). Kondisi tersebut harus menjadi prioritas penanganan dalam mendukung peningkatan produktivitas usaha tani dan ketahanan pangan, terlebih sektor pertanian merupakan sektor penggerak utama perekonomian daerah.

Berkenaan dengan penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih yang dititikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, penanganan/pemeliharaan sarana air bersih, permasalahan yang dihadapi di antaranya cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 12,28%. Untuk itu perlu terus dilakukan penambahan sambungan rumah untuk air minum, pembangunan instalasi sumber mata air dan unit distribusi dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan.

g. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Memperhatikan Kaidah Pembangunan Berkelanjutan

Dalam hal mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, perkembangan kinerja pelayanan pengelolaan persampahan masih dihadapkan pada

permasalahan terbatasnya tingkat pelayanan *(level of service)* persampahan (perkotaan) yang baru mencapai 42,44%. Untuk itu, perlu terus didorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah dimulai dari hulu melalui sosialisasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Disamping itu perlu dilakukan pula perawatan dan pemeliharaan kendaraan angkut serta penambahan armada untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah perkotaan. Selain perlunya tambahan perluasan areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaligending dan Semali serta adanya areal cadangan untuk TPA pada masa yang akan datang.

Upaya meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat masih terkendala pada masih rendahnya tingkat status mutu lingkungan. Dari indikator yang diukur dari tingkat status mutu sungai utama dan waduk besar pada tahun 2014 berada pada status mutu cemar berat, dan belum dapat mencapai target status mutu sedang. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, masih rendahnya pengelolaan limbah serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan menjadi kendala dalam peningkatan kualitas lingkungan.

h. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kebumen menjadi permasalahan yang utama mengingat jumlah penduduk miskin masih lebih tinggi daripada rata-rata penduduk miskin di tingkat nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen selama tahun 2011-2015 masih cukup memprihatinkan, meskipun angkanya dari tahun 2011 semakin menurun. Setelah sempat naik dari 22,70% tahun 2010 menjadi 24,06% tahun 2011, angka kemiskinan terus menurun hingga tahun 2015 penduduk miskin Kabupaten Kebumen mencapai 20,02%. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, selama periode tahun 2011-2015, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen selalu lebih tinggi. Dibandingkan angka penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 berada cukup jauh di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan perbandingan angka 20,13% berbanding 13,58%. Untuk skala provinsi, penduduk miskin Kabupaten Kebumen berada pada peringkat 34 dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Secara regional/kawasan, penduduk

miskin Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 hanya lebih rendah dari Kabupaten Wonosobo dengan perbandingan angka 20,13% berbanding 20,80%. Diperkirakan pada tahun 2015, angka dan peringkat penduduk miskin ini tidak mengalami banyak pergeseran.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

i. Belum Optimalnya Upaya Penciptaan Kesempatan Kerja untuk Mengurangi Pengangguran

Isu pengangguran di Jawa Tengah termasuk juga di Kabupaten Kebumen hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah saat ini, terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri dan perdagangan. Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Jawa Tengah berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM.

Selain permasalahan tersebut di atas, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda. Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan,

kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

j. Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Pelayanan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan memiliki peranan yag sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan di antaranya menyangkut masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang perlu diperbaiki/ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah, tidak hanya ditentukan oleh jumlah murid, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur sekolah yang memadai dalam mengimbangi perkembangan jumlah penduduk usia sekolah.

Sampai tahun 2015, kondisi gedung sekolah yang rusak untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 29,46%, Sekolah Dasar/sederajat sebesar 33,78%, jenjang Sekolah Menengah Pertama/sederajat sebanyak 17,78%, jenjang Sekolah Menengah Atas/sederajat sebanyak 12,41%. Disamping itu, akses pelayanan pendidikan dilihat juga dari tingkat ketersediaan kelas dibandingkan dengan jumlah murid yang harus dilayani, yang ditunjukkan melalui rasio kelas/murid pada tahun 2015, dimana untuk jenjang SD/sederajat mencapai 1:22 atau sudah di atas standar nasional sebesar 1:32, untuk jenjang SMP sederajat dengan rasio 1:30, juga sudah di atas standar nasional sebesar 1:36, dan untuk jenjang SMA/sederajat dengan rasio 1:44 atau masih dibawah standar nasional sebesar 1:40. Sarana kelas untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat masih kurang, untuk itu, diperlukan kebijakan penambahan jumlah kelas dan/atau sekolah tingkat SMA/sederajat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan. Meskipun kewenangan pendidikan menengah ke depan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun pemerintah Kabupaten Kebumen semestinya tetap dapat melakukan intervensi program/kebijakan pembangunan/penambahan kelas/ sekolah SMA/sederajat, melalui pemerintah provinsi.

k. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang ideal pada hakikatnya merupakan bentuk pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan kewajiban

aparatur pemerintahan/Aparatur Sipil Negara sebagai abdi masyarakat. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Dengan demikian, kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terjamin. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat dan terarah khususnya terkait perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Permasalahan umum yang masih dihadapi pada kinerja pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik di antaranya pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat, terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan, masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara yang dapat menjadi gambaran dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Pada aspek kelembagaan, postur birokrasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, serta masih adanya kecenderungan pembentukan lembaga atau unit kerja baru tanpa disertai dengan audit organisasi. Tantangan ke depan, diperlukan audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah daerah, sehingga terwujud postur birokrasi yang tepat fungsi, tepat sasaran dan tepat ukuran.

Pada aspek sumber daya manusia aparatur, permasalahan yang dihadapi antara lain pada sisi manajemen kepegawaian meliputi komposisi pegawai negeri sipl/aparatur sipl negara yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat. Hal ini di antaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antar wilayah; tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah; belum diterapkannya sistem remunerasi yang berbasis kinerja; belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan kinerja; penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi yang diperlukan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Tantangan ke depan adalah melakukan penyempurnaan manajemen kepegawaian untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mendukung pencapaian kinerja birokrasi secara optimal.

2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
      1) Pendidikan
         a) belum optimalnya aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat;
         b) masih rendahnya kuota penerima bantuan bagi siswa miskin serta belum optimalnya perhatian terhadap siswa berprestasi;
         c) belum optimalnya kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;
         d) belum meratanya distribusi penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan;
         e) terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar;
         f) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal; dan
         g) pelimpahan kewenangan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi.
      2) Kesehatan
         a) masih tingginya angka kematian ibu dan bayi;
         b) meningkatnya kasus penyakit menular seperti DBD, HIV dan malaria;
         c) masih adanya balita dan ibu hamil dengan status gizi buruk/kurang gizi;
         d) pelaksanaan kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum optimal menjangkau seluruh masyarakat dan aturannya yang masih sering berubah;
         e) belum seimbangnya sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan antara kuratif dengan promotif dan kuratif;
         f) masih rendahnya pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat; dan
         g) kurang optimalnya peran lintas sektoral dalam upaya penanganan masalah kesehatan.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a) belum optimalnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan kabupaten maupun desa;
   b) belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penanganan jalan dan jembatan;
   c) belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir;
   d) belum optimalnya penyediaan prasarana gedung perkantoran dan penyediaan prasarana publik;
   e) kurangnya pemberdayaan petani pemakai air;
   f) kurangnya usaha-usaha konservasi sumberdaya air;
   g) terbatasnya ketersediaan air baku perdesaan dan daerah perbukitan;
   h) masih rendahnya fasilitasi penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman perdesaan;
   i) belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan;
   j) pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
   k) dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal; dan
   l) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   a) masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni;
   b) *backlag* (jarak antara ketersediaan dan kebutuhan) perumahan masih tinggi;
   c) masih adanya kawasan permukiman kumuh; dan
   d) belum optimalnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin termasuk air bersih dan sanitasi.
5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
   a) masih perlunya peningkatan kewaspadaan aparatur pemerintah dan masyarakat akan kemungkinan Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan dalam NKRI;
   b) menurunnya kesadaran masyarakat tentang persatuan dan kesatuan, solidaritas, toleransi serta budaya saling menghormati meskipun dalam perbedaan;
   c) menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;

d) belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan;
e) perlunya peningkatan kewaspadaan dan upaya pencegahan dini terhadap bencana;
f) belum optimalnya penegakan peraturaan perundangan-undangan di daerah; dan
g) kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum masih rendah.

6) Sosial
a) masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya fakir miskin, penyandang disabilitas dan rumah tidak layak huni;
b) terbatasnya akses jaminan sosial, perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
c) terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai;
d) belum optimalnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial sementara frekuensi/variasi bencana sangat kompleks;
e) terbatasnya kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumber daya manusia, termasuk pekerja sosial masyarakat dan potensi kesejahteraan masyarakat lainnya; dan
f) terbatasnya akses informasi dan jejaring kerjasama bagi pelayanan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja
a) belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan terbatasnya penyediaan lapangan kerja yang menyebabkan pengangguran;
b) masih rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat/ tenaga kerja.
c) terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;
d) rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja;

e) masih terbatasnya sistem informasi ketenagakerjaan dan belum tersedianya *data base* yang akurat tentang kondisi ketenagakerjaan;
f) belum adanya keterpaduan program penanganan pengangguran dan kemiskinan antar berbagai sektor;
g) masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen;
h) masih rendahnya keikutsertaan tenaga kerja/ karyawan pada BPJS ketenagakerjaan; dan
i) belum optimalnya peran dan fungsi organisasi/ lembaga ketenagakerjaan.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
a) belum optimalnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan;
b) masih adanya nilai norma budaya yang kurang kondusif terhadap pemberdayaan perempuan;
c) belum optimalnya penyediaan database pilah gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
d) meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
e) terbatasnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

3) Pangan
a) masih kurang beragamnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, berimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan;
b) belum optimalnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan;
c) harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional;
d) masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan;
e) belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh dan masih kurang optimalnya sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan; dan
f) belum optimalnya peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

4) Pertanahan
a) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin pembangunan di atas tanah (IMB);

b) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan kepemilikan tanahnya;
c) rumitnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
d) tingginya permintaan harga tanah oleh masyarakat (selalu berada di atas harga pasaran).

5) Lingkungan Hidup
a) belum optimalnya pengelolaan persampahan;
b) masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;
c) masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
d) belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
e) penurunan kualitas air permukaan dan terbatasnya ketersediaan cadangan air;
f) masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; dan
g) adanya indikasi rendahnya kualitas lingkungan terbukti dalam beberapa parameter kualitas lingkungan yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan (meningkatnya pencemaran air dan udara).

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil;
b) belum optimalnya kualitas implementasi Sistem Administrasi Kependudukan;
c) keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasionalkan piranti teknologi informasi Sistem Administrasi Kependudukan;
d) sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan kurang memadai; dan
e) belum optimalnya pengelolaan dokumen dan sinergitas/sinkronisasi program kependudukan dan catatan sipil antar pemangku kepentingan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a) belum optimalnya tertib administrasi keuangan dan kekayaan Pemerintah Desa;
b) belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kurang berkembangnya sebagian lembaga ekonomi pedesaan (Badan Usaha Milik Desa);
c) terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa;

d) semakin menurunnya semangat gotong royong masyarakat;
e) masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan data base desa/kelurahan;
f) jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi; dan
g) belum optimalnya pengelolaan aset-aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM–MP) khususnya aset ekonomi produktif.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a) adanya kecenderungan menurunnya kualitas peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
b) kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi;
c) kecenderungan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk memakai alat kontrasepsi hormonal;
d) meningkatnya perilaku negatif anak dan remaja (minuman keras, seks bebas dan narkoba) serta makin meningkatnya pernikahan dini; dan
e) keterbatasan kemampuan dan konsistensi pengelola UPPKS dalam pengembangan usaha karena kurangnya bimbingan/motivasi, permodalan, keterampilan dan pemasaran produk.

9) Perhubungan
a) terbatasnya penyediaan sarana pengaman lalu lintas;
b) masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam berlalu lintas;
c) rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan jalan sesuai tonase;
d) kondisi jalur trayek yang rusak dan diperlukan kebutuhan angkutan di daerah perbukitan atau daerah terpelosok; dan
e) perlunya kesiapan dan kualitas dari alat pengujian kendaraan bermotor serta perlunya peremajaan alat pengujian kendaraan bermotor.

10) Komunikasi dan Informatika
a) belum optimalnya penyediaan jaringan komunikasi/ internet di seluruh wilayah (masih terdapatnya daerah *blank spot area*) dan di seluruh area pelayanan publik;
b) masih kurangnya ketersediaan peralatan dan sarana prasarana untuk pengendalian dan penataan pembangunan menara telekomunikasi; dan
c) terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur bidang Komunikasi dan Informatika.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
    a) adanya keterbatasan sumber daya manusia, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi;
    b) distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agrobisnis) yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas;
    c) masih kurangnya wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan jiwa kewirausahaan; dan
    d) masih kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.
12) Penanaman Modal
    a) pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
    b) belum optimal dan kurang inovatifnya promosi potensi investasi daerah;
    c) masih adanya resistensi masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kebumen;
    d) biaya investasi masih tinggi dimana lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat harganya tinggi (permintaan harga lahan masyarakat di atas harga pasar); dan
    e) kurangnya daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten.
13) Kepemudaan dan Olah Raga
    a) masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
    b) kurangnya peran serta generasi muda dalam pembangunan;
    c) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan olah raga di daerah; dan
    d) belum adanya aktualisasi pemetaan olahraga unggulan.
14) Statistik
    a) belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan;

b) belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap Perangkat Daerah;
c) keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik; dan
d) adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) data dan statistik daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

15) Persandian
a) belum optimalnya pemanfaatan persandian sebagai sarana pengamanan informasi pembangunan daerah; dan
b) keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menguasai persandian.

16) Kebudayaan
a) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa;
b) belum optimalnya pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah;
c) belum optimalnya pengelolaan benda-benda cagar budaya;
d) belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas/aktivitas dan apresiasi seni dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya); dan
e) perlunya aktualisasi seni budaya unggulan daerah.

17) Perpustakaan
a) kurangnya minat dan budaya baca di kalangan siswa, guru dan masyarakat;
b) kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang representatif; dan
c) masih kurangnya Bahan Pustaka baik dari kuantitas maupun kualitas di Perpustakaan Daerah.

18) Kearsipan
a) masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah;
b) masih rendahnya apresiasi terhadap arsip daerah; dan
c) terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan daerah.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan
a) keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;
b) keterbatasan permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan;

c) belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk;
d) jiwa kebaharian masyarakat masih relatif kurang; dan
e) masih kurangnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

2) Pariwisata
a) belum optimalnya pendapatan pariwisata;
b) belum optimalnya penggalian dan pemanfaatan potensi wisata daerah khususnya yang berbasis komunitas;
c) rendahnya angka kunjungan wisatawan ke objek daerah tujuan wisata;
d) belum optimalnya penyediaan sarana prasarana, fasilitas dan infrastruktur di objek daerah tujuan wisata; dan
e) masih rendahnya kesadaran, keterlibatan, dan peran serta masyarakat di sekitar objek daerah tujuan wisata dalam pengembangan objek wisata.

3) Pertanian
a) produksi dan produktivitas komoditas pertanian belum optimal dan secara umum belum sesuai standar teknis dan standar mutu;
b) belum optimalnya daya dukung, sarana prasarana dan penguasaan teknologi pertanian;
c) semakin terbatasnya kuantitas dan lemahnya kapasitas/kualitas sumber daya manusia, baik secara individu maupun kelembagaan, dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana irigasi pertanian;
d) akses terhadap permodalan pertanian lemah, bahkan terhadap permodalan yang disediakan pemerintah;
e) masih tingginya peredaran bibit pertanian yang belum sesuai standar kualitas dan kecenderungan penurunan kualitas bibit ternak;
f) belum berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk;
g) serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyakit hewan menular belum sepenuhnya dapat dikendalikan;
h) masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak memenuhi standar kualitas;
i) lambatnya adopsi teknologi dan masih bertumpu pada teknik usaha tani sederhana; dan
j) dampak perubahan Iklim.

4) Kehutanan
   a) belum berkembangnya usaha hasil hutan bukan kayu;
   b) masih adanya lahan kritis yang belum tertangani; dan
   c) rendahnya kesadaran masyarakat dalam penatausahaan peredaran hasil hutan kayu.
5) Energi dan Sumber Daya Mineral
   a) belum optimalnya penerapan tata kelola pertambangan yang baik dan benar oleh pelaku usaha pertambangan;
   b) terbatasnya sarana prasarana operasional dalam rangka pengendalian dan pengawasan, survei, analisis data, waktu dan personil;
   c) tingginya biaya investasi dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk setiap kapasitas listrik yang dihasilkan; dan
   d) belum tercukupinya kebutuhan energi bagi masyarakat.
6) Perdagangan
   a) masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan perizinan usaha perdagangan;
   b) kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam aktivitasnya untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan/konsumen;
   c) rendahnya daya saing produk daerah dalam menembus pasar; dan
   d) rendahnya daya saing pengusaha dalam era persaingan bebas.
7) Perindustrian
   a) kurangnya pemahaman perajin industri yang masih berorientasi pada produksi, bukan pada pasar (kebutuhan pasar, peluang pasar);
   b) terbatasnya penguasaan teknologi dan informasi;
   c) belum adanya kawasan industri;
   d) rendahnya kesadaran regenerasi usaha/penerus usaha sehingga beberapa unit usaha industri kecil mengalami tutup usaha; dan
   e) adanya keterbatasan sarana produksi/peralatan serta keterbatasan akses pemasaran.
8) Transmigrasi
   a) belum optimalnya kerjasama antar daerah dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi;
   b) daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun lokasi transmigrasi yang masih rendah;

c) terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran;
d) minimnya sarana pelatihan bagi calon transmigran, khususnya di tingkat kabupaten; dan
e) belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan di lokasi transmigrasi.

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
1) Perencanaan
a) dinamisnya regulasi yang melandasi perencanan dan pembangunan;
b) terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan;
c) belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan pembangunan;
d) kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
e) terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan;
f) kurang optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan; dan
g) tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah.
2) Keuangan
a) belum optimalnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
b) pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; dan
c) sumber pendapatan daerah dari Badan Usaha Milik Daerah masih terbatas.
3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
a) masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur; dan
b) belum optimalnya pemanfaatan dan penyusunan database kepegawaian daerah.
4) Penelitian dan Pengembangan
a) terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten dalam penelitian dan pengembangan (fungsional peneliti);
b) belum adanya kelembagaan/jaringan penelitian dan pengembangan sebagai mitra pemerintah dalam inovasi pembangunan (jarlitbang); dan

c) belum optimalnya partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan.

5) Fungsi Lainnya (Pemerintahan Umum)
   a) belum optimalnya implementasi *Good Governance*;
   b) belum optimalnya penerapan dan pengembangan kapasitas pelayanan Pemerintah Daerah berbasis elektronik dan internet (*electronic Governmennt, e-Gov*);
   c) belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring kerjasama antara masyarakat sipil, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai politik dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan; dan
   d) belum optimalnya kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah dan/atau lembaga swasta/ perorangan.

B. Lingkungan Strategis

Isu strategis akan menjadi jembatan antara capaian pembangunan saat ini dengan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis yang terpetakan dengan baik akan membuat perencanaan pembangunan yang disusun dapat lebih tepat dalam mengatasi permasalahan. Identifikasi terhadap isu-isu strategis merupakan langkah awal untuk memetakan potensi-potensi permasalahan pembangunan di suatu daerah. Dengan teridentifikasinya isu strategis maka proses perumusan kebijakan akan memperoleh batu pijakan yang tepat, yaitu informasi mengenai hal-hal yang harus didahulukan penanganannya.

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Kebumen. Hasil *review* akan melengkapi draf isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Kebumen.

Penentuan isu strategis pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Kebumen diawali dengan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang selama ini belum tertangani atau belum tuntas penanganannya sesuai target yang diinginkan. Selain itu, penetapan isu-isu strategis juga diperkaya dengan telaah terhadap isu internasional, nasional, regional dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Pembahasan mengenai lingkungan strategis, mencakup analisis lingkungan internal maupun analisis lingkungan eksternal dengan uraian sebagai berikut.

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang akan dikaji dalam bagian ini, mencakup: (i) Posisi Geografis dan Geoekonomi Daerah, (ii) Kondisi Demografi, dan (iii) Lingkungan Sosial Budaya. Penjelasan selengkapnya akan dipaparkan pada bagian berikut:

a. Posisi Geografis dan Geoekonomi Daerah

Ketergantungan pada sektor pertanian yang produktivitasnya semakin menurun. Sektor pertanian tumbuh signifikan pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,02%. Akan tetapi pada tahun 2013, sektor pertanian tidak tumbuh dan bahkan mencatatkan pertumbuhan negatif 0,23%. Di lain pihak, sektor pertanian masih menjadi sumber utama pembentuk PDRB maupun penyerap tenaga kerja yang paling besar dibandingkan sektor lain.

Di lain pihak, berdasar data PDRB 2013 Kabupaten Kebumen, penurunan nilai tambah sektor pertanian ini disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi beberapa komoditas dibanding tahun 2012, khususnya padi dan kedelai. Penurunan produksi tanaman padi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (i) adanya anomali iklim berupa hujan di musim kemarau (kemarau basah) sehingga intensitas cahaya kurang yang mengakibatkan asimilat tidak maksimal, (ii) musim tanam mundur; (iii) adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); (iv) adanya serangan hama tikus; (v) penurunan produksi tanaman kedelai disebabkan luas areal tanaman kedelai yang berkurang diakibatkan musim panen yang kedua mundur karena tingginya curah hujan pada saat panen padi sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi jika dilaksanakan penanaman kedelai.

Laju inflasi juga tidak bisa dikendalikan, terutama pada tahun 2013 dimana inflasi mencapai 2 digit. Dampak variabel makro yang tidak dikendalikan, sepertinya inflasi dapat menurunkan daya beli penduduk yang dicerminkan oleh capaian PDRB per kapita yang mengalami pertumbuhan lambat. PDRB per kapita di Kabupaten Kebumen relatif masih rendah, dan masih jauh di bawah rata-rata PDRB Provinsi Jawa Tengah.

b. Kondisi Demografi

Dinamika kependudukan (demografi), tidak hanya ditentukan dari sisi jumlah tetapi yang sangat menentukan adalah sisi kualitasnya/capaian tingkat pendidikan berdasar kelompok jenjang pendidikan tertentu.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kebumen masih banyak yang hanya lulus Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data rata-rata lama

sekolah berada pada angka kisaran 6-7 tahun. Data lain juga menunjukkan bahwa 60% penduduknya hanya berpendidkan tingkat SD ke bawah.

Dari sisi angka partisipasi pendidikan, capaian yang optimal masih berada pada jenjang pendidikan yang paling rendah. Untuk SMP dan SMA, APS berada jauh di bawahnya. Angka partisipasi murni terus turun selama kurun waktu 2010-2013.

Data lain yang terkait bidang kependudukan, masih ditemukan besaran angka kematian bayi di Kabupaten Kebumen dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 yang masih jauh dari target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, yaitu 5/1.000 (lima per seribu) kelahiran hidup sehingga perlu upaya keras misalnya dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan ibu dan anak. Angka kematian bayi masih berasa pada kisaran angka 10/1.000.

c. Lingkungan Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya di Kabupaten Kebumen, antara lain juga masih ditunjukkan oleh tingginya persentase penduduk miskin, yang besarnya mencapai angka hampir 20% dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada.

Upaya pengurangan tingkat kemiskinan dalam jangka panjang, antara lain dapat ditempuh dengan peningkatan mutu/kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen, yang antara lain ditempuh dengan cara peningkatan infrastruktur pendidikan/sekolah terutama untuk tingkat pendidikan atas (Sekolah Menengah Atas), yang dari data yang tersedia masih relatif sedikit/terbatas. Terkait dengan hal ini, juga perlu pemikiran mengenai rasio/standar ketersediaan sekolah dan guru.

2. Lingkungan Eksternal dan Dokumen Terkait

Lingkungan Eksternal dan dokumen terkait yang akan dikaji dalam bagian ini, mencakup:

a. *Millenium Development Goals* (MDGs);
b. *Post-2015 Development Agenda;*
c. Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ACFTA; dan
d. Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Penjelasan selengkapnya tentang analisis lingkungan eksternal diuraikan sebagai berikut:

a. *Millenium Development Goals* (MDGs)

Konsep MDGs muncul dilatarbelakangi dari adanya pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu

memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, ditetapkan delapan tujuan beserta target-targetnya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Delapan agenda dasar dari MDGs meliputi:

1) menghilangkan kemiskinan dan kelaparan;
2) mencapai pendidikan dasar;
3) mempromosikan persamaan gender dan emansipasi wanita;
4) menurunkan angka kematian bayi;
5) memperbaiki kesehatan ibu hamil;
6) memberantas HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain;
7) menjamin kelayakan lingkungan; dan
8) membangun perserikatan global untuk pembangunan (*development*).

Tujuan MDGs ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan menganalisis kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidentifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan di bawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, diketahui bahwa Indonesia berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah untuk melaksanakan MDGs, maka seluruh provinsi, kabupaten/kota berkewajiban berkontribusi dalam memenuhi komitmen tersebut. Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari NKRI ikut berpartisipasi aktif dalam mencapai target yang dicanangkan dalam MDGs. Dengan potensi sumber daya, baik manusia maupun finansial yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen, terdapat optimisme bahwa pemerintah Kabupaten kebumen akan dapat memenuhi target MDGs.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen, sebagian atau seluruh aspek MDGs dapat dipilih sebagai aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu MDGs sebagai isu strategis RPJMD, dengan catatan telah dilakukan kajian mengenai relevansi antara isu MDGs dengan permasalahan riil di Kabupaten Kebumen.

b. *Post-2015 Development Agenda*

Agenda Pembangunan *Post–2015* merupakan kegiatan tindak lanjut dari MDGs yang oleh banyak kalangan layak diteruskan karena keberhasilan yang telah dicapainya. Hal penting yang menjadi fokus dari *Post-2015 Development Agenda* adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dari bumi dengan target akhir pada tahun 2030. Hal tersebut disampaikan dan disepakati pada *High Level Panel* di Rio De Janeiro tahun 2012. Visi dan tanggung jawab dari Post-2015 adalah mengakhiri kemiskinan ekstrem dalam segala bentuknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan meletakkan dasar-dasar kesejahteraan yang berkesinambungan bagi semua.

Seperti yang disepakati oleh para pemimpin dunia, sasaran dan target baru perlu dilengkapi dengan informasi dasar sehubungan dengan HAM secara *universal* dan menyelesaikan kerja yang telah dimulai oleh MDGs. Dalam hal ini yang terpenting adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dari muka bumi ini menjelang 2030. Saat ini hal tersebut dapat dilakukan. Oleh karena itu, agenda pembangunan yang baru harus meneruskan semangat Deklarasi Milenium dan hal-hal terbaik dari MDGs, dengan fokus praktis pada isu-isu seperti kemiskinan, kelaparan, air, sanitasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Para pemimpin dunia menyimpulkan bahwa agenda *post-2015* merupakan agenda universal. Agenda ini perlu didorong oleh lima pergeseran transformasi besar, yaitu:

1) Tidak meninggalkan siapapun di belakang
   Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrem, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya-yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.
2) Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti
   Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.
3) Mentransformasikan ekonomi untuk lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif

Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

4) Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua
   Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.
5) Membangun sebuah kemitraan global yang baru
   Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacar dan penduduk lokal/indigenous. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen, sebagian atau seluruh agenda post-2015 dapat dipilih sebagai aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu agenda post-2015 sebagai isu strategis RPJMD, dengan catatan telah dilakukan kajian mengenai relevansi antara isu agenda post-2015 dengan permasalahan riil pembangunan di Kabupaten Kebumen.

c. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN sejalan dengan dinamika hubungan antar-bangsa di ASEAN yang menyadari pentingnya integrasi negara-negara di Asia Tenggara. Pada pertemuan informal para Kepala Negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997 disepakati ASEAN Vision 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hanoi yang menghasilkan *Hanoi Plan of Action* (HPA). Visi 2020 termasuk HPA berisi antara lain: kondisi yang ingin diwujudkan di beberapa bidang, seperti orientasi ke luar, hidup berdampingan secara damai dan menciptakan perdamaian internasional.

Beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Visi 2020 adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turis melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan di antara negara-negara anggota ASEAN.

Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 dihasilkan Bali Concord II yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat integrasi ASEAN. Terdapat tiga komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan dengan tiga pilar di dalam ASEAN *Vision* 2020, yaitu pada bidang keamanan politik (ASEAN *Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 adalah: "*To create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic goods, services, investment, skill labor economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020*."

Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC, maka dibuatlah AEC Blueprint yang memuat empat pilar utama yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *ecommerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen

pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dengan berlakunya MEA 2015, berarti negara-negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada ASEAN *Economic Community* (AEC) Blueprint. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen, pemberlakuan konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi aspek yang harus mendapat perhatian besar dalam pembangunan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun mendatang. Pada satu sisi, hal ini bisa menjadi peluang untuk Kabupaten Kebumen mengembangkan perekonomian daerah, dengan syarat upaya peningkatan daya saing daerah baik itu sumber daya manusia maupun produk-produk perekonomian daerah dapat secara optimal dilakukan untuk mengimbangi peningkatan daya saing Negara ASEAN yang lain. Pada sisi yang lain, pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi ancaman yang sangat serius bagi pembangunan daerah, apabila pemerintah dan seluruh stakeholders pembangunan Kabupaten Kebumen tidak mempersiapkan diri untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia maupun produk-produk perekonomian daerah.

d. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam melaksanakan pengaturan terhadap rumah tangganya sendiri, daerah harus mengikuti koridor kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini semata-mata ditujukan untuk menjamin keharmonisan dalam keberjalanan fungsi pemerintahan melalui pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Salah satu konsekuensinya, Pemerintah Daerah harus memenuhi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD, Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Adapun pada tahun 2014 telah dilaksanakan 15 (lima belas) SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan personil daerah dalam bidang bersangkutan, dengan rincian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:

1) Bidang Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
2) Bidang Lingkungan Hidup, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
3) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota;
4) Bidang Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5) Bidang Perumahan Rakyat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

6) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
7) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
8) Bidang Pendidikan Dasar, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar;
9) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10) Bidang Ketenagakerjaan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
11) Bidang Ketahanan Pangan, berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ T.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12) Bidang Komunikasi dan Informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi;
13) Bidang Kesenian, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
14) Bidang Penanaman modal, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
15) Bidang Perhubungan khusus angkutan massal berbasis jalan, berdasarkan Praturan Menteri Perhubungan Nomor PM.10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.

Kaitan penyusunan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah pada sisi belanja daerah yang direncanakan untuk menangani isu-isu strategis pembangunan daerah. Belanja daerah untuk penanganan isu-isu strategis pembangunan daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

C. Isu-isu Strategis

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Nasional serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini ditujukan untuk menjaga sinergitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi.

Tabel 4.1
Isu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

ISU STRATEGIS RPJM NASIONAL TAHUN 2015-2019	ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018
1. Stabilitas Politik dan Keamanan; 2. Tata Kelola : Birokrasi Efektif dan Efisien; 3. Pemberantasan Korupsi; 4. Pertumbuhan Ekonomi; 5. Percepatan Pemerataan dan Keadilan; 6. Keberlanjutan Pembangunan; 7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 8. Kesenjangan Antar Wilayah; 9. Percepatan Pembangunan Kelautan.	1. Pengurangan Kemiskinan; 2. Pengurangan Pengangguran; 3. Pembangunan Infrastruktur; 4. Kedaulatan Pangan; 5. Kedaulatan Energi; 6. Tata Kelola Pemeintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah.

Sumber : RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Berdasarkan hasil telaahan dan analisis dari permasalahan pembangunan dan isu/kebijakan internasional, nasional dan regional, maka isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pembangunan yang Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia merupakan motor dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan agar pembangunan yang dilakukan juga berkualitas. Kuantitas dari manusia akan mempengaruhi pembangunan, akan tetapi Sumber daya manusia dalam jumlah yang sedikit tetapi berkualitas akan lebih baik daripada jumlah sumber daya manusia banyak namun hanya sedikit yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (i) pendidikan, (ii) kesehatan, dan (iii) kepemimpinan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka sumber daya manusia akan semakin berkualitas. Kesehatan dan kepemimpinan menunjukkan produktivitas dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Apabila di Kabupaten Kebumen memiliki sumber daya manusia yang produktif maka nilai tambah terhadap berbagai sektor pembangunan semakin meningkat dan beragam.

   Untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia, pemerintah belum melakukan upaya-upaya yang tepat secara optimal. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat miskin dinilai masih kurang. Ada pencapaian yang mendukung pembangunan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia, namun masih ada pula capaian yang kurang baik.

   Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun sumber daya manusia tampak dari data angka melek huruf pada tahun 2013 dan 2014 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 92,16%, angka partisipasi kasar sejak tahun 2012 pada jenjang pendidikan SD dan SLTP sudah mencapai di atas 100%, sedangkan untuk jenjang SLTA masih berada pada tingkat 82,70% pada tahun 2014. Angka putus sekolah pada jenjang SLTA pada tahun 2014 justru mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2013 yaitu sebesar 0,43%. Bidang kesehatan juga memberi kontribusi terhadap pembentukan sumber daya manusia seperti angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 10,92 dan angka kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran di atas angka 50.

2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penurunan Permasalahan Sosial

   Nilai-nilai keagamaan menjadi salah satu nilai dasar yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Nilai-nilai agama menjadi penuntun dan pedoman bagi setiap individu di masyarakat dalam berkehidupan serta secara simultan

memberikan pengaruh yang besar pada kondisi sosial dan ekonomi daerah. Timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran, anak terlantar, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, tidak terlepas dari penurunan aplikasi/penerapan nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelengggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan tidak saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berkaitan dengan unsur-unsur atau persoalan-persoalan non-ekonomi seperti sosial, budaya, dan politik. Karena sifat multidimensional tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*). Untuk mengejar seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi, dapat diukur secara kuantitatif dan objektif seperti dalam mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah. Namun untuk memahami seberapa besar kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang ukurannya menjadi sangat relatif dan kualitatif. Disini yang dipersoalkan bukan berapa besar ukuran kemiskinan, tetapi dimensi-dimensi apa saja yang terkait dalam gejala kemiskinan tersebut.

Isu pengangguran di Kabupaten Kebumen juga perlu mendapat perhatian, meskipun menurut data tingkat pengangguran Kabupaten Kebumen yaitu Angka pengangguran terbuka pada tahun 2014 menunjukkan angka sebesar 3,25%. Persentase pengangguran ini lebih rendah daripada tingkat pengangguran Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional yang mencapai 8,36%. Namun demikian, karena tingkat pengangguran berpotensi menjadi masalah penambahan tingkat kemiskinan, maka Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pengangguran ini dengan tepat agar kebijakan yang diambil tepat. Pengembangan sektor-sektor unggulan di Kebumen dapat diarahkan dengan menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Penanganan permasalahan pengangguran di Kabupaten Kebumen harus difokuskan pada upaya pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap) dan nelayan, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Kebumen bekerja pada sektor ini. Kemudian juga

perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang tidak/belum bekerja, anak putus sekolah dan pemberdayaan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, upaya pengurangan pengangguran juga harus dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penyediaan lapangan usaha, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta tenaga pengelola Balai Latihan Kerja, pendidikan vokasi yang fokus atau berorientasi kepada kebutuhan pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru berbasis potensi sumber daya lokal.

4. Optimalisasi Potensi Seluruh Sektor Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi

   Kabupaten Kebumen memiliki potensi sumber daya yang melimpah. Dari sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kabupaten Kebumen dapat mengoptimalkan penggunaannya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya lahan pertanian yang melimpah antara lain untuk pengembangan padi sawah dan perkebunan, serta pengembangan sektor pariwisata yang mengandalkan keindahan panorama alam. Dengan pemanfaatan yang tepat dan sesuai dengan potensi lokal, sumber daya ini seharusnya dapat mensejahterakan penduduk Kebumen, secara langsung ataupun tidak langsung.

   Dampak yang dapat dirasakan secara langsung dari adanya pemanfaatan sumber lokal adalah terbuka luasnya lapangan pekerjaan. Dampak tidak langsung dari eksplotasi sumber daya lokal di Kebumen adalah dengan retribusi dan pajak yang kemudian oleh Pemerintah Daerah dana pajak dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana atau sarana Kabupaten. Pengelolaan sumber daya yang tepat di Kabupaten Kebumen akan menjadikan kabupaten ini terdepan dan tumpuan nasional dalam agribisnis.

   Secara bertahap, pembangunan di sektor pertanian mulai menunjukkan kemajuan yang ditunjukkan dengan data produktivitas padi pada tahun 2011 hingga 2014, produksi yang dihasilkan berturut meningkat 440,021 ton, 480,338 ton, 422,835 ton, dan 448,27 ton padi kering. Produksi Kabupaten Kebumen mengalami surplus sehingga mampu menyediakan produksi padi bagi wilayah-wilayah yang lain. Produktifitas sektor pertanian per hektar menunjukkan angka yang meningkat yaitu 55,56 ton per hektar pada tahun 2011 meningkat menjadi 59,01 ton per hektar.

5. Penyediaan Infrastruktur Transportasi dan Fasilitas Dasar

Prasarana transportasi dan fasilitas dasar merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Fasilitas dasar tersebut menjadi hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Komitmen pimpinan daerah akan mendorong aparat pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya untuk mau bekerjasama menyusun strategi penyediaan kebutuhan dasar. Strategi penyediaan kebutuhan dasar merupakan bukti bahwa Pemerintah Daerah telah memikirkan dan merencanakan seluruh aspek pengembangan layanan fasilitas dasar secara komprehensif.

Penyediaan infrastruktur transportasi darat penting kaitannya dalam mewujudkan Kebumen yang sejahtera. Manfaat dari ketersediaan infrastruktur jalan yang baik adalah sebagai akses dan sarana distribusi. Infrastruktur jalan sebagai akses bertujuan untuk membuka daerah-daerah yang masih terisolasi dan memudahkan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berbagai informasi lain. Adanya akses menuju daerah yang terisolasi akan menarik penduduk untuk lebih maju dan mengurangi ketimpangan yang terjadi. Infrastruktur transportasi darat yang baik akan memobilisasi baik orang dan barang secara cepat dan lancar serta dalam volume besar. Keberadaan infrastruktur transportasi akan meningkatkan transaksi dan perputaran ekonomi sehingga dapat menciptakan kesejahteraan di Kebumen.

Kondisi yang ada saat ini mengenai jaminan penyediaan infrastruktur belum menunjukkan kondisi yang dapat mendukung terwujudnya visi. Sebagai contoh, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2010 sampai tahun 2014 belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Apabila proporsi jalan dalam kondisi baik pada tahun 2010 mencapai 64,99%, namun pada tahun 2014 proporsi jalan dalam kondisi baik hanya 51,56%. Kondisi jalan dalam keadaan rusak berat dan rusak ringan mencapai 16,38% dan 17,43%. Sebagai ilustrasi kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 mencapai 166,95 km.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kebumen dalam pembangunan infrastruktur adalah belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur yang sejalan dengan dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengembangan wilayah. Permasalahan tersebut ditandai yaitu:

a. Infrastruktur Fisik
   Infrastruktur ini terkait dengan Pekerjaan Umum dan Perhubungan antara lain belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan untuk mendukung daya saing wilayah, belum optimalnya prasarana sarana transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah utamanya terkait ketersediaan terminal barang dan lahan terminal tipe A guna pendukung aktivitas terminal, integrasi antar moda transportasi dan pengembangan sistem transportasi massal; belum optimalnya kondisi prasarana sarana sumber daya air, terkait dengan kondisi jaringan irigasi yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian utamanya irigasi kewenangan kabupaten, daya dukung dan tampung drainase serta sungai yang sudah tidak memadai; ketersediaan tampungan air baku yang belum merata dan dalam kondisi yang belum optimal sehingga masih terdapat wilayah yang mengalami kekeringan; rendahnya akses masyarakat terhadap air minum terlindungi dan rendahnya pelayanan sanitasi layak; pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara terpadu antar wilayah dan belum memperhatikan kesehatan lingkungan; rendahnya pengelolaan jasa konstruksi; serta masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni.
b. Infrastruktur Non Fisik
   Jenis inftrastruktur ini terkait dengan saarana pendidikan, kesehatan dan sosial, antara lain: pemenuhan kualitas prasarana sarana pendidikan baik bangunan sekolah, ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung (perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer) yang masih belum optimal dan merata; belum terpenuhinya prasarana dan sarana di Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK serta jumlah dan sebaran Puskesmas yang masih kurang; belum optimalnya kondisi panti-panti sosial sehingga memerlukan upaya peningkatan; serta belum optimalnya prasarana dan sarana publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
c. Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)
   Permasalahan yang terkait dengan maslah ini, antara lain: masih terbatasnya kapasitas *bandwith* internet; kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah dan sesuai kapasitasnya; belum ada data *center*; keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia aparatur serta masyarakat terhadap TI dan kelembagaannya untuk menuju keterbukaan informasi publik berbasis TI.

6. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif bagi Seluruh Pelaku Usaha

   Iklim investasi yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha perlu diciptakan dalam rangka mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen serta mendukung para pelaku usaha baru yang akan memulai usahanya. Pemerintah akan berusaha keras untuk menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan perhatian sama besar bagi semua kalangan usaha.

   Investor besar identik dengan perusahaan atau manufaktur yang besar, perlu didukung karena kegiatan perusahaan atau manufaktur ini akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga akan mengurangi pengangguran. Selain itu perusahaan atau manufaktur besar menyumbang pajak dan retribusi yang besar pula, dengan demikian pendapatan asli daerah akan turut meningkat.

   Usaha Kecil dan Mikro meskipun bukan termasuk sektor formal, namun memiliki ketahanan terhadap krisis global yang terjadi akhir-akhir ini. Pemerintah perlu mendukung UKM untuk menjaga dan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya dalam koridor hukum yang berlaku, seperti dukungan kebijakan perbankan yang mempermudah kredit pinjaman kepada pelaku usaha kecil dan mikro.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Generasi Mendatang

   Lingkungan hidup perlu dijaga kondisi dan keberadaanya karena di dalamnya terdapat hak generasi penerus untuk menikmati kondisi lingkungan yang baik dan terjaga kelestariaannya. Pembangunan yang mengabaikan lingkungan hanya akan membuat pertumbuhan ekonomi tinggi namun kualitas dari pertumbuhan ekonomi tersebut rendah. Kualitas lingkungan sebagai tempat hidup masyarakat menurun dan pada akhirnya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

   Potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Kebumen meliputi pencemaran udara, air, dan juga tanah. Kabupaten Kebumen yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa Tengah berpotensi menyumbang emisi karena pembuangan sarana transportasi. Namun, keberadaan hutan-hutan di Kabupaten Kebumen masih dapat dipertahankan keberadaannya. Ada 3 (tiga) alasan mengapa hutan Kebumen perlu dijaga, yaitu karena fungsinya sebagai penghasil oksigen, sebagai ekosistem bagi

berbagai macam flora dan fauna serta sebagai penahan laju emisi gas rumah kaca.

Pengelolaan terhadap lingkungan harus menjadi arus utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang dijalankan harus memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

8. Tata Kelola Pemerintahan dan Kelembagaan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan

   Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan dan kinerja aparatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing, baik itu sebagai individu (Aparatur Sipil Negara) maupun sebagai Perangkat Daerah. Terkait dengan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 15 Januari 2014, maka dalam rangka reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah harus melakukan langkah-langkah strategis dan konkrit dengan fokus pada pemantapan sistem manajemen kepegawaian meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian dan batas usia pensiun pegawai aparatur sipil negara.

   Tujuan pembangunan dapat tercapai apabila didukung oleh sistem kelembagaan yang memadai. Sistem kelembagaan terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: (i) Peraturan, (ii) Aktor, dan (iii) Sumber Daya. Pada unsur pertama, keberadaan peraturan dan kebijakan yang pro terhadap penciptaan masyarakat yang sejahtera merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Pada unsur kedua, Pemerintah Daerah sebagai aktor pembangunan diharapkan mampu melaksanakan peran yang diembannya dan melakukan koordinasi antar lembaga dengan baik. Pemerintah Daerah perlu memiliki kecakapan intelektual serta dukungan pendanaan yang memadai agar dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi dan Misi Kabupaten Kebumen

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, RPJMD mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kebumen adalah:

"Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis"

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

1. Kebumen, adalah suatu daerah otonom, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mandiri, artinya suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang mampu mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Kemandirian di sini bukan situasi atau kondisi dalam keterisolasian, tetapi konsep dinamis yang mengenal saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlebih dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang kini tengah berlangsung. Untuk membangun kemandirian mutlak dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang menjadi kunci dari kemandirian itu. Kemandirian suatu daerah, antara lain dapat diukur dari; ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan

pembangunannya; kemandirian aparatur dalam menjalankan tugasnya; dan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemandirian dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Selain itu, kemandirian secara prinsip adalah suatu sikap untuk mengenali potensinya dan kemampuannya untuk mengelola sumber daya yang tersedia dan tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dan masyarakatnya harus mandiri dalam menentukan kebijakan serta memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pemenuhan kebutuhan bahan pokok untuk pengembangan agrobisnis dan pemenuhan kebutuhan akan kebutuhan pangan sebagai produk petanian. Kedua kebutuhan ini dengan sendirinya akan tercukupi dengan mengelola sumber daya lokal yang menjadi basis kehidupan masyarakatnya yakni pertanian.

3. Sejahtera, artinya suatu kondisi dimana masyarakat telah mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan dan pendidikan serta sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini setidaknya diperlukan dua syarat. Pertama, agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri maka masyarakat memerlukan pendapatan perkapita yang cukup. Dalam hal ini, maka seberapa jauh pengembangan agrobisnis mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi disertai dengan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, seandainya syarat pertama tidak terwujud, maka Pemerintah Daerah berkewajiban membantu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akan mendapatkan bantuan sosial baik dalam bentuk subsidi atau bantuan sosial lainnya. Untuk bisa mewujudkannya, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pendapatan regional yang cukup guna membiayai kebutuhan perlindungan sosial tersebut. Dalam hal ini, sumbangan agrobisnis pada pendapatan regional merupakan salah satu tantangan yang cukup besar untuk dipikirkan dalam pengembangan program agrobisnis. Dengan demikian, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya kondisi sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar warga, tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi dan berkesinambungan, meningkatnya Indeks Pembangunan

Manusia, menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, tersedianya berbagai infrastruktur pelayanan dasar dan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik di semua elemen.

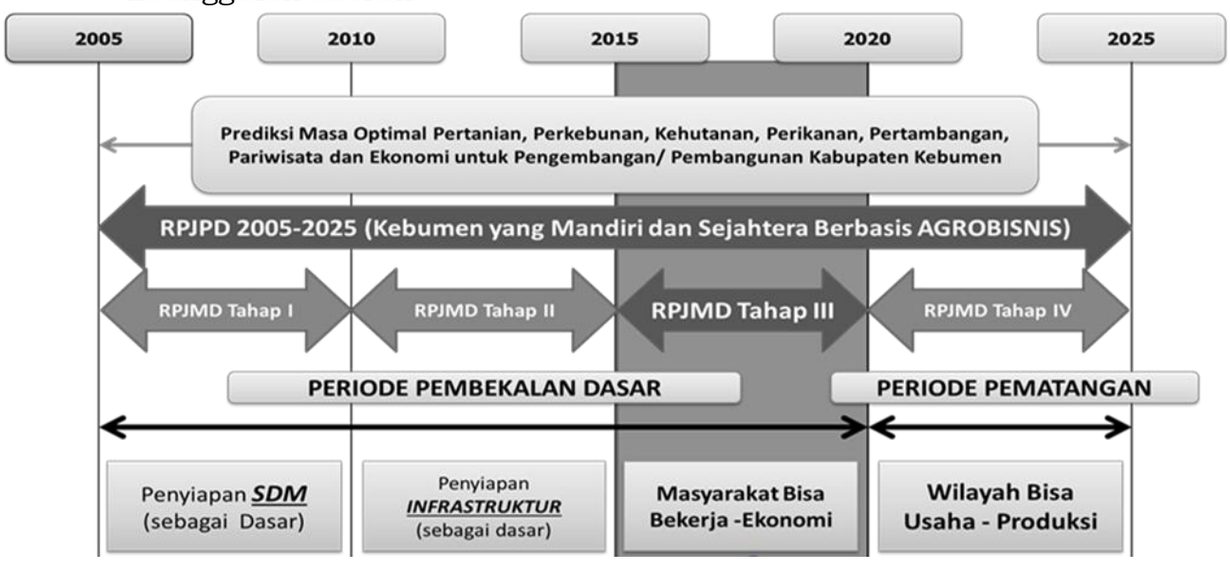
4. Agrobisnis, artinya daerah yang mampu menghasilkan produk-produk pertanian dan produk olahan pertanian yang memiliki nilai kompetitif yang tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, maupun internasional. Kabupaten Kebumen yang memiliki basis ekonomi di sektor pertanian ini diharapkan mampu menjadi daerah agrobisnis terdepan di Jawa Tengah pada tahun 2025. Produk pertanian merupakan produk yang dihasilkan secara langsung dari kegiatan bertani. Sementara itu produk olahan pertanian merupakan produk yang dihasilkan setelah produk pertanian tersebut diolah dalam suatu industri agrobisnis baik industri rumah tangga maupun industri besar. Upaya menghasilkan produk pertanian dan produk olahan pertanian secara bersamaan ini sangat penting. Pada satu sisi, Kabupaten Kebumen memiliki potensi alam dan infrastruktur yang baik guna mengembangkan pertanian. Selain itu sebagian besar masyarakat Kabupaten Kebumen mengembangkan kegiatan ekonominya di sektor pertanian. Pada sisi yang lain, di Kabupaten Kebumen juga berkembang industri-industri kecil yang mengolah produk pertanian menjadi produk olahan pertanian. Produk pertanian bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik di tingkat lokal maupun nasional namun pada saat yang sama juga menjadi bahan dasar yang diperlukan industri-industri produk olahan pertanian. Oleh karena itu, keduanya merupakan suatu kesatuan holistik yang tidak dipisahkan. Secara riil keberhasilan menjadi daerah agrobisnis bisa dilihat dari sumbangan subsektor agrobisnis pada tiga hal, yaitu (1) kontribusinya yang signifikan pada pendapatan regional, (2) penyerapan tenaga kerja, dan (3) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini sangat penting untuk mengukur pencapaian konsep sebagai daerah agrobisnis terdepan di Jawa Tengah. Signifikansi kontribusi pada pendapatan regional bisa dilihat dari persentase sumbangan sektor petanian pada pendapatan regional. Sementara itu, seberapa jauh penyerapan tenaga kerja ditunjukkan dengan persentase tingkat partisipasi pekerja di sektor ini dibanding sektor lain di luar sektor pertanian. Sedangkan kesejahteraan masyarakat bisa ditentukan dari seberapa besar perbedaan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok dari pendapatan yang diperoleh para pekerja di sektor pertanian (sebelum dan setelah visi diwujudkan).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kelima konsep kunci saling terkait satu sama lain. Kelimanya merupakan suatu jalinan sistemik yang bersifat holistik. Ketidakmampuan mengembangkan produk pertanian misalnya, akan mengganggu pengembangan agrobisnis, menghambat terciptanya kemandirian masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan kesulitan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan kelima konsep tersebut perlu diperhatikan secara serius baik konsep tersebut berdiri sendiri maupun sebagai satu kesatuan secara utuh.

Pada tataran yang lebih operasional, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut perlu ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. mengurangi tingkat kemiskinan penduduk;
3. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis;
4. mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan; dan
5. menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.

RPJMD menjadi bagian tahap ketiga dan keempat dari RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Tahap ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah.



Gambar 5.1
Posisi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021
dalam Tahapan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025
Sumber : Data primer diolah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah tahun 2016-2021 adalah:

"*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan*"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
2. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
3. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
4. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
5. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan

pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas										
1. Mewujud-kan sumber-daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,21	12,38	12,54	12,71	12,87	13,04	13,20
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,93	6,98	7,02	7,07	7,11	7,16	7,20
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	53,30	54,74	56,49	58,04	59,55	61,47	63,39
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	38,78	44,23	46,79	53,53	56,09	58,65	65,38
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,77	72,81	72,85	72,89	72,93	72,97	73,01
		6. Angka Kematian Ibu	Angka	68,48	100	95	90	85	75	68
		7. Angka Kematian Bayi	Angka	10,50	11,00	11,00	10,90	10,90	10,75	10,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat										
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	%	100	100	100	100	100	100	100
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	%	23,66	25,04	27,56	30,09	32,61	35,13	37,65
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	Kasus	867	800	750	700	650	600	500

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 3 : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan										
4. Meningkat-kan partum-buhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi	%	5,83	5,86	5,89	5,91	5,94	5,97	6,00
		12 Pendapatan perkapita penduduk	Ribu Rp	16.983,67	18.349,63	19.715,60	21.081,57	22.447,54	23.813,51	25.179,48
		13. Rasio/Indeks Gini	Point	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	Unit	-	1	2	4	4	5	6
5. Meningkat-kan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	%	0	0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	16,73	16,80	17,01	17,46	17,90	18,80	19,69

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
6. Mewujud-kan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendu-kung pengem-bangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	%	49,09	52,68	54,83	57,00	59,43	61,88	62,88
7. Terwujud-nya pengelola-an sumber da-ya air, sumber-daya lahan, sumberdaya hutan, sumber-daya pesisir berdasarkan azas konserva-si, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point/ Indeks	59,92	63,00	66,00	69,00	74,75	76,00	77,50
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan										
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	%	20,02	19,26	18,50	17,74	16,98	16,22	15,45

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	%	2,09	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97
Misi 5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat										
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	76,64	77,40	79,03	80,03	81,41	82,73	83,87
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	93,33	95,00	96,00	98,00	99,00	99,00	99,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama										
11. Mewujud-kan penye-lenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	CC	B	B	B	B	B	B
		25. Opini BPK atas LKPD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00

Sumber : Data primer diolah

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats)* dengan melibatkan seluruh komponen Pemerintah Daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah tahun 2010-2015, serta dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.

A. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*)

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan organisasi. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kekuatan

   Kekuatan Kabupaten Kebumen yang teridentifikasi antara lain:

   a. jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk usia produktif yang lebih tinggi;
   b. kehidupan dan budaya masyarakat yang religius dan agamis;

c. adanya keinginan masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan dan ketertinggalan;
d. masih tumbuh suburnya jiwa gotong royong, kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat;
e. kondisi geografis wilayah dengan variasi topografi pegunungan dan pantai yang memiliki pesona alam yang indah;
f. sumber daya alam yang cukup melimpah dan beragam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya);
g. pembangunan jalan lintas selatan jawa sebagai akses horizontal bagian selatan;
h. tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi;
i. adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan; dan
j. adanya program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.

2. Kelemahan

Kelemahan Kabupaten Kebumen dalam pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. tingginya angka kemiskinan dan pengangguran pada usia produktif;
b. kondisi geografis wilayah yang rawan bencana alam;
c. belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah;
d. belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar;
e. belum optimalnya pendapatan dan kemampuan keuangan daerah;
f. belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
g. belum optimalnya penguasaan dan aplikasi sistem dan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan masyarakat; dan
h. masih rendahnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan sumber daya.

3. Peluang

Peluang untuk pembangunan Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

a. terbukanya peluang usaha dan investasi, khususnya pada sektor agribisnis, agroindustri, pariwisata, kelautan serta energi dan sumber daya mineral;
b. terbukanya informasi pasar baik lokal, regional maupun global yang didukung oleh perkembangan informasi dan teknologi;

c. pemberlakuan otonomi daerah yang semakin luas bagi Pemerintah Daerah;
d. iklim demokratis yang semakin membaik, serta perhatian pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah yang semakin tinggi;
e. mulai tumbuhnya kesadaran kehidupan berpolitik masyarakat, dan terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui otonomi daerah;
f. kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk petani dan nelayan;
g. perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan bagi hasil pemanfaatan sumber daya alam; dan
h. adanya bantuan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

4. Ancaman

Adapun ancaman yang mungkin muncul dalam pembangunan Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a. dinamisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan;
b. kondisi ekonomi makro yang masih belum stabil;
c. pengembangan kawasan Ekonomi Asia;
d. dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat;
e. terjadinya degradasi moral masyarakat; dan
f. pengembangan wilayah sekitar yang memiliki karakteristik sama.

B. Strategi

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menciptakan nilai tambah *(value added)* dari hasil perencanaan pembangunan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen. Di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

1. Strategi Misi Ke-1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Rangkaian strategi dari misi ini, diarahkan untuk mewujudkan dan menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-1 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-1

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.1.1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal
				1.1.2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat
		1.2	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	1.2.1	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas
		1.3	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	1.3.1	Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda, olahraga dan prasarana olahraga
		1.4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.4.1	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan
				1.4.2	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan
				1.4.3	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit
				1.4.4	Meningkatkan perilaku hidup sehat
				1.4.5	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				1.4.6	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-1 yang dominan pada bidang pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2021.

2. Strategi Misi Ke-2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.

   Rangkaian strategi dari misi ke-2 ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat di Kabupaten Kebumen yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, serta peningkatan akhlak masyarakat secara keseluruhan. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-2, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-2

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	1.1.1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama
				1.1.2	Meningkatkan pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya
2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	2.1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	2.1.1	Meningkatkan kordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-2 yang dominan pada bidang sosial dan budaya, diharapkan dapat meningkatkan Indeks Ketenteraman Sosial (IKS) yang diindikasikan dengan semakin menurunnya persentase pelanggaran hukum dan juga semakin meningkatnya persentase ketersediaan prasarana keagamaan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

3. Strategi Misi Ke-3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.

   Rangkaian strategi pendukung misi ke-3, diarahkan untuk mewujudkan beberapa tujuan, yaitu: (i) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan; (ii) meningkatkan daya saing investasi dan pariwisata daerah, (iii) mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap; serta (iv) terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-3, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-3

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1.1.1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
				1.1.2	Mengembangkan kawasan perdesaan
				1.1.3	Mengembangkan Kawasan Industri
				1.1.4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi
				1.1.5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi
				1.1.6	Penganekaragaman ketahanaan pangan berbasis potensi lokal
				1.1.7	Peningkatan operasi pasar

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				1.1.8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat
				1.1.9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah
				1.1.10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah
				1.1.11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD
2.	Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	2.1	Meningkatnya daya saing investasi daerah	2.1.1	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu
		2.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	2.2.1	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata
3.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	3.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	3.1.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan
				3.1.2	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
				3.1.3	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi
				3.1.4	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)
				3.1.5	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa
				3.1.6	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan
				3.1.7	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
				3.1.8	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik
				3.1.9	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan
4.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari	4.1	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	4.1.1	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah
5.	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	5.1	Menurunnya angka pengangguran	5.1.1	Meningkatkan keterampilan masyarakat
				5.1.2	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-3 yang dominan pada bidang pengembangan infrastuktur wilayah, diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menunjang dan menjadi pendorong dalam peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, meningkatnya nilai Indeks Daya Saing Usaha, peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah, menurunkan angka pengangguran yang bernilai ekonomi serta terjadinya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2021.

4. Strategi Misi Ke-4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan

   Rangkaian strategi pendukung misi ke-4, diarahkan untuk mewujudkan beberapa tujuan, yaitu: (i) untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera; (ii) untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran; (iii) untuk mewujudkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-4, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-4

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	1.1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1.1.1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-4 yang dominan pada bidang ekonomi diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

5. Strategi Misi Ke-5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

   Rangkaian strategi pendukung misi ke-5, diarahkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-5, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-5

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1.1.1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas
				1.1.2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan
		1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	1.2.1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit

Sumber : Data primer diolah

Hasil penerapan dari strategi pada misi ke-5 yang dominan pada penyediaan sarana pendukung bidang pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan besaran indeks keterjangkauan pendidikan dan indeks keterjangkauan kesehatan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021.

6. Strategi Misi Ke-6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Rangkaian strategi pendukung misi ke-6 diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2016-2021. Sasaran dan strategi untuk pencapaian misi ke-6, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6
Sasaran dan Strategi untuk Misi Ke-6

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	1.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1.1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas keuangan daerah
				1.1.2	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik
		1.2	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	1.2.1	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan

Sumber : Data primer diolah

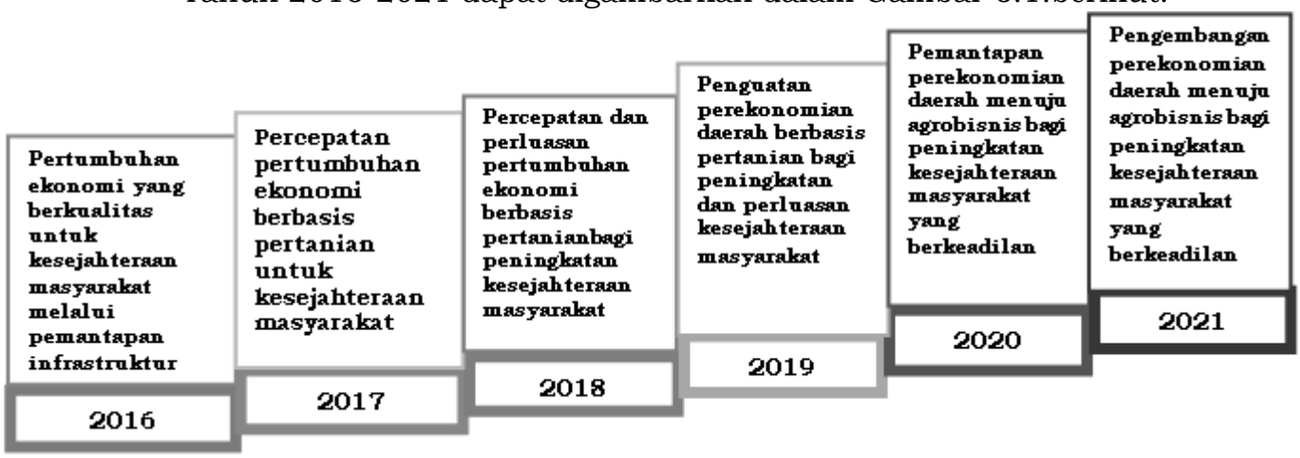
Sasaran dari strategi pada misi ke-6 yang dominan pada bidang pemerintahan ini ditujukan untuk meningkatkan indeks penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggarannya. Hal ini didasari pada prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Tema tahapan pembangunan di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2016-2021 dapat digambarkan dalam Gambar 6.1.berikut:



Gambar 6.1
Tema Pembangunan Tahunan
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Sumber : Data primer diolah

Secara keseluruhan arah kebijakan berdasarkan fokus tema pembangunan dijabarkan keterkaitan strategi dan arah kebijakan diuraikan dalam Tabel 6.7 sebagai berikut.

Tabel 6.7.
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas			
1	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	a	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	b	Perluasan akses pendidikan formal
3	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	c	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan olah raga dan prasarana olah raga.	d	Meningkatkan mutu/kualitas pembinaan olahraga dan prasarana olahraga
5	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	e	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
6	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
7	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit		
8	Meningkatkan perilaku hidup sehat	f	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
9	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	g	Meningkatkan akses dan pelayanan pada ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
10	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	h	Meningkatkan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat			
1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	a	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai ajaran agama
2	Meningkatkan pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	b	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3	Meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	c	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen
Misi 3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan			
1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	a	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
2	Mengembangkan kawasan perdesaan	b	Pembangunan wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
3	Mengembangkan Kawasan Industri		
4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	c	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota
5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi		
6	Penganekaragaman ketahanaan pangan berbasis potensi lokal	d	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal
7	Peningkatan operasi pasar	e	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat
8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatlan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	f	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri
9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	g	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.
10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah		
11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD	h	Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah
12	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	i	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.
13	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	j	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/masyarakat
14	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	i	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
15	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi		
16	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi		
17	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	j	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana-prasarana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
18	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa		
19	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan	k	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
20	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	l	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA
21	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	m	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik
22	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	n	Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
23	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	o	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan			
1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	a	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
2	Meningkatkan keterampilan masyarakat	b	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
3	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat		
Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat			
1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	a	Peningkataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		
3	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	b	Peningkataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	a	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Good and Clean Governance*)
2	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	b	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan
3	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	c	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber : Data primer diolah

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.8
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas									
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1	Meningkatnya IPM (Indeks Pembangun-an Manusia)	1.1.1	Meningkat-nya derajat pendidikan masyarakat	1	Meningkatkan mutu pendi-dikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	a	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
						2	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	b	Perluasan akses pendidikan formal

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				1.1.2	Meningkat-nya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	c	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
				1.1.3	Meningkat-nya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4	Meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan pemuda, olahraga dan prasarana olahraga	d	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda, olah raga dan prasarana olah raga
				1.1.4	Meningkat-nya derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	e	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
						6	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
						7	Meningkatkan upaya penanggulang-an penyakit		
						8	Meningkatkan perilaku hidup sehat	f	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
						9	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	g	Peningkatan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						10	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	h	Peningkatan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar
Misi 2: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat									
1.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1.1	Meningkatnya **Indeks Keberagamaan**/ diukur dengan = ((Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan) + (Persentase Prasarana Keagamaan dalam Kondisi baik)) / 2	1.1.1	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	1	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	a	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidup-an berbangsa dan bernega-ra berda-sarkan nilai-nilai ajaran agama
						2	Meningkatkan Pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	b	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama
2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	2.1	Meningkatnya Indeks Ketenteraman Sosial (Persentase penurunan pelanggaran hukum)	2.1.1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	3	Meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	c	Optimalisasi produk hukum dan implementasi nya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 3: Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan									
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Meningkatnya Angka Pertumbuhan ekonomi	1.1.1	Meningkat-nya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	a	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
						2	Mengembang-kan kawasan perdesaan	b	Pembangun-an wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah
						3	Mengembangk an Kawasan Industri		
						4	Meningkatkan kualitas SDM koperasi	c	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahtera-an anggota.
						5	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi		
						6	Penganekara-gaman ketahanaan pangan berbasis potensi lokal	d	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal
						7	Peningkatan operasi pasar	e	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatlan kesejahtaan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	f	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri.
						9	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah	g	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.
						10	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah		
						11	Mengembangkan unit usaha syariah pada BUMD	h	Peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah
2.	Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	2.1	Meningkatnya Nilai Indeks Daya Saing Usaha	2.1.1	Meningkatnya daya saing investasi daerah	12	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	i	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.
				2.1.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	13	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	j	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/ masyarakat
3.	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	3.1	Persentase peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah	3.1.1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	14	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	i	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
						15	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi		
						16	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi		

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						17	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)	j	Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana - prasatana transportasi dan komunikasi untuk menunjang dan memperlancar proses pembangunan daerah
						18	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa		
						19	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan	k	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya
						20	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	l	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA
						21	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik	m	Peningkatan dan optimalitas ketertiban administrasi pertanahan secara baik
						22	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan	n	Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
4.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	4.1	Indeks Kualitas Lingkungan	4.1.1	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	23	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	o	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan									
1.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	1.1	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.1.1	Meningkat-nya Keberdayaan Masyarakat	1	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulang-an kemiskinan	a	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
2.	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerja an, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	2.1	Menurunnya Angka Pengangguran	2.1.1	Meningkat-nya keterserapan tenaga kerja	2	Meningkatkan keterampilan masyarakat	b	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan Masyaraat Ekonomi Asean (MEA)
						3	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat		
Misi 5: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat									
1.	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1.1	Indeks Keterjang-kauan Pendidikan	1.1.1	Meningkat-nya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	a	Peningkataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
						2	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan		
		1.2	Indeks Keterjang-kauan Kesehatan	1.2.1	Meningkat-nya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	3	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	b	Peningkataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama									
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	1.1	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	1.1.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	a	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Good and Clean Governance*)
						2	Meningkatkan prosedur pelaporan sisten keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembanganan yang semakin baik	b	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesimambungan
				1.1.2	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	3	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	c	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

Sumber : Data primer diolah

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan sumber daya manusia, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi

belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

A. Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2016-2021

Arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing. Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detail dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, di antaranya sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, berlandaskan pada pengamalan dan penghayatan nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta ditopang dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik;
2. membangun perekonomian daerah berbasis kepada ekonomi kerakyatan, optimalisasi pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah dengan fokus pada agrobisnis (pertanian, perkebunan dan peternakan), pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing, ditopang dengan penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
3. mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin melalui penciptaan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa, agama dan budaya; dan
4. meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui profesionalisme, peningkatan tatakelola dan perluasan partisipasi publik melalui kebijakan penyelenggaraan *good governance* yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, selain membutuhkan tingkat investasi yang tinggi, juga harus memperhatikan konsep perencanaan pembangunan wilayah di suatu daerah. Konsep perencanaan pembangunan wilayah ini harus memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada. Optimalisasi potensi-potensi ekonomi unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, industri kecil menengah, dan sektor-sektor lainnya harus di-*overlay*-kan atau disinkronkan dengan wilayah dimana potensi-potensi unggulan tersebut berada, karena tidak semua wilayah mempunyai potensi

unggulan yang sama, tetapi setiap wilayah pasti memiliki satu potensi ekonomi unggulan yang harus dikembangkan. Keterpaduan potensi ekonomi unggulan daerah dan aspek penataan ruang diperlukan agar seluruh wilayah dalam suatu daerah dapat berkembang bersama-sama. Wilayah dengan potensi ekonomi unggulan yang besar dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan yang akan menarik dan mendukung wilayah-wilayah di sekitarnya dengan potensi ekonomi unggulan yang lebih kecil.

Secara kewilayahan berdasar dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, pembangunan daerah diprioritaskan pada kawasan strategis kabupaten dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis provinsi dan/atau nasional.

1. Kawasan Strategis Nasional

   Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Nasional di wilayah Kabupaten Kebumen meliputi:

   a. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan. Kawasan ini meliputi:
      1) Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen;
      2) Komando Rayon Militer;
      3) Polisi Resor;
      4) Polisi Sektor;
      5) Sekolah Calon Tamtama;
      6) Detasemen Kesehatan TNI;
      7) Daerah latihan TNI;
      8) Daerah latihan dan uji coba TNI;
      9) Lapangan uji coba senjata; dan
      10) Pos TNI Angkatan Laut.
   b. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini meliputi:
      1) Kawasan Geologi Karangsambung; dan
      2) Kawasan DAS Serayu-Bogowonto.
   c. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini meliputi Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai Jalan Strategis Nasional.

2. Kawasan Strategis Provinsi

   Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kabupaten Kebumen meliputi:

a. Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
c. Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:

a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini meliputi:
   1) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun-Kebumen-Sruweng-Karanganyar-Gombong;
   2) Kawasan pesisir Ayah;
   3) Kawasan Petanahan;
   4) Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Puring, Buayan, Sadang, Ayah, Karangsambung, Prembun, Padureso, Petanahan, Rowokele, Sempor, dan Karanggayam;
   5) Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit;
   6) Kawasan industri genteng Pejagoan; dan
   7) Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan.
b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Kawasan ini meliputi:
   1) Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong;
   2) Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
   3) Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor; dan
   4) Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen.
c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini meliputi:
   1) Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo; dan
   2) Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang.
d. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi, meliputi:
   1) Kawasan Waduk Sempor; dan

2) Kawasan Waduk Wadaslintang.

Berdasarkan hasil pembobotan indikator ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, terhadap kawasan-kawasan strategis yang mendukung visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021, didapatkan 5 kawasan strategis dengan bobot nilai tertinggi, antara lain:

1. Jaringan Jalan Selatan-Selatan;
2. Kawasan Pesisir Ayah;
3. Kawasan Ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun-Kebumen-Sruweng-Karanganyar-Gombong;
4. Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Puring, Buayan, Sadang, Ayah, Karangsambung, Prembun, Padureso, Petanahan, Rowokele, Sempor, dan Karanggayam; dan
5. Kawasan Hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo.

C. Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peluang untuk mewujudkan desa yang sejahtera semakin terbuka, karena desa memiliki kewenangan yang jelas dan alokasi dana yang pasti, demi mewujudkan desa yang makmur. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya akan mendorong dan memperkuat pembangunan desa yang dijalankan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta didasarkan atas kelembagaan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

Setidaknya, ada lima isu strategis dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pembangunan desa; keuangan, aset dan Badan Usaha Milik Desa; pembangunan kawasan perdesaan; kerjasama antardesa; serta lembaga kemasyarakatan desa. Dari kelima isu tersebut, isu pembangunan kawasan perdesaan mempunyai pengaruh terhadap perubahan kerangka kebijakan pembangunan desa, sekaligus akan mendorong dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka otoritas dan peran desa menjadi jelas, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desanya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya pembangunan kawasan perdesaan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Kebumen.

Berkenaan dengan dasar hukum tentang pengertian suatu kawasan, terdapat dua peraturan setingkat undang-undang yang memberikan penjelasan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Pengelolaan kawasan didasarkan pada dua karakter kegiatan yang spesifik, yaitu perkotaan dan perdesaan. Terdapat satu istilah lain, yaitu tentang kawasan khusus, yang merupakan bagian wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Khusus untuk kawasan perdesaan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang pengembangannya diarahkan untuk:

1. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
3. konservasi sumber daya alam;
4. pelestarian warisan budaya lokal;
5. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
6. penjagaan keseimbangan pembangunan.

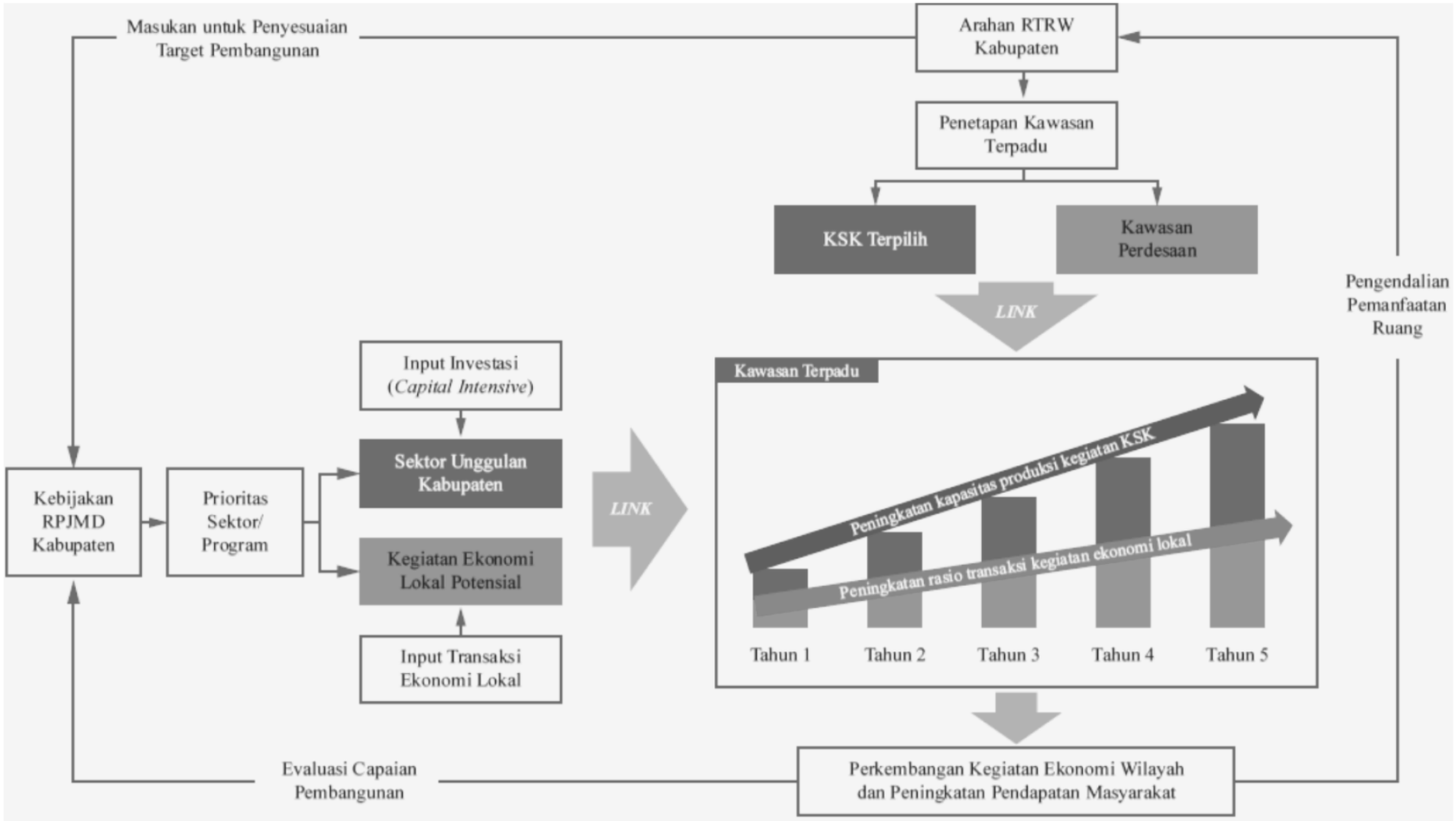
Pengertian kawasan perdesaan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan pernyataan yang sama, hanya orientasi pengembangannya memiliki perhatian berbeda, yaitu:

1. penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
2. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
3. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Dari uraian di atas, maka kedua undang-undang mempunyai kesamaan tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat desa. Perbedaannya terletak kepada pendekatan pembangunan kawasan yang diterapkan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang lebih menekankan kepada aspek pelestarian lingkungan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan tingkat

kesejahteraan masyarakat di perdesaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih mengarahkan pendekatan pembangunannya kepada aspek sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Hubungan antara Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan eksistensi Kawasan Perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terletak pada sisi keduanya secara bersamaan dapat memberikan dan menguatkan interaksi antara perencanaan ruang dengan pembangunan sektoral. Gambar 7.1 menjelaskan secara ilustratif bagaimana kedua undang-undang saling berhubungan dalam penerapannya. Diawali dengan dua dokumen utama sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang berfungsi sebagai pengendalian pemanfaatan ruang dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten yang berfungsi sebagai strategi pencapaian target pembangunan daerah.

Kedua tipe pengembangan kawasan ini akan bekerja dalam suatu ruang kabupaten secara terpadu dengan menciptakan dua interaksi (*link*), yang berbasis ruang dan sektor. Secara keruangan, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan kawasan perdesaan akan saling mengisi dan karena keduanya tidak dalam satu lokasi yang berimpit, maka pengembangan kawasan perdesaan harus mendukung/sejalan dengan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang dalam KSK. Di sisi lain, secara sektoral, KSK harus dapat memberikan akses dukungan kebijakan pengembangan sektor komoditas dan kegiatan ekonomi lokal dalam setiap kawasan perdesaan yang ada. Kedua bentuk interaksi ini akan berjalan selama lima tahun dalam periode pembangunan jangka menengah daerah, dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Setiap peningkatan investasi produksi di dalam KSK, harus dapat memberikan dampak peningkatan transaksi kegiatan di dalam kawasan perdesaan. Kebijakan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan harus memperhatikan hal-hal di atas.



Gambar 7.1
Skema Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sumber : Bappenas, 2015

D. Kebijakan Umum Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah disusun dengan prinsip yang mengacu pada nilai dasar yang berkaitan dengan tujuan kesamaan hak, tanpa perbedaan dan manfaat bersama, serta nilai-nilai yang berkaitan dengan proses meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan, keberlanjutan, kemitraan dan keterpaduan.

Kebijakan umum untuk program penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebijakan publik yang berpihak pada orang miskin. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak pada kaum miskin dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan telah dirumuskan 4 (empat) kebijakan utama dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha
   Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
2. Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
   Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
   Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.
4. Kebijakan Perlindungan Sosial dan Lingkungan
   Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh sebab itu, rencana aksi penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta rasa aman dan diakui/partisipasi, dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, upaya-upaya terobosan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang, antara lain:

1. Penyusunan Satu Data Kemiskinan Kabupaten Kebumen melalui kegiatan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap data kemiskinan, dengan indikator yang mengkombinasikan indikator kemiskinan Nasional dan indikator kearifan lokal. Pendataan dan verifikasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, Kelurahan dan Kecamatan, dikoordinasikan oleh Bappeda dan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bersama Perangkat Daerah terkait;
2. Menyusun model penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis kawasan pada daerah-daerah/wilayah-wilayah tertentu yang menjadi kantong kemiskinan dan memiliki karakteristik seperti:
   a. kawasan pertanian dan perkebunan (model pengembangan desa-desa miskin di kawasan utara seperti Kecamatan Karanggayam, Karangsambung, Sadang dan Alian);
   b. kawasan pariwisata (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Ayah);
   c. kawasan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan (model pengembangan desa-desa di Kawasan Pesisir Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal dan Mirit); dan
   d. kawasan industri kecil (model pengembangan desa-desa di wilayah tengah Kabupaten Kebumen).
3. Menjadikan program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu Gerakan Daerah dan Gerakan Bersama yang dibangun dengan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai pilar-pilar utama pembangunan serta dilaksanakan melalui fondasi nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.
4. Penyusunan Masterplan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen (MP3KG) beserta *roadmap* dan Rencana Aksinya.

5. Optimalisasi dan dinamisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui:
   a. rapat koordinasi yang terjadwal (minimal dilakukan setiap triwulan);
   b. menggunakan sistim Ban Berjalan, melalui instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi; dan
   c. penyediaan anggaran yang memadai.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat yang mempunyai otoritas dan bertanggung jawab atas terwujudnya rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang mencakup wewenang dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi. Selain itu, perlu didukung oleh kemitraan dan kerjasama berbagai pelaku dan peran dan keterpaduan langkah dari berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kebumen, lembaga perwakilan, pelaku usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesi, maupun unsur perguruan tinggi.

Secara operasional, kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Strategi/Kebijakan dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha Menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan	Program-Program yang mendukung strategi/kebijakan ini di antaranya:	
	Program Peningkatan Kesempatan kerja;	Dinas Nakertransos
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakertransos
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindagsar
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindagsar
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan,
		Dinas Pertanian Peternakan
		Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Perikanan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan Perikanan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Kelautan Perikanan
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas SDA ESDM

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Hutbun
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Dinkop dan UMKM
		Bagian Perekonomian
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinkop dan UMKM
	Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinkop dan UMKM
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
	Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan	Dinas Pekerjaan Umum
		Dinas SDA ESDM
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dinas Pekerjaan Umum

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dishubkominfo
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dishubkominfo
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Dishubkominfo
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dishubkominfo
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kantor Kesbangpol
		Satpol PP
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Kantor Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kantor Kesbangpol
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satpol PP
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Kantor Kesbangpol, Bagian Kesra dan DPPKAD
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Daerah/Pemerintah Desa	PPKD

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar	Program-Program yang mendukung strategi/kebijakan ini di antaranya:	
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Kelautan Perikanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Dinas Kelautan Perikanan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Hutbun
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Nakertransos
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Nakertransos
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinkop dan UMKM
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Bapermades
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Bapermades
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Bapermades
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Bapermades
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Bapermades

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	PPKD/Bapermades
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN	PPKD/Bapermades
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan	Program-Program yang mendukung strategi/ kebijakan ini di antaranya:	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dikpora
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dikpora
	Program Pendidikan Menengah	Dikpora
	Program Pendidikan Non Formal	Dikpora
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dikpora
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dikpora
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinkes
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinkes
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Dinkes
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinkes
	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinkes
	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Dinkes
		DPU
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinkes
	Program Badan Layanan Umum Daerah	RSUD Sudirman
	Program Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Perlindungan Sosial dan Lingkungan Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial	Program-Program yang mendukung strategi/ kebijakan ini di antaranya:	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Dinas Nakertransos
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Nakertransos, Bappeda
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Dinas Nakertransos
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Dinas Nakertransos
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinas Nakertransos
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya	Dinas SDA ESDM
	Program Pengendalian Banjir	Dinas SDA ESDM, BPBD
		BPBD
	Program Pengembangan Perumahan	Bapermades
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD
	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	BPBD
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	BPBD

STRATEGI/KEBIJAKAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	BPBD
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	BPBD
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes
	Belanja Bantuan Sosial Pendidikan	PPKD/Dikpora
	Belanja Bantuan Sosial Kesehatan	PPKD/Dinkes
	Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan	PPKD/DPU
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin	PPKD/Bapermades, DPU, Dinas Nakertransos
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam	PPKD/BPBD

Sumber : Data primer diolah

E. Kebijakan Umum Pengembangan Agrobisnis

Pengembangan agrobisnis yang berdaya saing di daerah berbasis pertanian seperti Kabupaten Kebumen, merupakan upaya pengembangan perekonomian daerah yang paling efektif. Hal ini didasarkan karena agrobisnis memiliki kandungan komponen lokal tinggi yang lebih potensial untuk dikembangkan.

Pengembangan agrobisnis bukan hanya diarahkan pada pengembangan pertanian primer atau subsistem *on-farm* agrobisnis saja, melainkan juga mencakup subsistem agrobisnis hulu (*up-stream*), yakni kelompok industri yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer, seperti industri perbenihan. Di sisi lain, kelompok industri tersebut masih kurang lengkap jika belum ada subsistem agrobisnis hilir (*down-stream*), yakni industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan beserta kegiatan perdagangannya.

Seringkali pengembangan agrobisnis di setiap daerah hanya sebatas pada pemanfaatan kelimpahan sumber daya yang ada atau mengandalkan keunggulan komparatif semata, seharusnya pengembangan agrobisnis juga dikembangkan dan ditransformasikan ke daerah lain serta memperoleh dukungan dari organisasi ekonomi yang dibentuk oleh rakyat. Selain dukungan infrastruktur, kebijakan makroekonomi sangat diperlukan untuk mengembangkan agrobisnis sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah.

Untuk mencapai sasaran pengembangan agrobisnis, perlu disusun kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pengembangan agrobisnis, yang harus mencakup aspek sektoral dan spasial dalam hal ini bidang sosial ekonomi, lingkungan hidup, dan penataan ruang.

Kebijakan umum pengembangan agrobisnis di Kabupaten Kebumen diarahkan pada strategi sebagai berikut:

1. penentuan dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian;
2. tata guna lahan dan air (pengolahan terhadap sumberdaya lahan dan air yang berkelanjutan);
3. pengaturan (*rute*) transportasi sebagai akses pendukung kawasan agrobisnis;
4. perlu adanya sistem tarif;
5. penelitian dan pengembangan (*Resource Development*);
6. perlu menarik investasi/investor besar;
7. insentif dan disinsentif kultural;
8. tidak boleh dikembangkannya industri yang bersifat polutif pada zona agrobisnis; dan
9. perlu adanya dukungan atas inisiatif/rintisan-rintisan ekonomi pertanian.

Secara spasial, berdasarkan kawasan strategis, peruntukan dan potensi wilayah, pengembangan agrobisnis di Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan, diarahkan antara lain pada wilayah:

1. Kawasan EMAS (Eko-Mina-Agro-wiSata), dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Ayah, Puring, Buayan, Kuwarasan, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, dan Ambal. Sektor-sektor yang dikembangkan di daerah ini antara lain pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta pariwisata;
2. Kawasan Agrowisata Tanaman Buah-Buahan, di wilayah Kecamatan Karangsambung dan Sadang; dan
3. Kawasan penunjang, yang terdiri atas:
   a. kawasan pusat-pusat jasa di wilayah Kecamatan Kebumen, Karanganyar, Gombong, Prembun dan Kutowinangun;
   b. kawasan industri di wilayah Kecamatan Petanahan dan Klirong; dan
   c. pengembangan infrastruktur penunjang di antaranya jalan selatan-selatan di wilayah pesisir (Mirit-Ayah), jalan lintas utara di wilayah (Rowokele-Padureso) dan pembangunan embung-embung mini di kawasan pertanian (Karangsambung, Sadang, Karanggayam dan Ayah).

F. Program Pembangunan Daerah

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa

program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah.

2. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program, dalam penyusunan program harus melibatkan Perangkat Daerah berkenaan.
3. Penamaan program dengan kalimat sederhana, ringkas, mudah dimengerti sehingga dapat dijabarkan ke dalam kegiatan.
4. Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi dan arah kebijakan.

Rencana program pembangunan daerah tahun 2016-2021 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan program pendukung operasional.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   b. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal;
   c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
   d. Program Pendidikan Menengah;
   e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
   f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
2. Kesehatan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
   b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
   c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
   d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
   e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
   g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
   h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
   i. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
   j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
   k. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
   l. Program Badan Layanan Umum Daerah; dan

m. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya;
   b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
   c. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
   e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
   f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
   g. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan;
   h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
   i. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
   j. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya;
   k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
   l. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong;
   m. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
   n. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
   o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
   p. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
   q. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
   r. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
   s. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   t. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; dan
   u. Program Pengendalian Banjir.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pengembangan Perumahan;
   b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
   c. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
b. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
f. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
g. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; dan
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
d. Program Pembinaan Para Penyandang Penyakit dan Trauma;
e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; dan
f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; dan
b. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
c. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.

3. Pangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

4. Pertanahan
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.
5. Lingkungan Hidup
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
   b. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
   c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
   d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
   e. Program Pengendalian Banjir;
   f. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
   g. Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral;
   h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
   i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
   j. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
   k. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
   l. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
   b. Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
   c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
   d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
   e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan;
   f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
   g. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Keluarga Berencana;
   b. Program Pelayanan Kontrasepsi; dan

c. Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga.

9. Perhubungan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
   b. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
   c. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; dan
   d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

10. Komunikasi dan Informatika

    Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

    a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
    b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa;
    c. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;
    d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; dan
    e. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

    Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

    a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
    b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
    c. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
    d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan
    e. Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja BUMD.

12. Penanaman Modal

    Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

    Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

    a. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga;
    b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
    c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan
    d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

14. Statistik
    Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
15. Persandian
16. Kebudayaan
    Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
17. Perpustakaan
    Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
18. Kearsipan
    Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
   b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
   c. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
   d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; dan
   e. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
2. Pariwisata
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
   b. Program Pengembangan Kemitraan; dan
   c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
3. Pertanian
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
   b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
   c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
   d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan);
   e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
   f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
   g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; dan

h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

4. Kehutanan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
   b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; dan
   c. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

5. Energi dan Sumberdaya Mineral

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

6. Perdagangan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
   b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; dan
   c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

7. Perindustrian

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Penataan Struktur Industri;
   b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
   c. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
   d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
   e. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

8. Transmigrasi

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Perencanaan Tata Ruang;
   b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
   c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   d. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
   e. Program Kerjasama Pembangunan;
   f. Program Perencanaan Sosial Budaya;
   g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam;
   h. Program Pengembangan Data/Informasi;

i. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan
j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

2. Keuangan
   Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:
   a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
   b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
   Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:
   a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
   b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
   c. Program Pendidikan Kedinasan;
   d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
   e. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS.
4. Penelitian dan Pengembangan
5. Fungsi Lainnya
   Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
   b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan;
   d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
   f. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
   g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan Pemerintah Daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Rencana program pembangunan daerah tahun 2016-2021 merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi

program yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sesuai edaran Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa urusan dan kewenangan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai berlaku pada bulan Oktober 2016, maka rencana program prioritas daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Tabel 7.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Memiliki Wawasan Luas, Tangguh serta Berkemajuan Melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas									
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal	Angka Harapan Lama Sekolah	%	12,21	13,20	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dikpora
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,93	7,20	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dikpora
	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	Perluasan akses pendidikan formal					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dikpora
Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas	Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	%	53,30	63,39	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dikpora
							Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dikpora
							Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dikpora
							Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Kantor Perpusarsipda
							Belanja Bantuan Sosial Pendidikan-Bantuan Beasiswa bagi siswa kurang mampu S1	Belanja Tidak Langsung	PPKD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Meningkatnya prestasi olahraga dan pembinaan kepemudaan	Meningkatkan mutu/ kualitas prasarana olahraga danpembinaan olahraga serta kepemudaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan olah raga dan praasarana olah raga.	Capaian prestasi pemuda dan olahraga	%	37,78	65,38	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Kepemudaan dan Olahraga	Dikpora, Setda
							Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kepemudaan dan Olahraga	Dikpora, Setda
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dikpora
							Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dikpora, Kecamatan, Kelurahan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,77	73,01	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit						Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan						Program Upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	Dinkes, Setda, Kelurahan
	Meningkatkan perilaku hidup sehat	Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat					Program Pengembangan Lingkungan sehat	Kesehatan	DINKES
							Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	DINKES

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	Meningkatkan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar	Angka Kematian Bayi	Kasus	10,50	10,75	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	DINKES
	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	Meningkatkan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar	Angka Kematian Ibu	Kasus	68,48	90,00	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	DINKES
Misi 2 : Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat dengan Melakukan Pemerataan dan Penyeimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya serta Melakukan Pembangunan yang Bukan Terfokus Hanya pada Aspek Fisik Saja tetapi juga Aspek Non Fisik berupa Pengembangan Potensi Intelektual, Rohaniah, Intuisi, Kata Hati, Akal Sehat, Fitrah dan yang Bersifat Batin Lainnya dalam Bingkai Kebersamaan dan Sinergitas Antar Elemen Masyarakat									
Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	Optimalisasi produk hukum dan implement-tasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen	Penurunan Kasus Pelanggar-an Hukum	Kasus	867,00	500,00	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan
							Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
							Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesbangpol, Setda, Kecamatan
							Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesbangpol
							Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesbangpol
							Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesbangpol, Setda, Kecamatan
							Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesbangpol
							Program peningkatan peran serta kepemudaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesbangpol
							Program pendidikan politik masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesbangpol

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Meningkatkan pemahaman pengamalan agama	Penguatan implementasi kesalehan sosial dan kehidup-an berbangsa dan bernega-ra berda-sarkan nilai-nilai ajaran agama	Angka Melek Huruf Siswa Lulus Sekolah	%	100,00	100,00	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Setda
	Meningkatkan Pembinaan dan penanganan terhadap masyarakat yang rawan kasus asusila dan norma sosial keagamaan lainnya	Peningkatan peran pemerintah dalam kegiatan keagamaan dan toleransi beragama	Cakupan penangan-an kasus-kasus pelanggar-an norma keagamaan	%	23,66	37,65	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Urusan Sosial	Setda
Misi 3 : Mengembangkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Pengembangan Potensi Lokal Unggulan Melalui Sinergi Fungsi-Fungsi Pertanian, Industri, Pariwisata dan Sektor Lainnya, dengan Penekanan pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Penciptaan Lapangan Kerja serta Berwawasan Lingkungan									
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah	Peningkatan produktivitas dan efisiensi industri kecil dan menengah.	Pertum-buhan ekonomi	%	5,83	6,00	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	Penanaman Modal	BPMPT
	Penganekaragaman ketahanaan pangan berbasis potensi lokal	Optimalisasi ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal	Pendapatan perkapita	Ribu Rp	16.983,67	25.179,48	Program peningkatan ketahanan pangan	Pangan	Kantor Ketapang

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan	Rasio Gini	Angka	0,24	0,21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Terbangun-nya Kawasan Pembangunan Ekonomi	Kawasan	-	6,00	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
							Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanak, Dishutbun
							Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanak, Dishutbun
							Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pertanian	Distanak, Dishutbun, Setda
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Distanak, Dishutbun
							Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Distanak, Dishutbun
							Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Distanak, Dishutbun
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	Distanak, Dishutbun
							Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
							Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
							Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Memperluas akses permodalan dan pemasaran produk dan jasa koperasi	Peningkatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk kesejahteraan anggota.					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinkop UMKM, Setda
							Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinkop UMKM, Setda
							Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinkop UMKM, Setda
	Meningkatkan kualitas SDM koperasi						Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinkop UMKM, Setda

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Mengembangkan kawasan perdesaan	Pembangunan wilayah berbasis kawasan dan potensi daerah					Program Perencanaan tata Ruang	Fungsi Perencanaan	Bapermasdes
	Mengembangkan Kawasan Industri						Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	Bapermasdes
	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri dalam usaha meningkatlan kesejahtaan para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan dalam negeri.					Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri	Perindustrian	Disperindagsar
							Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Disperindagsar
							Program peningkatan kapasitas Iptek sistem Produksi	Perindustrian	Disperindagsar
							Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Perindustrian	Disperindagsar
	Meningkatkan kualitas SDM industri kecil dan menengah						Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	Disperindagsar
	Peningkatan operasi pasar	Pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang tidak merugikan masyarakat					Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Disperindagsar
							Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Disperindagsar
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah dan perizinan terpadu satu pintu	Peningkatan kemudahan iklim investasi di daerah.	Persentase peningkat-an investasi PMA/ PMDN	%	-	6,00	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	BPMPT
							Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	BPMPT, DPU

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja BUMD	Koperasi dan UMKM	Setda
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan upaya penggalian dan promosi/pemasaran obyek-obyek wisata	Pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan non alam, dan berbasis komunitas/ masyarakat	Prosentase peningkat-an kunjungan wisata	%	16,73	19,69	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Pariwisata	Disparbud
							Program pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Disparbud
							Program Pengembangan Destinasi Wisata	Pariwisata	Disparbud
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Disparbud
Meningkatnya pelayan-an infrastruktur yang men-dukung pengembangan wilayah	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah	Persentase tingkat pelayanan infrastrukt ur wilayah	%	49,09	62,88	Program peningkatan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi						Program pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
	Meningkatkan kalitas pelayanan air minum dan sanitasi						Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
	Meningkatkan fasilitas dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ)						Program Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
	Meningkatkan aksesibilitas komunikasi, informasi, dan media massa						Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana bidang keciptakaryaan						Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
	Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA						Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
	Meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan secara elektronik						Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
	Meningkatkan jaringan listrik perdesaan						Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelurahan
							Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas SDA ESDM
							Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
							Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas SDA ESDM

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
							Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU, Dinas SDA ESDM
							Program pembangunan saluran drainase /gorong gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
							Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas SDA ESDM
							Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU, Dinas SDA ESDM
							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dishubkominfo
							Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dishubkominfo
							Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Dishubkominfo
							Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dishubkominfo
							Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo, Setda

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo, Setda
							Program pengkajiandan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo, Setda
							Program kerjasama informasi dengan media massa	Komunikasi dan Informatika	Setda, Sekretariat DPRD
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase kesesuaian pemanfaat-an ruang	%	75,00	75,00	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU
							Program Perencanaan Tata Ruang	Fungsi Perencanaan	Bappeda
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	59,92	77,50	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	DPU
							Program Lingkungan Sehat Perumahan	Lingkungan Hidup	DPU
							Program pengelolaan areal pemakaman	Lingkungan Hidup	DPU
							Program pengembangan kinerja pengelolaan persampah an	Lingkungan Hidup	DPU, KLH
							Program Pengendalian Banjir	Lingkungan Hidup	Dinas SDA ESDM
							Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Expotensi merusak lingkungan	Lingkungan Hidup	Dinas SDA ESDM

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral	Lingkungan Hidup	Dinas SDA ESDM
							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	KLH
							Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	KLH
							Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	KLH
							Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	KLH
							Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	KLH
							Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BPBD
							Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BPBD
							Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BPBD
							Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	BPBD
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial	Sosial	BPBD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BPBD
							Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	BPBD
Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Memiliki Daya Saing Tinggi Berbasis Pertanian, Industri, Perikanan, Pariwisata dan Budaya melalui Proses Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kemiskinan									
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen	Angka Kemiskinan	%	20,02	15,45	Program pengembangan perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bapermasdes, DPU
							Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6 Kelurahan
							Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinas Nakertransos
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Nakertransos
							Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinas Nakertransos
							Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	Dinas Nakertransos

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	Dinas Nakertransos
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Transmigrasi	Dinas Nakertransos
							Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi	Dinas Nakertransos
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Bappeda
							Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Sosial	2 Kecamatan dan 11 Kelurahan
							Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BPPKB
							Program Pelayanan Kontrasepsi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BPPKB
							Program dan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang konduksif	Koperasi dan UMKM	BPPKB
							Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BPPKB

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB
							Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB
							Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bapermasdes, Kecamatan
							Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bapermasdes
							Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB, Bapermades, Kecamatan, Kelurahan
							Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bapermades, Setda, Kecamatan, Kelurahan
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan masyarakat	Peningkatan kemampuan dan keterampil-an masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam menghadapi tantang Masyaraat Ekonomi Asean (MEA)	Angka Pengang-guran	%	2,09	1,97	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Nakertransos
	Meningkatkan penyediaan lapangan kerja serta jiwa kewirausahaan bagi masyarakat						Program Peningkatan Kesempatan kerja	Tenaga Kerja	Dinas Nakertransos
							Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Nakertransos

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi 5 : Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Baik, Meningkatkan Nilai Kualitas Pendidikan serta Membuka Akses Kesehatan yang Maksimal dan Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat									
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang kelas	Peningkataan kualitas sarana dan prasaran pendidikan	Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	76,64	88,37	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dikpora dan Kelurahan
	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan						Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dikpora
							Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dikpora
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	Peningkataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan	Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	%	90,00	96,00	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
							Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinkes
							Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarna puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinkes
							Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinkes
							Program BLUD	Kesehatan	Dinkes (Puskesmas)
							Program Badan Layanan Umum Daerah	Kesehatan	RSUD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata	Kesehatan	Dinkes, RSUD
Misi 6 : Memperkuat Sekaligus Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik yang Maksimal (*Good and Clean Government*) dengan Jalan Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik, Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Bersih, Efisien, Efektif, Profesional, Transparan dan Akuntabel, yang Didukung dengan Sistem Pengawasan yang Efektif Guna Menekan Perilaku Korupsi, Kolusi serta Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Pendalaman Agama									
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Good and Clean Governance*)	Prosentase capaian pelayanan SKPD	%	90,00	96,00	Program Peningkatan pelayanan administrtasi kantor	Pendukung Operasional	Semua SKPD, Kecamatan dan Kelurahan
			Nilai akuntabili-tas kinerja	angka	CC	B	Program Peningkatan sarana prasrana Aparatur;	Pendukung Operasional	Semua SKPD, Kecamatan dan Kelurahan
							Program pengembangan data/informasi	Fungsi Perencanaan	Semua SKPD, Kecamatan dan Kelurahan
							Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Stattistik	Semua SKPD, Kecamatan dan Kelurahan
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Fungsi Lainnya	Setda, Distannak, Disperindagsar, Dishubkominfo, Bapermasdes, Sekretariat DPRD
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Fungsi Lainnya	Setda

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Keuangan	Setda
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	BKD, BPBD, Dikpora, Satpol PP, Bapermasdes, DPPKAD
							Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Fungsi Lainnya	Sekretariat DPRD
							Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	BKD, Dikpora, BPPKB, Setda
							Program Pendidikan Kedinasan	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	BKD
							Program peningkatan disiplin aparatur	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Setda, BKD
							Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	BKD
							Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Fungsi Lainnya	Inspektorat
							Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Komunikasi dan Informatika	Kantor Perpusarsipda, Sekretariat DPRD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Kantor Perpusarsipda
							Program Penataan Administrasi kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukpencapil
							Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BPPKB
							Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan	Bappeda, Setda, Kecamatan, Kelurahan
							Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan	Bappeda
							Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Fungsi Perencanaan	Bappeda
							Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Fungsi Perencanaan	Bappeda
							Program Kerjasama Pembangunan	Fungsi Perencanaan	Bappeda
							Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Fungsi Perencanaan	Bappeda
							Program Perencanaan tata Puang	Fungsi Perencanaan	Bappeda, Dinas SDA ESDM
							Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Fungsi Perencanaan	Bappeda

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
							Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Fungsi Perencanaan	Setda
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Bapermasdes
							Program Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bapermasdes
							Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bapermasdes
							Program Pengembangan wilayah perbatasan;	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Setda
							Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Fungsi Lainnya	Setda
							Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	Fungsi Lainnya	Setda
							Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;	Fungsi Lainnya	Setda
							Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Fungsi Lainnya	Inspektorat, Setda, DPPKAD, Kecamatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)			
	Meningkatkan prosedur pelaporan sisten keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik	Peningkatan akuntabilitas sistem pelapor-an keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinam-bungan	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Keuangan	DPPKAD, Disparbud Disperindagsar, Dishubkominfo, Setda
							Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Fungsi Keuangan	DPPKAD
Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengamalan nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	Peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Prosentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalur-kan zakatnya melalui kelemba-gaan BAZ	%	30,00	80,00	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Urusan Sosial	Setda

Sumber : Data primer diolah

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

lndikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kebumen berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas sesuai dengan Janji Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah, serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

A. Program Prioritas/Unggulan

Program prioritas/unggulan disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati sesuai dengan Janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

1. Pengembangan Kawasan Industri dan UMKM
   a. optimalisasi pemanfaatan ruang yang ada untuk pengembangan kawasan industri dengan didukung oleh infrastruktur kawasan industri maupun infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup serta nilai tambah bagi masyarakat;
   b. meningkatkan ketersediaan infrastruktur industri dan pendukung pada pengembangan kawasan industry; dan
   c. mensinergikan kompetensi hasil pendidikan dengan kebutuhan SDM industri.

2. Pengentasan Kemiskinan
   a. pengurangan kemiskinan terpadu melalui agrobisnis, agama, budaya dan pendidikan; dan
   b. peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengentasan kemiskinan.
3. Komunikasi dan Perhubungan
   a. membuka akses komunikasi bagi wilayah *blank spot area* untuk pengembangan desa; dan
   b. pengurangan angka kecelakaan lalu lintas pada perlintasan kereta api.
4. Pertanian
   a. pengembangan teknologi tepat guna untuk peningkatan produk pertanian; dan
   b. pengembangan agrobisnis berbasis potensi wilayah dan melalui *corporate farming.*
5. Kesehatan
   a. peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui jamkesda; dan
   b. pendampingan tenaga kesehatan dalam rangka pengurangan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
6. Pendidikan
   a. beasiswa Strata 1 bagi warga miskin berprestasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan 100 mahasiswa per tahun;
   b. bantuan insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah/madrasah; dan
   c. bantuan insentif bagi guru TPQ dan Madrasah Diniyah.
7. Pemerintahan
   a. menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (no korupsi) dan melayani (no upeti);
   b. peningkatan kinerja pegawai sesuai kompetensinya dengan didukung peningkatan kesejahteraan; dan
   c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
8. Keagamaan
   a. peningkatan sarana ibadah dan pendidikan keagamaan guna mendorong peningkatan kualitas keberagamaan;
   b. peningkatan forum silaturahmi antar umat beragama; dan
   c. penyelenggaraan forum dialogis dengan masyarakat melalui safari sholat Jumat.
9. Infrastruktur
   Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan agrobisnis, industri, UMKM, dan

wisata terutama infrastruktur jalan yang memperlancar akses produksi dan pemasaran industri dan pariwisata.

B. Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah beserta Kebutuhan Pendanaan

Perumusan indikasi rencana program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah dan berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan kerangka program masih mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diuraikan berdasar visi dan misi bupati dan wakil bupati serta Perangkat Daerah beserta kebutuhan pendanaannya dapat dilihat dalam tabel 8.1 berikut.

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
A. TOTAL BELANJA					**2.689.506.435**		**3.070.328.875**		**3.296.984.272**		**3.593.000.033**		**3.838.846.140**		**4.082.559.077**		
BELANJA TIDAK LANGSUNG					**1.770.101.277**		**1.906.065.059**		**2.124.460.296**		**2.368.804.038**		**2.597.350.910**		**2.817.218.383**		
Belanja Pegawai					1.286.089.802		1.334.237.516		1.471.984.012		1.621.039.558		1.746.362.527		1.815.244.257		
Hibah					7.295.806		17.615.200		17.615.200		17.615.200		17.615.200		50.551.396		
Bantuan Sosial					53.093.210		75.165.886		75.165.886		75.165.886		75.165.886		75.165.886		
Belanja Bagi Hasil					7.802.434		7.802.434		7.802.434		7.802.434		7.802.434		7.802.434		
Bantuan Keuangan					413.320.025		468.744.023		549.392.764		644.680.960		747.904.862		865.954.410		
Belanja Tidak Terduga					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
BELANJA LANGSUNG					**919.405.158**		**1.164.263.816**		**1.172.523.976**		**1.224.195.995**		**1.241.495.230**		**1.265.340.694**		
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					**583.022.995**		**687.108.774**		**740.436.280**		**777.503.161**		**808.846.928**		**815.523.727**		
1. Pendidikan																	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD 0-6	%	47,07	50,57	9.442.440	54,07	10.202.744	57,57	11.318.700	61,07	11.404.750	64,57	11.486.265	68,07	11.558.726	68,07	DIKPORA
Program Pendidikan Non Formal	% lembaga PNF yang terakreditasi	%	21,62	25,68	668.520	29,73	1.002.259	33,78	1.404.903	37,84	1.493.992	40,54	1.531.389	43,24	1.561.529	43,24	DIKPORA
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	%	103,62	102,62	8.386.824	102,92	9.237.724	103,22	10.583.476	103,42	10.807.336	103,72	11.023.632	104,02	11.067.058	104,02	DIKPORA
Program Pendidikan Menengah	Prosentase SMA/MA/ SMK terakreditasi	%	-	-	2.239.000	-	2.460.900	-	2.391.800	-	2.466.480	-	2.552.128	-	2.563.841	-	DIKPORA
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik berkualifikasi S1	%	68,80	68,33	11.419.800	68,34	11.912.340	68,35	11.639.800	68,36	11.674.800	68,36	11.689.800	68,37	11.659.800	68,37	DIKPORA
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Indeks survey layanan pendidikan	%	75,60	76,50	595.000	78,00	635.000	79,50	679.000	81,00	727.400	82,50	780.640	84,00	839.204	84,00	DIKPORA
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Gedung PAUD/ sederajat dalam kondisi baik	%	83,88	80,20	1.555.000	81,20	1.860.500	82,20	2.031.150	83,20	2.219.565	84,20	2.426.422	85,20	2.654.463	85,20	DIKPORA



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya sarpras pendukung PAUD di kelurahan	paket	-	-	-	7,00	348.263	7,00	248.823	7,00	261.264	7,00	274.327	7,00	288.044	35,00	7 kelurahan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Gedung SD/SMP atau sedarajat dalam kondisi baik	%	74,22	74,95	17.530.700	75,54	20.785.470	76,16	18.014.857	76,88	19.264.243	77,50	20.618.567	78,24	19.998.317	78,24	DIKPORA
	Persentase Gedung SD/sedarajat dalam kondisi baik	%	66,22	67,01	-	67,51	-	67,85	-	68,19	-	68,53	-	68,88	-	68,88	DIKPORA
	Persentase Gedung SMP/ sedarajat dalam kondisi baik	%	82,22	82,89	-	83,56	-	84,46	-	85,58	-	86,48	-	87,60	-	87,60	DIKPORA
Program Pendidikan Menengah	Persentase Gedung SMA/ sedarajat dalam kondisi baik	%	87,59	88,23	4.874.000	88,87	5.271.400	89,51	5.079.740	90,15	5.347.634	90,79	5.334.317	91,43	5.658.469	91,43	DIKPORA
Jumlah Anggaran Urusan Pendidikan					**56.711.284**		**63.716.600**		**63.392.249**		**65.667.464**		**67.717.487**		**67.849.450**		
2. Kesehatan																	
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	%	31,75	52,00	7.400.000	54,50	14.250.000	77,25	21.100.000	100,00	27.935.000	100,00	31.353.000	100,00	31.353.000	100,00	DINKES
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Tertanganinya kasus TB Paru, diare dan DBD	%	100,00	100,00	575.000	100,00	623.000	100,00	710.000	100,00	823.000	100,00	949.300	100,00	769.230	100,00	DINKES
Program Upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan rawat jalan puskesmas	%	60,00	70,00	9.776.000	75,00	9.889.000	80,00	9.947.900	80,00	10.009.690	80,00	10.074.659	80,00	10.118.125	80,00	DINKES
	Meningkat-nya usaha kesehatan sekolah	%	NA	55,00	30.000	55,00	40.000	55,00	50.000	55,00	60.000	55,00	75.000	55,00	75.000	55,00	SETDA



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
	Terfasilitasinya pemberian TMT bagi masyarakat di kelurahan	paket	-	-	-	45,00	183.068	39,00	140.880	46,00	155.424	46,00	155.770	46,00	162.434	222,00	7 kelurahan
Program Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Desa Pelaksana STBM	%	65,00	65,00	400.000	70,00	520.000	75,00	1.600.000	80,00	1.825.000	80,00	1.850.000	85,00	1.875.000	85,00	DINKES
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya prosentase desa strata siaga aktif mandiri.	%	11,52	15,00	447.000	18,00	541.000	20,00	579.000	23,00	620.000	25,00	664.300	27,00	712.230	27,00	DINKES
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah kasus kematian bayi	Kasus	208,00	220,00	250.000	220,00	345.000	218,00	470.000	218,00	470.000	215,00	470.000	215,00	470.000	1.306,00	DINKES
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase ibu hamil dan remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	%	49,00	52,50	100.000	57,50	175.000	62,50	200.000	67,50	250.000	67,50	300.000	67,50	300.000	67,50	DINKES
	Prosentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	83,00	85,00	1.700.000	90,00	2.000.000	90,00	2.200.000	100	2.420.000	100	2.662.000	100	2.928.000	100	DINKES
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tercukupi-nya obat dan perbekalan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan dasar	Puskesmas	28,00	35,00	2.479.330	35,00	3.425.000	35,00	3.825.000	35,00	4.325.000	35,00	4.725.000	35,00	4.725.000	35,00	DINKES
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Banyaknya fasilitasi pengawasan obat dan makanan	Kegiatan	-	2,00	340.000	2,00	540.000	2,00	640.000	2,00	740.000	2,00	840.000	2,00	840.000	2,00	DINKES
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarna puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Banyaknya Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana untuk pelayanan	Puskesmas	1,00	2,00	22.854.049	3,00	36.800.000	4,00	27.500.000	5,00	22.000.000	6,00	22.000.000	7,00	16.750.000	7,00	DINKES

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
	rawat inap																
Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan	%	100,00	100,00	1.907.000	100,00	2.035.000	100,00	2.070.000	100,00	1.445.000	100,00	1.490.000	100,00	1.530.000	100,00	DINKES
Program BLUD	Terlayaninya kesehatan masyarakat desa melalui BLUD puskesmas	unit	-	37,00	35.064.907	37,00	34.728.948	37,00	38.201.843	37,00	42.022.028	37,00	46.224.230	37,00	50.846.653	37,00	DINKES (Puskesmas)
Program Badan Layanan Umum Daerah	Capaian target SPM	%	80,00	85,00	80.000.000	85,00	96.000.000	90,00	105.000.000	95,00	116.160.000	100,00	127.780.000	100,00	127.780.000	100,00	RSUD
	Capaian target kinerja klinis	%	85,00	87,00	-	90,00	-	93,00	-	95,00	-	98,00	-	100,00	-	98,00	RSUD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata	Bertambahnya Aset Daerah di RSUD	%	60,00	65,00	9.000.000	70,00	6.000.000	75,00	8.000.000	80,00	9.000.000	85,00	10.000.000	90,00	10.000.000	90,00	RSUD
Jumlah Anggaran Urusan Kesehatan					**172.323.286**		**208.095.016**		**222.234.623**		**240.260.142**		**261.613.259**		**261.234.672**		
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Capaian Produktivitas padi	Ton	6,53	6,54	14.735.950	6,55	17.671.570	6,55	40.496.259	6,56	38.555.885	6,56	39.655.976	6,57	43.621.573	6,56	DISTANAK
	Capaian Produktivitas jagung	Ton	7,23	7,48	-	7,48	-	7,48	-	7,48	-	7,48	-	7,48	-	7,48	DISTANAK
	Capaian Produktivitas kedelai	Ton	1,18	1,23	-	1,23	-	1,23	-	1,23	-	1,23	-	1,23	-	1,23	DISTANAK
	Prosentase Peningkatan JITUT dan JIDES dalam kondisi baik	%	81,35	90,34	-	98,39	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	DISTANAK

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program peningkatan jalan dan jembatan	Capaian jalan dalam kondisi mantap (sedang dan baik)	%	52,58	58,75	49.617.906	61,68	80.650.000	64,77	84.965.000	67,85	87.961.150	70,94	91.157.650	70,94	91.157.650	70,94	DPU
	Peningkatan jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit	355,00	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	380,00	DPU
Program pembangunan jalan dan jembatan	Capaian jalan dalam kondisi mantap (sedang dan baik)	%	52,58	58,75	2.475.000	61,68	18.275.000	64,77	19.825.000	67,85	21.375.000	70,94	22.925.000	70,94	22.925.000	70,94	DPU
	Peningkatan jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit	355,00	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	380,00	DPU
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Capaian jalan dalam kondisi mantap (sedang dan baik)	%	52,58	58,75	129.835.061	61,68	135.250.000	64,77	139.450.000	67,85	143.815.000	70,94	143.900.000	70,94	143.900.000	70,94	DPU
	Peningkatan jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit	355,00	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	380,00	DPU
Program Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan	Capaian jalan dalam kondisi mantap (sedang dan baik)	%	52,58	58,75	-	61,68	100.000	64,77	100.000	67,85	100.000	70,94	100.000	70,94	100.000	70,94	DPU
	Peningkatan jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit	355,00	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	380,00	DPU
Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Capaian jalan dalam kondisi mantap (sedang dan baik)	%	52,58	58,75	-	61,68	750.750	64,77	825.825	67,85	908.407	70,94	999.247	70,94	999.247	70,94	DPU
	Peningkatan jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit	355,00	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	380,00	DPU



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
	Berfungsinya kembali jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana	unit	-	7,00	10.582.036	5,00	1.000.000	8,00	1.500.000	8,00	2.000.000	10,00	2.500.000	10,00	3.000.000	48,00	BPBD
Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Capaian jalan dalam kondisi mantap (sedang dan baik)	%	52,58	58,75	-	61,68	50.000	64,77	50.000	67,85	50.000	70,94	50.000	70,94	50.000	70,94	DPU
	Peningkatan jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit	355,00	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	380,00	DPU
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Capaian jalan dalam kondisi mantap (sedang dan baik)	%	52,58	58,75	9.685.000	61,68	9.700.000	64,77	9.700.000	67,85	9.700.000	70,94	9.700.000	70,94	9.700.000	70,94	DPU
	Peningkatan jumlah jembatan dalam kondisi baik	unit	355,00	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	380,00	DPU
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terbangunnya jalan perdesaan	lokasi	10,00	10,00	2.722.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	DPU
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Cipta Karya	Capaian gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	60,91	64,55	750.000	69,09	16.750.000	73,64	18.000.000	78,18	19.300.000	82,73	20.600.000	87,27	20.600.000	87,27	DPU
Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru paru/ rumah sakit mata	Prosentase terselesaikan-nya tambahan 1 unit bangunan rumah sakit umum daerah	%	-	100,00	42.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	DPU
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya jumlah GOR di kabupaten Kebumen	unit	2,00	5,00	16.750.000	5,00	16.750.000	5,00	16.750.000	5,00	16.750.000	5,00	16.750.000	5,00	16.750.000	25,00	DPU



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Penduduk berakses air minum	%	12,28	13,00	18.531.486	13,78	32.100.000	14,62	33.600.000	15,64	33.100.000	16,53	33.600.000	16,53	33.600.000	16,53	DPU
Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	Jumlah Talud/ bronjong yang berada pada kondisi dan daya layan seharusnya	m3	-	-	-	800,00	651.120	800,00	686.232	800,00	724.855	800,00	767.340	800,00	767.340	3.200,00	DPU
Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	Jumlah turap/ talud/ bronjong yang terbangun	unit	-	-	-	500,00	1.000.000	500,00	1.000.000	500,00	1.000.000	500,00	1.000.000	500,00	1.000.000	2.000,00	DPU
	Berkurangnya lokasi yang beresiko bencana alam akibat gerakan tanah	%	88,75	78,75	300.000	68,75	300.000	58,75	300.000	48,75	300.000	38,75	300.000	28,75	300.000	28,75	SDA ESDM
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Bertambahnya Jumlah LPJU yang terpasang	titik	4.140,00	1,00	10.574.100	1,00	10.974.100	1,00	11.374.100	1,00	11.774.100	1,00	12.174.100	1,00	12.174.100	6,00	DPU
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase jaringan Irigasi kondisi mantap Baik	%	80,00	55,00	20.299.600	61,00	26.032.300	68,00	25.359.700	75,00	28.422.600	82,00	26.505.500	89,00	26.555.500	89,00	SDA ESDM
Program pembangunan saluran drainase / gorong gorong	Prosentase drainase dalam kondisi baik	%	-	12,00	3.250.000	15,00	4.250.000	15,00	5.500.000	15,00	6.750.000	15,00	8.000.000	15,00	8.000.000	72,00	DPU
Program penyediaan dan pengolahan air baku	Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musm kemarau	%	13,63	13,63	-	22,73	2.200.000	30,00	1.760.000	37,27	1.760.000	45,54	1.760.000	52,73	1.930.000	45,54	SDA ESDM
Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, Danau dan sumber Daya Air lainnya	Tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat didaerah krisis air	%	7,00	7,00	300.000	3,00	10.500.000	5,00	9.000.000	6,70	7.500.000	8,30	7.500.000	10,00	7.500.000	10,00	SDA ESDM
Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75,00	75,00	100.000	75,00	100.000	75,00	100.000	75,00	100.000	75,00	100.000	75,00	100.000	75,00	DPU

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program Pencegahan Dini dan Penanggu-langan Korban Bencana Alam	Prosentase desa siaga/ tangguh bencana	%	5,24	8,10	1.112.755	10,95	2.060.000	13,81	2.104.000	17,14	2.216.400	20,95	2.262.540	25,24	2.497.794	25,24	BPBD
Program Pengendalian Banjir	Berfungsi-nya kembali secara normal tebing sungai yang rusak akibat bencana	Unit	-	7,00	3.812.135	5,00	1.000.000	8,00	1.500.000	8,00	2.000.000	10,00	2.500.000	10,00	3.000.000	38,00	BPBD
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terpeliha-ranya fasilitas pelayanan publik di tingkat kelurahan	%	-	100,00	3.300.000	100,00	5.002.193	100,00	6.026.820	100,00	6.626.002	100,00	7.280.627	100,00	8.002.626	100,00	kelurahan
Jumlah Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					**341.234.004**		**393.117.033**		**429.972.936**		**442.789.399**		**452.087.980**		**458.230.831**		
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
Program pengembangan perumahan	Cakupan rumah layak huni	%	91,25	92,86	600.000	95,26	7.007.800	97,66	7.007.800	100,00	7.007.800	100,00	7.007.800	100,00	7.007.800	100,00	BAPERMADES, DPU
	Jumlah RTLH yang tertangani oleh kelurahan	unit	-	-	-	25,00	379.040	30,00	659.200	35,00	745.820	38,00	807.427	38,00	826.171	38,00	6 kelurahan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kesiapsi-agaan Pencegahan bahaya kebakaran di lokasi kelem-bagaan pemerintah, sekolah dan Dunia Usaha	%	-	-	100.000	4,00	510.000	4,00	231.000	4,00	253.800	4,00	278.480	4,00	605.128	16,00	BPBD

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Banyaknya rumah yang mendapat bantuan perbaikan pasca bencana	Rumah	-	100,00	200.000	100,00	220.000	100,00	242.000	100,00	266.200	100,00	292.820	100,00	322.102	100,00	BPBD
Jumlah Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					**900.000**		**8.116.840**		**8.140.000**		**8.273.620**		**8.386.527**		**8.761.201**		
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasi-nya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	bulan	60,00	12,00	1.509.500	12,00	1.938.349	12,00	2.355.560	12,00	2.602.449	12,00	2.876.784	12,00	3.154.462	60,00	SATPOL PP
	Tingkat partisipasi petugas Linmas dalam pengen-dalian keamanan	%	100,00	100,00	107.800	100,00	197.674	100,00	221.145	100,00	242.705	100,00	264.865	100,00	9.500	100,00	kecamatan dan kelurahan
	Terfasilita-sinya upaya pemantau-an keaman-an dan ke-nyamanan lingkungan	bulan	60,00	12,00	209.500	12,00	213.000	12,00	234.300	12,00	257.730	12,00	283.503	12,00	311.853	60,00	KESBANG, SETDA, KECAMATAN
	Respon Time terhadap penaggulan gan bencana dan kebakaran	Pos	-	4,00	937.200	4,00	1.037.200	4,00	1.037.200	4,00	1.037.200	4,00	1.037.200	4,00	1.037.200	4,00	BPBD
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terfasilitasi-nya upaya pencegahan tindak kriminal	bulan	12,00	12,00	1.535.449	12,00	1.476.429	12,00	1.514.072	12,00	4.165.479	12,00	1.832.027	12,00	2.015.229	60,00	SATPOL PP
Program pemberdayaan masyarakat untuk	Meningkat-nya jumlah satlinmas	%	10,00	20,00	-	20,00	65.000	20,00	499.200	20,00	481.700	20,00	311.100	20,00	262.700	100,00	SATPOL PP



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
menjaga ketertiban dan keamanan	Banyaknya masyarakat yang paham potensi konflik dan langkah penyelesaiannya	orang	-	-	44.000	104,00	195.000	208,00	217.500	460,00	297.500	920,00	350.000	920,00	350.000	1.692,00	KESBANG
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Banyaknya masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba dan ikut berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba	orang	600,00	600,00	165.000	600,00	170.000	700,00	187.000	800,00	205.700	900,00	226.270	900,00	248.897	3.600,00	KESBANG
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Banyaknya masyarakat yang sadar akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	orang	200,00	150,00	752.553	150,00	847.000	150,00	852.000	150,00	865.000	150,00	877.000	150,00	877.000	750,00	KESBANG
	Tercapainya penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten kebumen	%	100,00	100,00	250.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00	SETDA
	Tercapainya pelaksanaan pemilu	%	100,00	-	-	-	-	100,00	75.000	100,00	100.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00	SETDA
	Terfasilitasinya kegiatan2 HUT RI	%	100,00	100,00	291.500	100,00	303.400	100,00	345.720	100,00	383.192	100,00	407.025	100,00	430.712	100,00	kecamatan
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Banyaknya masyarakat yang paham akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat	-	200,00	200,00	153.000	200,00	141.000	200,00	146.000	200,00	151.000	200,00	154.500	200,00	154.500	1.000,00	KESBANG
	Terwujudnya kemi-traan pengembangan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang agama	%	NA	100,00	250.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00	350.000	100,00	350.000	500,00	350.000	100,00	SETDA



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Banyaknya pemuda yang ikut berperan serta dalam pembangunan	-	75,00	50,00	32.500	60,00	35.000	70,00	37.500	70,00	37.500	70,00	40.000	70,00	40.000	320,00	KESBANG
Program pendidikan politik masyarakat	Capaian partisipasi masyarakat/ penduduk dalam proses pemilihan umum	%	62,51	-	216.000	-	298.000	70,00	360.000	70,00	565.000	70,00	605.000	70,00	605.000	70,00	KESBANG
Jumlah Anggaran Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					**6.454.002**		**7.517.052**		**8.682.197**		**12.092.154**		**10.040.274**		**10.272.054**		
6. Sosial																	
Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Tercapainya pendataan tempat ibadah, TPQ dan madin	%	50,00	50,00	150.000	50,00	400.000	20,00	200.000	15,00	200.000	15,00	200.000	100,00	200.000	100,00	SETDA
	Meningkatnya kapasitas SDM kesos	%	75,00	75,00	25.000	75,00	130.000	75,00	135.000	75,00	140.000	75,00	145.000	75,00	145.000	75,00	SETDA
	Jumlah anggota kelembagaan sosial yang diberdayakan	orang	87,00	166,00	520.000	166,00	530.000	112,00	320.000	117,00	360.000	117,00	400.000	117,00	400.000	512,00	NAKERTRANSOS
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial	Tersedianya kebutuhan penanganan masalah strategis akibat bencana dan bantuan logistik korban bencana	bulan	-	12,00	2.000.000	12,00	2.500.000	12,00	2.550.000	12,00	2.600.000	12,00	2.650.000	12,00	2.700.000	60,00	BPBD
	Banyaknya orang yang terlayani dan terehabilitasi kesejahteraan sosialnya	orang	-	198,00	170.000	75,00	190.000	165,00	175.000	170,00	210.000	175,00	250.000	175,00	250.000	708,00	NAKERTRANSOS

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
	Banyaknya Fasilitasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	kegiatan	-	1,00	207.000	1,00	233.873	1,00	250.000	1,00	250.000	1,00	275.000	1,00	275.000	6,00	BAPPEDA
	Terfasilitasinya keg. TKP2KDes	%	100,00	100,00	178.419	100,00	412.360	100,00	309.275	100,00	335.382	100,00	356.402	100,00	380.519	100,00	2 kec dan 11 kel
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah fakir miskin, KAT dan PMKS yang diberdayakan	orang	31.393,00	32.134,00	1.250.000	31.168,00	1.250.000	31.980,00	3.600.000	32.205,00	3.775.000	32.625,00	4.100.000	32.625,00	4.200.000	5.208,00	NAKERTRANSOS
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah anak nakal, penyandang cacat dan trauma yang terbina	orang	20,00	204,00	350.000	204,00	350.000	70,00	150.000	80,00	175.000	90,00	200.000	90,00	200.000	90,00	NAKERTRANSOS
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Jumlah anak panti asuhan dan panti jompo yang terbantu	orang	225,00	650,00	350.000	650,00	350.000	650,00	225.000	650,00	250.000	650,00	275.000	650,00	275.000	3.250,00	NAKERTRANSOS
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks napi dan Penyandang Sosial lainnya	orang	32,00	84,00	200.000	84,00	200.000	65,00	100.000	70,00	125.000	75,00	150.000	75,00	150.000	75,00	NAKERTRAN-SOS
Jumlah Anggaran Urusan Sosial					**5.400.419**		**6.546.233**		**8.014.275**		**8.420.382**		**9.001.402**		**9.175.519**		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					**89.777.201**		**135.024.690**		**156.091.102**		**158.340.190**		**167.747.243**		**164.214.285**		
1. Tenaga Kerja																	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	-	600,00	5.000.000	480,00	5.311.482	534,00	5.470.000	552,00	7.350.000	552,00	11.400.000	552,00	11.400.000	3.270,00	NAKERTRAN-SOS
Program Peningkatan Kesempatan kerja	Penempatan tenaga kerja/pencari kerja yang terdaftar x 100%	%	22,85	23,05	1.485.000	23,24	1.920.000	23,43	2.550.000	23,61	2.845.000	23,83	3.075.000	24,01	3.075.000	24,01	NAKERTRAN-SOS



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) dengan jumlah kasus yang dicatatkan	%	100,00	100,00	245.000	100,00	365.000	100,00	390.000	100,00	520.000	100,00	675.000	100,00	675.000	100,00	NAKERTRANSOS
Jumlah Anggaran Urusan Tenaga Kerja					**6.730.000**		**7.596.482**		**8.410.000**		**10.715.000**		**15.150.000**		**15.150.000**		
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan	desa	132,00	70,00	645.900	76,00	545.100	76,00	760.000	76,00	880.000	34,00	1.010.000	34,00	1.020.000	332,00	BPPKB
Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemahaman, kemampuan dan ketrampilan perempuan	Organisasi	31,00	31,00	100.000	31,00	60.000	31,00	65.000	31,00	70.000	31,00	75.000	31,00	75.000	155,00	BPPKB
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Jumlah organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	unit	75,00	75,00	545.000	75,00	545.000	75,00	545.000	75,00	545.000	75,00	545.000	75,00	545.000	375,00	BPPKB
Jumlah Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					**1.290.900**		**1.150.100**		**1.370.000**		**1.495.000**		**1.630.000**		**1.640.000**		
3. Pangan																	
Program peningkatan ketahanan pangan	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	%	91,20	91,70	4.643.245	92,20	4.996.000	92,70	5.298.000	93,20	5.601.000	93,70	5.930.000	94,20	5.930.000	94,20	KETAPANG
Jumlah Anggaran Urusan Pangan					**4.643.245**		**4.996.000**		**5.298.000**		**5.601.000**		**5.930.000**		**5.930.000**		
4. Pertanahan																	

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
5. Lingkungan Hidup																	
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bertambah-nya Ruang Terbuka Hijau yang terbangun	lokasi	-	1,00	7.850.000	1,00	8.350.000	1,00	9.900.000	1,00	10.450.000	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	6,00	DPU
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase penanganan luasan per-mukiman kumuh	%	-	16,67	1.750.000	33,33	2.000.000	50,00	2.500.000	66,67	3.000.000	83,33	3.500.000	83,33	3.500.000	83,33	DPU
Program pengelolaan areal pemakaman	Areal Pemakaman umum yang tertata	lokasi	-	-	-	2,00	1.200.000	2,00	1.200.000	2,00	1.200.000	2,00	1.200.000	2,00	1.200.000	8,00	DPU
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampah an	Cakupan pelayanan sampah	%	42,44	42,54	14.770.000	42,67	16.220.000	42,74	16.600.000	42,84	17.100.000	42,94	17.500.000	42,94	17.500.000	42,94	DPU
	Prosentase penanganan sampah di tingkat desa/ kelurahan	%	6,50	9,00	115.000	11,00	100.000	13,00	175.000	15,00	200.000	17,00	230.000	20,00	200.000	76,00	KLH
Program Pengendalian Banjir	Prosentase peningkatan perlin-dungan perumahan penduduk dan areal persawahan serta areal pariwisata beserta infrastruk-turnya dari bencana banjir dan abrasi	%	70,00	72,00	16.620.000	76,00	33.475.000	80,00	32.585.000	83,00	32.625.000	85,00	37.895.000	87,00	31.756.000	87,00	SDA ESDM
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Expotensi merusak lingkungan	Persentase usaha per-tambangan yang mene-rapkan good practice minning	lokasi	23,00	32,00	75.000	42,00	90.000	52,00	105.000	61,00	120.000	71,00	135.000	84,00	150.000	258,00	SDA ESDM
Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatn ya jumlah kelompok masyarakat yang paham tentang	%	25,00	31,25	50.000	37,50	1.650.000	43,75	1.650.000	50,00	1.650.000	56,25	1.650.000	62,50	1.650.000	62,50	SDA ESDM



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
	bencana Geologi																
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Penurunan Beban Pencemaran lingkungan	%	2,00	5,00	3.009.845	10,00	3.880.770	10,00	4.734.000	10,00	4.994.000	10,00	5.339.000	10,00	5.339.000	60,00	KLH
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase penurunan sumber polusi dari sumber tidak bergerak	%	-	-	-	-	70.000	-	470.000	-	470.000	-	470.000	-	470.000	-	KLH
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Prosentase penanganan koonservasi Sumber Daya Alam	%	5,00	3,00	112.500	4,00	156.000	14,00	500.000	20,00	500.000	27,00	500.000	35,00	500.000	100,00	KLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tersedianya profil keanekaragaman hayati	dokumen	-	1,00	40.000	1,00	200.000	1,00	100.000	1,00	100.000	1,00	100.000	1,00	100.000	6,00	KLH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya upaya akses Infor-masi Sumberdaya Lingkungan Hidup	keg	3,00	3,00	250.000	3,00	265.000	3,00	300.000	3,00	310.000	3,00	310.000	3,00	310.000	18,00	KLH
Jumlah Anggaran Urusan Lingkungan Hidup					**44.642.345**		**67.656.770**		**70.819.000**		**72.719.000**		**80.829.000**		**74.675.000**		
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
Program Penataan Administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran sesuai SPM	%	-	100,00	3.711.994	100,00	3.955.916	100,00	4.328.665	100,00	3.981.532	100,00	4.374.484	100,00	4.796.932	100,00	CAPIL
	Cakupan penerbitan kutipan akte kematian sesuai SPM	%	-	45,00	-	47,00	-	50,00	-	60,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	CAPIL
	Cakupan penerbitan e-KTP	%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	CAPIL



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Teridentifikasinya data kependudukan	desa	460,00	460,00	60.000	460,00	50.000	460,00	55.000	460,00	60.000	460,00	65.000	460,00	65.000	2.300,00	BPPKB
Jumlah Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					**3.771.994**		**4.005.916**		**4.383.665**		**4.041.532**		**4.439.484**		**4.861.932**		
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Prosentase BUMDES yang terbentuk	Lembaga	6,00	67,00	158.907	76,00	495.000	100,00	518.500	100,00	522.350	100,00	526.585	100,00	531.244	443,00	BAPERMADES
Program Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dan tanah kas desa yang terselesaikan	%	100,00	100,00	15.000	100,00	50.000	100,00	55.000	100,00	60.500	100,00	66.550	100,00	73.205	100,00	BAPERMADES
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	30,00	10,00	2.612.722	10,00	2.470.120	10,00	2.824.522	10,00	3.085.204	10,00	3.366.785	10,00	3.586.738	60,00	BAPERMADES, KEC
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Terfasilitaasinya upaya peningkatan keberdayaan masyarakat desa	pelatihan	-	11,00	700.000	11,00	730.000	11,00	948.000	11,00	1.037.700	11,00	1.135.670	11,00	1.240.737	66,00	BAPERMADES
	Terisinya jabatan kepala desa	%	100,00	100,00	30.000	100,00	1.350.000	100,00	600.000	100,00	8.250.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00	SETDA
	Tingkat partisipasi RT/RW yang berperan dalam kelembagaan desa	%	100,00	100,00	36.750	100,00	149.240	100,00	152.750	100,00	544.288	100,00	236.852	100,00	155.859	100,00	Kecamatan dan kelurahan
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Bertambahnya perempuan yang berperan di pedesaan	orang	300,00	60,00	60.000	60,00	60.000	60,00	70.000	60,00	77.000	60,00	84.700	60,00	93.170	300,00	BAPERMADES

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100,00	100,00	202.300	100,00	237.099	100,00	276.156	100,00	307.862	100,00	333.489	100,00	361.369	100,00	Kecamatan dan kelurahan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase desa yang menyusun APBDes sesuai standar	%	100,00	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	170.000	100,00	187.000	100,00	205.700	100,00	226.270	100,00	BAPERMADES
Program Pengembangan wilayah perbatasan;	Jumlah desa yang dilakukan penetapan dan penegasan batas desa	%	-	100,00	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	SETDA
Jumlah Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					**4.005.679**		**5.641.459**		**5.614.928**		**14.071.903**		**6.046.330**		**6.358.592**		
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
Program Keluarga Berencana	Peningkatan pelayanan KB di kecamatan	%	-	100,00	4.159.539	100,00	4.189.539	100,00	4.194.539	100,00	4.204.539	100,00	4.214.539	100,00	4.224.539	100,00	BPPKB
Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan pelayanan KB Aktif	%	84,50	84,70	377.500	84,75	370.000	84,80	375.000	84,90	380.000	85,10	390.000	85,50	390.000	85,50	BPPKB
Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pemberda-yaan kader kelompok Tribina	kelom pok	156,00	100,00	50.000	110,00	55.000	120,00	60.000	125,00	65.000	130,00	70.000	130,00	70.000	585,00	BPPKB
Jumlah Anggaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					**4.587.039**		**4.614.539**		**4.629.539**		**4.649.539**		**4.674.539**		**4.684.539**		
9. Perhubungan																	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan kualitas layanan transportasi	%	30,31	38,57	442.590	45,72	350.000	54,33	455.000	63,66	500.000	72,96	565.000	83,33	615.000	83,33	DISHUB

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Cakupan kualitas layanan transportasi	%	30,31	38,57	2.236.885	45,72	4.829.003	54,33	8.810.000	63,66	5.595.000	72,96	6.067.000	83,33	6.627.000	83,33	DISHUB
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Cakupan kualitas layanan transportasi	%	30,31	38,57	75.000	45,72	-	54,33	-	63,66	-	72,96	-	83,33	-	83,33	DISHUB
Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan kualitas layanan transportasi	%	30,31	38,57	2.260.000	45,72	9.033.000	54,33	19.495.000	63,66	10.025.000	72,96	10.550.000	83,33	11.050.000	83,33	DISHUB
Jumlah Anggaran Urusan Perhubungan					**5.014.475**		**14.212.003**		**28.760.000**		**16.120.000**		**17.182.000**		**18.292.000**		
10. Komunikasi dan Informatika																	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Capaian layanan komunikasi	%	46,63	51,92	3.142.001	61,54	8.295.000	71,15	8.761.500	63,66	9.589.650	72,96	10.859.615	100,00	11.359.615	100,00	DISHUB, SETDA
Program kerjasama informasi dengan media massa	Terwujud-nya kerja sama informasi dengan media publik	%	100,00	100,00	2.568.800	100,00	4.731.000	100,00	4.918.800	100,00	5.040.000	100,00	5.155.000	100,00	5.160.000	100,00	SETDA, SETWAN
Program pengkajiandan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Capaian layanan komunikasi	%	46,63	51,92	180.000	61,54	195.000	71,15	258.350	63,66	284.685	72,96	307.653	100,00	307.653	100,00	DISHUB, SETDA
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Prosentase peningkatan layanan informasi arsip	%	100,00	20,00	170.000	20,00	300.000	20,00	330.000	20,00	340.000	20,00	355.000	20,00	355.000	100,00	PERPUSARDA, SETWAN
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Capaian layanan komunikasi	%	46,63	51,92	120.000	61,54	170.000	71,15	195.200	63,66	209.720	72,96	225.692	100,00	225.692	100,00	DISHUB, SETDA
Jumlah Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika					**6.180.801**		**13.691.000**		**14.463.850**		**15.464.055**		**16.902.960**		**17.407.960**		
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Meningkatnya akses UMKM dan Koperasi terhadap fasilitas pembiayaan pemerintah	%	NA	90,00	50.000	90,00	70.000	90,00	90.000	90,00	110.000	90,00	130.000	90,00	130.000	90,00	SETDA
	Peningkatan Jumlah UMKM	Kelompok	43.132,00	400,00	80.000	425,00	3.230.000	450,00	942.720	500,00	1.036.992	550,00	1.123.122	550,00	1.217.865	2.875,00	DINKOP
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah UMKM yang terfasilitasi mengikuti pameran	UMKM	25,00	5,00	100.000	5,00	100.000	5,00	110.000	5,00	110.000	5,00	120.000	5,00	120.000	30,00	SETDA
	Peningkatan Jumlah UMKM	Kelompok	43.132,00	400,00	760.000	425,00	1.085.000	450,00	1.203.500	500,00	1.278.850	550,00	1.411.735	550,00	1.501.909	2.875,00	DINKOP
Program dan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang konduksif	Meningkatkan jumlah kegiatan dan beragam jenis usah kelompok	Kelompok	33,00	120,00	70.000	130,00	125.000	150,00	150.000	155,00	175.000	180,00	180.000	180,00	180.000	735,00	BPPKB
	Peningkatan Jumlah UMKM	Kelompok	43.132,00	400,00	445.250	425,00	977.250	450,00	264.285	500,00	291.308	550,00	320.439	550,00	345.894	2.875,00	DINKOP
	Terwujudnya Kampung UMKM	Lokasi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	DINKOP
	Meningkatnya kinerja bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM	LKM	NA	30,00	90.000	50,00	120.000	80,00	140.000	100,00	160.000	130,00	180.000	150,00	180.000	540,00	SETDA
	Meningkatnya partisipasi dalam kegiatan pengembangan UMKM di tingkat provinsi dan nasional	%	100,00	100,00	435.000	100,00	435.000	100,00	465.000	100,00	475.000	100,00	505.000	100,00	505.000	100,00	SETDA
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya Persentase koperasi aktif	%	50,00	80,00	816.693	82,00	945.747	85,00	1.281.555	88,00	1.450.611	90,00	1.551.472	92,00	1.692.769	92,00	DINKOP



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program Penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja BUMD	Prosentase BUMD dengan predikat sehat	%	80,00	80,00	300.000	80,00	300.000	80,00	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00	SETDA
Jumlah Anggaran Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					**3.146.943**		**7.387.997**		**4.997.600**		**5.437.761**		**5.871.768**		**6.203.437**		
12. Penanaman Modal																	
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Nilai investasi PMA/PMDN	Rp (juta)	324.436	200.000	655.000	210.000	715.000	220.000	782.000	230.000	860.200	240.000	946.220	250.000	1.044.807	250.000	BPMPT
Jumlah Anggaran Urusan Penanaman Modal					**655.000**		**715.000**		**782.000**		**860.200**		**946.220**		**1.044.807**		
13. Kepemudaan dan Olahraga																	
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah Pelatih Olahraga yang dikirim mengikuti pelatihan	Pelatih	40,00	40,00	25.000	40,00	27.500	40,00	30.250	40,00	33.275	40,00	36.603	40,00	40.263	240,00	DIKPORA
	Meningkatnya pemahaman sosialisasi program olah raga	%	NA	75,00	50.000	75,00	55.000	75,00	60.000	75,00	65.000	75,00	75.000	75,00	75.000	75,00	SETDA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Pengiriman Atlit POPDA SD, SMP, SMA Tk Kab Kebumen, Kedu, Tk. Prov Jateng	Atlet	50,00	60,00	1.116.510	60,00	1.228.161	70,00	1.350.977	70,00	1.486.075	75,00	1.634.682	75,00	1.798.151	75,00	DIKPORA
	Meningkatnya kesegaran jasmani bagi PNS	%	NA	75,00	95.000	75,00	100.000	75,00	110.000	75,00	125.000	75,00	140.000	75,00	140.000	75,00	SETDA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terfasilitasinya pengembangan Olah raga melalui even perlombaan dan olahraga	event	10,00	10,00	347.250	10,00	381.975	10,00	372.923	10,00	387.715	10,00	403.986	10,00	419.000	60,00	DIKPORA
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan skala regional dan	orang	130,00	120,00	525.000	120,00	577.500	120,00	684.250	120,00	750.675	120,00	822.243	120,00	884.467	720,00	DIKPORA

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
	nasional																
	Prosentase organisasi pemuda yg berperan dalam pembangunan desa	%	100,00	100,00	200.470	100,00	248.323	100,00	314.085	100,00	342.353	100,00	379.580	100,00	410.975	100,00	Kecamatan dan kelurahan
Jumlah Anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga					**2.359.230**		**2.618.459**		**2.922.485**		**3.190.092**		**3.492.093**		**3.767.855**		
14. Statistik																	
Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Tersedianya dokumen database perangkat daerah	dokumen	15,00	27,00	1.387.650	27,00	1.445.675	27,00	1.597.711	27,00	1.739.102	27,00	1.904.740	26,00	1.904.003	158,00	Semua SKPD, Kecamatan
Jumlah Anggaran Urusan Statistik					**1.387.650**		**1.445.675**		**1.597.711**		**1.739.102**		**1.904.740**		**1.904.003**		
16. Kebudayaan																	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Banyaknya fasilitasi pengelolaan keragaman budaya	%	42,86	62,50	360.000	62,22	1.085.000	64,00	1.193.500	67,27	1.312.850	70,00	1.444.135	69,23	1.588.549	70,00	DISPARBUD
Jumlah Kebudayaan					**360.000**		**1.085.000**		**1.193.500**		**1.312.850**		**1.444.135**		**1.588.549**		
17. Perpustakaan																	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa	%	50,00	11,00	560.000	15,00	750.000	15,00	1.020.000	15,00	1.115.000	15,00	1.205.000	15,00	1.205.000	86,00	PERPUSARDA
Jumlah Anggaran Urusan Perpustakaan					**560.000**		**750.000**		**1.020.000**		**1.115.000**		**1.205.000**		**1.205.000**		
18. Kearsipan																	
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku	%	4,60	16,09	169.400	22,61	169.400	29,31	185.000	36,02	193.000	42,72	200.000	49,43	200.000	49,43	PERPUSARDA
18Jumlah Anggaran Urusan					**169.400**		**169.400**		**185.000**		**193.000**		**200.000**		**200.000**		

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Kearsipan																	
Urusan Pilihan					**83.506.715**		**193.171.245**		**134.733.374**		**133.884.228**		**115.225.219**		**116.368.817**		
1. Kelautan dan Perikanan																	
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi ikan tangkap	ton	7.618,06	7.922,78	2.971.250	8.239,69	85.980.000	8.569,28	4.335.000	8.912,05	4.290.000	9.268,53	4.445.000	9.639,28	4.445.000	9.639,28	DINLUTKAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Terbentuknya dan berkembangnya Kawasan Agrobisnis Perikanan dan Kelautan	lokasi	-	-	-	1,00	3.324.245	1,00	3.744.044	1,00	3.946.569	1,00	622.326	1,00	202.525	1,00	DINLUTKAN
	Meningkatnya produksi ikan budidaya	ton	2.008,73	2.169,43	1.962.978	2.342,98	2.425.000	2.530,42	2.600.000	2.732,85	2.775.000	2.951,48	3.000.000	3.187,60	3.000.000	3.187,60	DINLUTKAN
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan angka konsumsi makan ikan	kg/ka/th	13,65	14,84	1.520.877	16,13	1.250.000	17,53	1.300.000	19,06	1.350.000	20,71	1.400.000	22,52	1.400.000	22,52	DINLUTKAN
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatknya pengetahuan teknis dan manajemen kelompok	kelompok	30,00	35,00	300.000	40,00	50.000	45,00	50.000	50,00	50.000	55,00	50.000	60,00	50.000	60,00	DINLUTKAN
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Peningkatan jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	klp	12,00	15,00	130.000	18,00	130.000	21,00	390.000	24,00	250.000	27,00	250.000	30,00	250.000	30,00	DINLUTKAN
Jumlah Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan					**6.885.105**		**93.159.245**		**12.419.044**		**12.661.569**		**9.767.326**		**9.347.525**		
2. Pariwisata																	
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.117.136	1.304.500	2.047.000	1.305.500	2.430.000	1.306.000	2.523.000	1.308.000	2.625.300	1.309.000	2.737.830	1.310.000	2.861.613	1.310.000	DISPARBUD

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program pengembangan Kemitraan	Terfasilitasi-nya program pengem-bangan pariwisata dan kebudayaan	kegiatan	-	4,00	1.207.700	4,00	1.400.000	4,00	1.540.000	4,00	1.694.000	4,00	1.863.400	4,00	2.049.740	24,00	DISPARBUD
Program Pengembangan Destinasi Wisata	Bertambah-nya Fasilitasi sarana/ prasarana obyek wisata	obyek	9,00	9,00	13.273.000	9,00	17.544.000	9,00	19.298.400	9,00	21.228.240	9,00	23.351.064	9,00	22.384.920	9,00	DISPARBUD
Jumlah Anggaran Urusan Pariwisata					**16.527.700**		**21.374.000**		**23.361.400**		**25.547.540**		**27.952.294**		**27.296.273**		
3. Pertanian																	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	% jumlah kelompoktani yang bankable	%	6,00	8,00	865.000	9,00	700.000	10,00	770.000	11,00	847.000	12,00	931.700	13,00	1.024.870	13,00	DISTANAK
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	%	54,75	69,53	4.014.420	78,47	3.225.500	86,67	5.728.630	92,01	6.387.084	95,37	6.864.621	98,57	7.551.083	98,57	DISTANAK
	Produksi Industri Pengolahan Perkebunan	Rp (000)	289.685	318.025	50.000	346.896	150.000	409.857	60.000	442.510	100.000	446.927	150.000	480.530	200.000	446.927	DISHUTBUN
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Prosentase peningkatan produksi hortikultura	%	-	0,50	575.000	0,50	600.000	0,50	660.000	0,50	726.000	0,50	798.600	0,50	878.460	3,00	DISTANAK
	Nilai Produksi Perkebunan (juta rupiah)	Rp. juta	633,83	640,17	979.000	646,57	979.000	653,04	2.500.000	659,57	2.750.000	666,16	3.000.000	672,82	3.250.000	666,16	DISHUTBUN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Penurunan Angka kehilangan Hasil (%)	%	10,93	10,94	390.000	10,91	5.000.000	10,88	5.170.000	10,85	5.687.000	10,82	6.255.700	10,82	6.881.270	10,82	DISTANAK
	Nilai Produksi Perkebunan (juta rupiah)	Rp. juta	633,83	640,17	550.000	646,57	1.224.000	653,04	1.088.000	659,57	950.000	666,16	950.000	672,82	950.000	666,16	DISHUTBUN
	Produksi Industri Pengolahan Perkebunan	Rp. 000,-	289.685	318.025	250.000	346.896	797.000	409.857	875.000	442.510	1.051.000	446.927	1.156.000	480.530	1.271.000	446.927	DISHUTBUN



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
	Menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi	%	70,00	73,00	450.000	76,00	480.000	78,00	515.000	80,00	535.000	82,00	555.000	85,00	555.000	85,00	SETDA
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terfasilitasinya Promosi hasil produksi pertanian dan peternakan	kali	12,00	6,00	220.000	6,00	150.000	6,00	165.000	6,00	181.500	6,00	199.650	6,00	219.615	30,00	DISTANAK
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Capaian Produksi daging	Kg	11.101.920	11.102.031	1.900.000	11.102.140	5.300.000	11.102.250	5.830.000	11.102.360	6.413.000	11.102.470	7.054.300	11.102.580	7.759.730	11.102.580	DISTANAK
	Capaian Produksi Telur	Kg	3.836.272	3.836.310	-	3.836.350	-	3.836.390	-	3.836.430	-	3.836.470	-	3.836.510	-	3.836.510	DISTANAK
	Bertambahnya jumlah produksi bibit sapi	ekor	2.946,00	800,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	3.300,00	DISTANAK
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	ekor	13.052,00	13.150,00	660.000	13.250,00	523.500	13.400,00	575.850	13.500,00	633.435	13.750,00	696.779	13.750,00	766.456	67.050,00	DISTANAK
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Terpeliharanya Sarana pemasaran hasil produksi peternakan	unit	2,00	2,00	250.000	2,00	250.000	2,00	275.000	2,00	302.500	2,00	332.750	2,00	366.025	2,00	DISTANAK
Jumlah Anggaran Urusan Pertanian					**11.153.420**		**19.379.000**		**24.212.480**		**26.563.519**		**28.945.100**		**31.673.509**		
4. Kehutanan																	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Cakupan rehabilitasi/ konservasi lahan/ hutan	%	2,64	2,30	3.200.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30	DISHUTBUN
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kelompok peduli konservasi Sumber Daya Alam dan LH	keg	-	8,00	174.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	DISHUTBUN
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Produksi Kayu Bulat (m3)	m3	17.149,26	171,49	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUTBUN
	Produksi Hasil Hutan	Rp. (000)	18.673.000	18.675.078	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.675.078	DISHUTBUN

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
	Bukan Kayu																
Jumlah Anggaran Urusan Kehutanan					**3.994.690**		-		-		-		-		-		
5. Energi dan Sumberdaya Mineral																	
Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan	Meningkat-nya Jumlah dukuh berlistrik yang berkualitas	%	84,00	89,00	10.902.900	91,00	15.445.500	92,00	12.654.700	93,00	12.587.600	94,00	13.010.500	95,00	12.455.500	459,00	SDA ESDM
Jumlah Anggaran Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral					**10.902.900**		**15.445.500**		**12.654.700**		**12.587.600**		**13.010.500**		**12.455.500**		
6. Perdagangan																	
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	%	31,11	40,00	32.365.500	48,89	40.604.000	60,00	59.110.000	71,11	52.974.000	77,78	31.417.000	100,00	31.417.000	77,78	DISPERINDAG
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan	-	80,75	81,00	269.000	81,50	322.000	81,75	350.000	82,00	380.000	82,25	413.000	82,50	448.010	82,25	BPMPT
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan	-	80,75	81,00	30.000	81,50	35.000	81,75	40.000	82,00	45.000	82,25	50.000	82,50	50.000	82,25	DPU
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Banyaknya lokasi PKL dan asongan yang tertata	lokasi	-	6,00	13.000	2,00	75.000	2,00	100.000	2,00	125.000	2,00	150.000	2,00	150.000	14,00	DISPERINDAG
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Prosentase tertanganin ya pengaduan konsumen	kegiat an	4,00	4,00	89.300	4,00	195.000	4,00	225.000	4,00	260.000	4,00	310.000	4,00	310.000	28,00	DISPERINDAG
Jumlah Anggaran Urusan Perdagangan					**32.766.800**		**41.231.000**		**59.825.000**		**53.784.000**		**32.340.000**		**32.375.010**		
7. Perindustrian																	
Program Penataan Struktur Industri	Terbentuk-nya kawa-san industri	%	-	-	200.000	20,00	1.100.000	40,00	400.000	60,00	500.000	80,00	600.000	100,00	600.000	100,00	DISPERINDAG

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Kenaikan Jumlah industri kecil menengah	unit	54.899,00	54.909,00	613.500	54.919,00	925.000	54.929,00	1.230.000	54.939,00	1.535.000	54.949,00	1.840.000	54.959,00	1.840.000	54.949,00	DISPERINDAG
	Persentase usaha per-dagangan berizin	%	100,00	19,24	75.000	19,38	82.500	19,55	90.750	20,23	100.000	21,57	110.000	23,72	121.000	99,97	BPMPT
Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi	Meningkatnya Jumlah IKM yang menerapkan merek bagi produknya	IKM	-	15,00	162.600	20,00	180.000	25,00	200.000	30,00	220.000	35,00	240.000	35,00	240.000	125,00	DISPERINDAG
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang produknya bestandar SNI	IKM	-	30,00	30.000	40,00	40.000	50,00	50.000	60,00	60.000	70,00	70.000	70,00	70.000	250,00	DISPERINDAG
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah wilayah/lokasi yang menerapkan reklame IKM	IKM	-	4,00	20.000	6,00	30.000	8,00	40.000	10,00	50.000	10,00	50.000	10,00	50.000	38,00	DISPERINDAG
Jumlah Anggaran Urusan Perindustrian					**1.101.100**		**2.357.500**		**2.010.750**		**2.465.000**		**2.910.000**		**2.921.000**		
8. Transmigrasi																	
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Banyaknya keluraga Miskin daerah bencana yang difasilitasi pemindahan-nya ke daerah transmigrasi	KK	10,00	10,00	175.000	10,00	225.000	10,00	250.000	10,00	275.000	10,00	300.000	10,00	300.000	60,00	NAKERTRANSOS
8.Jumlah Anggaran Urusan Transmigrasi					**175.000**		**225.000**		**250.000**		**275.000**		**300.000**		**300.000**		
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					**42.209.694**		**45.187.951**		**50.949.270**		**53.477.223**		**57.116.430**		**58.998.801**		
1. Perencanaan																	
Program Perencanaan tata Ruang	Terbentuknya Kawasan Perdesaan	lokasi	-	1,00	125.000	2,00	137.500	3,00	151.250	4,00	166.375	5,00	183.000	6,00	200.000	6,00	BAPERMADES
	Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang	dokumen	-	1,00	300.000	2,00	625.000	1,00	325.000	1,00	350.000	1,00	350.000	1,00	350.000	6,00	BAPPEDA



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
	Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	10,00	2,00	50.000	2,00	100.000	2,00	100.000	2,00	100.000	2,00	100.000	2,00	100.000	12,00	SDA ESDM
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah	dokumen	17,00	3,00	2.306.982	3,00	2.582.695	2,00	2.399.687	3,00	2.774.882	3,00	3.088.450	3,00	3.433.877	17,00	BAPPEDA, SETDA, KEC, KEL
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	TerfasilitasinyaPeningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	keg	10,00	3,00	200.000	3,00	220.000	3,00	225.000	3,00	225.000	3,00	225.000	3,00	225.000	18,00	BAPPEDA
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (Paket)	dokumen	-	3,00	750.000	1,00	350.000	1,00	400.000	1,00	400.000	1,00	400.000	1,00	400.000	8,00	BAPPEDA
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tersedianya dokumen kajian kawasan industri Kabupaten Kebumen	dokumen	-	-	-	1,00	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	dokumen	-	4,00	670.000	4,00	370.000	4,00	625.000	4,00	625.000	4,00	835.000	4,00	635.000	24,00	BAPPEDA
Program Kerjasama Pembangunan	Terfasilitasinya kluster ekonomi daerah	kluster	-	4,00	120.000	4,00	130.000	4,00	130.000	4,00	140.000	4,00	140.000	4,00	150.000	24,00	BAPPEDA
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya	-	-	4,00	530.000	4,00	590.000	3,00	630.000	3,00	640.000	3,00	640.000	3,00	650.000	20,00	BAPPEDA
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terkoordinasikannya Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	kali	-	5,00	50.000	5,00	50.000	5,00	60.000	5,00	60.000	5,00	70.000	5,00	70.000	30,00	BAPPEDA



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah	%	100,00	-	-	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	SETDA
Program pengembangan data/informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	dokumen	548,00	168,00	2.242.507	158,00	2.559.039	155,00	2.669.717	155,00	2.722.589	155,00	2.857.007	159,00	3.054.804	907,00	Semua SKPD, KEC, KEL
Jumlah Anggaran Fungsi Perencanaan					**7.344.489**		**7.989.234**		**7.840.654**		**8.333.845**		**9.018.457**		**9.398.681**		
2. Keuangan																	
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Capaian Realisasi belanja	%	91,00	90,00	908.000	90,00	1.100.000	90,00	1.210.000	90,00	1.331.000	90,00	1.464.100	90,00	1.610.510	90,00	DPPKAD
	Capaian Penerbitan Dokumen keuangan daerah tepat waktu	%	100,00	100,00	997.605	100,00	1.130.000	100,00	1.243.000	100,00	1.367.300	100,00	1.504.030	100,00	1.654.433	100,00	DPPKAD
	Capaian SKPD Tertib Administrasi AsetTepat Waktu	%	79,00	79,00	903.500	79,00	1.070.500	80,00	1.167.550	80,00	1.274.305	83,00	1.391.736	83,00	1.520.909	83,00	DPPKAD, DPU
	Capaian Realisasi Pendapatan	%	100,00	100,00	4.983.711	100,00	5.029.500	100,00	5.382.100	100,00	6.243.360	100,00	7.089.876	100,00	7.693.364	100,00	DPPKAD, DISPARBUD, DISPERINDAG, DISHUB
	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa publik melalui ULP	%	100,00	100,00	1.000.000	100,00	1.250.000	100,00	2.500.000	100,00	2.650.000	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00	SETDA
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Jumlah SKPD yang mengirim SPJ fungsional tepat waktu	SKPD	-	216,00	959.750	216,00	1.110.501	216,00	1.210.000	216,00	1.319.800	216,00	1.440.780	216,00	1.573.858	1.080,00	DPPKAD
Jumlah Anggaran Urusan Keuangan					**9.752.566**		**10.690.501**		**12.712.650**		**14.185.765**		**15.590.522**		**16.753.074**		

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	orang	1.169,00	1.338,00	3.857.750	1.569,00	3.355.000	1.700,00	5.244.200	1.725,00	5.989.620	1.745,00	6.497.482	1.785,00	6.541.067	8.947,00	BKD, BPBD, DIKPORA, SATPOL, BAPERMADES, DPPKAD
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terfasilitasi-nya aparatur pemerintah sejak perekrutan, penempatan, pengembang-an karier sampai dengan penghargaan prestasi	orang	5.235,00	7.169,00	3.472.150	5.092,00	3.895.320	741,00	5.250.000	741,00	4.697.000	741,00	5.266.000	741,00	5.371.000	13.968,00	BKD, DIKPORA, BPPKB, SETDA
Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase pegawai yang mengikuti Diklat Teknis	%	27,00	31,00	840.000	38,00	1.440.000	46,00	1.250.000	55,00	670.000	65,00	700.000	73,00	700.000	73,00	BKD
Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pegawai yg tidak dijatuhi hukuman disiplin	%	99,95	99,79	1.702.750	99,80	2.024.150	99,80	2.358.650	99,80	2.518.096	99,80	2.557.555	99,81	2.557.555	99,81	SETDA, BKD
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Prosentase penempatan ASN yang sesuai kebutuhan dan kompe-tensinya	%	100,00	100,00	35.000	100,00	45.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00	BKD
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase aparatur desa yang meningkat kapasitas-nya	%	100,00	20,00	663.204	20,00	617.500	20,00	730.800	20,00	802.965	20,00	892.081	20,00	968.342	100,00	BAPERMADES
Jumlah Anggaran Urusan Kepegawai an, Pendidikan dan Pelatihan					**10.570.854**		**11.376.970**		**14.883.650**		**14.727.681**		**15.973.118**		**16.197.964**		
4. Penelitian dan Pengembangan																	

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
5. Fungsi Lainnya																	
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Ditetapkannya perda/raperda	dokumen	-	13,00	2.353.190	13,00	2.291.215	6,00	2.319.215	16,00	2.569.215	16,00	2.569.215	26,00	2.569.215	64,00	SETDA, DISTANAK, DISPERINDAG, DISHUB, BAPERMADES, SETWAN
	Terwujudnya Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	-	100,00	1.697.000	100,00	1.835.000	100,00	1.862.000	100,00	2.050.000	100,00	2.160.000	100,00	2.160.000	100,00	SETDA
Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	%	15,00	25,00	6.132.201	35,00	6.291.201	45,00	6.331.201	55,00	6.331.201	65,00	6.180.201	70,00	6.180.201	70,00	SETWAN
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	orang	4,00	35,00	150.000	35,00	183.730	7,00	130.000	8,00	140.000	8,00	150.000	10,00	150.000	97,00	INSPEKTORAT
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tercukupinya kebutuhan rumah tangga KDH dan wakil KDH	bulan	12,00	12,00	330.000	12,00	363.000	12,00	399.300	12,00	439.230	12,00	483.153	12,00	483.153	60,00	SETDA
	Terkendalinya angka inflasi	%	-	3,00	135.000	3,00	175.000	3,00	175.000	3,00	200.000	3,00	200.000	3,00	200.000	3,00	SETDA
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	Kelengkapan peraturan tentang ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja SKPD	%	60,00	-	-	70,00	35.000	80,00	25.000	90,00	25.000	-	-	100,00	-	100,00	SETDA
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Cakupan lahan Bersertifikat	%	20,53	21,53	200.000	22,53	250.000	23,53	250.000	24,53	200.000	25,53	200.000	26,53	200.000	26,53	SETDA



Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelakanaan kebijakan KDH;	Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	%	1,72	4,00	1.516.000	4,00	1.639.500	7,00	1.792.000	10,00	1.951.000	14,00	2.122.500	14,00	2.122.500	14,00	INSPEKTORAT
	Persentase SKPD yang tidak ada temuan penyim-pangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	%	90,00	90,00	-	90,00	-	92,00	-	93,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	INSPEKTORAT
	Tingkat Maturitas SPIP pada Level 3	%	1,0	1,0	-	2,0	-	2,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	-	3,0	INSPEKTORAT
	Nilai Leveling APIP Kabupaten	%	2,00	2,00	-	2,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00	INSPEKTORAT
	Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100,00	100,00	1.329.894	100,00	1.337.100	100,00	1.428.050	100,00	1.471.681	100,00	1.552.399	100,00	1.640.462	100,00	kecamatan
	Terlaksana-nya kegiatan pengendalian pembangunan di kabupaten pada seluruh SKPD	%	100,00	100,00	360.000	100,00	360.000	100,00	390.000	100,00	420.000	100,00	450.000	100,00	450.000	100,00	SETDA
	Tersedianya pedoman standar kompetensi pegawai	dokumen	1,00	2,00	150.000	3,00	170.000	6,00	190.000	8,00	190.000	9,00	200.000	9,00	200.000	46,00	SETDA
	Tersedianya data rekonsiliasi pelaporan keuangan daerah	dokumen	5,00	1,00	188.500	1,00	200.500	1,00	220.550	1,00	242.605	1,00	266.866	1,00	293.552	6,00	DPPKAD
Jumlah Anggaran Urusan Fungsi Lainnya					**14.541.785**		**15.131.246**		**15.512.316**		**16.229.932**		**16.534.334**		**16.649.083**		

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Peren-canaan	
				Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-		
Pendukung operasional SKPD					**121.163.553**		**101.152.796**		**89.760.799**		**100.609.676**		**92.462.044**		**109.519.337**		
Program Peningkatan pelayanan administrtasi kantor	Meningkatkan kebutuhan Sarana Pelayanan Admisnistrasi Perkantoran	%	100,00	20,00	37.862.494	20,00	42.487.050	15,00	44.768.358	15,00	47.663.832	15,00	50.571.247	15,00	53.646.224	100,00	Semua SKPD, KEC, KEL, SUB SKPD DIKPORA
Program Peningkatan sarana prasrana Aparatur;	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100,00	20,00	82.668.559	20,00	58.080.996	15,00	44.679.416	15,00	52.417.516	15,00	41.287.137	15,00	55.269.452	100,00	Semua SKPD, KEC, KEL
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya nilai EKPPD	Angka	3,00	3,00	630.000	3,00	492.000	3,00	510.000	3,00	525.000	3,00	600.000	3,00	600.000	3,00	SETDA
Pendukung operasional SKPD					**121.161.053**		**101.060.046**		**89.957.774**		**100.606.348**		**92.458.384**		**109.515.677**		
B. Pengeluaran Pembiayaan					**12.900.000**		**10.500.000**		**12.750.000**		**10.470.000**		**11.300.000**		**11.400.000**		
1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda					10.400.000		8.000.000		10.250.000		7.970.000		8.800.000		8.900.000		
2. Pemberian Pinjaman Daerah					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
TOTAL (A + B)					**2.702.406.435**		**3.080.828.875**		**3.309.734.272**		**3.603.470.033**		**3.850.146.140**		**4.093.959.077**		

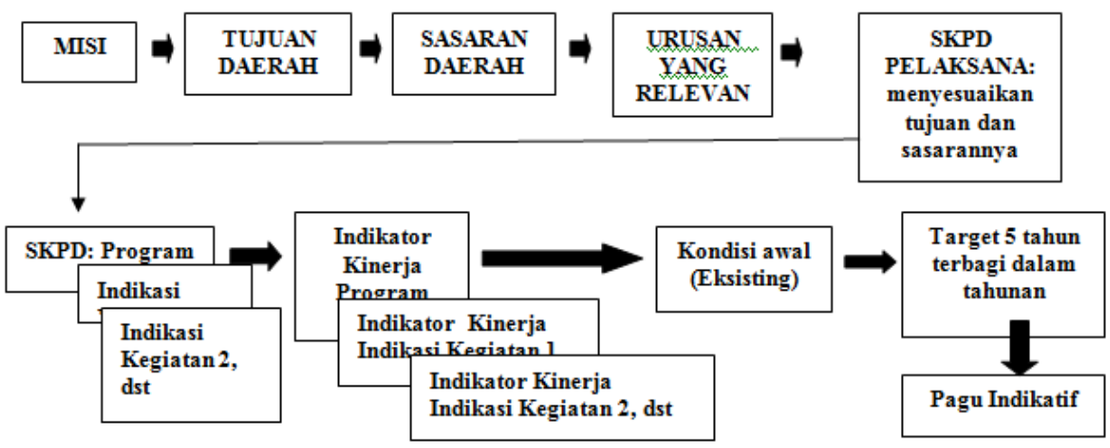
Sumber : data primer diolah

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai. Hal ini akan dikaitkan dengan pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah merupakan akumulasi atau penjumlahan capaian kinerja dari indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kemudian, indikator kinerja program setiap Perangkat Daerah nerupakan akumulasi dari hasil satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah dari masing-masing program yang dirancang oleh setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Keterkaitan pola pikir dari misi daerah hingga penjabaran indikator daerah, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9.1
Alur Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Kebumen

Sumber : *Hasil Analisis (2015)*

Indikator kinerja daerah juga dapat memberikan gambaran tentang prestasi atau capaian pembangunan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, setiap indikator dan target kinerja harus dinyatakan dengan angka (kuantitatif) yang jelas pada setiap tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Oleh karena itu, target kinerja harus dapat menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan juga memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C). Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perumusan indikator kinerja utama Kepala Daerah menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah. Indikator ini dapat diukur dengan melihat indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci dan indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah. Indikator-indikator ini kemudian diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggung-jawaban kepada masyarakat. Rumusan indikator kinerja utama Kepala Daerah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program Perangkat Daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah.

Penjabaran lebih rinci mengenai indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah dalam Rencana RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, dapat dilihat selengkapnya dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas										
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,38	12,54	12,71	12,87	13,04	13,20	13,20
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	6,93	6,98	7,02	7,07	7,11	7,16	7,20	7,20
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	53,30	54,74	56,49	58,04	59,55	61,47	63,39	63,39
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	38,78	44,23	46,79	53,53	56,09	58,65	65,38	65,38
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	72,77	72,81	72,85	72,89	72,93	72,97	73,01	73,01
		6. Angka Kematian Ibu	68,48	100	95	90	85	75	68	68
		7. Angka Kematian Bayi	10,50	11,00	11,00	10,90	10,90	10,75	10,50	10,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat									
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	100	100	100	100	100	100	100	100
		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	23,66	25,04	27,56	30,09	32,61	35,13	37,65	37,65
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Kasus pelanggaran hukum	867	800	750	700	650	600	500	500

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat										
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	5,83	5,86	5,89	5,91	5,94	5,97	6,00	6,00
		12 Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	16.983,67	18.349,63	19.715,60	21.081,57	22.447,54	23.813,51	25.179,48	25.179,48
		13. Rasio/Indeks Gini	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	-	1	2	4	4	5	6	6
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/ PMDN	0	0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	16,73	16,80	17,01	17,46	17,90	18,80	19,69	19,69
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	49,09	52,68	54,83	57,00	59,43	61,88	62,88	62,88

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumber daya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,92	63,00	66,00	69,00	74,75	76,00	77,50	77,50
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan										
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	20,02	19,26	18,50	17,74	16,98	16,22	15,45	15,45
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	2,09	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97	1,97

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat										
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	76,64	77,40	79,03	80,03	81,41	82,73	83,87	83,87
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	90,00	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,00	96,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama										
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	B	B	B	B	B	B	B	
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B	B	B	B	B	B	
		25. Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	

Sumber : Data primer diolah

Tabel 9.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas											
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,38	12,54	12,71	12,87	13,04	13,20	13,20	DIKPORA
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	6,93	6,98	7,02	7,07	7,11	7,16	7,20	7,20	DIKPORA
		3. Angka Kelulusan	99,86	99,87	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92	99,92	DIKPORA
		4. Persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (S1 ke atas)	1,82	1,88	1,95	2,01	2,08	2,14	2,20	2,20	DIKPORA
		5. Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	B	B	B	B	B	B	B	B	DIKPORA
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	6. Angka Partisipasi Sekolah	89,06	90,26	91,26	91,86	92,36	92,86	93,36	93,36	DIKPORA
		7. Persentase Sekolah Terakreditasi A	17,54	19,21	21,72	24,23	26,73	30,08	33,42	33,42	DIKPORA
		8. Capaian kunjungan perpustakaan	9,06	10,05	11,25	12,70	14,47	16,63	19,27	19,27	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan olahraga	9. Capaian prestasi cabang olahraga	35,90	38,46	43,59	48,72	53,85	58,97	64,10	64,10	DIKPORA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		10. Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional	41,67	50,00	50,00	58,33	58,33	58,33	66,67	66,67	DIKPORA
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	31,75	31,75	54,5	77,25	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		12. Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	76/ B	78/ B	80/ B	81/ B	82/ A	83/ A	84/ A	84/ A	DINAS KESEHATAN dan RSUD
		13. Nilai kinerja kesehatan BLUD	A	A	A	A	A	A	A	A	RSUD SUDIRMAN
		14. Cakupan penanganan ibu hamil resiko tinggi	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		15. Persentase Kasus Gizi Buruk	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	DINAS KESEHATAN
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat											
2. Menciptakan masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	16. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SD	100	100	100	100	100	100	100	100	DIKPORA
		17. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah SMP	100	100	100	100	100	100	100	100	DIKPORA
		18. Cakupan rehabilitasi kasus narkoba	2,67	5,13	7,69	10,26	12,82	15,38	17,95	17,95	KANTOR KESBANGPOL
		19. Cakupan Penemuan Kasus Baru HIV	68,31	70	75	80	85	90	95	95	BAGIAN KESRA SETDA, DINKES

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		20. Cakupan Penanganan Kasus Pertikaian Antar Agama	100	100	100	100	100	100	100	100	BAGIAN KESRA SETDA
		21. Persentase masjid dan mushola dalam kondisi baik	79,98	65	70	75	80	85	90	90	BAGIAN KESRA SETDA
		22. Persentase Ponpes dan TPQ dalam kondisi baik	61,5	65	72,5	77,5	82,5	87,5	92,5	92,5	BAGIAN KESRA SETDA
		23. Persentase gereja dalam kondisi baik	80	85	90	95	100	100	100	100	BAGIAN KESRA SETDA
		24. Persentase wihara dalam kondisi baik	80	85	90	95	100	100	100	100	BAGIAN KESRA SETDA
3. Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	25. Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	867	750	600	560	485	400	300	300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		26. Presentase cakupan penerbitan Akta Kelahiran	86,00	86,75	87,50	88,25	89,00	89,50	90,00	90,00	DISDUKCAPIL
		27. Prosentase cakupan penerbitan akta kematian	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	52,00	DISDUKCAPIL
		28. Persentase desa Siaga/ Tangguh Bencana	2,86	10,00	17,14	24,29	31,43	38,57	45,71	45,71	BPBD
		29. Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	41,00	52,80	64,60	76,40	80,00	85,00	90,00	90,00	KANTOR KESBANGPOL
		30. Capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam proses pemilihan umum	62,51	-	-	70,00	70,00	-	70,00	70,00	KANTOR KESBANGPOL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		31. Capaian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan nilai budaya	42,86	62,22	62,50	64,00	67,27	69,23	70,00	70,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat											
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	32. Produktivitas padi	6,53	6,54	6,55	6,55	6,56	6,56	6,57	6,57	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		33. Produktivitas jagung	7,23	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		34. Produktivitas kedelai	1,18	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		35. Kenaikan Angka Nilai Tukar Petani (NTP)	102,00	102,20	102,40	102,60	102,80	103,00	103,20	103,20	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		36. Produksi kelapa	188.450,04	188.913,63	189.359,18	189.433,55	189.528,92	189.945,13	190.225,42	190.225,42	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		37. Produksi tembakau	311,87	347,76	358,78	382,47	395,03	408,68	415,35	415,35	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		38. Produksi daging	11.101.920	11.102.031	11.102.140	11.102.250	11.102.360	11.102.470	11.102.580	11.102.580	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		39. Produksi Telur	3.836.272	3.836.310	3.836.350	3.836.390	3.836.430	3.836.470	3.836.510	3.836.510	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		40. Produksi ikan	9.627	10.092	10.582	11.099	11.644	12.220	12.826	12.826	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		41. Beroperiasinya PPI yang bisa menampung kapal berbobot 30 GT ke atas	-	-	-	1	1	1	1	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		42. Produksi kayu bulat	17.149,26	17.320,75	17.493,95	17.668,89	17.845,57	18.024,03	18.204,27	18.204,27	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		43. Presentase Koperasi Aktif	78	80	82	85	88	90	92	92	DINAS KOPERASI UMKM
		44. Peningkatan Jumlah UMKM	43.132	43.532	43.957	44.407	44.907	45.457	46.057	46.057	DINAS KOPERASI UMKM
		45. Persentase penanganan kerawanan pangan	30,53	35,88	42,75	49,62	56,49	63,36	70,23	70,23	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		46. Persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya	10,65	20,43	30,22	40,00	49,78	59,57	69,35	69,35	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		47. Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan	25,00	31,74	37,39	43,04	48,70	54,35	60,00	60,00	KANTOR KETAHANAN PANGAN
		48. Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	31,11	40,00	48,89	60,00	71,11	77,78	100,00	100,00	DINAS PERINDAGSAR
		49. Jumlah usaha perdagangan berizin	9.718	1.059	2.088	2.088	2.299	2.380	2.413	2.413	DINAS PERINDAGSAR/ BPMPT
		50. Jumlah industri kecil menengah	54.899	54.909	54.919	54.929	54.939	54.949	54.959	54.959	DINAS KOPERASI UMKM/DINAS PERINDAGSAR
		51. Terbangunnya kawasan industri	-	-	-	1	-	-	-	1	DINAS PERINDAGSAR
		52. Terbentuknya Kawasan Perdesaan	-	1	1	1	1	1	1	6	BAPERMASDES
		53. Terbentuknya Unit Usaha Syariah pada BUMD	-	-	-	-	1	-	-	1	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
5. Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Pariwisata Daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	54. Nilai investasi PMA/PMDN	324.436	324.436	324.436	340.658	361.097	382.763	405.729	405.729	BPMPT
		55. Presentase BUMD dengan predikat sehat	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
		56. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	80,75/ B	81,00/ B	81,50/ A	81,75/ A	82,00/ A	82,25/ A	82,50/ A	82,50/ A	BPMPT
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	57. Jumlah kunjungan wisatawan	1.117.136	1.304.815	1.526.764	1.793.337	2.114.344	2.511.841	3.006.422	3.006.422	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		58. Lama tinggal wisatawan	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,70	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
6. Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	59. Capaian jalan kabupaten dalam kondisi baik	45,92	48,74	51,55	54,37	57,18	60,00	60,00	45,92	DINAS PEKERJAAN UMUM
		60. Capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	55,00	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	80,00	DINAS SDA ESDM
		61. Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	-	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		62. Cakupan pelayanan air bersih	11,45	13,00	13,78	14,62	15,54	16,53	16,53	16,53	DINAS PEKERJAAN UMUM
		63. Cakupan lahan bersertifikat	20,53	21,53	22,53	23,53	24,53	25,53	26,53	26,53	BAGIAN TAPEM SETDA
		64. Cakupan kualitas layanan transportasi	30,31	38,57	45,72	54,33	63,66	72,96	83,33	83,33	DISHUBKOMINFO
		65. Capaian layanan komunikasi	46,63	51,92	61,54	71,15	80,77	90,38	100,00	100,00	DISHUBKOMINFO
		66. Rasio elektrifikasi	84,00	89,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	DINAS SDA ESDM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
7. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	67. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	56,54	57,00	57,50	58,00	58,50	59,00	60,00	60,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		68. Penanganan lahan kritis	375,00	200,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
		69. Capaian luas RTH Perkotaan	14,85	15,50	16,67	16,93	17,45	17,45	17,45	17,45	DINAS PEKERJAAN UMUM
		70. Angka Indeks kualitas udara	73,17	75,00	76,00	77,00	77,50	78,00	79,00	79,00	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
		71. Angka Indeks kualitas air	46,67	51,00	56,00	61,00	72,00	74,00	76,00	76,00	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
		72. Cakupan pelayanan sampah	42,44	42,54	42,67	42,74	42,84	42,94	42,94	42,94	DINAS PEKERJAAN UMUM
		73. Persentase usaha pertambangan yang menerapkan *good practice minning*	23,00	32,00	42,00	52,00	61,00	71,00	84,00	84,00	DINAS SDA ESDM
<u>*Misi 4*</u> : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan											
8. Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	74. Cakupan penanganan PMKS	14,82	16,08	16,11	16,13	16,16	16,18	16,20	16,20	DINAS NAKERTRANSOS
		75. Cakupan rumah layak huni	91,25	92,86	95,26	97,66	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM/ BAPERMASDES
		76. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	31,96	32,01	32,13	32,15	32,24	32,31	32,37	32,37	BADAN PP DAN KB
		77. Cakupan Peserta KB Aktif	84,65	84,70	84,75	84,80	84,90	85,10	85,50	85,50	BADAN PP DAN KB

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	78. Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja	18,21	19,72	20,02	20,55	21,09	21,39	21,59	21,59	DINAS NAKERTRANSOS
Misi 5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat											
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	79. Persentase Gedung PAUD/sederajat dalam kondisi baik	70,54	71,48	76,17	79,92	83,68	87,43	90,24	90,24	DIKPORA
		80. Persentase Gedung SD/sederajat dalam kondisi baik	66,22	67,01	67,51	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	DIKPORA
		81. Persentase Gedung SMP/ sederajat dalam kondisi baik	82,22	82,89	83,56	84,46	85,58	86,48	87,60	87,60	DIKPORA
		82. Persentase Gedung SMA/ sederajat dalam kondisi baik	87,59	88,23	88,87	89,51	90,15	90,79	91,43	91,43	DIKPORA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	83. Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kesehatan	80	87	87,5	88	88,5	90	90	90	DINKES
		84. Tingkat pelayanan kegawatdaruratan	100	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
		85. Tingkat mutu pelayanan sarana kesehatan	90	95	96	97	98	98	98	98	DINKES
		86. Nilai kinerja kesehatan BLUD	A	A	A	A	A	A	A	A	RSUD SUDIRMAN
		87. Peningkatan Persentase Akses Sanitasi	65	65	70	75	80	80	85	85	DINKES, DPU
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama											
11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	88. Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	86,17	88,13	89,59	92,48	92,98	94,80	96,52	96,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		89. Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	70,00	70,00	SEKRETARIAT DPRD
		90. Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	26 KECAMATAN
		91. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B	B	B	B	B	A	A	A	26 KECAMATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		92. Capaian peningkatan pelayanan kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	11 KELURAHAN
		93. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kelurahan	B	B	B	B	B	A	A	A	11 KELURAHAN
		94. Capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa	42,16	43,33	44,00	45,79	45,79	45,79	48,95	48,95	BAPERMASDES
		95. Persentase jumlah Perangkat Daerah menerapkan arsip baku	4,60	16,09	22,61	29,31	36,02	42,72	49,43	49,43	KANTOR PERPUSARSIPDA
		96. Capaian kinerja program	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	BAPPEDA
		97. Capaian akuntabi-litas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan *)	54,28	58,65	63,27	67,88	72,50	74,90	79,52	79,52	SEKRETARIAT DAERAH
		98. Persentase LAKIP yang nilainya meningkat	1,72	4,00	4,00	7,00	10,00	14,00	14,00	14,00	INSPEKTORAT
		99. Persentase Perangkat Daerah yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK	90,00	90,00	90,00	92,00	93,00	95,00	95,00	95,00	INSPEKTORAT
		100. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	90,00	90,00	90,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	INSPEKTORAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		101. Nilai Leveling APIP Kabupaten	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	INSPEKTORAT
		102. Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset	91,89	92,12	92,25	92,30	92,50	93,25	95,00	95,00	DPPKAD
		103. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00	BAGIAN KESRA SETDA

Sumber : Data primer diolah

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019, penjabaran dari RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025 serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015. RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

A. Pedoman Transisi

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen periode 2016-2021 akan berakhir pada 17 Februari 2021. Dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada waktu yang sama. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka berlaku kaidah transisi, dimana RPJMD ini tetap dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, dengan tetap berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Masa transisi ini berlaku sampai ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan RKPD Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, maka pelaksanaan RPJMD harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen, kecamatan, kelurahan dan desa, serta masyarakat termasuk dunia usaha, mempunyai kewajiban yang sama dalam

melaksanakan dan mensukseskan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;

2. Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJMD;
4. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah harus menjamin pelaksanaan dan konsistensinya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan dan pencapaian target RPJMD, Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RPJMD;
6. Pelaksanaan RPJMD berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 agar keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah terutama dari sisi keruangan/kewilayahan dapat terwujud;
7. Pelaksanaan RPJMD dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah) pasti akan menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan. Untuk meminimalisasi tantangan dan mengoptimalkan capaian RPJMD, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama, antara lain:
    a. Perencanaan program dan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART = Spesific, Measurable, Achievable, Resources Availability, Time*), Program dan kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan, dapat diukur, dapat dicapai, tersedia sumber daya, dan dibatasi oleh waktu. Pemilihan program dan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang didasarkan pada sasaran prioritas tahunan dan berpedoman pada rencana target capaian pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021;

b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA (*Plan*, *Do*, *Check* dan *Action*) dengan tahapan: rencanakan, kerjakan apa yang telah direncanakan, periksa atau monitor pelaksanaan, dan aksi tindak lanjut;
c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas yang memiliki 3 (tiga) aspek, antara lain:
   1) taat dan sesuai aturan;
   2) sesuai dengan norma profesionalisme; dan
   3) berorientasi pada hasil yang berkualitas.
d. Kebijakan kerangka pendanaan menggunakan prinsip dukungan kebijakan keuangan yang mengikuti kebutuhan program terpilih;
e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan mengaplikasikan:
   1) desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output; dan
   2) desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.

8. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang RPJMD, maka RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
PENUTUP

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat kerangka kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program dari Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Dokumen ini berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

RPJMD merupakan dokumen bersama yang harus dilaksanakan dan dipatuhi seluruh *stakeholders* pembangunan daerah, dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kebumen selama periode Tahun 2016-2021. Dokumen ini juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang disusun setiap 5 (lima) tahun, serta pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kebumen:

"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"

Ukuran keberhasilan pencapaian visi pada tahun 2021 sebagai akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah antara lain:

Sejahtera : dengan indikasi antara lain pada aspek kesejahteraan masyarakat, indikator pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0%, pendapatan perkapita penduduk (ADHK) sebesar Rp.25,18 juta.

Unggul : dengan indikasi antara lain pada aspek pelayanan umum, indikator jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 70,94%, irigasi teknis kewenangan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 80%, cakupan pelayanan air bersih sebesar 16,53%, rasio elektrifikasi sebesar 95%; aspek daya saing daerah, indikator laju peningkatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai sebesar 6,00%, kunjungan wisatawan sebesar 3,006 juta, persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (S1 ke atas) sebesar 2,20%; pada aspek pelayanan umum, dalam hal

pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dapat mencapai hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdaya : dengan indikasi antara lain pada aspek kesejahteraan masyarakat dimana persentase penduduk miskin menurun menjadi sebesar 15,45% dan angka pengangguran menurun menjadi 1,97%.

Agamis : dengan indikasi antara lain pada angka melek huruf Alquran siswa lulus sekolah sebesar 100%, cakupan penanganan kasus-kasus pelanggaran norma-norma keagamaan (kasus narkoba, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan pertikaian antar agama) meningkat menjadi 37,65%, sarana prasarana keagamaan dan pendidikan keagamaan dalam kondisi baik meningkat menjadi 94,17%, serta persentase Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan Badan Amil Zakat meningkat menjadi 80%.

Berkelanjutan : dengan indikasi antara lain pada aspek daya saing daerah, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 77,50 poin dan cakupan pelayanan sampah sebesar 42,94%.

Selanjutnya, RPJMD ini menjadi pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen. Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD ini terjadi kondisi dan peristiwa yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah disusun dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD